RECLAIMING THE STATE

MENGATASI PROBLEM DEMOKRASI DI INDONESIA PASCA-SOEHARTO

PENYUNTING
AMALINDA SAVIRANI & OLLE TÖRNQUIST

PolGov
RESEARCH CENTRE FOR POLITICS AND GOVERNMENT
Department of Politics & Government - FISIPOL UGM

PolGov
RESEARCH CENTRE FOR POLITICS AND GOVERNMENT
Department of Politics & Government - FISIPOL UGM

RECLAIMING THE STATE

MENGATASI PROBLEM DEMOKRASI DI INDONESIA PASCA-SOEHARTO

PENYUNTING:
AMALINDA SAVIRANI • OLLE TÖRNQUIST

PolGov
RESEARCH CENTRE FOR POLITICS AND GOVERNMENT
Department of Politics & Government - FISIPOL UGM

pcd press

Reclaiming the State:
Mengatasi Problem Demokrasi di Indonesia Pasca-Soeharto

Copyright Penerbit PolGov, 2016 bekerjasama dengan PCD Press
All rights reserved

Penyunting:
Amalinda Savirani
Olle Törnquist

Penerjemah:
Luqman-Nul Hakim

Desain Sampul:
Bobby Haryanto

Tata letak:
Bobby Haryanto

Foto Sampul:
Edi Susanto

Bahasa Indonesia
Cetakan 1, Mei 2016

Diterbitkan oleh Penerbit PolGov bekerja sama dengan PCD Press
Penerbit PolGov khusus menerbitkan buku-buku politik dan pemerintahan, berada di bawah payung Research Centre for Politics and Government (PolGov).

Research Centre for Politics and Government (PolGov) adalah lembaga riset dan publikasi dari Departemen Politik dan Pemerintahan (JPP) Fisipol UGM. Saat ini, PolGov berfokus ke dalam empat tema kunci sesuai dengan kurikulum JPP, yaitu: 1) politik lokal dan otonomi daerah, 2) partai politik, pemilu, dan parlemen, 3) HAM dan demokrasi, 4) reformasi tata kelola pemerintahan dan pengembangan sistem integritas.

Lt. 4 Gedung Fisipol UGM
Jl. Sosio Yustisia, Bulaksumur, Yogyakarta 55281
http://jpp.fisipol.ugm.ac.id
Ph./Fax: (0274) 552212
Email: penerbit.polgov@ugm.ac.id

Perpustakaan Nasional RI. Data Katalog dalam Terbitan (KDT)
Reclaiming the State:
Mengatasi Problem Demokrasi di Indonesia Pasca-Soeharto
SAVIRANI, AMALINDA dan Olle Törnquist (ed.)
1 ed — Yogyakarta: Penerbit PolGov, Mei 2016
268 Hal. 15x21 cm
ISBN 978-602-71962-7-8
1. Sosial/Politik I. Judul

DAFTAR ISI

Catatan Pengantar:
Kondisi Terkini Demokratisasi di Indonesia viii
Purwo Santoso

BAB 1. PENDAHULUAN 1
Amalinda Savirani dan Olle Törnquist *1*

BAB 2. MENUNTUT HAK KESEJAHTERAAN
DENGAN *DEMOS* YANG TERCERAI BERAI 21
Amalinda Savirani

BAB 3. INSTITUSI DEMOKRASI:
DARI PENGUATAN *GOOD GOVERNANCE*
MENUJU MASYARAKAT SIPIL AKTIF 37
Hasrul Hanif dan Eric Hiariej

BAB 4. NEGARA, BISNIS YANG TERKONSOLIDASI,
DAN PEMIMPIN POPULIS BARU 59
Amalinda Savirani

BAB 5. LAHIRNYA PASCA-KLIENTELISME
DI INDONESIA 75
Eric Hiariej *75*

BAB 6. MEM-*BYPASS* PROBLEM-PROBLEM
DEMOKRATISASI 107
Willy Purna Samadhi dan Olle Törnquist

BAB 7. REKOMENDASI 129
Amalinda Savirani, Eric Hiariej, Hasrul Hanif,
Olle Törnquist, Willy Purna Samadhi

LAMPIRAN
Kuesioner Lokal 151
Kuesioner Nasional 193

Daftar Pustaka 236

Tentang Para Penulis 245

Indeks 250

DAFTAR GRAFIK

Grafik 2.1. Prioritas Isu Publik 25
Grafik 2.2. Aktor yang terlibat dalam pembahasan isu publik 31

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1. Institusi yang seharusnya mengelola isu publik 28
Tabel 3.1. Penilaian umum tentang tata aturan dan regulasi demokrasi formal 44
Tabel 3.2. Perbandingan penilaian umum tentang tata aturan dan regulasi demokrasi hasil survei 2003, 2007 dan 2013 45
Tabel 3.3. Kualitas proses-proses demokrasi (tata aturan dan regulasi) 46
Tabel 3.4. Bagaimana tata aturan dan regulasi informal mendukung formalisasi institusi demokrasi formal 47
Tabel 3.5. Bagaimana tata aturan dan regulasi informal membatasi atau bertentangan dengan institusi demokrasi formal 51
Tabel 3.6. Bagaimana aktor-aktor utama mempromosikan tata aturan dan regulasi yang sememstinya digunakan untuk mendorong demokrasi 53
Tabel 3.7. Bagaimana aktor-aktor utama menyalahgunakan tata aturan dan regulasi yang semestinya digunakan untuk mendorong demokrasi 54
Tabel 4.1. Bagaimana aktor-aktor dominan dan alternatif dalam mengelola isu-isu publik 63
Tabel 4.2. Latar belakang aktor-aktor dominan di 30 daerah survei 65
Tabel 4.3. Posisi dominan dan afiliasinya dengan Orde Baru 67
Tabel 4.4. Jenis-jenis aktor dominan 68
Tabel 4.5. Bagaimana aktor menjadi para pemimpin yang sah 71
Tabel 5.1. Strategi aktor untuk mengatasi eksklusi 80
Tabel 5.2. Perhatian utama aktor-aktor dominan dan alternatif 85
Tabel 5.3. Indikator-indikator keberhasilan dalam memprioritaskan isu-isu publik 90

Tabel 5.4. Indikator-indikator keberhasilan dalam memobilisasi dan mengorganisasi dukungan 92
Tabel 5.5. Metode untuk memobilisasi dan mengorganisasi dukungan 95
Tabel 5.6. Metode aktor dominan dan alternatif dalam melakukan mobilisasi 96
Tabel 5.7. Metode aktor untuk menjadikan isu sebagai agenda politik 97
Tabel 5.8. Sebab-sebab kegagalan untuk mengontrol wacana publik 103
Tabel 6.1. Strategi aktor dominan untuk mencapai tujuannya 112
Tabel 6.2. Tantangan demokratisasi yang dihadapi oleh aktor-aktor dominan untuk implementasi strategi 114
Tabel 6.3. Lembaga-lembaga yang ditargetkan oleh aktor alternatif untuk mengatasi problem demokrasi dan mempromosikan kepentingan dan cita-cita 123
Tabel 6.4. Mediator yang didekati oleh aktor-aktor alternatif untuk mengatasi persoalan demokrasi dan mempromosikan kepentingan dan cita-cita 124
Tabel 6.5. Strategi aktor alternatif untuk mencapai tujuan 125
Tabel 6.6. Tantangan demokratisasi yang dihadapi oleh aktor-aktor alternatif untuk implementasi strategi 126

CATATAN PENGANTAR:

KONDISI TERKINI DEMOKRATISASI DI INDONESIA

Purwo Santoso

Buku ini merupakan laporan tentang kondisi demokrasi dan demokratisasi di Indonesia, yang mengkaji secara kritis capaian dan tantangan demokratisasi yang berlangsung di negeri ini. Dengan demikian, buku ini menjadi referensi penting bagi siapa saja yang bercita-cita mengamankan transformasi Indonesia menuju sistem politik demokratis yang sejati. Kajian dalam buku ini membawa serta perspektif dari dua kelompok yang berkontribusi bagi transformasi ini: para peneliti demokrasi yang berorientasi teori dan para pelaku atau aktivis pro-demokrasi. Kajian dalam laporan ini bertujuan untuk memastikan bahwa demokratisasi tidak hanya berjalan, namun juga menuju arah yang benar. Meskipun penelitian dalam laporan ini dilakukan dengan memenuhi standar keilmuan dan memiliki orientasi akademik yang tinggi, hasil penelitian ini bersifat praktis yakni membantu

para aktivis dan praktisi politik agar dapat berkontribusi dalam pembangunan demokrasi secara lebih efektif.

Argumen dan temuan yang disajikan dalam laporan ini sebelumnya telah disampaikan ke publik dalam bentuk ringkasan ekskutif. Dengan publikasi buku ini ada pendetailan temuan dan argumen penelitian tersebut. Temuan awal penelitian ini juga telah dipresentasikan selama seminar yang berlangsung di Jakarta pada 25 Februari 2014, dengan bantuan mantan Sekretaris Genderal Dewan Perwakilan Rakyat (Sekjen DPR), Eddie Siregar, dan pada 29 April 2014 di Universitas Gadjah Mada (UGM), Yogyakarta.

Buku ini juga memuat revisi penilaian perkembangan liberalisasi politik Indonesia yang dilakukan secara periodik. Proses ini, dalam pelbagai cara, tidak secara otomatis membuat Indonesia lebih demokratis. Kebingungan atas perkembangan demokrasi belakangan ini ditambah kesalahpahaman atas perbedaan antara demokrasi dan liberalisme memerlukan penjelasan yang lebih jauh. Meskipun masyarakat Indonesia menolak otoritarianisme, mereka masih mengharapkan peran-peran negara untuk mengelola isu-isu publik strategis, khususnya terkait kesejahteraan. Dengan demikian, menjadi terang bahwa sistem pemerintahan yang semakin liberal tidak berarti mencerminkan bahwa sistem tersebut demokratis. Sebagaimana tercantum dalam judul buku ini, demokratisasi adalah persoalan merebut kembali negara.

Kajian awal kondisi demokrasi di Indonesia dilakukan antara 2003 dan 2004, dan laporan tertulisnya diterbitkan pada 2005 dalam bahasa Indonesia, *Menjadikan Demokrasi Bermakna: Masalah dan Pilihan di Indonesia,* disunting oleh AE. Priyono, Willy Purna Samadhi, dan Olle Törnquist. Laporan

tersebut diterbitkan kembali dalam edisi bahasa Inggris pada 2007 dengan judul, *Making Democracy Meaningful: Problems and Options in Indonesia*. Kajian kondisi demokrasi yang kedua diterbitkan laporan berbahasa Inggris yang dikeluarkan pada 2009, *Building Democracy on the Sand: Advances and Setbacks in Indonesia,* disunting oleh Willy P. Samadhi dan Nicolaas Warouw. Pada tahun yang sama, edisi bahasa Indonesia dari laporan tersebut diterbitkan dengan judul, *Demokrasi di Atas Pasir: Kemajuan dan Kemunduran Demokrasi di Indonesia.* Dua laporan tersebut dikombinasikan untuk sebuah publikasi dalam *PCD Journal* yang berjudul, *A Decade of Reformasi: Unsteady Demoratisation*. Meskipun laporan-laporan sebelumnya telah diperbaharui dengan parameter-parameter yang lebih detail, tujuan dasarnya masih sama yakni untuk memahami dinamika demokratisasi di Indonesia.

Selain menyebutkan laporan-laporan terdahulu, penting juga disampaikan bahwa pengelolaan proyek penelitian ini juga mengalami perubahan. Laporan-laporan survei sebelumnya di tahun 2004/2005 dan 2007 secara teknis dikelola oleh Demos Jakarta, sedangkan laporan yang sedang Anda baca ini ditangani oleh Departemen Politik dan Pemerintahan, FISIPOL, UGM, sebagai bagian dari proyek penelitian yang sedang berjalan dalam tema besar "Kekuasaan, Kesejahteraan dan Demokrasi". Penelitian ini dimungkinkan oleh dukungan dana dari Kementerian Luar Negeri Norwegia melalui Kedutaan Besar Norwegia di Indonesia. Meskipun demikian, saya dapat menjamin kepada para pembaca bahwa dukungan dana tersebut sama sekali tidak mempengaruhi hasil kajian ini. Tim pengelola secara ketat menjaga integritas dalam pelaksanaan penelitian ini. Kajian ini telah melibatkan para pihak dengan latar belakang yang beragam, yang bekerja

secara profesional di bawah kerjasama akademik antara UGM dan Universitas Oslo, Norwegia. Dalam hal ini, peran Profesor Olle Törnquist sangat besar dalam proyek penelitian ini.

Beberapa hal penting terkait skema penelitian ini perlu saya sampaikan sebagai berikut:

Pertama, meskipun penelitian ini memeriksa capaian demokratisasi, kepentingan utamanya bukanlah untuk membangun sebuah posisi indeks tertentu. Sebuah indeks demokrasi memungkinkan perbandingan pelbagai pendekatan, namun ia tidak bersifat preskriptif. Penelitian yang disampaikan dalam buku ini mengkaji masa depan arah demokratisasi dan menggunakan pendekatan kualitatif untuk memeriksa capaian-capaian khusus, hambatan dan tantangan dalam membangun agenda pro-demokrasi. Dengan kata lain, laporan ini bertujuan untuk mendukung kerangka besar gerakan demokrasi.

Kedua, seperti halnya laporan-laporan sebelumnya, penyusunan laporan ini mementingkan asas kepemilikan bersama dengan gerakan pro-demokrasi. Penelitian ini bergantung pada kerja keras para aktivis pro-demokrasi dari seluruh pelosok negeri ini, dan khususnya di mana aktivisme pro-demokrasi cukup kuat. Data untuk laporan ini dikumpulkan oleh para enumerator di bawah pengawasan para peneliti lokal dan peneliti utama yang juga bertindak sebagai informan kunci di masing-masing daerah. Survei yang cukup luas dilakukan antara Februari dan Agustus 2013 di 30 kota dan kabupaten, termasuk DKI Jakarta dan DI Yogyakarta. Pengumpulan data ini dimungkinkan oleh kerja keras para informan kunci: Aryos Nivada (Aceh Selatan), T. Muhammad Jafar (Banda Aceh), Benget Silitonga (Medan), Priyono Prawito (Bengkulu), Kasmadi Kasyim (Kerinci), Muhammad Irfan (Batam), Syafarudin and Tabah Maryanah (Lampung Selatan),

Didik Hadiyatno (Balikpapan), Noorhalis Majid (Banjarmasin), Lutfi Wahyudi (Kutai Kartanegara), Viza Julianzah (Pontianak), Widiyanto (Jakarta), A. H. Maftuchan (Bekasi and Tangerang), Caroline Paskarina (Bandung), Hasrul Hanif (Yogyakarta), Alfi Satiti (Pekalongan), Wachyu Ardiyanto (Batang), Akhmad Ramdhon (Surakarta), Aan Anshori (Surabaya and Sidoarjo), I Putu Wirata (Badung), M. Imran (Makassar), M. Nur Alamsyah (Poso), Welly Waworuntu (Manado), Jusuf Madubun (Ambon), M. Ridha Ajam (Ternate), Otto Gusti Madung (Belu), Rudi Rohi (Kupang), dan Aprila R. A. Wayar (Jayapura). Tim peneliti terdiri atas 120 peneliti tetap dan tidak-tetap di daerah. Mereka semua bekerja di garda depan untuk pelaksanaan survei ini. Tanpa dedikasi mereka, survei ini tidak akan mungkin tuntas. Untuk mereka semua, kami berterima kasih.

Ketiga, laporan ini juga dimungkinkan oleh informasi dan penilaian yang diberikan para aktivis demokrasi yang terlibat dalam gerakan-gerakan demokrasi. Penilaian mereka yang berbasis lokal bermanfaat untuk menunjukkan pentingnya advokasi dalam mempercepat proses demokratisasi di level daerah. Para penulis buku ini, juga para kontributor utama, telah menganalisis masukkan yang diberikan oleh para aktivis demokrasi untuk menampilkan gambaran yang lebih besar. Selain para penulis dan informan, sejumlah individu juga telah berkontribusi dalam penyusunan laporan ini termasuk Wening Hapsari dan Rita Kartika Sari yang, di bawah koordinasi Debbie Prabawati, menjamin bahwa semua kebutuhan penelitian lapangan terpenuhi. Mereka juga terlibat dalam diseminasi awal hasil survei di Jakarta dan Yogyakarta. Selain itu, Loly N Fitri mendukung tim penulis dengan menyediakan lingkungan kerja yang nyaman. Saya berterima kasih atas kerja-kerja mereka.

Keempat, keabsahan laporan ini juga ditentukan oleh paparan pengamatan dan analisis—sesuai dengan data dan hasil kajian—para partisipan penelitian. Untuk menjamin akurasi analisis, kami menyelenggarakan serangkaian lokakarya yang melibatkan para aktivis di lapangan. Pada kesempatan yang lain, temuan-temuan penelitian juga didiskusikan secara terbatas antara tim peneliti utama dan para pakar. Dalam menulis laporan ini, kami berterima kasih atas kontribusi penting para pakar demokrasi di Indonesia, termasuk Mohtar Mas'oed, Tamrin Amal Tomagola, Daniel Dhakidae, AE. Priyono, Wardah Hafidz, Wiladi Budiharga, Usman Hamid, Ikrar Nusa Bakti, Danang Widoyoko, Luky Djani, Mian Manurung, Eva Kusuma Sundari, Handoko Wibowo, Philip J. Vermonte, dan Kuskridho Ambardi. Pandangan mereka, sebagai praktisi demokrasi dan akademisi, memperkaya analisis buku ini. Profesor Kristian Stokke dari Universitas Oslo sangat penting dalam memberikan masukkan selama proses penelitian berlangsung. Saya berterima kasih kepada para pakar dan konsultan yang telah terlibat dalam kajian ini.

Kelima, laporan ini menghubungkan penilaian partisipan atas topik-topik tertentu dengan argumen besar tentang demokratisasi. Laporan ini disusun berdasarkan keyakinan bahwa demokrasi haruslah menjadi proses yang berlangsung dari bawah, bukan skema yang dipaksakan dari tingkat pusat ke daerah. Selain itu, demokrasi mensyaratkan pentingnya keterlibatan publik, atau *demos,* dalam urusan-urusan publik. Sejalan dengan argumen ini, temuan-temuan penelitian ini memerlukan penyempurnaan secara terus menerus dan kajian lanjutan, dan diharapkan para partisipan dalam penelitian ini akan terus terlibat dalam pendalaman analisis kami atas kemajuan demokrasi.

Terakhir, buku ini tidak akan pernah terwujud tanpa dedikasi para penulisnya: Amalinda Savirani, yang berperan sebagai koordinator penelitian dan penyunting, bersama Hasrul Hanif, Eric Hiariej, Willy P. Samadhi, dan Olle Törnquist yang terlibat panjang dalam proses penerbitan buku ini. Mereka telah menerjemahkan data-data kualitatif tentang gerakan demokrasi di Indonesia yang kompleks menjadi analsis yang mudah dipahami. Semangat mereka untuk menuntaskan buku ini patut mendapat apresiasi.

Saya berharap publikasi laporan ini dapat memberikan sumbangan berarti untuk mengatasi persoalan dan tantangan demokrasi di Indonesia. Selamat membaca dan salam pergerakan!

Prof. Purwo Santoso
Direktur Program "Kekuasaan, Kesejahteraan, dan Demokrasi" Departemen Politik dan Pemerintahan Fisipol UGM

BAB 1

PENDAHULUAN

Amalinda Savirani dan Olle Törnquist

Pada pertengahan Agustus 1998, tiga bulan setelah jatuhnya rezim Soeharto di tengah akutnya krisis ekonomi Asia dan protes mahasiswa, Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) dan Yayasan Ford mengumpulkan para pakar Indonesia baik dari kalangan nasional maupun internasional untuk mendiskusikan apa yang bisa negeri ini pelajari dari pengalaman upaya-upaya global untuk membangun demokrasi liberal, sebuah percobaan yang dimulai di Spanyol pada 1975 (Liddle et.al. 2001). Namun, upaya tersebut menghadapi beberapa persoalan. Rekomendasi universalnya adalah agar mempercepat demokratisasi melalui pembentukan pakta kekuasaan antara kelompok reformis moderat yang terdiri atas kelompok reaksioner dan gerakan rakyat radikal dengan mengkombinasikannya

dengan penegakkan kebebasan ekonomi, masyarakat sipil, pemilu yang adil dan terbuka, pembangunan lembaga (biasanya didefinisikan sebagai aturan main) dengan mana kelompok moderat dapat bertahan. Beberapa peserta diskusi mengangkat isu tentang pentingnya mempertimbangkan konteks dan problem di Indonesia sebagai langkah awal. Namun karena respon yang diberikan tidak cukup memuaskan 'kami hanya memberikan sebuah kerangka, Anda sendiri yang harus mengisinya'[1], sejumlah intelektual mulai mempertimbangkan pendekatan yang lebih luas.

Langkah awal yang dikerjakan adalah melakukan survei kondisi gerakan demokrasi pasca-Soeharto, diikuti dengan kajian-kajian kritis atas kasus-kasus tertentu yang dikerjakan dengan bekerjasama dengan para aktor tersebut (Prasetyo et.al. 2003). Kesimpulan utamanya adalah bahwa sebagian besar gerakan sudah 'mengambang', tidak lagi memiliki basis sosial dan organisasi di kalangan masyarakat biasa. Langkah selanjutnya adalah melakukan evaluasi terhadap pelbagai tantangan dinamika demokratisasi secara lebih luas[2]. Langkah di atas merupakan asal mula dikembangkannya kerangka alternatif untuk menilai proses demokratisasi, yang kemudian diterapkan dalam tiga survei tingkat nasional—pada 2003-2004 dan2006-2007 oleh Demos dan 2013-2014 oleh Universitas Gadjah Mada. Survei-survei tersebut dikerjakan bekerjasama dengan Universitas Oslo, Norwegia.

Dalam buku ini, kesimpulan utama dari survei terbaru akan disampaikan dalam konteks hasil survei-survei sebelumnya

1 Professor Alfred Stepan.

2 Keputusan itu disetujui oleh kelompok kerja (terdiri atas Alm. Asmara Nababan, Th. Sumartana dan Alm. Munir Said Thalib, selain Stanley Adi Prasetyo dan OlleTörnquist) yang ditunjuk pada awal 2002 dalam sebuah konferensi dengan para pakar dan aktivis yang mendiskusikan kesimpulan-kesimpulan awal atas kajian gerakan demokrasi.

dan pelbagai argumen yang telah disajikan dalam publikasi dan diskusi akademik. Ringkasan laporan akan diikuti oleh tiga analisis yang lebih detail. Tahap pertama adalah dengan menghadirkan data survei ke masyarakat umum. Tahap kedua terdiri atas kajian mendalam atas beberapa data penting (seperti kapasitas aktor untuk perubahan). Tahap ketiga meliputi beberapa studi kasus tentang isu-isu penting dalam demokratisasi, termasuk perjuangan untuk warga negara aktif, hak-hak politik dan sosial, politik dan kebijakan sistem negara kesejahteraan, dan upaya-upaya membangun rezim demokrasi lokal. Hasil survei ini, serta publikasi-publikasi yang relevan, secara lengkap sudah tersedia di laman proyek penelitian ini, http://pwd.polgov.id/.

Mengukur Demokratisasi: Sebuah Titik Keberangkatan

Kerangka alternatif yang kami kembangkan untuk mengukur demokratisasi berbeda dengan metodologi arus-utama dalam lima hal[3]. *Pertama*, kami tidak mengambil begitu saja pemahaman bahwa lembaga-lembaga yang kerap dikaitkan dengan kasus-kasus paradigmatik demokrasi di Eropa Barat dan Amerika Utara khususnya serta-merta akan memajukan demokrasi (yang definisinya diterima umum sebagai 'kontrol publik atas urusan-urusan publik atas dasar persamaan politik[4]) dalam konteks dan waktu yang berbeda. Oleh karenanya, persoalan apakah aturan dan tata regulasi, seperti aturan tentang kewarganegaraan, organisasi masyarakat sipil, atau pemilu, itu dapat mempercepat demokrasi seharusnya menjadi pertanyaan empiris, bukan pertanyaan normatif. Alhasil, kita akhirnya mengadopsi sebuah

3 Untuk diskusi lebih luas, lihat Törnquist 2013.
4 Beetham 1999.

definisi substantif tentang demokrasi daripada semata-mata prosedural. Berkebalikan dengan pengukuran-pengukuran model arus-utama, penting juga dipertimbangkan bagaimana demokrasi itu tidak hanya substantif namun juga bersifat substansial dengan memeriksa persoalan-persoalan mana yang menjadi bagian dari keputusan-keputusan demokrasi atau dipolitisasi dan diputuskan oleh, misalnya, teknokrat, pengadilan, pasar, pertemuan masyarakat, para pemimpin agama, klan atau keluarga.

Kedua, meskipun kami tidak mengambil posisi untuk menentang demokrasi liberal, kami memahami bahwa standar model dominan ini tidak selamanya akan menghasilkan efek-efek yang diharapkan dalam semua konteks. Oleh karena itu kami juga mempertimbangkan pandangan dan kemungkinan lainnya, seperti representasi demokrasi suplementer melalui isu, kepentingan dan organisasi (selain model pemilu liberal) dan pelbagai bentuk deliberasi, yang telah terbukti krusial seperti dalam isu penganggaran partisipatif di Amerika Latin.

Ketiga, kami berupaya untuk melampaui model-model pengukuran kondisi demokrasi yang ada, karena pada umumnya model-model tersebut cenderung mengukur dimensi normatifnya tanpa memeriksa persoalan-persoalan yang menyebabkan demokrasi mengalami perkembangan atau kemandekan. Sebaliknya, model yang kami ajukan lebih diorientasikan untuk mengukur kemunduran, kemajuan dan pilihan demokratisasi.

Keempat, kami melengkapi kajian tentang lembaga-lembaga yang kurang lebih teroganisir dengan mengambil fokus pada (i) aktor-aktor perubahan yang dominan dan alternatif dan (ii) kapasitas mereka untuk mempercepat dan menggunakan nilai-nilai dan lembaga-lembaga demokrasi. Dengan kata lain,

kami menggabungkan teori-teori tentang kelembagaan, agensi dan kekuasaan.[5]

Terakhir, kami memberikan pengetahuan baru akan pentingnya pemahaman dinamika aktual—melampaui apa yang diberikan para *think-tanks* yang duduk nyaman di kota-kota besar—dan mendukung inisatif-inisiatif yang diambil para aktor perubahan. Hal ini disebabkan oleh keterbatasan bank-data tentang demokratisasi di Indonesia dan model-model pengukuran arus-utama yang berasumsi bahwa lembaga-lembaga demokrasi liberal itu yang lebih penting, dan malah mengabaikan pandangan masyarakat tentang lembaga-lembaga tersebut. Survei ini juga berbeda dengan survei opini, yang menggunakan sampel acak dan penjelasan statistik. Dengan mengidentifikasi para pakar terbaik yang memahami tantangan demokratisasi dalam pelbagai arena politik di Indonesia dan mengajukan sejumlah pertanyaan kepadanya, kami dapat mengevaluasi kekuatan sejumlah teori dan argumen tentang demokratisasi. Para pakar ini merupakan intelektual kritis yang telah lama terlibat dalam kajian dan praktik demokratisasi. Sebagian besar malah merupakan aktor-aktor perubahan yang pentingdan mampu menggunakan hasil-hasil survei untuk rekomendasi kebijakan.

Tiga Pandangan tentang Demokratisasi Indonesia

Para pengamat demokratisasi Indonesia umumnya bersepakat tentang poin-poin keberhasilan dan permasalahannya. Negeri ini relatif telah memberikan kebebasan untuk berasosasi

5 Pada kasus pertama kami banyak mengikuti David Beetham dan koleganya (2002); pada kasus yang belakangan kami banyak terpengaruh oleh gagasan kekuasan Pierre Bourdieu, Sydney Tarrow (1994) and teori-teori lain tentang gerakan sosial, dan kajian awal kami sendiri tentang organisasi politik di Asia Tenggara (misalnya Törnquist 2002)

dan melaksanakan pemilu yang bebas dan terbuka. Destabilisasi politik identitas telah berhasil diatasi, dan aktor-aktor politik dominan juga telah terekonsiliasikan dalam 'aturan main' demokrasi. Namun demikian, korupsi dan kronisisme masih tetap ada, dan upaya reformasi tidak berjalan maksimal.

Tahun-tahun awal Presiden Yudhoyono, yang mulai menjabat pada 2004, telah menunjukkan stabilitas politik dan pertumbuhan ekonomi yang stabil; pemberantasan korupsi; perdamaian demokratis di Aceh; keterlibatan aktivis dalam politik, dan kemunculan beberapa pemimpin menjanjikan—Joko 'Jokowi' Widodo satu di antaranya—sebagai pemangku mandat pemilihan langsung di daerah. Akan tetapi, tahun-tahun belakangan ini juga menunjukkan beberapa kemunduran: korupsi tetap merajalela, termasuk partai presiden sendiri; pemerintahan Aceh yang tidak efektif dan korup ditambah penerapan hukum syariah yang keras oleh kalangan mantan pemberontak konservatif; dominasi kepentingan uang di parlemen; dan kesulitan-kesulitan membangkitkan komoditas ekspor; buruh murah; dan kelas menengah yang konsumtif.

Setidaknya ada tiga cara utama yang digunakan untuk memikirkan persoalan dan pilihan demokratisasi Indonesia: (1) perspektif liberal, (2) pandangan struktural yang radikal atau konservatif, (3) perspektif sosial demokrasi transformatif.

Akar-akar pandangan liberal ditopang oleh analisis kajian-kajian tentang agensi dan lembaga yang terbukti mampu menjelaskan mengapa, meskipun dengan kondisi struktural yang buruk, demokratisasi dapat berjalan di negara-negara Selatan sejak akhir 1970an. Sebagaimana ditunjukkan dalam paragraf pembuka bab ini, perspektif ini sangat dominan di Indonesia sejak 1998. Penjelasan dasarnya adalah bahwa liberalisasi ekonomi dan politik

yang lebih luas sejak jatuhnya Soeharto telah melapangkan jalan bagi para reformer moderat untuk membangun pakta kekuasaan. Dengan begitu, mereka telah berhasil mencegah munculnya kekuatan-keuatan reaksioner dan gerakan rakyat radikal, dengan mengkombinasikan antara privatisasi, desentralisasi dan deregulasi pada satu sisi dan merancang lembaga-lembaga demokrasi liberal yang mempromosikan penegakkan hukum, HAM, pemilu, penguatan masyarakat sipil, dan pemberantasan korupsi pada sisi yang lain. Argumen liberal yang mutakhir menyatakan bahwa Indonesia merupakan sampel dari negara-negara demokrasi baru, yang turbukti dapat menjalankan demokratisasi dengan sangat cepat dalam kondisi struktural yang buruk. Meskipun memang ada persoalan, hal itu masih lebih baik jika dibandingkan dengan pengalaman negara-negara Selatan lainnya atau bahkan fase-fase awal demokratisasi di Amerika Utara dan Eropa. Dalam perspektif ini, upaya-upaya reformasi, seperti pendanaan partai politik yang lebih besar dan upaya-upaya aktivis masyarakat sipil dan pemimpin perserikatan buruh untuk masuk dalam politik arus-utama, dipandang akan membawa negeri ini menuju demokrasi liberal sepenuhnya (misalnya Mietzner 2013, Aspinall 2010 dan 2013, dan sebagian dalam Caraway dan Ford 2014).

Posisi struktural yang bekebalikan—dan semakin berpengaruh—dianut oleh para konservatif pada satu sisi dan ekonomi politik radikal pada sisi yang lain. Para konservatif bersepakat dengan pemikiran awal Samuel Huntington (1965) dan posisi mutakhir Fukuyama (2014) bahwa demokratisasi justru malah semakin meningkatkan praktik korupsi dan konflik, dan karenanya harus didahului oleh 'politik ketertiban' yang memungkinkan pembangunan negara menjadi efisien, sebagaimana terjadi di Singapura dan sekarang sedang diupayakan

dengan cara-cara yang lebih militeristik di Burma; kondisi politik Indonesia juga mengandaikan perlunya 'kepemimpinan yang kuat'. Para pemikir konservatif ini kerap berpendapat bahwa korupsi telah berkembang luas sejak 1998, dan bahwa reformasi demokrasi tidak mampu memeranginya. Mereka memerlukan kekuasaan teknokratis yang lebih besar dan agensi-agensi yang secara politik independen seperti Bank Indonesia (Soesastro dan Atje 2005: 28). Sementara itu, kelompok pemikir radikal (e.g. Winters 2011, 2014, Robison and Hadiz 2004, 2014) memotret politik Indonesia kontemporer dengan berkesimpulan bahwa sedikit sekali perubahan yang terjadi sejak jatuhnya Soeharto, kecuali bahwa kekuatan-kekuatan oligarki tidak lagi dipegang oleh Soeharto dan kelompoknya sendiri atau, sebagaimana ditunjukkan Slater (2013), oleh kartel-kartel politik. Desentralisasi telah memungkinkan lingkaran aktor-aktor bisnis yang luas untuk memperoleh akses kontrak dan konsesi melalui cara-cara politik. Oleh karenanya, mereka berpendapat bahwa yang terjadi di Indonesia adalah demokrasi oligarkis. Pemikir Marxist, seperti Max Lane (2014) melihat potensi untuk menuntaskan persoalan ini dengan menguatkan kelompok perserikatan buruh progresif dan gerakan sosial, namun sebagian besar para pemikir ekonomi politik menganggap hal ini, juga kelompok kelas menengah dan organisasi bisnis yang progresif, terlampau lemah. Bagi kelompok strukturalis, demokrasi yang lebih substantif di Indonesia masih sangat jauh. Sementara bagi kelompok konservatif, proses demokrasi substantif itu tergantung pada penguatan kapasitas negara; sedangkan bagi kelompok radikal, demokrasi itu masih harus menunggu perkembangan kapitalisme yang tidak semata-mata berbasis akumulasi primitif yang mengandalkan buruh murah dan penghisapan, melainkan dengan kelahiran

suatu konstituen kelompok bisnis yang beroperasi dalam tata regulasi yang transparan dan terukur melalui penegakkan hukum dan serikat perdagangan yang kuat.

Posisi ketiga, yang berorientasi sosial demokrasi transformatif, lahir dari kajian-kajian dan refleksi kritis para aktivis demokrasi yang mengkombinasikan kajian-kajian agensi, lembaga dan kondisi struktural. Kita akan segera kembali pada hasil survei kami sebelumnya yang lebih lengkap, namun hasil survei ini (Prasetyo et al. 2003, Priyono et al. 2007, Samadi et al. 2009, Törnquist 2013) dan sejumlah kajian yang lain (e.g. Nordholt 2004, Van Klinken 2009 dan sebagian Caraway and Ford 2014) berkesimpulan bahwa proses demokratisasi di Indonesia berlangsung tidak merata dan mandek. Akibatnya, transisi di Indonesia tidak lain merupakan peralihan dari rezim diktator ke rezim oportunis. Hancurnya rezim lama bukanlah hasil dari konsensus pakta-pakta kekuasaan, namun lebih merupakan produk dari hilangnya kepercayaan pada kemampuan Soeharto untuk mempercepat pembangunan ekonomi yang menguntungkan kelompok bisnis besar, kelas menengah dan kelompok mahasiswa. Kemudian, proses transisi berjalan bersama dengan rekomendasi-rekomendasi liberal tentang perlunya pakta kekuasaan antara 'reformis moderat'. Model demokrastisasi yang bersifat elitis bertopang pada dua pilar: (i) marjinalisasi organisasi-organisasi rakyat dan merujuk pada kegiatan-kegiatan masyarat sipil di mana mereka umumnya masih terfragmentasi dan tidak terorganisir, dan (ii) depolitisasi, dalam bentuk privatisasi dan transfer jurisdiksi kekuasaan kepada para teknokrat, pengadilan dan elit lokal. Hal ini pada awalnya ditujukan untuk melibatkan aktor-aktor dominan dalam pengembangan (dan diharapkan akan mematuhi) aturan main baru. Situasi ini dipandang akan menawarkan stabilitas

yang lebih besar dan bahkan menggugurkan tesis Huntington dan Fukuyama bahwa demokratisasi harus diawali oleh 'politik ketertiban' dan pembangunan negara yang kuat. Akan tetapi efek dua pilar tersebut, selama bertahun-tahun, hanya terbatas pada kemampuan konstituen rakyat dan kepentingan progresif di antara kelompok bisnis dan kelas menengah untuk memerangi korupsi, mempromosikan penegakkan hukum, dan mendukung pembangunan inklusif. Alhasil, sebagian besar kelompok 'moderat' yang sudah nyaman, malah tidak banyak bertindak dalam isu-isu serius seperti pemberantasan korupsi, perbaikan konstituensi, atau memperluas representasi politik. Kaum liberal yang berharap proses demokratisasi akan berjalan lebih jauh dengan mengubah lembaga-lembaga strategis itu salah tempat; keseimbangan kekuasaan mesti diubah. Akan tetapi, sementara pemikir strukturalis radikal berpendapat bahwa demokratisasi hanya akan bisa berjalan ketika kapitalisme telah berjalan cukup progresif dan kelompok konservatif mengklaim bahwa demokrasi harus ditunda sampai kapasitas negara dibangun oleh 'para pemimpin kuat yang tercerahkan', peneliti sosial demokrat kiri menyarankan bahwa jalur terbaik untuk mengubah hubungan kekuasaan adalah melalui demokrasi politik yang transformatif. Upaya ini harus ditempuh, menurut mereka, dengan melakukan reformasi dalam perbaikan kapasitas politik dan representasi aktor untuk keperluan yang jelas dalam memberantas korupsi, mempromosikan penegakkan hukum dan pendalaman demokrasi.

Pendapat siapa yang benar? Apa saja pro dan kontra dari tiga posisi teoretik di atas? Apakah ada pekembangan baru, yang belum dipertimbangkan dalam argumen dan rekomendasi sebelumnya? Inilah beberapa pertanyaan utama yang mendorong dilakukannya survei ini yang berorientasi pada model demokrasi alternatif.

Desain dan Metode

Survei ini menggunakan metode suvei pakar (*expert survey*). Artinya seluruh informan, yang semuanya merupakan para aktivis berpengalaman, diminta untuk melakukan penilaian tentang kondisi demokrasi di masing-masing area atau sektor di mana mereka berada. Dalam survei ini, kami meminta mereka untuk berbagi pengalaman panjang mereka sebagai aktivis, yang mencakup enam bagian pertanyaan: tentang apa yang membentuk urusan publik (*public affairs*), lembaga-lembaga demokrasi, aktor dalam membangun demokrasi, hubungan antar aktor dan lembaga, strategi yang digunakan para aktor, dan refleksi para informan tentang strategi-strategi yang telah mereka gunakan selama lebih dari satu dasawarsa.

Pertanyaan kunci dalam bagian pertama meliputi: 1) isu-isu apa saja yang dianggap informan sebagai urusan publik, 2) bagaimana anggapan mereka terhadap pandangan masyarakat umum atas urusan publik, 3) siapa yang menangani urusan publik (pemerintah, sektor swasta, organisasi rakyat), 4) siapa saja yang terlibat dalam mendiskusikan urusan-urusan publik, dan 5) bagaimana pandangan mereka tentang pemahaman masyarakat atas peran warga negara aktif (*active citizens*) (cf. Törnquist 2013: 36).

Bagian kedua berkaitan dengan lembaga-lembaga demokrasi yang kami pahami sebagai 'tata aturan dan regulasi demokratis'. Kami mendaftar tiga belas tata aturan dan regulasi, yang sebagian besar merupakan aturan main formal berdemokrasi. Tata aturan ini diambil dari prinsip-prinsip universal tentang demokrasi, yang bersandar pada karya David Beetham dan koleganya (1999, 2000). Kami meminta para informan untuk menilai kualitas tiga belas aturan dan regulasi formal itu secara umum; kualitas

aturan-aturan tersebut sejak pilkada terakhir (cf. Törnquist 2013: 42); dan bagaimana lembaga-lembaga formal sesuai atau tidak sesuai dengan lembaga-lembaga lokal/informal.

Bagian ketiga mencakup aktor-aktor yang berkompetisi untuk mengontrol urusan publik yang sudah dieksplorasi pada bagian pertama dan dikembangkan atau digunakan lembaga yang sudah dikaji pada bagian kedua evaluasi ini. Tujuan bagian ketiga ini adalah agar para informan dapat memetakan aktor-aktor demokrasi di setiap wilayah atau sektor, dalam kategori yang kita buat sebagai aktor 'dominan' atau 'alternatif'. Aktor-aktor ini berada di level lokal dan nasional, dan memaikan peran dalam arena-arena masyarakat politik (*political society*), komunitas bisnis, negara, dan masyarakat sipil secara umum (cf. Törnquist 2013: 52). Para informan diminta untuk menyebutkan enam belas nama, masing-masing empat nama untuk sektor negara, masyarakat politik, masyarakat sipil, dan sektor bisnis. Dari enam belas nama ini kemudian kami meminta mereka untuk mengerucutkannya menjadi empat nama yang akan kami eksplorasi di bagian keempat. Kami juga melakukan kajian seberapa jauh aktor-aktor ini memiliki hubungan dengan rezim Orde Baru.

Pada bagian keempat, kami mengeksplorasi bagaimana para aktor berhubungan dengan lembaga-lembaga demokrasi, khususnya bagaimana mereka mempromosikan, menghindari atau menyalahgunakan tata aturan dan regulasi demokrasi.

Bagian terakhir tentang kapasitas aktor-aktor dominan dan alternatif untuk mengubah struktur kesempatan (*opportunity structure*) dari empat aktor (dua aktor dominan, dua aktor alternatif) yang mereka identifikasi pada evaluasi bagian ketiga. Kapasitas ini setidaknya mencakup lima aspek: melibatkan atau mengeksklusi aktor politik yang lain; mentransformasikan

tipe-tipe modal (modal sosial, ekonomi, kultural dan koersif) menjadi otoritas; mentransformasikan perhatian komunal dan privat menjadi isu publik; mobilisasi dan mengorganisasi dukungan untuk tuntutan dan kebijakan; dan menggunakan, mereformasi dan mengembangkan jalur-jalur partisipasi dan representasi (Törnquist 2013: 67).

Semua bagian dalam kegiatan evaluasi ini telah didiskusikan panjang lebar dengan kelompok ahli, para mitra, dan peneliti-peneliti lokal. Bersama kelompok ini pula kami mendiskusikan instrumen, hasil evaluasi dan implikasinya.

Pemilihan informan juga telah melewati proses yang inklusif. Hal ini sangat penting dilakukan karena kesimpulan dan rekomendasi (kebijakan alternatif) survei ini akan berimplikasi pada informan kami. Langkah yang kami lakukan adalah bahwa UGM dan Universitas Oslo mendiskusikan dan menyelesaikan pembuatan instrumen survei yang kemudian diperbaiki dengan mempertimbangkan pelbagai saran dan masukkan kelompok pakar (terdiri dari para pemimpin, intelektual, dan aktivis di level nasional). Kami kemudian menentukan daerah, sektor isu, informan kunci yang sebenarnya merupakan para koordinator survei di daerah. Para informan kunci ini terdiri atas aktivis LSM, mahasiswa, dan alumni UGM di seluruh Indonesia. Kami kemudian melakukan pelatihan terhadap enumerator yang akan melakukan wawancara. Karena survei dilakukan di tiga puluh daerah, kami menyelenggarakan pelatihan di tiga kawasan Indonesia: Barat, Tengah, Timur. Survei ini terdiri dari dua bagian kuesioner[6]: bagian pertama untuk respsonden di level lokal dan bagian yang lain untuk para responden di level pusat.

6 Lihat Lampiran

Perbedaan diantara keduanya adalah bahwa yang pertama fokus pada dinamika demokrasi di level lokal, sementara yang kedua fokus pada lembaga dan aktor di level pusat. Dalam dua kuesioner tersebut kami mengajukan pertanyaan kepada para pakar tentang sektor-sektor isu demokratisasi yang paling penting seperti lingkungan, buruh, gender, pemberantasan korupsi, pluralisme dan transparansi anggaran.

Hasil Survei-Survei Terdahulu

Survei demokrasi 2013 merupakan kegiatan survei kami yang ketiga, setelah survei pertama dilakukan pada 2003/2004 dan yang kedua pada 2006. Kami perlu mengetengahkan kembali hasil-hasil dari dua survei terdahulu ini untuk memahami pola-pola jawaban terkait kondisi demokratisasi di Indonesia yang memungkinkan kita untuk merefleksikan bagaimana demokratisasi di Indonesia berjalan.

Terkait dengan lembaga-lembaga demokrasi (tata aturan dan regulasi), survei menunjukkan empat poin utama. Pertama, bahwa sudah ada kebebasan namun mengalami kemerosotan; kedua, sudah ada upaya untuk memperbaiki tata kelola pemerintahan; ketiga, komunitas politik di pinggiran telah terlibat di dalam, setidaknya, lembaga-lembaga formal—artinya mereka sudah membentuk sebuah komunitas politik yang padu (bukannya bersifat etno-nasionalis); dan keempat, representasi telah dimonopoli. Artinya, meskipun sudah ada infrastruktur lembaga demokrasi persoalan utama demokrasi indonesia masih berada pada sistem representasi yang tidak cukup terbuka yang memungkinkan kepentingan rakyat bisa terinklusi. Organisasi-organisasi kerakyatan tidak banyak terlibat dalam politik yang terorganisir. Hal ini disebabkan oleh, di antaranya,

kesulitan untuk memperoleh representasi demokratis berbasis organisasi isu dan kepentingan dan karena ketidakmungkinan mereka untuk membentuk partai politik baru. Akibatnya, representasi akan selalu dimonopoli oleh elit (cf. Törnquist 2013: 43-46).

Terkait aktor-aktor demokrasi, dua survei terdahulu menunjukkan hasil sebagai berikut. Pertama, terdapat aktor politik dominan yang kuat dan aktor politik alternatif yang lemah. Aktor-aktor dominan umumnya berada di area negara, sementara para aktor alternatif (pro-demokrasi) berada di area masyarakat sipil, dan dikotomi ini menjadi relatif tidak terlalu ketat dalam survei 2013. Kedua, para elit telah ikut serta dalam lembaga-lembaga demokrasi meskipun ada juga yang melanggar atau menyalahgunakannya. Politik—tidak semata-mata kebebasan dan hak dalam pemilu—dimonopoli oleh para aktor dominan dan kelompok oligarkis. Ketiga, seperti halnya kesimpulan kedua, dominasi elit dalam demokrasi Indonesia (selain pemilu) telah mendorong stabilitas demokrasi. Tanpa dukungan elit, demokrasi Indonesia tampaknya tidak akan bertahan (cf. Törnquist 2013: 54). Hal ini tidak berarti bahwa demokratisasi tidak bisa lebih konsisten, tetapi bahwa ia akan tetap memerlukan dukungan aktor-aktor alternatif yang terorganisir. Dan hasil surveinya cukup jelas: bahwa para aktor alternatif ini hanya berada di garis pinggir saja (cf. Törnquist 2013: 68-70).

Aktor-aktor perubahan di Indonesia telah mengalami perubahan dari yang sebelumnya berbasis politik kepentingan pada 1950an dan awal 1960an, yang diikuti oleh petaka politik 1965-1966 dan tiga dasawarsa rezim kediktatoran, hingga pengakuan pentingnya demokratisasi sejak 1980an hingga sekarang. Periode-periode ini memiliki konteks yang berbeda—

polisentrisme, kebebasan individu dan privatisasi—dan telah mengabaikan pentingnya peran reformasi ekonomi sosial dalam penguatan kapasitas demokrasi rakyat biasa. Hal ini berarti bahwa telah terjadi keterputusan antara demokrasi dan politik massa (cf. Törnquist 2013: 79-87).

Rekomendasi dari Survei Terdahulu

Rekomendasi utama dari survei pertama adalah untuk '*go politics*', yakni untuk mengatasi persoalan-persoalan representasi yang lemah dan demokrasi yang didominasi oligarki. '*Go politics*' artinya bahwa para aktivis mesti mencoba untuk masuk arena politik terorganisir, termasuk pemilu. Dengan demikian, persoalan-persoalan yang dihadapi aktivis masyarakat sipil, seperti lemahnya basis sosial dan politik di masyarakat yang mengakibatkan mereka menjadi 'mengambang', dapat segera dimitigasi dan diselesaikan. Jalinan antara masyarakat politik dan sipil akan pelan-pelan direformasi (Priyono, Samadhi and Törnquist, et. al. 2007), dan representasi rakyat yang lebih bermakna akan diciptakan. Terdapat beberapa syarat untuk '*go politics*'. Pertama, para aktivis mesti menjadi bagian dari gerakan politik yang lebih besar, tidak hanya berkutat pada inisiatif-inisiatif individu. Kedua, setelah terpilih, para aktivis tidak bisa serta merta mengabaikan para pendukungnya; gerakan-gerakan rakyat mesti ikut serta dalam peran representasinya, terlibat, memberi petunjuk dan kontrol terhadap fungsi-fungsi representasi melalui para calon yang terpilih.

Blok Politik Demokratis

Survei kedua merekomendasikan pentingnya membangun blok politik demokratis. Blok ini semakin urgen dalam situasi

pola representasi yang lemah, demokrasi yang didominasi elit (dicampur dengan sentimen populis), dan kemerosotan lembaga-lembaga demokrasi. Blok politik demokrasi merupakan arena sosial politik yang diciptakan masyaraklat sipil untuk menguatkan kapasitas representasi rakyat, memperluas jaringan, dan mentransformasikan konflik sektarian menjadi lebih pada isu-isu yang strategis yang melibatkan kerjasama politik yang produktif. Blok ini tidak berwujud partai politik, namun aliansi yang luas dan menjadi saluran alternatif bagi representasi rakyat dengan wujud yang lebih bersifat permanen, yang bisa dibangun dari tingkat desa hingga nasional (Mundayat and Priyono 2009). Blok politik demokrasi ini memungkinkan masyarakat sipil, bersama-sama dengan organisasi politik dan organisasi rakyat lainnya, untuk bersama-sama terlibat dan menggunakan lembaga-lembaga demokrasi yang ada dalam rangka membangun demokrasi yang lebih bermakna. Blok politik demokratis bisa juga berfungsi sebagai alternatif untuk menggunakan kontrol rakyat atas lembaga-lembaga negara, termasuk parlemen, sehingga rakyat memiliki akses pada isu-isu publik yang luas dan dapat memobilisasi serta membangun aliansi ekstra-parlementer dalam rangka mengajukan tuntutan-tuntutan politik yang penting.

Hasil Survei Terakhir dan Rekomendasi

Survei kondisi demokrasi yang terakhir menunjukkan bahwa demokratisasi di Indonesia, yang kerap dianggap sebagai contoh keberhasilan, ternyata mengalami kemandekan. Kemandekan ini berlangsung dalam konteks di mana negeri ini telah berhasil mengadopsi pelbagai tata aturan dan regulasi, aktor-aktor pro-demokrasi telah terpolitisasi beberapa tahun belakangan, dan klientelisme sudah tidak lagi menjadi mode kekuasaan yang

ada. Survei juga menunjukkan ada sujumlah kemajuan terkait isu kebebasan dan pemilu elitis yang ternyata tidak menghambat stabilitas atau pertumbuhan ekonomi. Sementara itu, keberhasilan membangun pakta kekuasaan antara kelompok konservatif moderat dan reformis telah menghasilkan perubahan struktural dan kelembagaan yang mengarah pada kebebasan ekonomi dan politik.

Namun demikian, kemajuan ini juga disertai dengan persoalan-persoalan yang menghambat perkembangan demokrasi Indonesia. Sebagian besar lembaga demokrasi masih sangat lemah. Selain kebebasan dan keleluasaan berserikat, sedikit sekali perbaikan dalam hal persamaan politik, tata kelola pemerintahan dan representasi. Aktor-aktor dominan dan alternatif mendukung lembaga-lembaga demokrasi hanya sepanjang tata aturan dan regulasi itu cocok dengan kepentingan mereka masing-masing. Era pasca-klientelisme ditandai oleh distribusi patronase, gaya politik populis dan karir politik individual. Meskipun kesejahteraan telah menjadi isu publik untuk sekian lamanya, pelayanan yang seharusnya diberikan negara belum efisien kalau bukan tidak ada sama sekali. Ketika sebagian kelompok mengandalkan pada solusi-solusi berbasis pasar, sebagian besar masyarakat masih harus mengandalkan pada calo-calo untuk merebut haknya atas pelayanan publik atau malah menggunakan mekanisme mandiri yang ada di masyarakat untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan kesejahteraannya. Aktor-aktor alternatif yang semestinya menjadi pendorong demokrasi masih cukup lemah. Mereka terfragmentasi, miskin strategi jangka panjang, dan cenderung untuk menyandarkan politik penetrasi lembaga-lembaga publik dan organisasi-organisasi politik secara umum. Hal ini menandakan bahwa aktor-aktor dominan dan

alternatif cenderung telah mem-*bypass* demokrasi. Keduanya memanfaatkan keterbukaan yang ada untuk mempengaruhi tata kelola publik melalui 'politik penetrasi' daripada menyelesaikan persoalan mendasar demokrasi. Tak ayal, menurut pandangan mereka sendiri, aktor-aktor dominanlah yang paling berhasil.

Akan tetapi, karena politisasi masyarakat sipil, banyak aktor alternatif yang kemudian memilih untuk masuk ke arena-arena negara dan politik arus-utama. Karena terbatasnya organisasi-organisasi independen, keterlibatan mereka di negara dan politik direalisasikan terutama melalui koneksi-koneksi ke para aktor dominan yang berpandangan terbuka. Dalam prosesnya, aktor-aktor alternatif malah cenderung dikooptasi oleh oligarki. Singkatnya, yang menjadi persoalan utamanya adalah lemahnya representasi politik dan aksi kolektif.

Secara umum kami menggambarkan bahwa perjalanan demokratisasi di Indonesia dapat dibagi dalam dua fase. Fase pertama ditandai oleh keterlibatan aktor-aktor kuat dalam memoderasi agenda-agenda reformasi dan membangun lembaga-lembaga demokrasi liberal yang dapat mereka terima. Fase kedua, yang kami ajukan ini, melibatkan kepentingan yang lebih luas khususnya kepentingan-kepentingan yang termarjinalisasi namun diperlukan (juga oleh para pendukung fase pertama yang tercerahkan) untuk mengatasi persoalan-persoalan demokratisasi seperti kebebasan yang kian merosot, reformasi tata kelola pemerintahan yang terbatas dan representasi politik yang buruk. Dengan kata lain, demokratisasi di Indonesia sudah seharusnya memasuki fase kedua ini. Ω

BAB 2

MENUNTUT HAK KESEJAHTERAAN DENGAN *DEMOS* YANG TERCERAI BERAI

Amalinda Savirani

Pengantar

Meskipun ide tentang 'publik' menjadi konsep kunci dalam demokrasi, makna persisnya seringkali tidak terang, dan signifikansinya dalam praktik demokrasi—khususnya di negara-negara Selatan. Umumnya, makna demokrasi diambil begitu saja, tanpa upaya pemahaman lebih jauh. Definisi demokrasi yang diajukan David Beetham merupakan sebuah pengecualian. Ia mendefinisikan demokrasi sebagai 'kontrol rakyat atas urusan-urusan publik berdasarkan prinsip persamaan politik'. Ia menegaskan bahwa ide tentang publik itu tidak terpisahkan dari praktik demokrasi. Dalam pengertian demokrasi model Beetham ini, urusan-urusan publik (*Public affairs*) merupakan perhatian utama demokrasi. Beetham juga menjelaskan sebuah istilah lain yang juga penting bagi demokrasi: rakyat, atau *demos*

dalam bahasa Latin, warga negara demokrasi dalam istilah modern. Dalam survei ini, *demos* merujuk pada warga negara aktif yang mempengaruhi pembuatan keputusan. *Demos* yang berhasil dapat mendayagunakan kontrol rakyat dengan mengendalikan wacana-wacana publik. Di Indonesia, hal ini kerap berlangsung dalam media-media sosial. Dengan kata lain dimensi kontrol rakyat dan urusan publik menjadi dua pilar dalam demokrasi model Beetham. Publik di sini didefinisikan dalam istilah Hannah Arendt sebagai 'tindakan yang dilakukan bersama' (Benhabib 1996).

Bab ini akan mengidentifikasi, memeriksa, dan mengukur perhatian dan pemahaman para informan mengenai gagasan tentang urusan publik sehingga kita bisa memahami bagaimana sesungguhnya persepsi tentang urusan publik, dan bagaimana peran *demos* dalam menentukan urusan publik. Ide tentang publik dan *demos* akan didiskusikan dan dikerangkai di bawah payung konsep kewarganegaraan dan kesejahteraan. Meskipun konsep kewarganegaraan telah menjadi pokok bahasan dalam literatur-literatur terkini, kejelasan konsep tersebut masih perlu digali lagi. Kewarganegaraan, dalam studi ini, tidak merujuk pada status legal seseorang melainkan pada partisipasi politik dalam suatu negara. Sebagai sebuah konsep, kewarganegaraan juga merujuk pada keterlibatan rakyat dalam tata kelola terhadap urusan-urusan publik yang lakukan secara bersama-sama (Stokke 2014: 10). Urusan publik itu tergantung pada kewarganegaraan karena warga negara mengakui hak mereka bersama melalui proses-proses deliberasi dan pembuatan keputusan. Sementara, 'kesejahteraan' didefinisikan dalam kaitannya dengan tata kelola dan peran sentral negara dalam mengatur ekonomi untuk perbaikan taraf hidup masyarakat (Esping-Andersen 1990: 2)

Bab ini akan menyampaikan tiga argumen utama. Pertama, kesadaran masyarakat Indonesia terhadap hak-hak kesejahteraan yang harus dijamin oleh negara ternyata cukup meningkat. Kesadaran publik itu terkait dengan perubahan-perubahan kelembagaan yang mempengaruhi kerangka kebijakan tentang kesejahteraan, juga dengan isu-isu kesejahteraan yang menjadi agenda kampanye dalam pemilu presiden dan pilkada. Kedua, meskipun kesadaran warga negara terhadap tanggung jawab pemerintah untuk memenuhi hak-hak kesejahteraan meningkat, kapasitas negara masih terbatas. Akibatnya, penyediaan kesejahteraan banyak dikelola oleh agensi-agensi non-pemerintah seperti lembaga-lembaga sosial. Masyarakat sendirilah, dan bukan pemerintah, yang berusaha memenuhi kebutuhan kesejahteraan warga negara. Ketiga, *demos* merupakan arena wacana yang sangat penting bagi urusan publik, termasuk isu kesejahteraan publik.

Menuntut Hak Kesejahteraan

Melalui survei 2013, kami berusaha memahami lebih spesifik mengenai hubungan antara warga negara dan urusan publik. Kami mengajukan empat pertanyaan kepada para informan, sebagai berikut:

1. Menurut Anda, urusan publik apa yang dianggap paling penting?
2. Siapa saja pihak yang paling sering membicarakan urusan publik ini?
3. Siapa yang paling ideal menangani isu publik ini?
4. Bagaimana *demos* menentukan urusan-urusan publiknya?

Isu kesejahteraan sebagai urusan publik utama

Perhatian terhadap urusan-urusan publik utama ditentukan oleh penyediaan layanan kesejahteraan, termasuk jaminan kesehatan dan pendidikan. Dalam konteks Indonesia, penyediaan-penyediaan ini dipandang sebagai 'pelayanan publik'. Isu-isu kesejahteraan telah menjadi perhatian yang sangat besar selama lebih dari satu dasawarsa sebagai akibat dari adopsi sistem pemilu langsung, baik di level presiden, gubernur, bupati/walikota. Para calon yang berhasil umumnya mendapatkan suara dengan cara memprioritaskan isu-isu kesejahteraan publik dalam agenda kampanye mereka dan selama mereka menjabat. Selama proses pemilu di daerah, misalnya, para calon bupati/wali kota memberikan janji-janji program kerakyatan seperti pendidikan gratis dan jaminan kesehatan. Artinya, popularitas isu-isu publik di Indonesia telah menjadi bagian tak terpisahkan dari demokrasi elektoral, khususnya dalam pemilu dan pilkada.

Temuan survei 2013 berbeda dengan survei sebelumnya yang dilakukan pada 2007, di mana para responden tidak mengidentifikasi isu kesejahteraan sebagai urusan publik utama, bahkan para aktivis pun tidak menyebutkan isu penyediaan layanan publik oleh negara. Prioritas isu, menurut survei sebelumnya, justru ditentukan oleh perkembangan organisasi masyarakat sipil.

Berdasarkan respon-respon dalam survei 2013 ini, kami mengidentifikasi lima belas tantangan utama yang dihadapi warga negara dalam kehidupan sehari-hari, yang dapat dikategorikan dalam empat kelompok:

1. Tantangan atas layanan publik, termasuk kesehatan, pendidikan, keamanan fisik, perumahan, jaminan sosial dan keamanan;

2. Regulasi ekonomi atas industri, perikanan, pertanian, sektor informal, upah dan buruh;
3. Tantangan infrastruktur, termasuk transportasi publik dan kemacetan
4. Tantangan terhadap kewarganegaraan, termasuk hak-hak sipil dan hak-hak minoritas.

Tantangan lainnya meliputi konservasi lingkungan, dinamika politik di daerah dan nasional, kinerja pemerintah, isu-isu moral, perbedaan dan kepemimpinan (lihat grafik 2.1).

Sebanyak 55% responden menyebutkan urusan publik yang berkaitan dengan penyediaan layanan kesejahteraan—meliputi jaminan kesehatan, pendidikan, keamanan, transprtasi publik, lalu lintas dan perumahan umum—sebagai prioritas utama. Hampir 30% responden mengatakan tata kelola ekonomi sebagai isu publik penting yang kedua. Kewarganegaraan, termasuk hak-hak sipil seperti regulasi-regulasi tentang agama, hak anak, dan hak minoritas menjadi isu publik prioritas yang ketiga, dipilih oleh kurang dari 14%.

Grafik 2.1. Prioritas Isu Publik

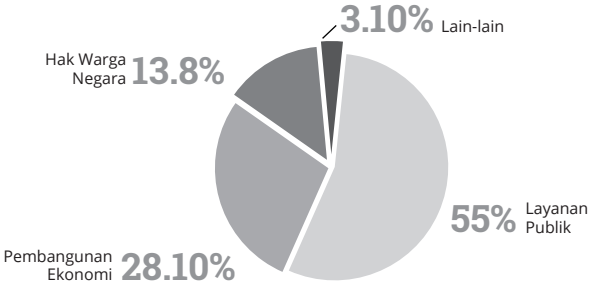

Karena kuesioner yang digunakan dalam survei 2007 cukup berbeda dengan survei 2013, upaya membandingkan perkembangan perhatian masyarakat terhadap isu publik dalam periode yang berbeda ini menjadi cukup sulit. Namun demikian, beberapa indikator memungkinkan dilakukannya analisis inklusif dengan menggunakan data yang dikumpulkan dalam survei-survei kami. Selama 2006-2007, ketika pertama kali survei demokrasi dilakukan, pupularitas isu-isu kesejahteraan dalam kampanye politik jauh lebih kecil dibandingkan dengan masa sekarang. Sebaliknya, isu yang berkaitan dengan masyarakan sipil cukup dominan saat itu. Padahal survei tersebut dilakukan setelah ada upaya pelembagaan hak-hak kesejahteraan, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang no 40/2004 tentang keamanan sosial yang dikenalkan saat masa kepemimpinan Megawati (2001-2004). Periode transisi selama sepuluh tahun sebelum Undang-Undang ini diimplementasikan, para politisi memulai menggunakan isu-isu kesejahteraan dalam kampanye mereka. Strategi ini kian marak pada tahun-tahun setelah pemilihan langsung kepala daerah diterapkan.

Salah satu perintis kampanye politik yang menggunakan isu-isu kesejahteraan adalah Bupati Buleleng di Bali Utara, I Gede Winasa. Untuk menarik dukungan massa, ia memulai dengan memberikan layanan kesehatan gigi sebagai upaya awal untuk membangun program-program kesejahteraan masyarakat. Winasa kemudian menerapkan program jaminan kesehatan di daerah yang dikenal dengan Jaminan Kesehatan Jembrana (JKJ), pendidikan gratis untuk sekolah dasar selama dua masa jabatannya (2000-2005 dan 2005-2010). Program-program kesejahteraan Winasa meningkatkan popularitasnya, dan bahkan ia hampir mengumpulkan 90% suara pada pilkada 2005. Lembaga donor,

Yayasan TIFA, menobatkan Winasa sebagai model pemimpin daerah inovatif dan menyebut dirinya dan kabupaten Buleleng sebagai 'contoh terbaik' dari promosi kesejahteraan (TIFA, 2005). Setelah Winasa, banyak para pemimpin daerah yang mengikuti jejaknya dalam rangka mencari dukungan masyarakat melalui kebijakan-kebijakan kesejahteraan, seperti jaminan kesehatan bagi masyarakat miskin, termasuk Walikota Solo, Joko Widodo, Presiden RI saat ini.

Pada 2014, isu-isu kesejahteraan menjadi fokus utama dalam pilkada dan pemilu nasional. Selama kampanye presiden 2014, Joko Widodo getol sekali menjanjikan kebijakan-kebijakan populis seperti Kartu Indonesia Pintar (KIP) dalam sektor pendidikan dan Kartu Indonesia Sehat (KIS), yang terbukti sangat efektif sebagai platform kampanyenya. KIP dan KIS menjamin warga negara Indonesia mendapat layanan kesehatan dan pendidikan gratis 12 tahun. Bank Dunia menyebut hal ini sebagai 'upaya reformasi keamanan sosial terbesar di dunia saat ini' (2014). Selain itu, Joko Widodo juga mengenalkan Kartu Keluarga Sejahtera untuk membantu 15,5 juta tunawisma dan keluarga miskin dengan memotong subsidi BBM. Jika berhasil, model keamanan sosial baru Indonesia akan menyamai model Bolsa Familia, skema keamanan sosial yang diperkenalkan di Brazil pada 2003 guna membantu 12 juta rakyat miskin di sana (Janvry et. al. 2005).

Menuntut Hak Kesejahteraan pada Negara

Selain bertanya isu publik mana yang dianggap penting, kami juga bertanya kepada informan tentang apakah masyarakat umumnya mengetahui siapa pihak yang paling wajib mengelola kesejahteraan publik. Jawaban dari para informan ditampilkan dalam tabel 2.1. Hampir 36% informan kami menjawab bahwa

mayoritas masyarakat mengetahui siapa yang seharusnya bertanggungjawab. Sebanyak 50% menjawab tidak yakin, dan sepertiga lainnya mengatakan bahwa tidak tahu pihak mana yang seharusnya bertanggungjawab.

Selanjutnya kami mengajukan pertanyaan kepada informan tentang siapa yang seharusnya mengelola urusan publik: individu, keluarga, negara, swasta, masyarakat sipil atau organisasi kemasyarakatan lainnya. Lebih dari 65% menyebutkan bahwa urusan publik adalah tanggung jawab negara, sementara kurang dari 9% menjawab bahwa urusan publik seharusnya dikelola oleh organisasi-organisasi masyarakat sipil.

Tabel 2.1. Institusi yang seharusnya mengelola isu publik

NO	JENIS INSTITUSI	PERSENTASE
1	Individu	3,2%
2	Keluarga, klan	0,5%
3	Pasar	5,9%
4	Organisasi masyarakat sipil	8,1%
5	Negara/pemerintah daerah	65,9%
6	Negara/lembaga publik	6,4%
7	Tidak menjawab	10,0%
	TOTAL	**100,0%**

Pendapat mayoritas bahwa negara seharusnya mengelola urusan publik seperti isu-isu kesejahteraan mencerminkan pemahaman warganegara tentang pentingnya hak kesejahteraan dan sentralnya peran dan kapasitas negara untuk menyediakan kebutuhan-kebutuhan kolektif warganya. Negara dipandang memiliki kemampuan politik dan keuangan untuk menjamin penyediaan layanan publik seperti jaminan kesehatan, pendidikan, perumahan, pensiun, transportasi publik dan keamanan fisik.

Para informan juga berpendapat bahwa kondisi ideal ini masih belum menjadi kenyataan. Jawaban terhadap pertanyaan survei 'siapa yang sesungguhnya mengelola urusan publik?' menunjukkan bahwa masyarakatlah yang memenuhi kebutuhan kesejahteraan warga (hampir 40% jawaban) daripada disediakan pemerintah. Hanya 13,6% responden yang mengatakan bahwa kesejahteraan dikelola melalui kerjasama negara-warga, sementara hanya 5,9% yang menyebut peran sektor swasta.

Sentralnya peran masyarakat dalam mengurusi isu publik juga merupakan temuan dalam survei 2007. Masyarakat sendirilah yang harus menyelesaikan persoalannya melalui organisasi-organisasi kemasyarakatan atau pemimpin informal (45%). Mereka juga memanfaatkan lobi dan kampanye media (34%) dan melalui pejabat yang dipilih di level daerah dan nasional (23%). Kesamaan dari hasil dua survei ini menunjukkan tingginya harapan terhadap penyediaan layanan kesejahteraan oleh negara, sementara pada kenyataannya negara telah mengalihkan tanggung jawabnya kepada masing-masing warga negara, organisasi kemasyarakatan dan swasta/pasar.

Salah satu penjelasan mengapa lembaga-lembaga negara jauh lebih baik menangani urusan-urusan publik adalah karena persepsi masyarakat akan lemahnya kapasitas negara. Dalam kasus jaminan kesehatan, sebagaimana dibahas oleh Aspinall (2014), kapasitas negara untuk memenuhi hak-hak kesejahteraan warga negara masih terbatas karena dua alasan. Pertama, kapasitas politik pemerintah yang lemah untuk memberantas korupsi dan pungutan liar yang dilakukan oleh politisi-birokrat. Kedua, kondisi keuangan pemerintah. Pada 2014, PDB Indonesia jatuh di bawah Taiwan dan Korea Selatan saat jaminan kesehatan universal mulai diterapkan. Jika Indonesia ingin meningkatkan

kualitas sistem jaminan kesehatan, ia harus meningkatkan pendapatan melalui pajak. Akan tetapi, kebijakan ini mungkin akan berpengaruh terhadap dukungan politik dari kelas menengah dan 'berpotensi akan mengakibatkan pertarungan sosial yang sengit' (Aspinal 2014: 817).

Meskipun pemerintah tidak memiliki kesiapan untuk menerapkan program-program kesejahteraan publik seperti jaminan kesehatan universal, hasil-hasil survei menunjukkan harapan publik bahwa kesejahteran seharusnya menjadi tanggung jawab negara dan menjadi bagian dari hak dasar warga negara.

Bersatu dalam Wacana, Tercerai berai dalam Gerakan: *Demos* di Indonesia

Kuatnya Wacana Publik di Masyarakat Sipil

Berdasarkan hasil survei, wacana tentang urusan publik cukup kuat di kalangan organisasi masyarakat sipil (56%). Dengan demikian, masyarakat sipil memainkan peranan penting dalam mendefinisikan hak-hak kesejahteraan warganegara. Negara menempati urutan yang kedua yang berperan dalam mendefinisikan hak-hak kesejahteraan, yakni 25%, diikuti oleh masyarakat politik seperti partai politik dan anggota parlemen 11%, dan sektor ekonomi 8%. Masyarakat sipil secara aktif menjadikan urusan-urusan publik sebagai fokus agenda dan kebijakan. Padahal, apa yang disebut 'fraksi balkon', yang merujuk pada lantai kedua dalam ruang sidang di gedung parlemen di Jakarta, di mana anggota organisasi masyarakat sipil menyaksikan dan mengikuti proses pembuatan dan pelaksanaan kebijakan, sebenarnya ditujukan secara khusus untuk masyarakat umum yang ingin terlibat dalam proses-proses di parlemen.

Selama proses persidangan UU BPJS pada 2011, 65 anggota Komite Aksi Jaminan Sosial (KAJS) secara rutin menghadiri sidang marathon di gedung parlemen untuk mendukung proses kebijakan ini. Selain membentuk 'faksi balkon' ini, aliansi ini juga melakukan beberapa aksi demonstrasi sepanjang perdebatan RUU ini berlangsung di gedung parlemen.

Grafik 2.2. Aktor yang terlibat dalam pembahasan isu publik

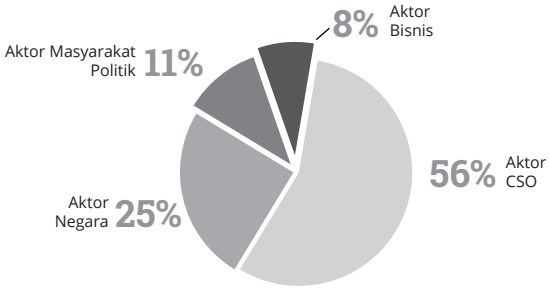

Dari grafik di atas, kita bisa melihat bagaimana aktor-aktor masyarakat sipil itu berperan penting dalam proses 'pembentukan wacana'. Grafik itu juga menunjukkan pentingnya keaktifan masyarakat sipil sebagai pilar demokrasi, setidaknya dalam level wacana. Agar berfungsi efektif, lembaga-lembaga demokrasi memerlukan arena independen dan plural yang memungkinkan berlangsungnya interaksi dan perdebatan, dengan mana warga negara bisa secara langsung terlibat dalam pembuatan keputusan tentang kebijakan-kebijakan kesejahteraan yang dikelola negara. Masyarakat sipil yang aktif akan mengontrol kebijakan-kebijakan pemerintah dan menjamin dipenuhinya hak-hak kesejahteraan sesuai dengan perundangan yang ada (Beetham, Carvalho, Landman & Weir, 2002:28). Masyarakat sipil juga berperan

dalam membatasi otoritas negara demi terciptanya keseimbangan kekuasaan yang ideal dan demokratis.

Sebagaimana ditunjukkan dalam bab ini, urusan publik hanya akan menjadi bermakna bagi masyarakat jika mereka sendiri terlibat dalam menentukan apa itu urusan publik dan mendorong peran negara untuk mengelolanya. Tentu saja perdebatan tidak cukup hanya seputar siapa yang menjamin pemenuhan kesejahteraan. Kita harus melibatkan partai politik, lembaga perwakilan dan agenda pemerintah agar urusan-urusan publik tersebut diterjemahkan dalam kebijakan pemerintah. Tanpa proses aktivasi ini, kesenjangan antara urusan publik dan kebijakan publik akan semakin tak terjembatani.

Transformasi Masyarakat Sipil dalam Isu-Isu Publik

Para wakil rakyat seharusnya akif dalam perumusan kebijakan publik yang mengedepankan urusan-urusan publik. Namun, justru organisasi masyarakat sipil yang memainkan peran penting dalam isu ini, dan mendorong partai-partai politik serta anggota parlemen untuk mengembangkan kebijakan yang susuai dengan kemauan rakyat. Mereka juga menjamin agar tidak ada kesenjangan antara perhatian dari wilayah publik dan yang ada di parlemen. Ketika pembagian antara masyarakat politik dan masyarakat sipil masih ada, kebijakan publik mungkin tidak akan mencerminkan kebutuhan aktual warga negaranya dan demokrasi dimungkinkan akan stagnan. Mietzner (2012) berpendapat bahwa di Indonesia, kelembaman demokrasi semacam itu merupakan gejala dari kebijakan pemerintah yang hanya menguntungkan elit daripada berpihak ke masyarakat.

Hasil survei juga menunjukkan bahwa kemandekan demokratisasi yang ada sekarang adalah akibat dari kegagalan

menerjemahkan kepedulian isu kesejahteran rakyat menjadi suatu kebijakan yang menguntungkan mereka. Urusan publik masih mengawang-awang dalam level perdebatan, daripada menjadi basis bagi sebuah tindakan yang terencana. Selama lebih dari satu dasawarsa, representasi-representasi masyarakat sipil[7] telah memperluas keterlibatan politik langsung mereka dengan menjadi anggota lembaga-lembaga sampiran negara (*state auxilary agencies*) atau komisi-komisi, tim konsultan, staf khusus menteri, komisaris BUMN, atau anggota parlemen. Meskipun keterlibatan mereka cukup berdampak pada politik Indonesia dan membangun saluran untuk advokasi kebijakan, kapasitas mereka dalam mempengaruhi kebijakan masih sangat terbatas. Kondisi ini mencerminkan adanya kesenjangan antara latar belakang sosial para aktor, orang-orang yang akan mereka representasikan, dan cara bagaimana mereka ditunjuk dan dipilih. Isu-isu tersebut berada di luar cakupan survei ini.

Kesimpulan

Bab ini telah menjelaskan dua gagasan tentang 'publik' dan '*demos*' sebagai komponen penting dalam demokrasi, sebagaimana diargumentasikan oleh Beetham. Hasil survei 2013 ini menunjukkan bahwa urusan publik oleh informan dipahami

7 Masyarakat sipil adalah arena di luar negara, masyarakat politik dan pasar. Konsep ini biasanya merujuknya sebagai 'pengawas' pemerintah. Ia terdiri atas organisasi-organisasi masyarakat, yang dikenal sebagai LSM, atau dalam sebuah komunitas sipil. Dalam tradisi liberal, masyarakat sipil tidak terlibat dalam politik. Akan tetapi, dalam tradisi sosial-demokrasi di negara-negara utara dan di negara-negara berkembang, seperti Indonesia, anggota organisasi masyarakat sipil ikut terlibat dalam politik, seperti menjadi calon legislatif atau kepala daerah melalui pemilu. Oleh karenanya, mereka dilabeli sebagai 'masyarakat sipil terpolitisasi' (c.f.Foley and Edwards1996; Cohen and Arato 1996; Törnquist 2013).

sebagai "isu publik" dan terkaita dengan kesejahteraan, seperti kesehatan dan pendidikan. Isu kesejahteraan publik merupakan isu yang kini menjadi perhatian di kalangan masyarakat Indonesia, dan makin pahamnya warganegara atas sentralnya peran negara dalam penyediaan pelayanan publik. Berbeda dengan pengalaman negara-negara lain, seperti di Eropa, sejarah gerakan akar rumputlah yang menuntut negara memenuhi hak-hak kesejahteraan. Secara khusus, pengalaman di negara-negara Skandinavia, keterlibatan warga negara dan pemerintah dalam isu-isu kesejahteraan telah menguatkan gerakan sosial yang pada akhirnya menjadi cikal bakal pembentukan model negara kesejahteraan.

Di Indonesia, situasinya terbalik: pemenuhan hak-hak kesejahteraan bersifat *top-down* dan diinisiasi oleh para kandidat pemimpin politik yang mengangkat isu-isu publik ini dalam materi kampanyenya atau dalam bentuk program jaminan pendidikan dan kesehatan. Perhatian pada isu kesejahteraan ini merupakan gejala baru yang muncul sejak sekitar satu dasawarsa terakhir. Ia dimulai sejak 2004, ketika perdebatan isu kesejahteraan menjadi topik populer bersamaan dengan implementasi jaminan kesehatan menyeluruh. Pada tahun-tahun itu, para politisi mendapatkan momentum untuk mengkampanyekan isu-isu kesejahteraan publik sebagai agenda kampanye pilkada. Meski diinisiasi oleh negara, kapasitas negara bukan berarti tidak terbatas dalam melakukan layanan publik. Akibatnya, masyarakatlah yang juga berperan aktif dalam penyediaan layanan publik ini.

Dalam arti spesifik, *demos* diartikan sebagai warga negara aktif yang terlibat dalam perdebatan tentang urusan-urusan publik dan memiliki kemampuan mendorong negara agar memenuhi hak-hak kesejahteraan warganya. Hasil-hasil survei menunjukkan

bahwa *demos* memegang peran sentral dalam wacana publik—khususnya terkait kebijakan terkait kesejahteraan, seperti dalam kasus penyediaan jaminan sosial. Dalam beberapa kasus, seperti kampanye KAJS, gerakan rakyat mungkin muncul, namun dalam kasus-kasus yang lain aktivitas *demos* masih cukup terbatas. Dengan kata lain, menjadi warga negara harus ditunjukkan dalam partisipasi politiknya. Kajian yang lebih lanjut sangat diperlukan untuk memahami bagaimana pengukuran tentang wacana-wacana publik akan memiliki dampak nyata dalam pembuatan kebijakan di Indonesia. Ω

BAB

3

INSTITUSI DEMOKRASI: DARI PENGUATAN *GOOD GOVERNANCE* MENUJU MASYARAKAT SIPIL AKTIF

Hasrul Hanif dan Eric Hiariej

Pengantar

Institusi merupakan komponen fundamental dalam proses demokratisasi. Institusi politik yang berfungsi dianggap sebagai prakondisi penting bagi berlangsungnya demokrasi. Institusi dan praktik politik yang ada merupakan alat untuk mempertahankan dan menjamin prinsip-prinsip ideal demokrasi. Bab ini menempatkan demokrasi sebagai sebuah ideal tata pemerintahan yang dimanifestasikan melalui sejumlah lembaga dan praktik, atau prosedur dan mekanisme. Institusi di sini dipahami sebagai "*rules and regulations*" atau tata kelola dan aturan demokrasi. Realisasi kontrol rakyat dan persamaan politik dapat diukur melalui keberadaan dan kinerja lembaga-lembaga demokrasi di suatu negara (lihat Beetham, 2007). Gagasan

ini sejalan dengan usulan yang diajukan Olle Törnquist untuk mengukur capaian tujuan-tujuan demokrasi (2013: 31):

> *Pertama, sejumlah prinsip krusial atau norma mesti didefinisikan terlebih dahulu, yakni partisipasi, otorisasi representatif dan ekskutif, representasi opini dan kelompok sosial, respon pemerintah terhadap pemilih dan opini publik, akuntabilitas, transparansi, dan solidaritas kemanusiaan, nasional dan internasional. Kedua, lembaga-lembaga apa (dalam bentuk tata aturan dan regulasi) yang diperlukan untuk mewujudkan prinsip-prinsip tersebut?*

Akan tetapi, keberadaan lembaga-lembaga demokrasi bukan jaminan secara otomatis untuk terealisasikan prinsip-prinsip demokrasi. Para aktor yang terlibat dalam proses-proses politik harus ikut juga mempromosikan, mengadopsi dan menginternalisasi tata aturan dan regulasi yang dianut lembaga untuk memastikan agar demokrasi menjadi satu-satunya mekanisme politik yang diterima. Sebaliknya, jika para aktor politik mengkhianati tata aturan dan regulasi yang ada dan/atau mengoperasikan lembaga-lembaga demokrasi berdasarkan cara-cara yang tidak demokratis maka proses demokratisasi akan terganggu dan penciptaan tata politik demokratis akan sulit dicapai (O'Donnell, 2004: 9-92).

Lembaga-lembaga demokrasi itu bukanlah organisme yang terisolasi dari sekitar, terisolasi dalam ruang politik yang kosong. Hubungan kekuasaan yang ada antara organisasi yang berbeda, kelompok dan kelas sangat berpengaruh dalam menentukan cara bagaimana lembaga-lembaga itu bekerja. Mengukur kualitas lembaga tanpa mempertimbangkan dimensi hubungan kekuasaan

akan gagal karena ia tidak mampu membongkar praktik-praktik aktual dan karakter politis dari lembaga-lembaga demokrasi. Dalam istilah formal, sebuah lembaga dianggap sudah baik dalam dirinya sendiri apabila ia mempromosikan tata aturan dan regulasi demokrasi yang ideal. Dengan memasukkan analisis hubungan kekuasaan, mengukur praktek demokrasi memasukan peluang bahwa sebuah lembaga selalu bersifat terbuka untuk disalahgunakan oleh kelompok-kelompok atau kelas dominan.

Sejumlah pakar yang mengkaji demokrasi Indonesia telah menerbitkan hasil-hasil studinya, khususnya terkait topik lembaga demokrasi, dengan beragam kesimpulan dan penilaian. Bagi kelompok yang optimis (lihat, misalnya, Diamond 2009), sebagai sebuah negara demokrasi baru di Asia Timur dan Tenggara, Indonesia telah menunjukkan hal yang jauh lebih baik dari yang diharapkan para pakar. Pembangunan lembaga-lembaga demokrasi berjalan dalam suasana politik yang terbuka, bebas dan liberal. Menurut kelompok ini, demokrasi di Indonesia akan bertahan cukup lama dan akan terus memperbaiki diri menuju tata kelola yang lebih baik. Sementara kelompok pesimis memandang bahwa meskipun jumlah lembaga-lembaga demokrasi yang diadopsi dan dibangun terus bertambah proses konsolidasi demokrasi di negara ini justru mengalami kemunduran. Walaupun organisasi-organisasi masyarakat sipil muncul sebagai pembela demokrasi yang paling penting, para elit yang anti-reformis ingin memutar kembali proses-proses ini (Mietzner 2012). Lebih buruk lagi, lembaga-lembaga demokrasi ini telah dibajak kartel-kartel politik (lihat misalnya Slater 2004; Ambardi 2005) atau kaum oligarkis (lihat misalnya Robison dan Hadiz 2004; Winters 2011). Dengan kata lain, menurut pandangan pesimistis ini, demokrasi di Indonesia mengalami kemandekan, meski institusi

demokrasi telah terpasang dengan baik. Di antara dua kubu di atas, ada sejumlah pakar yang merayakan proses demokratisasi di Indonesia namun pada saat yang sama memiliki catatan kritis terkait masih berlangsungnya praktik-praktik politik lama yang menghambat terwujudnya demokrasi. Kelompok ini menyesalkan praktik-praktik klientelisme yang masih bertahan dalam era akuntabilitas demokrasi (lihat, misalnya, Nordholt 2004; Klinken 2009).

Dengan memperhatikan pentingnya lembaga dan bersepakat dengan evaluasi umum atas kinerja tata aturan dan regulasi yang diajukan oleh sebagian besar pakar demokrasi yang disebutkan di atas, argumen utama dalam bab ini adalah bahwa demokrasi di Indonesia sejak diterapkannya aturan pemilihan pemimpin langsung seperti Pilkada berjalan jauh lebih baik hampir dalam semua tata aturan dan regulasi. Praktik-praktik informal yang masih terus berlangsung bersamaan dengan lembaga-lembaga formal memang sulit dihindari. Namun demikian, praktik-praktik tersebut juga berpotensi untuk mendukung kinerja lembaga-lembaga demokrasi.

Akan tetapi, berkebalikan dengan pandangan-pandangan yang optimis yang merayakan capaian proses demokratisasi di Indonesia, survei ini menunjukkan gambaran yang jauh lebih bernuansa mengenai kinerja lembaga-lembaga demokrasi. Perbaikan yang paling impresif terjadi dalam lembaga-lembaga yang berhubungan dengan masyarakat sipil, dan yang relatif rendah adalah lembaga-lembaga yang terkait dengan represenntasi dan tata kelola pemerintahan. Perkembangan-perkembangan ini, sebagaimana ditunjukkan dalam hasil survei, menunjukan dengan cukup jelas bahwa politik Indonesia menjadi semakin liberal namun tidak menjadi lebih demokratis.

Hal lain yang juga penting adalah hubungan antara para aktor dan lembaga-lembaga demokrasi. Berkebalikan dengan pandangan yang pesimis, aktor-aktor penting ternyata cukup mendukung dan ikut serta mempromosikan lembaga-lembaga demokrasi. Namun demikian, dukungan mereka sama sekali tidak bersifat substantif dan cenderung diskriminatif karena baik aktor dominan maupun alternatif hanya mempromosikan tata aturan dan regulasi dalam sektornya masing-masing. Dibandingkan dengan para aktor alternatif, aktor-aktor dominan cenderung lebih berpotensi untuk menyalahgunakan lembaga-lembaga demokrasi.

Dalam survei ini yang dimaksud lembaga tidak semata-mata merujuk pada 'organisasi' dan/atau negara dan agensi non-negara. Konsep lembaga (institusi) merujuk pada norma, nilai, prosedur, konvensi, aturan sosial, regulasi, kepercayaan, kode, budaya, dan pengetahuan yang membentuk perilaku dan orientasi individu atau sosial (lihat Lauth 2000: 23; Olsen dan March 1989: 22). Dengan mengadopsi gagasan David Beetham tentang lembaga demokrasi (Beetham 1999: 154-155; Landman 2008: 11-12), survei ini berupaya untuk mengidentifikasi kemajuan terkini demokrasi Indonesia dengan mengukur kinerja tata aturan dan regulasi yang diklasifikasikan dalam kategori berikut. Kategori pertama adalah tata aturan dan regulasi yang berkaitan dengan gagasan kewarganegaraan, yang meliputi 'kesetaraan warga negara', 'penegakkan hukum', 'keadilan yang setara', dan 'praktek prinsip HAM universal'. Kategori kedua dapat dikelompokkan dalam rubrik *representasi* yang terdiri atas 'representasi politik demokratis', 'partisipasi warga negara', 'saluran representasi berbasis isu dan kepentingan yang terlembaga', 'demokrasi lokal', dan 'kontrol demokratis terhadap instrumen koersi'. Kategori ketiga berkaitan dengan tata kelola demokrasi, yang terdiri atas

'tata kelola yang transparan, akuntabel dan tidak memihak' dan 'independensi dalam membuat dan mengimplementasikan keputusan'. Kategori terakhir adalah masyarakat sipil aktif yang terdiri atas 'kebebasan dan akses yang setara terhadap wacana publik', dan 'pengorganisasian warga negara demokratis'. Dengan membuat kategori secara detail, survei ini bertujuan untuk mengukur kualitas demokrasi tanpa harus terjebak dalam generalisasi.

Survei bagian ini diorientasikan untuk mengukur kinerja lembaga-lembaga demokrasi dengan mengajumkan sejumlah pertanyaan berikut ini:

- Bagaimana evaluasi umum Anda atas kualitas regulasi lembaga-lembaga demokrasi di tingkat kota/kabupaten (baik, sedang, buruk)?
- Bagaimana pandangan Anda atas kualitas perkembangan regulasi lembaga-lembaga demokrasi di tingkat kota/kabupaten (membaik, tidak berubah, memburuk)?
- Praktik-praktik informal (adat, tradisi, nilai budaya, dan lainnya) apa saja yang mendukung, membatasi atau bertentangan dengan regulasi lembaga-lembaga demokrasi?
- Apakah para aktor utama (baik aktor dominan atau alternatif) mempromosikan, menyalahgunakan, atau mengabaikan regulasi lembaga-lembaga demokrasi untuk kepentingan masing-masing?

Institusi Demokrasi yang Semakin Baik

Secara umum, standar demokrasi Indonesia, khususnya dalam konteks lembaga demokrasi, sebagaimana diargumentasikan para pakar seperti Larry Diamond terkonfirmasi. Survei bagian ini meminta para informan untuk memberikan penilaian umum

mereka terhadap lembaga-lembaga formal. Sebagian besar jawaban menyatakan bahwa kualitas tata aturan dan regulasi demokrasi di Indonesia cukup baik atau bahkan membaik (lihat tabel 3.1). Dibandingkan dengan survei-survei sebelumnya kecenderungan ini cukup meningkat (lihat tabel 3.2). Para informan diminta untuk melakukan evaluasi atas kualitas tata aturan dan regulasi sejak pilkada terakhir. Selain 'representasi politik demokratis' dan sejumlah tata aturan dan regulasi terkait tata kelola pemerintahan, mereka yang menyatakan bahwa kualitas lembaga demokrasi 'membaik' jumlahnya dua kali lipat dari mereka yang mengatakan bahwa kualitas lembaga demokrasi semakin memburuk (lihat tabel 3.3).

Berbeda dengan kajian-kajian yang ada, survei 2013 ini memberi perhatian pada posisi dan peran lembaga-lembaga infromal seperti adat, nilai-nilai budaya seperti para tetua adat, forum-forum adat, perkumpulan warga, pertemuan kampung, dan acara-acara tradisional, dalam menilai kualitas institusi demokrasi di Indonesia. Di negara seperti Indonesia dimensi-dimensi seperti nilai-nilai informal, organisasi dan mekanisme berpengaruh sangat besar terhadap proses demokratisasi. Meskipun lembaga informal seperti adat kelihatannya bertentangan dengan norma-norma demokrasi, temuan dalam survei ini menunjukkan hasil yang sebaliknya: lembaga-lembaga informal dapat menjadi pendorong atau penghambat lembaga-lembaga demokrasi (lihat tabel 3.4 dan 3.5) pada saat yang bersamaan. Tampaknya peribahasa lama 'bukan senjata yang bermasalah, tapi siapa yang memegangnya' cukup relevan dengan situasi ini, karena para aktor yang menggunakan tata aturan dan regulasi informal sangat berpengaruh pada tata aturan dan regulasi demokrasi formal.

Tabel 3.1. Penilaian umum tentang tata aturan dan regulasi demokrasi formal

NO	KATEGORI INSTITUSI FORMAL DEMOKRASI (TATA ATURAN DAN REGULASI)	BAIK	CU-KUP BAIK	BU-RUK	TIDAK MEN-JAWAB
		(% informan)			
A.	Kewarganegaraan	29,0	42,0	25,8	3,2
1.	Kesetaraan warga negara	34,2	45,3	27,9	2,5
2.	Penegakan hukum	27,7	42,9	25,2	4,2
3.	Persamaan hak terhadap keadilan	22,3	36,0	38,5	3,2
4.	HAM universal	31,8	43,8	21,6	2,9
B.	Representasi	25,2	41,7	28,8	4,0
5.	Representasi politik demokratis	27,4	35,5	33,3	3,9
6.	Partisipasi warga negara	20,8	43,8	32,3	3,2
7.	Saluran terlembaga untuk representasi berbasis isu dan kepentingan	24,0	47,0	24,8	4,2
8.	Demokrasi lokal	28,9	43,2	23,8	4,1
9.	Kontrol demokratis atas instrumen koersif	26,7	39,0	29,9	4,4
C.	Tata Kelola	19,4	41,7	35,1	3,7
10.	Tata kelola yang transparan, akuntabel dan tak memihak	19,8	39,9	37,5	2,9
11.	Independensi pemerintah dalam membuat dan menjalankan keputusan	19,1	43,6	32,8	4,6
D.	Kebabasan Sipil	52,0	33,4	10,6	3,9
12.	Kebebasan dan persamaan kesempatan untuk terlibat dalam wacana publik	49,0	34,5	12,2	4,4
13.	Kebebasan untuk mengorganisir diri	55,1	32,4	9,1	3,4
	RATA-RATA	29,7	40,5	26,1	3,7

Source: primary data

Tabel 3.2. Perbandingan penilaian umum tentang tata aturan dan regulasi demokrasi hasil survei 2003, 2007 dan 2013

NO	PENGELOMPOKAN INSTITUSI FORMAL DEMOKRASI (TATA ATURAN DAN REGULASI)	TAHUN					
		2003		2007		2013	
		BAIK	BURUK	BAIK	BURUK	BAIK	BURUK
1.	Kewarganegaraan, hukum dan hak	36	63	55	44	71	26
2.	Representasi demokrasi	36	62	57	42	67	29
3.	Akuntabilitas pemerintah	23	76	53	45	61	35
4.	Masyarakat sipil aktif	45	55	62	38	85	11
	RATA-RATA	**35**	**64**	**57**	**42**	**70**	**26**

Akan tetapi, terdapat temuan menarik lainnya berkaitan dengan lembaga informal dalam survei ini. Sebagaimana ditunjukkan dalam tabel 3.4 dan 3.5, 'mekanisme' kelembagaan seperti forum-forum adat dan acara tradisional menjadi faktor kunci. Mekanisme lembaga informal tersebut sangat mempengaruhi baik buruknya lembaga-lembaga demokrasi. Dengan demikian, lembaga informal juga menjadi faktor penting dalam hubungan antara lembaga informal dan tata aturan dan regulasi demokrasi formal. Oleh karena itu, upaya untuk memperbaiki kontribusi lembaga informal terhadap bekerjanya demokrasi formal dapat pula dilakukan melalui jalur 'mekanisme-mekanisme' informal ini.

Tabel 3.3. Kualitas proses-proses demokrasi (tata aturan dan regulasi)

NO	TATA ATURAN DAN REGULASI	MEM-BAIK	MEM-BURUK	TIDAK BER-UBAH	TIDAK MEN-JAWAB
		(% INFORMAN)			
A.	**KEWARGANEGARAAN**	**33,4**	**14,6**	**48,0**	**4,0**
1.	Kesetaraan warga negara	38,5	12,7	44,9	3,9
2.	Penegakan hukum	33,4	14,2	47,1	5,2
3.	Persamaan hak terhadap keadilan	27,2	16,7	52,4	3,7
4.	HAM universal	34,6	14,7	47,5	3,2
B.	**REPRESENTASI**	**32,5**	**15,1**	**47,5**	**4,9**
5.	Representasi politik demokratis	28,9	21,3	45,3	4,6
6.	Partisipasi warga negara	31,8	14,4	50,2	3,7
7.	Saluran terlembaga untuk representasi berbasis isu dan kepentingan	35,8	11,5	47,3	5,4
8.	Demokrasi lokal	34,0	14,0	46,8	5,2
9.	Kontrol demokratis atas instrumen koersif	32,3	14,2	48,0	5,6
C.	**TATA KELOLA**	**27,8**	**17,1**	**50,4**	**4,6**
10.	Tata kelola yang transparan, akuntabel dan tak memihak	29,7	1,69	49,7	3,7
11.	Independensi pemerintah dalam membuat dan menjalankan keputusan	25,8	17,4	51,2	5,6
D.	**KEBEBASAN SIPIL**	**54,1**	**7,5**	**34,3**	**4,1**
12.	Kebebasan dan persamaan kesempatan untuk terlibat dalam wacana publik	51,9	6,6	37,2	4,4
13.	Kebebasan untuk mengorganisir diri	56,3	8,4	31,4	3,9
	RATA-RATA	**35,4**	**14,1**	**46,1**	**4,5**

Tabel 3.4. Bagaimana tata aturan dan regulasi informal mendukung formalisasi institusi demokrasi formal

NO	TATA ATURAN DAN REGULASI	DUKUNGAN ASPEK INFORMAL TERHADAP INSTITUSI DEMOKRASI FORMAL			
		INFORMAL DALAM ARTI "NILAI"	INFORMAL DALAM ARTI "ORGANISASI"	INFORMAL DALAM ARTI "MEKANISME"	TIDAK TERKATEGORI
A.	**KEWARGANEGARAAN**	29,4%	12,4%	39,9%	18,4%
1.	Kesetaraan warga negara	33,9%	11,2%	36,2%	18,8%
2.	Penegakan hukum	24,9%	11,0%	39,1%	24,9%
3.	Persamaan hak terhadap keadilan	25,0%	16,0%	43,5%	15,4%
4.	HAM universal	33,7%	11,2%	40,6%	14,4%
B.	**REPRESENTASI**	12,9%	20,2%	44,4%	22,5%
5.	Representasi politik demokratis	12,2%	10,0%	32,8%	45,0%
6.	Partisipasi warga negara	10,9%	18,3%	51,3%	19,5%
7.	Saluran terlembaga untuk representasi berbasis isu dan kepentingan	7,6%	40,2%	33,5%	18,7%
8.	Demokrasi lokal	14,3%	11,9%	55,2%	18,6%
9.	Kontrol demokratis atas instrumen koersif	19,3%	20,5%	49,2%	11,0%
C.	**TATA KELOLA**	18,6%	18,6%	50,4%	12,4%
10.	Tata kelola yang transparan, akuntabel dan tak memihak	14,6%	18,0%	55,7%	11,8%
11.	Independensi pemerintah dalam membuat dan menjalankan keputusan	22,7%	19,3%	45,0%	13,0%
D.	**KEBEBASAN SIPIL**	16,9%	22,5%	51,8%	8,9%
12.	Kebebasan dan persamaan kesempatan untuk terlibat dalam wacana publik	20,2%	11,3%	60,2%	8,3%
13.	Kebebasan untuk mengorganisir diri	13,5%	33,7%	43,4%	9,4%

Semakin Liberal, Semakin tidak Demokratis

Temuan-temuan di atas secara umum memberi gambaran cukup positif tehadap evaluasi kinerja tata aturan dan regulasi dalam proses demokratisasi di Indonesia saat ini. Meskipun indikator-indikator ini membawa perkembangan baik, tata aturan dan regulasi yang mengatur kebebasan sipil masih menjadi perhatian. Hak-hak minoritas kelompok agama seperti Ahmadiyah dan Syiah, termasuk kebebasan membangun rumah ibadah misalnya masih seringkali dilanggar. Wahid Institute misalnya melaporkan bahwa terdapat 245 kekerassan atas nama kebebasan agama dan keyakinan di tahun 2013 sendiri. Warganegara biasalah, bukan para pemimpin politik, yang bertanggungjawab atas pelanggaran-pelanggaran ini. Para kepala daerah juga terlibat karena dalam banyak kasus saat mereka gagal untuk menindak para pelaku kekerasan. Sebaliknya, mereka malah kerap menyalahkan kelompok minoritas yang dianggap menggaanggu kohesi sosial masyarakat.

Lebih penting lagi, evaluasi umum tersebut menunjukkan kualitas kinerja tata aturan dan regulasi yang berbeda-beda. Hasil survei menunjukan kinerja lembaga satu berbeda dengan yang lainnya. Capaian yang paling impresif adalah lembaga-lembaga yang berkaitan dengan masyarakat sipil. Capaian paling buruk terjadi pada lembaga-lembaga yang berkaitan dengan tata kelola pemerintahan. Sementara, evaluasi terhadap kualitas tata aturan dan lembaga yang berkaitan dengan kewarganegaraan dan representasi berada di tengah-tengah, di antara dua posisi capaian di atas (lihat tabel 3.1).

Pola ini terulang kembali dalam hal kualitas lembaga-lembaga demokrasi. Sejak tahun saat pilkada pertama kali dilakukan, lembaga-lembaga yang berhubungan dengan

pembentukan masyarakat sipil aktif sudah banyak mengalami perbaikan. Sebaliknya, tidak ada perubahan signifikan dalam lembaga-lembaga yang berhubungan dengan tata kelola pemerintahan. Sebagian besar informan malah yakin bahwa tata aturan dan regulasi yang berhubungan dengan tata kelola pemerintahan berjalan semakin buruk. Sementara itu, kualitas perbaikan lembaga-lembaga yang berhubungan dengan kewarganegaraan dan representasi berada di tengah-tengah.

Berdasarkan variasi temuan di atas, bab ini berargumen bahwa proses demokratisasi tampaknya bias terhadap lembaga-lembaga yang berhubungan dengan masyarakat sipil dan kewarganegaraan. Dua kategori tata aturan dan regulasi ini sangat terkait dengan nilai-nilai dan norma-norma liberal. Sementara dua kategori yang lain, yakni tata kelola pemerintahan dan representasi, yang sangat berhubungan dengan gagasan pelibatan rakyat dalam proses-proses politik, justru malah tertinggal. Dengan demikian, tampaknya proses demokratisasi di Indonesia mengarah semakin liberal daripada demokratis, khususnya untuk dua kelompok isu di atas.

Dengan kecenderungan ini, Indonesia kerap dipandang sebagai contoh terbaik bagi proses liberalisasi politik. Sejak jatuhnya Soeharto, hak-hak dasar seperti kebebasan berekspresi, hak untuk berorganisasi, dan hak untuk terlibat dalam perdebatan publik (disamping ada banyak juga pelanggaran) telah semakin membaik. Sebagaimana akan didiskusikan panjang lebar dalam Bab 5 dan Bab 6 negara secara bertahap menjadi semakin terbuka terhadap penetrasi aktor-aktor non-negara, dan jumlah organisasi masyarakat sipil berkembang pesat.

Akan tetapi, keterbukaan tersebut jarang sekali diikuti oleh perbaikan dalam hal tata kelola dan representasi politik.

Sudah menjadi pandangan umum bahwa korupsi, kurangnya akuntabilitas dan legislasi-legislasi yang tidak jelas masih menjadi hambatan bagi demokrasi Indonesia (lihat, misalnya, Aspinall dan Klinken 2011). Sebagaimana akan didiskusikan dalam Bab 5, ketebukaan politik ini disertai dengan elitisme, fragmentasi di kalangan gerakan pro-demokrasi, dan miskinnya kebijakan-kebijakan alternatif. Faktor-faktor ini bertanggung jawab terhadap lemahnya representasi politik di negeri ini.

Perkembangan positif lembaga-lembaga demokrasi dalam proses demokratisasi di Indonesia harus disikapi dengan lebih hati-hati. Perbaikan-perbaikan kelembagaan tersvebut sebenarnya dapat berpotensi untuk membangun demokrasi yang lebih baik di masa mendatang. Akan tetapi, demokrasi di negeri ini sedang menghadapi bahaya stagnasi jika persoalan-persoalan tata kelola pemerintahan dan representasi tidak segera di atasi.

Aktor dan Lembaga

Bab ini berargumen bahwa pengukuran lembaga-lembaga demokrasi harus diikuti oleh evaluasi bagaimana para aktor menggunakan tata aturan dan regulasi. Evaluasi terhadap para aktor ini sangat penting karena mereka yang akan mengubah kualitas lembaga-lembaga formal demokrasi dan untuk memahami hubungan kekuasaan. Dengan memberi perhatian pada dimensi aktor, survei ini tidak mencoba keluar dari diskusi umum yang didominasi oleh catatan baik terkait tata aturan formal dan regulasi. Dengan demikian survei ini juga membuka ruang perdebatan bagi aspek politik dari lembaga-lembaga demokrasi yang justru harus menjadi perhatian utama.

Tabel 3.5. Bagaimana tata aturan dan regulasi informal membatasi atau bertentangan dengan institusi demokrasi formal

NO	TATA ATURAN DAN REGULASI	PERTENTANGAN ASPEK INFORMAL TERHADAP INSTITUSI DEMOKRASI FORMAL			
		INFORMAL DALAM ARTI "NILAI"	INFORMAL DALAM ARTI "ORGANISASI"	INFORMAL DALAM ARTI "MEKANISME"	TIDAK TERKATEGORI
A.	**KEWARGANEGARAAN**	32,2%	9,8%	46,7%	11,4%
1.	Kesetaraan warga negara	41,0%	9,2%	40,7%	9,2%
2.	Penegakan hukum	28,8%	9,0%	50,5%	11,8%
3.	Persamaan hak terhadap keadilan	25,6%	13,2%	48,3%	12,8%
4.	HAM universal	33,3%	7,7%	47,3%	11,7%
B.	**REPRESENTASI**	29,4%	12,7%	42,9%	16,1%
5.	Representasi politik demokratis	38,2%	4,1%	30,7%	27,0%
6.	Partisipasi warga negara	32,7%	10,2%	36,2%	20,9%
7.	Saluran terlembaga untuk representasi berbasis isu dan kepentingan	28,0%	18,0%	42,9%	11,2%
8.	Demokrasi lokal	29,7%	10,4%	50,5%	9,4%
9.	Kontrol demokratis atas instrumen koersif	18,4%	20,9%	54,4%	11,9%
C.	**TATA KELOLA**	21,8%	14,6%	53,1%	10,4%
10.	Tata kelola yang transparan, akuntabel dan tak memihak	20,4%	11,4%	59,2%	9,0%
11.	Independensi pemerintah dalam membuat dan menjalankan keputusan	23,2%	17,8%	47,0%	11,9%
D.	**KEBEBASAN SIPIL**	31,3%	15,2%	44,1%	9,4%
12.	Kebebasan dan persamaan kesempatan untuk terlibat dalam wacana publik	28,8%	12,4%	48,0%	10,7%
13.	Kebebasan untuk mengorganisir diri	33,7%	18,0%	40,1%	8,1%

Secara umum, berkebalikan dengan temuan para pakar politik Indonesia dari kubu pesimistis (lihat, misalnya, Robison dan Hadiz 2004; Winters 2011), survei ini menunjukkan bahwa semua aktor utama cenderung mendukung tata aturan dan regulasi demokrasi, daripada menyalahgunakannya (lihat Tabel 3.6 dan Tabel 3.7). Meskipun para aktor dominan lebih cenderung rentan untuk menyalahgunakan tata aturan dan regulasi demokrasi, sekarang ini seorang akan sangat sulit membayangkan ada seorang politisi, bupati atau aktivis yang berbicara menentang demokrasi. Mereka justru memproklamirkan diri mereka sendiri sebagai seorang yang mendukung, merayakan dan membela lembaga-lembaga demokrasi.

Mungkin saja para aktor utama mengungkapkan dukungan mereka terhadap demokrasi untuk meingkatkan popularitasnya sebagai seorang pendukung demokrasi. Bisa jadi mereka juga berencana mengabaikan tata aturan dan regulasi demokrasi ketika mereka sudah berkuasa. Akan tetapi, meskipun para aktor cenderung akan mengabaikan lembaga-lembaga demokrasi, mereka juga harus melakukannya dengan mengikuti tata aturan permainan yang ada. Meskipun hal ini kedengarannya kontradiktif, faktanya adalah bahwa para aktor utama hanya bisa menyalahgunakan demokrasi melalui tata aturan dan regulasi yang diterima secara luas, yang dalam teori dianggap akan memperkuat demokrasi. Sebagaimana akan dibahas di halaman-halaman selanjutnya, terlepas dari pemahaman dan perilaku mereka sendiri terhadap demokrasi, para aktor utama setidaknya masih harus secara formal dan resmi mengumumkan kepercayaannya dan dukungannya pada lembaga-lembaga demokrasi. Dengan cara tersebut, kita dapat mengatakan bahwa demokrasi telah menjadi 'satu-satunya aturan main yang berlaku' (*The only game in town*).

Tabel 3.6. Bagaimana aktor-aktor utama mempromosikan tata aturan dan regulasi yang sememstinya digunakan untuk mendorong demokrasi

NO	JENIS INSTITUSI DEMOKRASI	AKTOR-AKTOR DOMINAN			AKTOR-AKTOR ALTERNATIF		
		KERAP MEMPRO-MOSIKAN	JARANG MEMPRO-MOSIKAN	TIDAK MEN-JAWAB	KERAP MEMPRO-MOSIKAN	JARANG MEMPRO-MOSIKAN	TIDAK MEN-JAWAB
1.	Kesetaraan warga negara	60,80%	36,80%	2,40%	72,20%	23,40%	4,40%
2.	Penegakan hukum	46,80%	49,30%	3,90%	63,00%	31,60%	5,40%
3.	Persamaan hak terhadap keadilan	47,90%	46,60%	5,40%	68,90%	25,70%	5,50%
4.	HAM universal	45,80%	48,60%	5,60%	65,30%	29,40%	5,30%
5.	Representasi politik demokratis	51,10%	43,20%	5,70%	56,80%	36,10%	7,00%
6.	Partisipasi warga negara	51,60%	43,50%	4,90%	64,90%	28,80%	6,30%
7.	Saluran terlembaga untuk representasi berbasis isu dan kepentingan	46,40%	48,10%	5,50%	58,00%	34,80%	7,20%
8.	Demokrasi lokal	46,60%	47,10%	6,30%	55,00%	37,80%	7,20%
9.	Kontrol demokratis atas instrumen koersif	43,90%	50,20%	5,90%	54,20%	38,60%	7,20%
10.	Tata kelola yang transparan, akuntabel dan tak memihak	48,10%	46,70%	5,20%	62,10%	30,90%	7,00%
11.	Independensi pemerintah dalam membuat dan menjalankan keputusan	39,80%	55,40%	4,80%	49,50%	42,50%	8,00%
12.	Kebebasan dan persamaan kesempatan untuk terlibat dalam wacana publik	39,80%	55,40%	4,80%	59,10%	33,40%	7,50%
13.	Kebebasan untuk mengorganisir diri	51,70%	42,90%	5,40%	61,90%	31,20%	6,90%
	RATA-RATA	**47,72%**	**47,22%**	**5,06%**	**60,84%**	**32,63%**	**6,53%**

Tabel 3.7. Bagaimana aktor-aktor utama menyalahgunakan tata aturan dan regulasi yang semestinya digunakan untuk mendorong demokrasi

NO	JENIS INSTITUSI DEMOKRASI	AKTOR-AKTOR DOMINAN			AKTOR-AKTOR ALTERNATIF		
		KERAP MENYALAH GUNAKAN	JARANG MENYALAH GUNAKAN	TIDAK MENJAWAB	KERAP MENYALAH GUNAKAN	JARANG MENYALAH GUNAKAN	TIDAK MENJAWAB
1	Kesetaraan warga negara	36,50%	58,10%	5,40%	9,70%	85,50%	4,70%
2	Penegakan hukum	28,90%	64,00%	7,10%	6,10%	88,30%	5,60%
3	Persamaan hak terhadap keadilan	33,20%	59,80%	6,90%	7,00%	87,30%	5,70%
4	HAM universal	28,50%	64,50%	7,00%	5,40%	89,30%	5,30%
5	Representasi politik demokratis	33,30%	59,50%	7,20%	10,00%	84,40%	5,60%
6	Partisipasi warga negara	31,70%	61,50%	6,80%	7,10%	87,50%	5,40%
7	Saluran terlembaga untuk representasi berbasis isu dan kepentingan	26,90%	66,10%	7,10%	7,40%	87,20%	5,40%
8	Demokrasi lokal	24,00%	67,70%	8,30%	5,60%	88,70%	5,70%
9	Kontrol demokratis atas instrumen koersif	29,80%	63,40%	6,70%	5,90%	89,20%	4,90%
10	Tata kelola yang transparan, akuntabel dan tak memihak	36,00%	57,70%	6,30%	7,70%	87,20%	5,10%
11	Independensi pemerintah dalam membuat dan menjalankan keputusan	33,50%	60,30%	6,20%	8,20%	86,70%	5,10%
12	Kebebasan dan persamaan kesempatan untuk terlibat dalam wacana publik	20,80%	72,50%	6,60%	4,90%	89,90%	5,20%
13	Kebebasan untuk mengorganisir diri	20,00%	73,50%	6,50%	-	-	-
	RATA-RATA	**29,47%**	**63,74%**	**6,78%**	**7,10%**	**87,60%**	**5,30%**

Temuan survei penting lainnya berkaitan dengan cara-cara bagaimana para aktor utama mendukung tata aturan dan regulasi demokrasi. *Pertama*, hasil survei menunjukkan bagaimana para aktor dominan dan alternatif menempuh pendekatan berbeda dalam mempromosikan dan mendukung lembaga-lembaga demokrasi. Kedua, kelompok aktor ini cenderung mengungkapkan dukungan mereka dengan menyebarkan gagasan-gagasan demokrasi kepada masyarakat luas. Para aktor dominan lebih memilih dan bergantung pada strategi sosialisasi, yakni sebuah kegiatan mirip ceramah oleh pemerintah pada rakyatnya tanpa proses deliberatif. Sementara aktor-aktor alternatif menggunakan proses-proses diseminasi yang beragam dan interaktif serta partisipatif seperti seminar, loka karya dan penggunana media sosial.

Dalam penggunaannya di Bahasa Indonesia, sosialisasi berarti diseminasi publik yang melibatkan pembicara dan pendengar dengan interaksi yang terbatas. Para pemimpin politik kerap terlibat dalam tipe kegiatan ini dengan memberikan ceramah tanpa terlibat dalam diskusi kritis dengan para pendengarnya.[8] Masalahnya adalah bahwa sosialisasi bersifat satu arah dan minim praktek demokrasi. Ia tak lebih seperti propaganda kosong. Sosialisasi tidak pernah bisa memberikan jaminan yang pasti kepada publik bahwa para pemegang kekuasaan akan menjalankan aturan dan nilai dalam lembaga-lembaga demokrasi sebagaimana mestinya. Dengan tambahan liputan media yang luas, strategi ini kemudian hanya menjadi alat untuk meningkatkan popularitas para pemimpin politik dengan mengabaikan dimensi substantif dari demokrasi itu sendiri.

8 Lihat Bab 6.

Model diseminasi publik yang diadopsi oleh para aktor alternatif jauh lebih menjanjikan dalam hal membuka dialog dan perdebatan. Namun demikian, strategi ini sama sekali tidak memadai. Untuk menjamin penerapan lembaga demokrasi yang substantif, para aktor alternatif perlu menyelesaikan permasalahan-permasalahan seperti elitisme dan fragmentasi di kalangan aktivis pro-demokrasi (lihat Bab 5). Tanpa perbaikan berarti dalam area ini, diseminasi publik yang mereka lakukan hanya akan menjadi kendaraan bagi para aktor alternatif untuk meningkatkan popularitas mereka sendiri.

Kedua, survei menunjukkan bahwa para aktor utama mempromosikan kelompok institusi demokrasi yang berbeda-beda. Para aktor dominan cenderung untuk menggunakan institusi demokrasi yang berkaitan dengan kewarganegaraan dan representasi. Sementara para aktor alternatif lebih menggunakan institusi demokrasi yang berkaitan dengan tata kelola pemerintahan dan masyarakat sipil. Survei ini memiliki jangkauan yang terbatas untuk memahami mengapa perbedaan preferensi ini terjadi antara aktor dominan dan aktor alternatif. Namun demikian, dengan mengkombinasikan hasil survei di bagian yang lain, dapat dikatakan bahwa para aktor utama hanya perhatian pada tata aturan dan regulasi yang berhubungan dengan apa yang mereka anggap sebagai areanya sendiri. Alih-alih mempromosikan demokrasi dalam arti yang luas, para aktor utama tampaknya hanya memberi perhatian pada institusi demokrasi yang secara potensial akan menambah daya tawar mereka secara individual, kelompok dan/atau organisasi. Dengan kata lain, para aktor utama mungkin hanya mempromosikan tata aturan dan regulasi demokrasi tertentu yang akan memenuhi kepentingan mereka sendiri.

Perbedaan-perbedaan ini dapat juga dipandang sebagai bentuk dari hubungan yang spesifik antara aktor dominan dan aktor alternatif. Jalur-jalur informal memang tersedia di sana, tetapi komunikasi yang lebih strategis dan terstruktur yang melibatkan upaya-upaya substantif untuk menghubungkan kategori-kategori lembaga demokrasi yang berbeda dan untuk mentransformasikannya menjadi sebuah kerangka tindakan yang logis untuk membangun proses demokrasi masih belum ada. Akibatnya, proses demokratisasi yang berjalan ditandai oleh adanya dua kelompok aktor yang bertarung untuk institusi demokrasi yang berbeda. Para aktor domian, sebagaimana akan dibahas di Bab 4, umumnya berasal dari area negara, sementara para aktor alternatif umumnya merepresentasikan gerakan-gerakan demokrasi. Dengan memperhatikan latar belakang para aktor utama, kecenderungan yang disampaikan diatas mengkonfirmasi berlangsungnya 'politik penetrasi' yang akan didiskusikan di Bab 5 dan 6.

Kesimpulan

Melalui temuan survei di bab ini, secara umum dapat dikatakan bahwa kinerja institusi demokrasi di Indonesia mengalami perbaikan yang signifikan. Keberadaan lembaga-lembaga informal secara potensial mendukung tata aturan dan regulasi demokrasi; namun perhatian pada bagaimana mengintervensi mekanisme informal perlu ditekankan dalam rangka mencegah agar lembaga-lembaga informal seperti adat menjadi penghambat demokrasi. Penting juga dicatat bahwa ke-4 kelompok institusi-institusi demokrasi itu memiliki capaian yang berbeda-beda satu sama lain. Perbaikan institusi demokrasi yang paling mencolok berlangsung pada lembaga-lembaga

demokrasi yang berkaitan dengan pembentukan masyarakat sipil. Perkembangan yang kurang baik terjadi pada lembaga-lembaga demokrasi yang berhubungan dengan tata kelola pemerintahan dan representasi politik. Perbedaan tingkat perbaikan dalam lembaga-lembaga demokrasi ini menghantarkan studi ini pada kesimpulan bahwa negeri ini menjadi jauh lebih liberal namun kurang demokratis.

Hubungan antara aktor dan lembaga juga sangat penting diperhatikan karena ia membongkar bagaimana praktik-praktik aktual beroperasinya lembaga-lembaga demokrasi. Survei bagian ini berkesimpulan bahwa demokrasi telah menjadi mekanisme politik paling dominan. Semua aktor berusaha mempromosikan demokrasi dan harus bermain dengan tata aturan dan regulasi demokrasi yang ada meskipun mereka mungkin berencana untuk menyalahgunakan lembaga-lembaga demokrasi. Akan tetapi, cara bagaimana para aktor mempromosikan lembaga-lembaga demokrasi tidak diikuti dengan upaya untuk menjalankannya sebagaimana mestinya. Tampaknya para aktor, khususnya para aktor dominan, hanya mempromosikan demokrasi dalam rangka meningkatkan popularitas dan demi kepentingannya sendiri. Para aktor domian dan alternatif juga mengambil strategi dan pendekatan berbeda untuk mempromosikan lembaga-lembaga demokrasi. Perbedaan ini berkaitan dengan tujuan dan perhatian mereka masing-masing. Perbedaan strategi ini mengkonfirmasi berlangsungnya 'politik penetrasi' yang akan dijelaskan lebih rinci dalam Bab 5 dan Bab 6. Ω

BAB

4

NEGARA, BISNIS YANG TERKONSOLIDASI, DAN PEMIMPIN POPULIS BARU

Amalinda Savirani

Pengantar

Menurut definisi demokrasi David Beetham, aktor adalah faktor sentral dalam proses-proses politik demokratis. 'Aktor' tidak hanya merujuk pada para elit atau para politisi secara individual yang ada dalam lingkaran dalam kekuasaan, sebagaimana dibayangkan dalam tradisi pluralis. Aktor yang dimaksud dalam pendekatan ini adalah kelompok yang memiliki kapasitas untuk terlibat dalam gerakan-gerakan politik. Oleh karena itu, 'aktor' dapat dipisahkan dari apa yang mereka lakukan, dan pemahaman tentang peran penting mereka dalam demokrasi memerlukan pemeriksaan yang lebih mendalam terkait latar belakang sosial, ideologi, bisnis, dan status ekonominya.

Umumnya, kajian-kajian tentang sejarah demokrasi Indonesia Orde Baru banyak memberi perhatian pada bagaimana para elit mempertahankan otoritas politiknya. Hampir semua kajian tersebut menggunakan perspektif yang berorientasi elit. Kecenderungan ini mengakibatkan munculnya asumsi bahwa para elit mengontrol semua aspek tata kelola pemerintahan, termasuk birokrasi negara (Jackson 1976; King 1979), militer (Crouch 1975), dan gerakan sosial yang termarjinalisasi (Kartodirjo 1984). Beberapa pakar ada yang berfokus pada kondisi-kondisis struktural seperti kapitalisme yang secara langsung berkontribusi pada demokratisasi Indonesia (Mortimer 1986; Robison 1986; Törnquist 1984; Winters 1996), bukan hanya sebatas peran elit.

Di periode pasca-Soeharto, corak kajian-kajian politik Indonesia jauh lebih beragam, dengan berfokus pada lembaga, oligarki, dan gerakan sosial.[9] Robison dan Hadiz (2004) mengajukan tesis oligarki untuk menggambarkan 'sistem pemerintahan yang semua kekuasaan politiknya secara nyata dipegang oleh sejumlah kecil elit politik kaya'. Oligarki didefinisikan sebagai 'kekuasaan anggota kelompok korup yang berkuasa dalam sebuah sistem politik' (2004: 16). Mereka berkesimpulan bahwa Indonesia pasca-Soeharto merupakan rezim oligarki. Dalam kajian yang relatif sama, Mietzner (2012) menggambarkan 'kemandekan demokrasi' dalam politik Indonesia sejak jatuhnya Orde Baru, karena para elit politik anti-reformasi yang melumpuhkan laju demokratisasi. Para elit ini menentang demokratisasi dan secara terbuka melawan organisasi masyarakat sipil yang membela demokrasi.

9 Lihat Bab 1.

Salah satu tantangan lain terhadap tesis oligarki (lihat Ford and Caraway 2014, Ford and Pepinsky 2014, and Aspinall 2015) adalah sebuah kenyataan bahwa politik Indonesia pasca-Orde Baru juga telah membuka kesempatan bagi aktor-aktor politik yang beragam untuk mendorong pelbagai agenda politik, termasuk urusan-urusan publik. Aspinall, misalnya, menyebutkan contoh tentang sistem jaminan kesehatan yang baru dikenalkan, sementara Ford dan Caraway menekankan kasus gerakan dan serikat buruh, sebagai aktor di luar negara yang membantah tesis oligarki elit dalam politik Indonesia.

Bab ini akan mengidentifikasi para aktor dalam demokrasi Indonesia, termasuk posisi-posisi mereka, latar belakang personal, afiliasi politik, dan strategi-strategi yang digunakan untuk mendapatkan legitimasi. Bab ini akan mempertanyakan asumsi-asumsi teoretis tesis oligarki dimana perolehan modal politik berasal dari modal keuangan yang dikontrol oleh sekelompok kecil aktor yang berpengaruh. Hasil survei justru menunjukkan bahwa meskipun akses terhadap modal mungkin melibatkan aktor bisnis dan politik, hal itu tidak secara otomatis akan melahirkan rezim oligarki sebagimana dikhawatirkan para ilmuwan politik. Di bagian akhir, Bab ini juga akan memeriksa strategi-strategi para pemimpin populis untuk mendapatkan dukungan politik dengan cara mendorong agenda-agenda populis dan memeriksa apakah agenda-agenda tersebut diterapkan dalam kebijakan-kebijakan publik yang bermanfaat.

Negara dan Bisnis yang Terkonsolidasi

Dalam rangka memahami para aktor demokrasi, survei bagian ini meminta para informan untuk mengidentifikasi para aktor dominan dan alternatif yang bekerja di sektor-sektor utama

dalam demokratisasi seperti hak tanah, gender, anti-korupsi, lingkungan, ekonomi informal, serta para akor dalam pemerinah pusat, masyarakat politik, sektor bisnis dan masyarakat sipil.[10] Masing-masing informan diminta untuk mengidentifikasi hingga enam belas aktor, yang kemudian menghasilkan angka total 5.801 aktor. Para informan kemudian diminta untuk mengidentifikasi ke-16 aktor tersebut sebagai aktor dominan atau alternatif.

Selanjutnya kami meminta para informan untuk mengerucutkan enam belas nama tersebut menjadi empat nama yang dianggap paling penting: dua untuk aktor dominan dan dua untuk aktor alternatif. Jumlah aktor yang diidentifikasi mencapai 2.222 nama, dan mereka akan dianalisis dalam Bab ini. Beberapa aktor yang dilabeli sebagai aktor alternatif pada masa Orde Baru sudah menjadi aktor dominan pasca-Soeharto, dan mereka kini masuk ke arena negara dan terlibat dalam kekuasaan politik formal. Kami akan menyebut kelompok aktor ini sebagai 'elit baru'. Terakhir, para informan juga diminta untuk mengidentifikasi posisi terakhir yang dipegang oleh masing-masing aktor pada saat survei dilakukan. Terdapat tiga belas posisi yang berhasil mereka identifikasi, sebagaimana ditunjukkan dalam tabel 4.1.

10 Masyarakat politik didefinisikan di sini sebagai 'arena di mana warga negara direpresentasikan dan pandangan mereka diagregasi dan dikelola dalam suatu tuntutan dan proposal kebijakan'. Secara fungsional, konsep ini berbeda dengan masyarakat sipil—yang mungkin didefinisikan sebagai arena di luar negara, masyarakat politik dan pasar—di mana warga negara mengartikulasikan kepentingannya sendiri. Dalam tradisi liberal, masyarakat sipil dipandang tidak terlibat dalam politik. Akan tetapi, di banyak negara, termasuk negara-negara Skandinavia, dan negara berkembang lain seperti Indonesia para anggota masyarakat sipil terlibat dalam politik, seperti ikut serta dalam pemilu. Konidis ini dikenal dengan 'politisasi masyarakat sipil' (c.f. Foley and Edwards, 1996)

Tabel 4.1. Bagaimana aktor-aktor dominan dan alternatif dalam mengelola isu-isu publik

NO	POSISI AKTOR SAAT SURVEI DILAKUKAN	PERSENTASE	
		AKTOR DOMI-NAN	AKTOR ALTER-NATIF
1	Anggota DPR/ DPRD	14,0%	7,3%
2	Anggota partai politik	7,3%	6,1%
3	Pejabat publik terpilih (dalam pemilu)	49,2%	1,9%
4	Birokrat	5,2%	1,7%
5	Anggota Komisioner	0,4%	3,2%
6	Pengusaha	6,4%	4,0%
7	CSOs/aktivis/komite/pemimpin	3,6%	36,5%
8	Adat/klan/etnik/organisasi massa/ pemimpin masyarakat	4,2%	8,5%
9	Pemuka agama	1,8%	7,2%
10	Anggota militer	1,3%	0,2%
11	Anggota milisi	0,1%	0,1%
12	Profesional/akademisi	2,4%	11,7%
	TOTAL	**100,00**	**100,00**

Dari tabel di atas, kita bisa melihat bahwa dari 2000 lebih nama yang berhasil dikumpulkan, profil mereka saat survei dilakukan tersebar dalam posisi-posisi dalam kelompok aparat negara, masyarakat, dan kelompok *intermediary* (partai politik). Secara klasik, yang dianggap sebagai aktor dominan (aktor yang terkait dengan posisi negara), adalah para pejabat publik terpilih dalam pemilu (49,2%). Sementara itu, aktor alternatif oleh informan terbesar ada di posisi aktivis masyarakat sipil (36,5%).

Dibandingkan dengan survei sebelumnya pada tahun 2007, jumlah aktor dominan dalam arena negara (termasuk komisi-komisi dan lembaga representatif) melonjak dari 70% menjadi hampir 75%. Para aktor dominan yang berpengalaman bekerja dengan masyarakat sipil (termasuk aktivis LSM, pemimpin adat, pemimpin

agama, profesional dan akademisi) jumlahnya mencapai 12%, dan mereka yang memiliki latar belakang bisnis mencapai 6,5% —naik sedikit dari survei sebelumnya (6%). Aktor-aktor dari kalangan militer dan milisi persentasenya sangat kecil, yakni 1,4%. Hal ini mengindikasikan bahwa kehadiran sipil semakin kuat dalam politik Indonesia, dan mereka telah menjadi bagian dari aktor dominan. Metamorfosa aktor-aktor ini dari alternatif ke menjadi aktor dominan, semakin penting posisinya dalam arena negara.

Para aktivis LSM menjadi komponen paling dominan dari aktor-aktor altrnatif, disusul oleh pemimpin agama dan masyarakat, kelompok profesional dan akademisi yang mencapai total 73,9% dari aktor-aktor politik. Angka ini menunjukkan lonjakan jumlah aktor alternatif yang luar biasa yang berkontribusi dalam isu-isu publik. Karena para aktor alternatif memiliki pengalaman yang kuat dalam bekerja bersama masyarakat sipil, lonjakan ini juga dapat diartikan sebagai peningkatan fokus pada urusan-urusan publik. Para aktor altenatif dengan keahlian bisnis mencapai 4%, menggambarkan peningkatan jumlah aktor alternatif yang berlatar belakang bisnis.

Sebagian besar aktor dominan yang terlibat dalam arena negara memiliki latar belakang bisnis (lihat tabel 4.2). Survei ini juga menunjukkan bahwa persentasi kelompok bisnis yang terlibat dalam politik melonjak tajam. Hampir 60% pejabat publik yang terpilih memiliki atau menjalankan bisnis berskala besar, 9% memiliki perusahaan skala menengah di luar negeri. Hampir separuh pemimpin politik di negeri ini menjalankan bisnis skala besar, sementara 5% dari mereka mengelola bisnis skala menengah.[11]

Survei 2013 dilakukan di 30 daerah, dan dari jumlah tersebut ada empat belas daerah yang para aktor dominannya memiliki

11 Pola-pola akuisisi bisnis dan sektor bisnis para aktor berada di luar jangkauan studi ini.

Tabel 4.2. Latar belakang aktor-aktor dominan di 30 daerah survei

NO	KABUPATEN/ KOTA	TIGA JAWABAN TERATAS		
		1	2	3
1.	Banda Aceh	Pebisnis	Aktivis LSM	Pemimpin partai
2.	Aceh Selatan	Pemimpin partai	Aktivis LSM	Anggota parlemen
3.	Medan	Pebisnis	Aktivis LSM	Pemimpin partai
4.	Batam	Anggota parlemen	Pebisnis	Pejabat publik terpilih
5.	Kerinci	Pebisnis	Aktivis LSM	Pejabat publik terpilih
6.	Bengkulu	Profesional/ Akademisi	Pebisnis	Pemimpin partai
7.	Lampung Selatan	Pebisnis	Pemimpin adat	Anggota parlemen
8.	Tangerang	Pemimpin adat	Anggota parlemen	Pebisnis
9.	DKI Jakarta	Pebisnis	Pejabat publik terpilih	Pemimpin adat
10.	Bekasi	Pemimpin adat	Anggota parlemen	Aktivis LSM
11.	Bandung	Pebisnis	Pemimpin partai	Aktivis LSM
12.	Pekalongan	Pejabat publik terpilih	Pemuka agama	Anggota parlemen
13.	Batang	Aktivis LSM	Pemimpin adat	Pemimpin partai
14.	Surakarta	Aktivis LSM	Pebisnis	Anggota parlemen
15.	DI Yogyakarta	Pebisnis	Pejabat publik terpilih	Pemimpin adat
16.	Surabaya	Aktivis LSM	Pebisnis	Pejabat publik terpilih
17.	Sidoarjo	Pebisnis	Pejabat publik terpilih	Aktivis LSM
18.	Bandung	Pebisnis	Pemimpin adat	Anggota parlemen
19.	Banjarmasin	Pemimpin partai	Aktivis LSM	Anggota parlemen
20.	Balikpapan	Aktivis LSM	Pemimpin adat	Anggota parlemen
21.	Kutai Kertanegara	Pemimpin partai	Aktivis LSM	Pebisnis
22.	Pontianak	Anggota parlemen	Pebisnis	Pejabat publik terpilih
23.	Manado	Pebisnis	Pemimpin adat	Pejabat publik terpilih
24.	Poso	Pebisnis	Aktivis LSM	Pejabat publik terpilih
25.	Makassar	Pebisnis	Pejabat publik terpilih	Aktivis LSM
26.	Kupang	Aktivis LSM	Pebisnis	Pemimpin partai
27.	Belu	Pemimpin partai	Pebisnis	Pejabat publik terpilih
28.	Ambon	Pebisnis	Profesional/ Akademisi	Pejabat publik terpilih
29.	Ternate	Pebisnis	Pejabat publik terpilih	Aktivis LSM
30.	Jayapura	Community leader/ pemimpin adat	Pebisnis	Aktivis LSM

latar belakang bisnis. Para bekas profesional bisnis ini memegang posisi-posisi seperti pemimpin partai (di empat daerah), aktivis LSM (di empat daerah), anggota parlemen (di dua daerah), Pemimpin komunitas (tiga daerah), pejabat publik terpilih (satu daerah) dan profesional atau akademisi (satu daerah).

Hasil survei ini menunjukkan bahwa profesional bisnis memiliki peranan yang semakin penting dalam politik Indonesia. Salah satu penjelasan untuk kecenderungan ini adalah bahwa karena biaya politik yang sangat mahal untuk mengikuti pemilu, dan karenanya membatasi partisipasi individu-individu yang memiliki modal kecil (Aspinall dan Sukmajati 2015). Peningkatan jumlah jual beli suara di 30 daerah di Indonesia selama pemilu legislatif 2014 sudah dieksplorasi oleh Aspinall dan Sukmajati (2015). Mereka berkesimpulan bahwa dibandingkan dengan pemilu 2009, biaya untuk menjadi calon dari partai politik saat ini jauh semakin mahal. Daftar sistem pemilu terbuka yang diadopsi pada pemilu 2009[12] mungkin juga telah membuka peluang bagi para profesional bisnis untuk menjadi calon-calon legislatif atau kepala daerah.

Elit Baru

Dalam suvei 2013 ini, selain meminta para informan untuk mengidentifikasi 2000 lebih aktor dominan dan alternatif di 30 daerah, informan juga diminta mengidentifikasi afiliasi para

12 Sistem pemilu terbuka atau dikenal sebagai 'sistem proporsional daftar partai' adalah sistem pemilihan yang merupakan bagian dari sistem representasi proposional (*proportional representation*, PR). Dalam sistem ini, pelbagai kandidat dipilih melalui alokasi dalam sebuah daftar elektoral. Masyarakat memilih baik partai dan nama calon dalam partai tersebut. Dengan sistem ini, kompetisi antar calon dari dalam partai sendiri menjadi semakin kuat yang cenderung untuk melahirkan jual beli suara, atau politik uang. Model ini yang kemudian menjadikan demokrasi menjadi kian mahal.

aktor ini dengan kekuatan Orde Baru. Definisi operasional dari 'kekuataan Orde Baru ini adalah apakah mereka sebagai (a) administrator atau birokrat, (b) anggota Partai Golkar[13], (c) anggota lembaga-lembaga koorporatisasi negara seperti Korpri, Karang Taruna, Dharma Wanita, PWI, PGRI atau (d) pengusaha yang secara formal atau informal terkait dengan Orde Baru. Tujuannya adalah untuk membuktikan argumen tentang adanya hubungan kekuasaan dan politik paska-Soeharto dengan para aktor Orde Baru (Robison dan Hadiz 2004).

Hasil survei menunjukkan bahwa, dari sekitar 2000 aktor yang diidentifikasi sebagai aktor dominan, hanya 26% saja yang memiliki kaitan dengan kekuatan politik Orde Baru. Sisanya, yakni 74% adalah aktor baru, dan dalam studi ini disebut sebagai 'elit baru', sebagaimana ditampilkan dalam Tabel 4.3.

Tabel 4.3. Posisi dominan dan afiliasinya dengan Orde Baru

NO	POSISI AKTOR SAAT SURVEI DILAKUKAN	AFILIASI DENGAN ORDE BARU	
		"ELIT LAMA"	"ELIT BARU"
1.	Anggota DPR/ DPRD	21%	79%
2.	Anggota partai politik	34%	66%
3.	Pejabat publik terpilih (dalam pemilu)	38%	62%
4.	Birokrat	17%	83%
5.	Anggota Komisioner	3%	97%
6.	Pengusaha	49%	51%
7.	CSOs/aktivis/komite/pemimpin	3%	97%
8.	Adat/klan/etnik/organisasi massa/ pemimpin masyarakat	16%	84%
9.	Pemuka agama	1%	99%
10.	Anggota militer	7%	93%
11.	Anggota milisi	100%	0%
12.	Profesional/akademisi	4%	96%
	JUMLAH	**26%**	**74%**

13 Partai Golkar merupakan partai penguasa di bawah Orde Baru.

Mengenai sektor-sektor mana para elit baru ini memegang kendali kekuasaan, survei ini menunjukkan bahwa sebagian besar dari mereka, yakni hampir 40%, berada di arena negara. Sementara 60% yang lainnya berada dalam area masyarakat politik (40%), masyarakat ekonomi (30%), dan masyarakat sipil (40%). Kajian ini juga menunjukkan bahwa para 'elit baru' ini mendominasi semua sektor politik, yang membuat para aktor dominan pada masa Orde Baru tidak lagi mendominasi arena pemerintahan (lihat Tabel 4.4).

Fokus bab ini adalah pada individu-individu dan posisi mereka dalam arena politik. Para individu ini hanya mampu memenangkan pemilu dengan bantuan para kolega politiknya. Kekuasaan politik diperoleh melalui upaya bersama, namun kekuasaan itu tidak lagi bergantung pada ada tidaknya ikatan dengan Orde Baru. Hal ini diilustrasikan oleh karakter beberapa pemimpin sekarang ini seperti Walikota Surabaya Tri Risma Harini, Walikota Bandung Ridwan Kamil, Gubernur DKI Basuki Tjahja Purnama, Bupati Bantaeng, Sulawesi Selatan,

Tabel 4.4. Jenis-jenis aktor dominan

NO	JENIS ELIT	NEGARA		MASYA-RAKAT POLITIK		MASYA-RAKAT EKONOMI		MASYA-RAKAT SIPIL	
		F	%	F	%	F	%	F	%
1	Elit-elit lama (berafiliasi dengan Orde Baru)	325	35,3%	191	24,3%	196	35,4%	29	4,28%
2	Elit baru (tidak ada afiliasi dengan Orde Baru)	595	64,7%	559	75,7%	358	64,6%	647	96,7%
	JUMLAH	**920**	**100,0%**	**786**	**100,0%**	**554**	**100,0%**	**676**	**100,0%**

Nurdin Abdullah, dan Bupati Bojonegoro, Jawa Timur, Suyoto. Para pemimpin ini memegang kekuasaan tanpa memiliki kaitan dengan pemerintah korporatisme Orde Baru. Mereka memiliki latar belakang yang cukup beragam seperti birokrat (Tri Risma Harini), arsitek (Ridwan Kamil), aktivis partai Gerindra (Basuki Tjahja Purnama) dan PAN (Suyoto), serta akademisi (Nurdin Abdullah). Meskipun mereka memiliki latar belakang berbeda, mereka merepresentasikan orientasi yang relatif sama yang menganggap kepemimpinan sebagai sebuah kewajiban untuk bekerja demi publik. Mereka juga membangun citra sebagai para pemimpin yang bekerja keras yang mendedikasikan sepenuhnya untuk melayani masyarakat dan tidak terhubung dengan oligarki-oligarki Orde Baru—sentimen-sentimen yang merefleksikan bahwa mereka tidak ada kaitan dengan elit-elit lama dan keberhasilan mereka dalam membangun politik pencitraan demi kredibilitas politiknya (Subono dan Samadhi 2009: 107).

Elit Baru dan Populisme

Meskipun para elit baru membangun citra bahwa mereka merupakan pemimpin yang mendukung demokrasi, mereka masih menunjukkan beberapa perilaku yang sama seperti para elit lama—khususnya dalam pilkada. Hasil survei menunjukkan, misalnya, bahwa para elit baru memegang kekuasaan lebih karena kapasitas individunya daripada kaitannya dengan organisasi masyarakat akar rumput dan gerakan sosial. Mereka juga percaya bahwa dukungan tokoh atau individu yang cenderung menekankan prestasi individual daripada wakil gerakan rakyat. Ini adalah ciri lain dari elit baru. Politisi-politisi individualis ini umumnya tidak memiliki dukungan kuat dari gerakan-gerakan

rakyat. Teknik-teknik kepemimpinan mereka berbeda dengan cara yang ditempuh para elit Orde Baru. Mereka lebih memobilisasi dukungan langsung melalui kharisma dan kebijakan pro-rakyat daripada mengandalkan kelompok-kelompok agama atau organisasi-organisasi sipil.[14]

Bangkitnya politik individualis ini, sebagaimana tercermin dalam hasil survei tentang kapasitas aktor (akan digali secara mendalam Bab 6), juga ditunjukkan dalam strategi-strategi yang dipakai para aktor dominan dan alternatif dalam rangka mengamankan aliansi politiknya. Strategi-strategi tersebut, termasuk patronase, penggalangan dana, media, humas, dan lobi digunakan oleh para aktor dominan (48,2%) dan para aktor alternatif (37,9%). Sementara itu, strategi-strategi untuk membangun dukungan rakyat, seperti kerjasama dengan lembaga-lembaga demokrasi, melibatkan masyarakat dalam pembuatan keputusan, mendukung aksi massa, jejaring, dan kerja-kerja advokasi hanya mencapai 15,83% di kalangan aktor dominan dan 29,19% di kalangan aktor alternatif. Angka-angka ini menunjukkan bagaimana aktor-aktor dominan dan alternaif sama-sama cenderung menghindari strategi-strategi yang memerlukan pengorganisasian massa dan gerakan rakyat.

Pertanyaan-pertanyaan survei tentang bagaimana para aktor mendapatkan otoritas dan legitimasi juga menunjukkan hasil yang sama:[15] sebanyak 20% informan menyebutkan bahwa uang dan otoritas individu yang menjadi faktor penentu, diikuti oleh afiliasi politik dan keterlibatan dalam organisasi-organisasi demokrasi (lihat Tabel 4.5). Para informan menyebutkan bahwa para aktor

14 Kebijakan-kebijakan pro-rakyat yang berpengaruh pada kesejahteraan publik dibahas dalam Bab 2.

15 Mengenai bahasan lengkap tentang kapasitas aktor, lihat Bab 3.

Tabel 4.5. Bagaimana aktor menjadi para pemimpin yang sah

NO	CARA MENJADI PEMIMPIN	AKTOR DOMINAN (%)	AKTOR ALTERNATIF (%)
1.	Aktif dalam organisasi atau lembaga di mana mereka menjadi anggota	7,2	6,5
2.	Memiliki latar belakang pengalaman yang mendukung	3,6	2,2
3.	Memiliki kapasitas, pengetahuan dan keahlian	5,8	10,0
4.	Memiliki pengetahuan tentang konteks sosial, politik dan ekonomi para konstituen	4,0	9,0
5.	Memiliki karakter yang baik	1,6	1,5
6.	Idologi bersama antara aktor dan konstituen	0,2	1,5
7.	Mendapat dukungan dari gerakan rakyat	6,7	14,5
8.	Memiliki otoritas politik (aktor terlibat dalam pembuatan regulasi dan kebijakan)	14,4	6,7
9.	Memiliki jaringan/kontak dalam pemerintahan	5,1	7,2
10.	Menjadi bagian dari patronase dan politik dinasti	3,5	0,5
11.	Memenangkan kompetisi politik (lembaga internal dan eksternal)	3,9	1,0
12.	Memiliki citra positif, popularitas dan rekam jejak yang baik	4,3	10,2
13.	Pertahanan	5,3	4,7
14.	Akses kepada modal ekonomi	20,0	4,0
15.	Mendapatkan kepercayaan dari rakyat	3,7	4,5
16.	Meiliki hubungan dengan klan, etnik, ras, dan pemimpin agama	1,6	1,0
17.	Menggunakan kekerasan (koersif)	0,8	0,7
18.	Popular di media	0,8	3,2
19.	Kapasitas kepemimpinan	2,4	1,7
20.	Lain-lain	1,8	1,2
21.	Tidak tahu	3,2	8,0
	JUMLAH	**100**	**100**

dominan (87,2%) dan aktor alternatif (73,9%), dalam memperoleh legitimasinya sangat tergantung pada kapasitas individu yang dikembangkan melalui partisipasi aktif dalam sebuah organisasi atau lembaga, pengalaman dan keahlian, karakter personal, kekayaan pribadi, otoritas politik, jejaring yang kuat, dan citra positif dalam media massa dan masyarakat umum.

Di antara aktor-aktor dominan, para informan berpendapat bahwa faktor yang paling penting untuk memperoleh legitimasi dan otoritas adalah akses terhadap modal (20%). Evaluasi ini sesuai dengan kenyataan bahwa (a) sebagian besar aktor dominan dalam 30 daerah yang disurvei memiliki latar belakang bisnis dan (b) kekayaan matrial pada masa pasca-Soeharto menjadi semakin penting.

Penggunaan organisasi rakyat untuk mendapat legitimasi oleh aktor-aktor dominan dan alternatif secara historis telah dibatasi terutama untuk memobilisasi suara dalam pemilu. Oleh karenanya, upaya-upaya untuk mendapatkan dukungan rakyat akan cenderung menjadi pragmatis dan jangka pendek. Implikasinya, kerja sama menjadi tidak terlembaga namun bersifat informal dan tidak terlembaga secara kuat. Beberapa kerjasama informal mungkin akan berlanjut setelah kemenangan, seperti antara Jokowi dan LSM di Solo yang memfasilitsai organisasi-organisasi kerakyatan. Namun, karena kerjasama ini bersifat informal, ia tidak bersifat jangka panjang, karena upaya untuk melembagakan dan mengorganisir hubungan antara politik dan masyarakat, berlangsung terbatas.[16]

Menurut survei 2007, keterlibatan organisasi masyarakat akar rumput yang terbatas dalam memobilisasi suara mengurangi

16 Untuk penjelasan lebih jauh lihat Bab 6.

kesempatan untuk membangun aliansi yang kuat antara organisasi dan aktor-aktor dominan. Aliansi yang terbangun skalanya sangat kecil, terdiri atas kelompok aktor-aktor dominan yang tertutup seperti angota parlemen atau aktor-aktor lain dalam sektor pemerintahan (Subono dan Samadhi 2009: 111). Survei 2013 menunjukkan perubahan kecil, dengan terbentuknya aliansi-aliansi yang lebih beragam dan tidak bersifat jangka pendek. Koalisi Jaminan Sosial Nasional (KJSN) menjadi salah satu contoh yang paling jelas.

Menurut survei 2007, aktor-aktor dominan, seperti halnya para aktor alternatif, juga menggunakan strategi-strategi populis untuk menyambungkan dirinya dengan rakyat, termasuk kebijakan pembangunan untuk kesejahteraan. Meskipun strategi ini mungkin berjalan efektif, ia tidak lebih dari upaya politik membangun citra (Subono dan Samadhi 2009), daripada mencerminkan komitmen para pemimpin terhadap kebijakan-kebijakan kesejahteraan publik. Hasil-hasil survei 2013 sekali lagi menunjukkan sebuah pergeseran menuju kepemimpinan populis yang lebih substantif, yakni bukan hanya terbatas pada pencitraan, namun dikonkretkan dalam bentuk kebijakan.

Kesimpulan

Bab ini adalah tentang aktor demokrasi, yang mengikuti argumen Beetham, sangat penting dalam praktek demokrasi. Selain itu, bab ini juga membandingkan hasil survei-survei sebelumnya. Ada beberapa catatan yang menunjukkan kecenderungan kaitan aktor dengan proses demokratisasi di Indonesia. *Pertama*, aktor-aktor yang paling berpengaruh (khususnya para aktor dominan) semakin terkonsolidasi di dalam

arena negara. *Kedua*, para aktor dominan dan alternatif sekarang ini lebih banyak yang memiliki latar belakang bisnis, sehingga semakin menguatkan hubungan antara bisnis dan politik. Hal ini dimungkinkan karena perubahan kelembagaan pemilu, khususnya dalam kaitannya dengan pilkada, dan meningkatnya biaya kampanye dalam dua pemilu terakhir. *Ketiga*, aktor-aktor yang disebut di sini sebagai 'elit baru' memiliki kaitan yang terbatas dengan Orde Baru dan sistem korporatismenya. Dengan demikian, para elit baru ini memiliki gaya kepemimpinan berbeda, jika dibandingkan dengan para 'elit lama'. Mereka cenderung mencari dukungan rakyat dengan menjanjikan kebijakan-kebijakan populis. Strategi ini tidak memerlukan pengorganisasian gerakan rakyat atau dukungan partai politik yang kuat sebagai sebuah instrumen demokrasi, namun lebih bergantung pada upaya-upaya individual pemimpin dan tim suksesnya. Alhasil, upaya-upaya untuk membangun legitimasi dan otoritas melalui organisasi-organisasi masyarakat akar rumput terbilang sangat kecil.

Keempat, hasil survei juga menunjukkan munculnya kecenderungan para aktor dominan untuk menggunakan pendekatan-pndekatan populis, baik selama masa kampanye atau pun setelah mereka berkuasa. Misalnya, mereka cenderung mempromosikan kebijakan-kebijakan yang berkaitan dengan kesejahteraan publik seperti jaminan kesehatan dan pendidikan gratis. Penekanan mereka pada isu kesejahteraan, uniknya, jarang sekali disebabkan oleh tuntutan dari organisasi-organisasi akar rumput—sebagaimana umumnya terjadi di negara-negara lain—tetapi karena tekanan langsung dari para pemilihnya atau para pemimpin itu sendiri yang berambisi untuk mendulang dukungan politik. Ω

BAB

5

LAHIRNYA PASCA-KLIENTELISME DI INDONESIA

Eric Hiariej

Pendahuluan

Peran dan kapasitas aktor dalam demokrasi kurang mendapat perhatian dalam kajian-kajian demokrasi yang menekankan pada bekerjanya faktor-faktor struktural (bandingkan Moore, Jr. 1966; Lipset 1959). Para ilmuwan politik generasi belakangan kerap menggunakan pendekatan 'transisional' untuk memeriksa dampak tokoh dan kelompok-kelompok elit utama—baik di dalam maupun di luar pemerintahan—dalam mempengaruhi demokrasi. Ini adalah pendekatan kedua. Survei ini berdasarkan pada pendekatan ketiga yakni melihat demokrasi dari "kapasitas aktor". Meskipun analisis berbasis aktor masih cukup penting kontribusinya, model pendekatan transisional tidak lagi memadai untuk menjelaskan demokratisasi di Indonesia. Seorang aktor politik, dalam penggunaannya sekarang ini, merujuk pada individu atau kolektif yang memiliki

kapasitas dalam mentransformasikan struktur sosial-politik untuk mempercepat demokratisasi.

Kajian-kajian yang menggunakan pendekatan terakhir, yang memfokuskan pada kapasitas aktor, mengajukan dua argumen tentang kapasitas aktor. Argumen pertama berfokus pada keseimbangan kekuasaan kelas dan pemberdayaan kelas subordinat. Kelompok-kelompok kunci menjaga kelas ini dari hegemoni kelas dominan dan berusaha membangun keseimbangan antara negara dan masyarakat sipil (Rueschemeyer et.al 1992). Argumen kedua, diajukan oleh Olle Törnquist (2013), yang menyatakan bahwa para aktor mentransformasikan struktur sosial politik untuk mempercepat demokratisasi. Pendekatan ini menekankan struktur kekuasaan yang menentukan apa yang bisa dicapai oleh aktor dan bagaimana lembaga-lembaga demokrasi berkembang. Berdasarkan argumen terakhir ini, survei 2013 mengidentifikasi lima area untuk menguji kapasitas yang diperlukan aktor untuk mempromosikan dan menjaga lembaga-lembaga demokrasi: a) kapasitas mempromosikan politik inklusif; b) kapasitas mengakumulasi sumberdaya untuk membangun kekuasaan otoritatif; c) kapasitas mengkonversi isu-isu privat (yang terbatas cakupan dan skalanya) menjadi arena untuk agenda politik (yang luas cakupan dan skalanya); d) kapasitas pengorganisasian dan mobilisasi dukungan; dan e) kapasitas menggunakan cara-cara yang ada untuk partisipasi dan representasi (Törnquist 2013: 56-60).

Berdasarkan asumsi bahwa kapasitas aktor politik sangat penting untuk membangun demokrasi, bab ini berargumen bahwa meskipun demokrasi Indonesia telah menjadi semakin inklusif, aktor-aktor pro-demokrasi telah semakin terlibat dalam politik-politik formal di tingkat negara, dan meskipun ada

sebuah kecenderungan menuju formalisasi diskusi publik seputar isu-isu kesejahteraan, representasi politik yang substantif masih sangat lemah dan, sebagaimana akan dibahas di Bab selanjutnya, demokrasi Indonesia kini menghadapi bahaya untuk mengalami pem-*bypass*-an (pemotongan proses) yang dilakukan oleh elit.

Sejumlah faktor turut mempengaruhi kemandekan demokrasi di Indonesia. *Pertama*, karena tingginya biaya partisipasi politik dan sumber daya ekonomi masih menjadi sumber kekuasaan paling utama bagi aktor-aktor dominan maupun alternatif. Hal ini berakibat pada berlanjutnya oligarki dalam tata pemerintahan. *Kedua*, meskipun politisasi di kalangan aktor alternatif berkembang, mereka masih cukup lemah untuk melakukan percepatan reformasi atau membangun model representasi rakyat yang lebih substantif. Para aktor alternatif masih tercerai berai, miskin strategi-strategi, dan minim tawaran kebijakan alternatif yang substantif, dan cenderung bersifat elitis seperti halnya aktor-aktor dominan. *Ketiga*, demokratisasi belum juga mampu mengakhiri praktik-praktik klientelistik. Demokrasi di Indonesia sedang memasuki sebuah era baru, yang ditandai oleh bangkitnya populisme disertai dengan terus berlangsungnya alokasi kekuasaan yang berbasis patronase.

Populisme, dalam kajian ini, dipahami sebagai sebuah 'gaya politik' daripada sebuah ideologi (lihat Raadt, Holladers, Krouwel 2004). Ini yang membedakan praktek populisme Indonesia dengan populisme di Amerika Latin. Gaya populis di Indonesia ditandai oleh penggunaan istilah 'rakyat' yang diklaim oleh elit sebagai basis tindakan politiknya. Para pemimpin populis sangat tergantung pada wacana anti-kemapanan dan anti-elit, dan juga pada kharisma mereka sendiri untuk memobilisasi dukungan. Ciri praktek populisme di Indonesia yang kedua adalah hubungan

langsung antara pemimpin populis dan rakyat tanpa dimediasi oleh kekuatan apapun. Salah satu istilah yang dikaitkan dengan praktek populisme adalah istilah *blusukan* (Bahasa Jawa), yakni kunjungan tiba-tiba tanpa terencana pada kegiatan rakyat sehari-hari. Ini dapat diterjemahkan secara kasar sebagai 'gaya improvisasi' yang kerap digunakan untuk menggambarkan gaya politik Presiden Joko Widodo selama kampanye sebagai gubernur DKI pada 2012, dan saat pemilihan presiden pada 2014. Blusukan dianggap penanda bahwa seorang pemimpin berwatak populis.

Berdasarkan hasil survei 2013, Bab ini mengeksplorasi lima kecenderungan utama yang menandai bangkitnya apa yang kami sebut sebagai praktek 'pasca-klientelisme' dalam politik Indonesia.[17] Klientelisme politik didefinisikan sebagai praktik relasional yang saling menguntungkan antara patron dan klien. Yang mengikat hubungan keduanya adalah keuntungan material (uang, pekerjaan), dan non-material (akses terhadap layanan-layanan publik) yang bersifat personal yang diberikan oleh patron; dan kesetiaan dan dukungan baik saat pemilu, dari klien.

Untuk bisa menggali praktek 'pasca-klientelisme' tersebut, Bab ini akan memeriksa peran para aktor dominan sebagai kelanjutan dari struktur kekuasaan oligarkis, meskipun ada kecenderungan mereka juga telah mempraktekkan politik yang lebih inklusif. Argumen utama Bab ini adalah bahwa politisasi aktor-aktor alternatif—kebanyakan dari mereka diyakini sebagai aktor pro-demokrasi dan berorientasi aktivis—belum berhasil meningkatkan kapasitas mereka sendiri dalam memperbaiki demokrasi. Hal ini disebabkan oleh tingginya tingkat fragmentasi

17 Untuk pendalaman konsep pasca-klientelisme, lihat Manor (2013).

internal dan miskinnya strategi dan kebijakan alternatif untuk memperbaiki kondisi demokrasi. Para aktor alternatif ini malah cenderung terserap ke dalam pusaran hierarki kuasa elit dan gagal merepresentasikan rakyat. Bagian akhir dalam Bab ini akan menjelaskan kebangkitan populisme yang telah mendukung lahirnya pasca-klientelisme dalam konteks demokratisasi di negeri ini.

Demokrasi Oligarkis dalam Politik yang Lebih Inklusif: Aktor-aktor Dominan

Hasil-hasil survei menunjukkan kecenderungan bahwa demokrasi di Indonesia semakin inklusif. Para informan mengatakan bahwa sekitar 77% aktor-aktor dominan dan 80% aktor-aktor alternatif merupakan orang-orang yang secara politik cukup inklusif, baik di arena masyarakat politik (partai politik) maupun dalam interaksinya dengan aktor-aktor politik lain seperti di arena masyarakat sipil dan masyarakat ekonomi (bisnis).

Data hasil survei berikut cukup untuk menjadi basis argumen. Para aktor dominan menyelesaikan problem eksklusi melalui tindakan persuasif (24,3%), keterlibatan media (7,61%), dan aksesibilitas publik (6,65%). Sementara itu para aktor alternatif cenderung mempolitisasi keterlibatan media (17,89%), aksi massa (15,66%) dan tindakan persuasif (15,48%). Hanya sekitar 5% baik aktor-aktor dominan maupun alternatif yang menggunakan organisasi atau lembaga demokrasi untuk menyelesaikan masalah eksklusi politik. Secara agregat, mereka menggunakan strategi patronase (5,3%), aksi persuasif (24,3%), otoritas (6,6%) dan sebanyak 32% menggunakan strategi-strategi yang mirip dengan bagaimana klientelisme mengatasi eksklusi.

Tabel 5.1. Strategi aktor untuk mengatasi eksklusi

STRATEGI UNTUK MENGATASI EKSKLUSI	AKTOR DOMINAN	AKTOR ALTERNATIF
Patronase	7%	2%
Insentif uang	3%	1%
Keterlibatan media (untuk berbagi informasi dan dialog)	9%	18%
Organisasi dan lembaga domestik	6%	5%
Koersi/intimidasi	2%	0%
Propaganda/kampanye	7%	4%
Aksi persuasif	30%	15%
Otoritas	8%	1%
Aksesibilitas publik	8%	5%
Citra politik	2%	0%
Aksi massa/jaringan	3%	16%
Advokasi, program sipil	2%	4%
Lain-lain	3%	2%
Tidak menjawab	8%	2%
JUMLAH	**100%**	**100%**

Metode-metode ekonomi, politik dan sosial merupakan sarana-sarana utama untuk terlibat dalam masyarakat politik. Metode politik termasuk menjaga hak-hak pemilih. Metode ekonomi misalnya menciptakan regulasi dan prosedur-prosedur bisnis yang kondusif. Sementara metode-metode sosial meliputi topik-topik seperti gerakan masyarakat dalam mempertahankan hak kepemilikan rumah untuk warga miskin di perkotaan. Metode politik merupakan pilihan paling populer di antara aktor-aktor dominan dan alternatif (39,4%). Bila dibandingkan dengan hasil survei sebelumnya pada 2007, terkait dengan derajat inklusifitas aktor dominan dan alternatif, mereka telah lebih inklusif saat ini.

Meskipun ada kecenderungan bahwa politik Indonesia menjadi semakin inklusif, para aktor juga cenderung membatasi interaksi di arena mereka sendiri, baik mereka yang ada dalam domain negara, masyarakat politik, masyarakat sipil, atau sektor bisnis. Hal ini terjadi di antara aktor-aktor dominan, dan sangat berdampak pada representasi sipil. Akibatnya, untuk memperkuat representasi sipil, diperlukan tindakan persuasif yang lebih besar, seperti mobilisasi patronase (di antara aktor-aktor dominan) dan pelibatan media (di antara aktor-aktor alternatif). Dengan kata lain, ada paradoks: di terjadinya peningkatan inklusi politik para aktor (terhadap rakyat) di satu sisi, tapi terjadi pula peningkatan eksklusi antara sesama elemen kemasyarakatan (*polity*). Akibatnya, aktor alternatif gagal mencegah praktik-praktik elitis dan oligarkis dalam demokrasi Indonesia, yang kerap digunakan para aktor dengan modal politik dan ekonomi yang kuat.

Pada kenyataannya, modal ekonomi sangat penting peranannya dalam menjalankan strategi-strategi untuk mendapatkan legitimasi di kalangan aktor-aktor dominan. Hasil survei menunjukkan angka yang cukup tinggi untuk ini yakni 45,5%. Strategi-strategi percobaan ini meliputi pembentukkan aliansi kuat (31,8%), penggunaan strategi koersi (8,9%) dan penggunaan politik pengetahuan (8,3%). Ketika aktor dominan sudah berada di kekuasaan, mereka kerap meningkatkan modal ekonomi mereka dalam rangka memperkuat posisi dominan mereka.

Menurut survei-survei sebelumnya, modal ekonomi ternyata tidak selamanya menjadi strategi paling penting untuk pemenangan pemilu. Di antara masing-masing aktor dominan dan alternatif, faktor ini hanya mencapai 25% dan 23% dalam survei 2003/2004 serta 13% dan 17% dalam survei 2007. Ini

artinya, akses-akses penting kepada sumber daya ekonomi semakin menurun (Subono and Samadhi 2009: 105). Hasil survei tahun 2007, peranan bentuk-bentuk modal yang lain jauh lebih dominan. Modal sosial, misalnya, seperti memiliki jaringan dan aliansi kuat mencapai 28%, dan pengetahuan dan kapasitas mencapai 13%. Sementara modal sosial, politik atau koersi militer mencapai 33%. Survei terakhir dengan sangat jelas menunjukkan penurunan pentingnya faktor koersi. Ini hal yang sangat menggembirakan dalam politik Indonesia.

Strategi-strategi yang ditempuh aktor-aktor alternatif cukup berbeda. Secara historis, strategi-strategi mereka berbeda jauh dengan strategi yang ditempuh para aktor dominan. Sebagai individu yang cenderung membela demokrasi, sebagaimana ditunjukan dalam hasil survei 2013, mereka sedikit tidak bergantung pada uang namun pada pengetahuan (25%) dan modal sosial (52%) sebagai faktor-faktor kunci dalam memperoleh hak untuk berpartisipasi. Terlepas dari ini semua, 15,2% responden dalam survei 2013 mengklaim bahwa modal ekonomi menjadi sumber kekuasaan yang sangat penting. Dalam survei 2007, pengetahuan dianggap sebagai modal terpenting (37%), diikuti oleh modal sosial (32%), kekuasaan massa (21%), dan akses terhadap sumberdaya ekonomi (10%). Data ini menunjukkan bahwa aktor-aktor alternatif kini semakin memerlukan sumber daya ekonomi karena mereka telah lebih mapan dan bertransisi menjadi 'elit baru' (lihat Bab 4).

Sejalan dengan argumen yang dikembangkan di Bab 2, tentang aktor demokrasi, tingginya ketergantungan aktor-aktor dominan dan alternatif pada sumber daya keuangan sangat dipengaruhi oleh mahalnya biaya politik dan jabatan, mobilisasi dukungan, mempromosikan kebijakan, dalam memenangkan

pemilu. Oleh karena itu, politik terus dikontrol oleh sejumlah aktor kecil yang memiliki uang cukup untuk modal pemilu. Akibatnya, sistem oligarki terus bertahan meskipun para elit Orde Baru sudah relatif tidak lagi berkuasa.

Aktor Alternatif yang Terfragmentasi

Berdasarkan survei-survei sebelumnya, aktor-aktor alternatif telah lama mengalami fragmentasi. Fragmentasi tersebut sangat nyata dalam hal strategi-strategi yang digunakan untuk mengorganisir gerakan-gerakan akar rumput (yang cenderung mem-*bypass* saluran-saluran representasi demokrasi), membangun aliansi dengan aktor-aktor lain (yang cenderung menjadi partai mayoritas daripada minoritas), dan memilih isu yang bersifat tunggal daripada strategis (Kariadi 2009: 126-133).

Meskipun sekarang ini banyak aktor-aktor alternatif yang memiliki peran besar dalam politik-politik formal—termasuk yang menjadi anggota parlemen atau yang menjabat dalam kekuatan eksekutif—fragmentasi yang berlangsung terus-menerus telah melemahkan kapasitas mereka untuk memperbaiki kualitas representasi demokrasi. Alih-alih membangun blok politik yang solid (antar anggota parlemen dan aktivis LSM), yang karenanta memerlukan isu bersama lintas sektor (yakni isu strategis), organisasi dan strategi yang kuat, mereka cenderung memprioritaskan metode-metode aksi kolektif untuk menghadap isu-isu populer. Survei 2013 ini mengidentifikasi tiga tipe strategi di kalangan aktor-aktor alternatif yang mengarah pada fragmentasi politik (Samadhi 2015). *Pertama*, aktor-aktor yang terlibat dalam partai-partai politik dan kelompok-kelompok kepentingan khusus cenderung mengandalkan populisme dan modal sosial mereka, namun tidak memiliki koneksi yang memadai

dengan organisasi-organisasi akar rumput. *Kedua*, masyarakat sipil yang terlibat dalam gerakan sosial, yang memiliki hubungan dekat dengan gerakan akar rumput, termasuk serikat-serikat buruh. Gerakan yang memiliki modal sosial yang penting, kerap tidak mampu membuat organisasi politiknya sendiri dan harus berhubungan dengan organisasi-organisasi yang sudah mapan. *Ketiga*, aktor-aktor alternatif yang fokus pada advokasi kini lebih banyak terlibat dalam lobi-lobi politik dan administrasi yang terkait dengan isu-isu khusus seperti HAM. Dengan kata lain, fragmentasi bukan hanya akibat dari strategi-strategi yang beragam namun juga berakar dalam agenda politik mereka yang berorientasi jangka pendek semata. Namun demikian, karena sebagian besar aktor alternatif masuk dalam kategori pertama dan kedua, mereka mungkin akan mengawali metode-metode politik yang tidak terlalu elitis dengan membangun hubungan-hubungan dengan organisasi dan jejaring berbasis akar rumput.

Fragmentasi yang sama di kalangan aktor utama juga cukup jelas digambarkan dalam hasil-hasil survei 2013. Dalam kaitannya dengan penggunaan cara-cara partisipasi dan representasi yang ada, survei menunjukkan hasil-hasil berikut: 25% dari aktor-aktor dominan memilih untuk bergabung dengan negara dan agensi-agensi pemangku kepentingan (*stakeholder*), 18,8% memilih lembaga untuk masyarakat dan organisasi sipil mandiri, dan 17,2% memprioritaskan alat-alat ekskutif untuk kepentingan mereka. Sebaliknya, di kalangan aktor-aktor alternatif 38% dari mereka mengandalkan lembaga-lembaga untuk masyarakat dan organisasi sipil mandiri, 24,2% ikut dengan negara dan agensi pemangku kepentingan serta 15% pada lembaga-lembaga swasta.

Fragmentasi di kalangan aktor-aktor alternatif juga berkaitan dengan kepentingan tertentu dan tipe isu yang mereka advokasi.

Tiga klaster isu terbesar meliputi isu kesejahteraan (32,9%); problem demokrasi termasuk HAM dan pluralisme (21,9%); dan transparansi pemerintahan (14,3%). Hal ini berbeda dengan hasil-hasil survei 2007, dalam mana isu-isu kesejahteraan hanya menjadi perhatian dari 6% di kalangan aktor-aktor alternatif, sedangkan 38%-nya fokus pada isu-isu demokrasi, HAM dan pluralisme, sementara 27% memberi perhatian pada isu-isu tata kelola pemerintahan. Berbeda-bedanya perhatian di antara mereka menjadikan strategi-strategi yang digunakan pun beragam, dan komunikasi antar tiga platform menjadi cukup terbatas. Misalnya, dalam isu-isu besar seperti pemandulan KPK, sikap LSM-LSM yang bekerja dalam area tata kelola pemerintahan cukup dominan terlibat sementara peran LSM yang bekerja pada isu-isu HAM relatif terbatas.

Tabel 5.2. Perhatian utama aktor-aktor dominan dan alternatif

NO	JENIS ISU YANG MENJADI PERHATIAN	AKTOR DOMINAN		AKTOR ALTERNATIF	
		FRE-KUENSI	PER-SENTASE	FRE-KUENSI	PER-SENTASE
1	Isu moral dan etika	37	3,2%	49	4,5%
2	Isu kesejahteraan	459	40,3%	357	32,9%
3	Isu tata kelola pemerintahan	125	11,0%	155	14,3%
4	Isu demokrasi, HAM dan pluralisme	114	10,0%	237	21,9%
5	Isu pembangunan, infrastruktur	72	6,3%	19	1,8%
6	Gabungan pelbagai isu	148	13,0%	134	12,4%
7	Lain-lain	108	9,5%	80	7,4%
8	Tidak diketahui	77	6,8%	53	4,9%
	TOTAL JAWABAN	**1140**	**100,0%**	**1084**	**100,0%**

Baik aktor-aktor dominan dan alternatif menunjukkan cara-cara yang berbeda terkait bagaimana mereka mempromosikan kepentingan. Meskipun keduanya memprioritaskan keterlibatan media (masing-masing 21,5% dan 25,8%), para aktor dominan juga mengandalkan pada masyarakat politik (19,2%) diikuti oleh pemimpin informal (16,9%). Sementara itu, aktor-aktor alternatif memprioritaskan organisasi masyarakat sipil (23%), organisasi berbasis kepentingan (9%), pemimpin informal (13%), dan masyarakat politik (15%). Semua aktor politik cenderung memilih cara-cara keterlibatan politik di arena yang dianggap cukup kuat. Misalnya, aktor-aktor alternatif, kebanyakan dari mereka sebelumnya adalah anggota LSM, juga tergantung pada dukungan LSM ketika mereka berkampanye atau memegang kekuasaan.

Meskipun politik Indonesia menunjukan tantangan yang sama bagi aktor-aktor dominan dan alternatif, kurang dan tidak jelasnya komunikasi antar sektor kerap mengarah pada kompetisi merebut sumber daya daripada melahirkan kolaborasi untuk mengatasi masalah ataupun pembuatan kebijakan. Sebagai contoh, aktor-aktor alternatif dan LSM pendukungnya harus mencari dana untuk membiayai kegiatan-kegiatan mereka melalui lembaga-lembaga donor internasional seperti USAID, AUSAID, Uni Eropa, dll. Di tengah keterbatasan sumber dana tersebut, kompetisi antar aktor alternatif, yang memiliki platform kegiatan serupa, menjadi cukup tinggi. Karena mereka kerap berfokus hanya pada sektor mereka sendiri, akibatnya, mereka seringkali kehilangan kesempatan untuk menggabungkan kekuatan dengan sektor-sektor lainnya untuk mengatasi isu-isu bersama dan berbagi sumber daya. Strategi-strategi jangka pendek semacam ini sering dianggap sebagai upaya mereka untuk sekedar menjual dukungan masyarakat demi mengakses sumber dana dari pada

sebagai isu-isu publik kritis yang akan dimasukkan ke dalam agenda politik.

Fragmentasi merupakan problem yang makin meluas dan politisasi peran-peran aktor alternatif, melalui integrasinya ke dalam arena negara dan kekuatan politik formal, belum mampu memperbaiki karakter fragmentatif dalam gerakan-gerakan pro-demokrasi. Akibatnya, aktor-aktor alternatif dalam politik Indonesia sekarang ini menjadi sangat terpolitisasi, dan terfragmentasi pada saat yang sama. Fragmentasi ini memiliki dampak langsung pada pembuatan kebijakan terkait isu-isu kesejahteraan, seperti pendidikan dan jaminan kesehatan.[18] Isu-isu tersebut diagregasi dengan sangat tidak memadai dan kerap gagal memfasilitasi aktor-aktor di dalam sektor yang sama untuk mendorong isu-isu publik ini menjadi pertimbangan kebijakan. Singkatnya, para aktor cenderung hanya mengkomunikasikan dengan 'kawan-kawan' mereka sendiri daripada dengan kelompok yang lebih luas yang juga memiliki perhatian yang sama.

Contoh-contoh tentang aksi kolektif yang cukup besar, seperti gerakan pro-penguatan KPK pada Oktober 2009 dan Oktober 2012, menunjukkan bahwa fragmentasi politik telah berkurang. Aksi-aksi bersama yang dilakukan lintas sektor untuk melawan korupsi dan menjaga lembaga anti-korupsi ini telah menginspirasi masyarakat yang luas untuk ikut membela KPK. Sejumlah aktor—dari ICW sampai FSPMI menjadikan korupsi sebagai isu strategis dan merebut kesempatan ini untuk mengintegrasikan tujuan-tujuan mereka dan membangun rencana aksi bersama. Namun demikian, aksi-aksi yang sebagian besar bersifat spontan kerap gagal untuk mempengaruhi perubahan kebijakan pada isu-isu besar yang lain.

18 Hal ini telah dibahas dalam Bab 2.

Kampanye massa seperti *Koin untuk Prita* pada 2008 dan 2009 juga mengalami nasib yang sama. Kampanye ini yang juga dikenal sebagai 'Koin untuk Keadilan', merupakan kampanye aksi massa untuk meningkatkan perhatian tentang malpraktek pelayanan kesehatan sektor privat dan untuk membantu membiayai seorang perempuan bernama Prita Mulyasari. Prita telah mengalami malpraktek di Omni International Hospital dan diminta untuk membayar Rp 204.000.000 setelah dianggap melakukan tindakan kriminal pencemaran nama baik setelah mengkomplain direksi rumah sakit tersebut melalui email. Warga negara di seluruh Indonesia kemudian mendonasikan koin untuk isu ini sebagai bentuk solidaritas dan berhasil mengumpulkan lebih dari jumlah denda yang harus ia bayarkan. Akhirnya pihak pengadilan menolak tuntutan dari rumah sakit. Hal ini berarti bahwa dalam jangka pendek tujuan tersebut tercapai. Meskipun kampanye ini berhasil memobilisasi banyak warga dalam satu isu tunggal, gerakan ini bersifat spontan yang sama sekali tidak menghasilkan legislasi untuk mengatasi masalah malpraktek kesehatan. Miskinnya strategi jangka panjang untuk aksi kolektif membuatnya sulit untuk mentansformasikan suatu isu menjadi kebijakan.

Keterbatasan Pilihan Strategi dan aliansi kebijakan alternatif antar Aktor Alternatif

Temuan survei ini menunjukkan bahwa baik masyarakat biasa dan aktor-aktor demokrasi memiliki perhatian dan aspirasi yang sama untuk sebuah negara yang sejahtera. Temuan survei ini juga berargumen bahwa strategi-strategi jangka panjang untuk mengarahkan perhatian ini menjadi aksi kolektif yang melibatkan aktor-aktor politik dan warga negara dari latar belakang beragam

masih belum berkembang. Komite Aksi Jaminan Sosial (KAJS) menjadi salah satu pengecualian, karena ia berhasil melobi dan memenangkan perjuangan mereka untuk penyediaan jaminan kesehatan untuk seluruh bangsa Indonesia (Aspinall 2012). Akan tetapi, bahkan perjuangan mereka pun sulit dilanjutkan untuk membangun aksi-aksi bersama lagi untuk memperjuangkan hak-hak sosial yang lainnya. Tanpa percobaan intelektual dan ideologis, pilihan-pilihan kebijakan kesejahteraan yang substantif akan segera ambruk.

Dalam rangka membangun strategi jangka panjang, para aktor politik telah menjadikan media sebagai alat untuk mengkomunikasikan dan mempromosikan isu-isu kesejahteraan. Mereka berkompetisi untuk jabatan publik atau komisi-komisi. Mereka juga melakukan lobi untuk membangun aliansi politik melalui pengalaman keterlibatan mereka. Isu-isu kesejahteraan saat ini menjadi platform untuk mendapatkan popularitas dan kekuasaan. Dengan demikian, perubahan kebijakan yang dapat memperbaiki pendidikan dan jaminan kesehatan tidak selalu menjadi tujuan utama. Yang terpenting adalah menunjukkan dukungan untuk perbaikan sebagai sebuah cara untuk menjadi aktor politik yang berpengaruh dan memiliki akses untuk sumber daya ekonomi.

Jawaban survei terhadap pertanyaan tentang indikasi keberhasilan para aktor alternatif dan aktor dominan dalam memprioritaskan isu publik dalam agenda politik mereka menunjukkan jawaban yang tidak berbeda antara kedua aktor tersebut, khususnya ketika berkaitan dengan adanya dukungan politik, menduduki jabatan pemerintah atau menjadi anggota parlemen, dan kontribusinya pada wacana publik (Lihat tabel 5.3). Indikator-indikator ini bisa dikatakan bersifat 'klasik'

Tabel 5.3. Indikator-indikator keberhasilan dalam memprioritaskan isu-isu publik

NO.	INDIKATOR KEBERHASILAN	AKTOR DOMINAN (%)	AKTOR ALTERNATIF (%)
1.	Keberadaan media	4	5
2.	Keberadaan wacana publik	8	12
3.	Keterlibatan dalam pemerintahan, parlemen, partai dan/atau agenda gerakan sosial	2	3
4.	Berlangsungnya pembangunan infrastruktur	1	1
5.	Terpilih sebagai pejabat pemerintah atau anggota parlemen	14	14
6.	Pembentukan kebijakan kesejahteraan dan/atau pelaksanaan kebijakan, termasuk pendidikan, jaminan kesehatan, keamanan fisik, pendapatan dan kondisi kerja dll.	7	5
7.	Adanya dukungan politik dan rakyat, pembentukan koalisi	17	16
8.	Praktek *Good governance*	4	3
9.	Keuntungan material/keuangan dan/atau keuntungan sosial politik	4	1
10.	Adanya Aktivitas dan acara-acara publik	2	1
11.	Pembentukan program pembangunan dan ekonomi	4	1
12.	Berlangsungnya perubahan kebijakan	2	2
13.	Adanya regulasi-regulasi baru	6	3
14.	Berlangsungnya pembangunan-perdamaian, persamaan politik, perlindungan HAM, perbaikan kepedulian poilitik, pluralisme dan/atau kebijakan demokratisasi	2	7
15.	Program-program atau kebijakan yang berhasil	5	3
16.	Berlangsungnya kegiatan mempengaruhi proses politik	3	10
17.	Lain-lain	10	9
18.	Gabungan	5	5
	JUMLAH	**100**	**100**

karena masih berorientasi pada tujuan-tujuan jangka pendek, seperti pemenangan pemilu. Dari sini kita melihat bahwa strategi-strategi jangka panjang tidak diprioritaskan dan pilihan kebijakan substantif dalam memprioritas isu publik sangat terbatas. Meskipun demikian, baik aktor-aktor dominan maupun alternatif memiliki pandangan yang sama bahwa terbatasnya dukungan dan kepercayaan dari masyarakat merupakan faktor paling utama kegagalan mereka untuk menjadikan isu-isu publik menjadi produk kebijakan.

Aktor-aktor dominan dan alternatif memiliki pandangan sama bahwa mobilisasi dukungan sangat penting sebagai indikator keberhasilan dalam memobilisasi dan mengorganisasi dukung (Lihat tabel 5.4). Tujuan mobilisasi yang dianggap paling penting adalah memperluas basis dukungan (29% bagi aktor-aktor dominan dan 30,5% bagi aktor-aktor alternatif). Sebanyak 25,6% aktor-aktor dominan menganggap bahwa mendapatkan kekuasaan merupakan indikator penting kedua keberhasilan mobilisasi, diikuti oleh liputan media (14,3%). Sedangkan para aktor alternatif menganggap bahwa liputan media (23,7%) merupakan faktor yang lebih penting daripada jabatan kekuasaan (12,4%). Temuan survei ini sangat menarik terkait dengan aktor-aktor dominan. Pada masa era Soeharto, politik Indonesia kerap ditandai oleh label '*bureaucratic polity*' di mana para pembuat kebijakan, pakar/teknokrat, dan administrator terisolasi dari rakyat. Masyarakat umum tidak terlibat dalam proses-proses politik. Jawaban survei, khususnya terkait aktor dominan, yang menganggap penting dukungan populer terhadap kebijakan mereka, menunjukkan bahwa pola lama telah berubah, dari model *bureaucratic polity* menjadi apa yang disebut sebagai pemerintahan '*bureaucratic populist*'.

Tabel 5.4. Indikator-indikator keberhasilan dalam memobilisasi dan mengorganisasi dukungan

NO	INDIKATOR KEBERHASILAN	AKTOR DOMINAN (%)	AKTOR ALTERNATIF (%)
1	Seringnya kegiatan demonstrasi	0%	2%
2	Adanya jaringan yang kuat dengan partai politik	3%	2%
3	Adanya jaringan dan aliansi personal yang kuat	3%	8%
4	Adanya keterlibatan kolektif dalam pembuatan kebijakan	3%	2%
5	Adanya platform untuk memperoleh perhatian publik dan media	15%	26%
6	Mendapatkan kekuasaan dengan menempati posisi-posisi publik dan politik	28%	14%
7	Adanya organisasi massa yang kuat	3%	2%
8	Adanya dukungan publik yang besar	31%	34%
9	Lain-lain	13%	11%
	JUMLAH	**100%**	**100%**

Aktor-aktor dominan dan alternatif berbeda dalam hal mengidentifikasi sebab-sebab kegagalan kegiatan mobilisasi. Jawaban aktor-aktor dominan terkait faktor-faktor yang menghambat mobilisasi meliputi kurangnya dukungan publik (15,1%), oposisi yang kuat dan berpengaruh (14,7%), atau lemahnya jejaring politik (12,3%). Sementara di kalangan aktor-aktor alternatif, faktor-faktor yang menghambat mobilisasi termasuk disorganisasi jaringan (19,2%), minimnya kapasitas kelembagaan dan personal (17,5%) dan kurangnya dukungan publik (11,3%).

Temuan-temuan ini mengilustrasikan bahwa aktor-aktor dominan memprioritaskan dukungan publik, sementara aktor-aktor alternatif cenderung memberi perhatian lebih pada kapasitas lembaga dan jaringannya. Jawaban aktor dominan ini mirip dengan jawaban sebelumnya yang menunjukkan tren pergeseran *bureaucratic polity* menuju *bureaucratic populist* yang menekankan pentingnya dukungan populer dalam sebuah kebijakan.

Salah satu temuan paling kuat dalam jawaban tentang indikator keberhasilan dalam memobilisasi dan mengorganisasi dukungan adalah yang terkait dengan aktor dominan. Aktor ini lebih memperhatikan bagaimana perolehan kekuasaan melalui peningkatkan popularitas. Kebijakan-kebijakan tentang penyediaan kesejahteraan hanya menjadi penting bila mampu mendongkrak popularitas dan menjamin keberhasilan pencalonan dalam politik elektoral. Dengan demikian, langkah-langkah substantif atau strategi jangka panjang yang mempengaruhi tata kelola terkait isu-isu publik tidak menjadi prioritas. Dukungan rakyat dan pemenangan pemilulah yang menjadi target utama. Singkatnya, cara aktor-aktor dominan dan alternatif dalam memobilisasi dukungan lebih cenderung pragmatis dan bertujuan jangka pendek. Model populis untuk mendapatkan dukungan ini juga dibawa dalam gaya kepemimpinan mereka, sebagaimana akan di bahas di bagian selanjutnya.

Elitisme dan Lemahnya Representasi

Sejak pemilu 2004, saat aktor alternatif di luar negara mulai mengikuti politik elektoral, dan sejak para aktor alternatif menjadi bagian dari masyarakat politik dan negara, para aktor alternatif menjadi semakin terpolitisasi dan mapan. Sebagian dari mereka telah berhasil masuk ke jabatan-jabatan publik

seperti gubernur, bupati atau walikota. Di tengah keberhasilan politik ini, jaringan-jaringan mereka masih terfragmentasi dan strategi serta ideologi mereka masih berorientasi jangka pendek. Meskipun mereka mengklaim mewakili suara rakyat, mereka umumnya membangun jaringan dengan lingkaran dalam mereka saja dan gagal untuk membangun jaringan akar rumput yang lebih substantif, yang meliputi pengorganisasian, pengembangan strategi bersama, dan penggalian kebijakan alternatif. Upaya mereka untuk mempercepat perubahan cenderung kurang mengandalkan pada metode dan proses yang berhubungan dengan representasi demokrasi dan lebih pada otoritas politik mereka sendiri dan media. Dengan demikian, mereka lebih menjadi tokoh publik yang populer dengan menyuarakan tuntutan untuk mempercepat perubahan kebijakan, namun mereka mengabaikan dukungan rakyat untuk upaya-upaya perbaikan tata pemerintahan.

Elitisme semacam itu tercermin dalam hasil survei, khususnya terkait dengan metode-metode yang ditempuh para aktor dominan dan alternatif untuk memobilisasi dan mengorganisasi dukungan (Tabel 5.5). Komitmen terhadap demokrasi dan mobilisasi rakyat dari bawah sangat terbatas. Sejumlah besar aktor-aktor dominan mengandalkan populisme (45,4%) dan kepemimpinan kharismatik (11,8%). Hal serupa juga terjadi di kalangan aktor-aktor alternatif yang juga mengandalkan metode yang sama dengan jumlah masing-masing 30,2% dan 10%. Respon-respon survei yang berkaitan dengan metode mobilisasi berbasis klientelistik menunjukkan bahwa aktor-aktor dominan menawarkan para klien melalui jaringan patronase (12%), menjaga relasi dengan orang-orang berpengaruh (4,2%) dan menggunakan koneksi keluarga (5,7%). Angka-angka ini jauh lebih tinggi dibandingkan dengan aktor-aktor alternatif.

Tabel 5.5. Metode untuk memobilisasi dan mengorganisasi dukungan

NO	Jenis Metode Mobilisasi dan Mengorganisasi	Aktor Dominan (%)	Aktor Alternatif (%)
1	Membangun karakter populis	47%	31%
2	Kepemimpinan berkharisma	12%	10%
3	Klientelisme dan patronase	12%	4%
4	Ekonomi alternatif dan dukungan politik	5%	20%
5	Hubungan dengan orang-orang berpengaruh	4%	6%
6	Koneksi keluarga	6%	2%
7	Jaringan	6%	10%
8	Koordinasi gerakan dan kelompok masyarakat	4%	9%
9	Pengorganisasian dari bawah	3%	8%
	JUMLAH	**100%**	**100%**

Selain metode-metode mobilisasi dan organisasi elitis yang ditampilkan di Tabel 5.6, baik aktor-aktor dominan maupun alternatif juga cenderung menggunakan kemampuan yang mencerminkan pentingnya kepemimpinan, seperti jaringan (14,7%), dukungan organisasi (12,4%), dan membangun citra politisi populis (9,7%). Para informan merespon pertanyaan kami tentang bagaimana cara para aktor memasukkan isu-isu publik ke dalam agenda politik. Sebagaimana terlihat dalam Tabel 5.7, aktor-aktor dominan mengandalkan metode partisipasi aktif dalam partai politik (56,9%) atau organisasi berbasis kepentingan (18,6%). Sementara aktor-aktor alternatif cenderung menggunakan partisipasi aktif dalam organisasi-organisasi berbasis kepentingan (38,6%), diikuti oleh partisipasi dalam partai (19,8%) dan keterlibatan media (16%).

Tabel 5.6. Metode aktor dominan dan alternatif dalam melakukan mobilisasi

NO	JENIS METODE	AKTOR DOMINAN (%)	AKTOR ALTERNATIF (%)
1	Menggunakan kepercayaan dalam organisasi berbasis agama, etnis, klan	3,9%	3,9%
2	Menggunakan media sosial	4,0%	6,9%
3	Melalui organisasi	12,4%	5,0%
4	Melalui isu panas	3,7%	5,0%
5	Memperluas dan menghubungkan rakyat melalui idologi bersama	1,0%	0,5%
6	Membangun koalisi politik	0,4%	0,1%
7	Menyediakan uang atau sumberdaya lain	5,1%	1,6%
8	Membangun dan memobilisasi dukungan elit	2,7%	1,4%
9	Menggunakan karisma dan/ atau citra politik	4,8%	2,9%
10	Menggunakan populisme dan egalitarianisme	9,7%	3,1%
11	Jaringan	14,7%	22,7%
12	Menggunakan cara koersif dan kekerasan	1,3%	0,6%
13	Menggunakan patronase	1,3%	0,2%
14	Advokasi dan pendidikan politik	0,3%	9,9%
15	Lain-lain	27,2%	28,6%
16	Tidak diketahui	7,3%	7,8%
	JUMLAH	**100,0%**	**100,0%**

Tabel 5.7. Metode aktor untuk menjadikan isu sebagai agenda politik

NO	JENIS METODE	AKTOR DOMINAN (%)	AKTOR ALTERNATIF (%)
1.	Aktif dalam partai politik dan menjadikan isu sebagai agenda politik partai	56,9%	19,8%
2.	Aktif dalam organisasi kepentingan	18,6%	38,6%
3.	Membangun stasiun TV/radio	1,8%	1,1%
4.	Menulis artikel di media dan *press briefing*	5,0%	16,0%
5.	Menawarkan dukungan politik	10,3%	5,5%
6.	Membuat petisi	1,0%	5,4%
7.	Melakukan demonstrasi, dan aksi massa	0,6%	7,3%
8.	Bekerja dengan akademisi, universitas, dan lembaga riset	0,3%	0,4%
9.	Melakukan kontak langsung dengan komunitas untuk mendapatkan dukungan, sosialisasi	1,5%	3,4%
10.	Menggunakan birokrasi, regulasi	1,2%	0,2%
11.	Menggunakan jaringan bisnis, sumberdaya ekonomi untuk mempengaruhi	0,0%	0,1%
12.	Lain-lain	0,4%	0,4%
	JUMLAH	**100%**	**100%**

Sebagaimana sebelumnya ditunjukkan, aktor-aktor alternatif menjadi bagian dalam dunia politik praktis dengan bersandarkan pada popularitas mereka sebagai tokoh. Salah satu akibat utama dari kondisi fragmentatif di kalangan aktor-aktor alternatif, yang telah disebutkan di Bab 2, adalah kecenderungan para aktor alternatif bekerja di kelompok yang terbatas. Kecenderungan aktor alternatif untuk menggunakan metode seperti populisme dan patronase dalam memobilisasi dan mengorganisasi dukungan berarti bahwa mereka mengalami kesulitan untuk bekerja secara kolektif, bahkan dalam jejaring aktivis yang sudah terkelola dan terorganisasi. Selain itu, perhatian media lebih cenderung diarahkan untuk membangun peran individual sang tokoh yang dicitrakan sebagai individu idealis yang bertindak demi kepentingan rakyat.

Namun demikian, meskipun mudah diamati, tingkat elitisme tersebut sebenarnya berbeda-beda tingkatannya. Umumnya, aktor-aktor alternatif yang dipetakan dalam survei ini cenderung untuk merepresentasikan kelompok-kelompok elitis. Akan tetapi, ada juga yang sebaliknya: aktor alternatif tersebut yang aktif dalam gerakan-gerakan sosial akar rumput dan gerakan petani yang cenderung mendukung tata pemerintahan yang terbuka, dan kurang memprioritaskan kepemimpinan. Individu-individu tersebut umumnya beroperasi dalam sektor-sektor yang memerlukan dukungan masyarakat luas. Selain itu, ada beberapa tanda yang menunjukkan kecenderungan telah terbangunnya jaringan-jaringan partai politik, dengan kelompok kepentingan dan dikombinasikan dengan gerakan sosial.

Elitisme yang dikombinasikan dengan fragmentasi dan kurangnya strategi serta ideologi yang jangka panjang sangat merugikan representasi rakyat dan melanggengkan tata kelola pemerintahan yang oligarkis. Sayangnya, alih-alih memperbaiki

representasi, banyak aktor alternatif masih menyesuaikan upaya-upaya mereka pada sistem yang ada. Salah satu contoh pentingnya adalah pembentukan komisi-komisi atau badan-badan independen untuk membangun kerjasama antara negara dan para pemangku kepentingan. Lembaga-lembaga ini sangat kecil pengaruhnya untuk perubahan internal karena mereka kerap terdiri atas aktor-aktor yang, pertama-tama, ditunjuk oleh aktor-aktor dominan melalui diskresi mereka sendiri dan, kedua, masih berorientasi 'politik tokoh' yang masih berada di luar partai-partai politik dan parlemen. Akibatnya, mereka tergantung pada dukungan masyarakat sipil—namun jarang sekali dipilih dan terbuka pada organisasi-organisasi tertentu—dan juga jaringan dengan para koleganya di dalam lembaga-lembaga komisi (*auxiliary institutions*). Dengan kata lain, para aktor alternatif yang makin mapan dan terpolitisasi tidak secara otomatis dapat diterjemahkan sebagai perbaikan representasi demokrasi.

Era Pasca-Klientelisme (*Post Clientelism*)

Meskipun banyak argumen yang mengatakan bahwa evolusi politik Indonesia akan mengarah pada demokratisasi, beberapa kajian (misalnya Klinken 2009, Aspinall and Sukmajati 2014) berpandangan bahwa klientelisme masih menjadi penghambat akuntabilitas demokrasi. Hasil survei 2013 menunjukkan kecenderungan politik klientelistik semakin menurun. Meski berada dalam tantangan elitisme dan oligarki, demokrasi Indonesia kini menjadi semakin terbuka dan inklusif, setidaknya dalam proses rekruitmen pemimpin. Hal ini misalnya ditunjukkan oleh hadirnya para aktivis pro-demokrasi dalam jabatan-jabatan publik dan semakin populernya tata pemerintahan populis. Tentu saja politik klientelisme masih penting, sebagaimana ditunjukkan oleh

cara-cara aktor dominan dalam mendapatkan dukungan politik. Juga, karena metode-metode demokratis seperti pengorganisasian dari bawah dan koordinasi kelompok kepentingan belum menjadi prioritas baik bagi aktor-aktor dominan maupun alternatif. Survei ini juga menunjukkan bahwa status seorang kandidat sebagai pemimpin politik yang otoritatif dan efektif tergantung pada sumberdaya ekonomi dan jaringan kuat yang mereka miliki. Meskipun strategi-strategi tersebut tidak otomatis berdampak pada klientelisme politik, dalam arti umum, uang dan koneksi kerap dimenangkan melalui hubungan-hubungan patron-klien yang saling menguntungkan.

Selain menerapkan strategi klientelisme, baik aktor dominan maupun alternatif sekarang harus memproyeksikan diri mereka sendiri sebagai tokoh publik yang modern yang ditandai oleh watak populis dan karismatik agar dapat memobilisasi dan mengorganisasi dukungan. Para aktor utama tampaknya masih mengkombinasikan metode klientelisme dan populisme pada saat yang sama. Inilah yang kami argumentasikan sebagai "pasca-klientelisme" (Manor 2013).

"Pasca-Klientelisme" merupakan sebuah konsep yang merujuk pada proses distribusi kesejahteraan (barang, uang, dan akses) dari patron pada klien dalam rangka menjaga kesetiaan tapi tidak dilakukan melalui pola lama, melalui jaringan para perantara atau klien, melainkan melalui kebijakan resmi pemerintah di bidang kesejahteraan populis (program jaminan kesehatan, jaminan pendidikan, dan pensiun). Melalui program resmi ini, jangkauan distribusi sumberdaya (dalam bentuk kebijakan) menjadi lebih luas. Dengan cara ini, para politisi akan menjadi lebih populer, dan peluangnya untuk terpilih kembali pada pemilihan umum lebih kuat.

Praktek "Pasca-klientelisme" ini lahir karena para politisi terus menyadari bahwa pola distribusi sumberdaya kepada para klien tidak lagi efektif dalam menjaga kesetiaan. Pola distribusi kesejahteraan melalui model patronase juga tidak menjamin para politisi ini akan terpilih kembali. Para perantara yang ditugasi untuk mendistribusi sumberdaya telah memanfaatkan sumber daya tersebut bagi kepentingan mereka sendiri. Pada saat yang sama, ada dua trend yang tengah berlangsung. Pertama, negara secara umum makin terbuka dan responsif pada kebutuhan warganya yang marjinal; kedua, warga negara makin kritis, makin sadar politik, makin berkurang kesabarannya terhadap para pemimpin mereka, dan menuntut negara untuk bekerja lebih keras dalam menciptakan kesejahteraan. Kedua tren di atas mendorong warga negara biasa, termasuk yang termarjinalkan secara sosial dan ekonomi, untuk menjadi bagian dari gerakan popular (*popular engagement*).

Berlangsungnya "pasca-klientelisme" bukan berarti telah menghilangkan praktek klientelisme. "Pasca-klientelisme" merupakan tambahan dari praktek klientelisme, sehingga kita menyaksikan berlangsungnya dua praktek yang berbeda pada saat yang sama di negara-negara seperti India, Brasil, dan Afrika Selatan.

Baik populisme dan klientelisme merupakan metode elitis yang memiliki kesamaan yakni bersifat *top-down* dalam melibatkan rakyat dalam politik. Strateginya tidak dijalankan melalui jalur organisasi mereka yang berangkat dari bawah (Mouzelis 1998). Populisme jelas berbeda dengan klientelisme. Alih-alih menggunakan pertukaran material demi dukungan politik, seorang pemimpin populis bergantung pada dukungan pemilih yang dikembangkan dengan membangun citra publik

sebagai pemimpin yang dapat berkomunikasi langsung dengan rakyat dan berjanji akan memprioritaskan kebutuhan-kebuuhan mereka. Jadi, metode populis menekankan pada latar belakang personal pemimpin—termasuk kelas, etnik, atau agama—atau berorientasi pada kesejahteraan publik. Pada kenyataannya, cara-cara populis seperti memprioritaskan isu-isu kesejahteraan saat ini menjadi strategi utama di kalangan elit politik Indonesia karena diyakini akan mampu mendongkrak dukungan politik mereka.

Dalam hal menargetkan isu yang akan dijadikan perhatian publik, baik aktor-aktor dominan maupun alternatif memerlukan dukungan yang luas. Sebagaimana diindikasikan dalam Tabel 5.8 kegagalan untuk mendapatkan dukungan dapat berakibat pada ketidakmampuan untuk mengontrol wacana publik.

Adanya jurang pemisah antara populisme dan akuntabilitas demokrasi memang mesti menjadi perhatian. Janji-janji kampanye para calon yang populis dalam rangka mencari dukungan masyarakat tidak berarti bahwa hal itu akan melahirkan kebijakan-kebijakan yang efektif untuk mengatasi persoalan publik. Dengan bangkitnya populisme, para aktor demokrasi juga sudah merasa nyaman dengan kekuasaan dan jabatan yang mereka dapatkan. Untuk memperluas popularitasnya, aktor-aktor populis secara umum berjanji untuk membuat isu-isu publik sebagai bagian dari agenda politik. Namun tujuan utamanya tampaknya hanya untuk mendapatkan kekuasaan dan otoritas politik sebagai pejabat publik daripada memberikan prioritas pada kesehateraan masyarakat (lihat lagi tabel 5.2 dan 5.3 di atas). Hal ini sangat jelas di kalangan aktor dominan, yang cenderung membangun jejaring dengan agensi-agensi yang juga memiliki kekuasaan dan otoritas, daripada langsung dengan para konstituen.

Tabel 5.8. Sebab-sebab kegagalan untuk mengontrol wacana publik

NO.	PENYEBAB KEGAGALAN	AKTOR DOMINAN (%)	AKTOR ALTERNATIF (%)
1.	Komersialisasi dan fragmentasi media	0%	2%
2.	Elit yang mempertahankan kekuasaan	1%	11%
3.	Pendidikan yang buruk	4%	4%
4.	Kekhawatiran publik	0%	0%
5.	Kurang dukungan publik, partai atau institusional	28%	19%
6.	Lembaga yang tidak tidak berjalan, lemah, atau kerangka kelembagaan yang yang tidak berfungsi	8%	5%
7.	Apatisme politik	1%	2%
8.	Kurangnya kesadaran publik karena komunikasi yangg buruk atau tidak adanya jaringan sosial dan politik	3%	4%
9.	Prasangka berdasarkan latarbelakang personal (etnis, atau agama)	2%	1%
10.	Konflik kepentingan	3%	2%
11.	Kurangnya sumberdaya ekonomi, sosial dan politik	4%	13%
12.	Kebangkitan demokrasi, kesadaran politik dan inklusivitas politik	5%	1%
13.	Konflik politik	9%	5%
14.	Kapasitas yang buruk	5%	4%
15.	Skandal politik karena korupsi atau penyalahgunaan kekuasaan	3%	2%
16.	Strategi dan tantangan komunikasi publik	2%	4%
17.	Lain-lain	13%	8%
18.	Gabungan	10%	10%
	JUMLAH	100%	100%

Meskipun survei menunjukkan beberapa pengecualian, khususnya terkait dengan regulasi-regulasi baru, kebijakan dan program-program pembangunan mencerminkan komitmen pada isu-isu publik, perbaikan kesejahteraan belum menjadi prioritas yang utama secara sistematik. Justru para kandidat menunjukan kecenderungan pada 'politik berbasis tokoh'—khususnya para aktor dominan yang reputasinya sebagai pemimpin sah dan otoritatif lebih bergantung pada modal ekonomi dan kapasitas kepemimpinan mereka daripada komitmen untuk membangun organisasi yang demokratis. Populisme merupakan gaya politik, dan karenanya, sangat berkaitan dengan 'politik berbasis tokoh' karena ia bergantung pada persepsi publik tentang pemimpin individu yang mengklaim bertindak demi kepentingan publik. Model politik ini dalam bahasa Indonesia dikenal sebagai politik pencitraan, atau politik *branding*, yang mengutamakan pada popularitas individul di media dan wacana publik. Model ini lebih mengutamakan peran seorang humas (*public relations*) untuk membangun dan mempromosikan citra seseorang melalui media dalam rangka mendapatkan dukungan publik.

Sebenarnya, peran aktor-aktor alternatif sangat diharapkan dalam upaya perbaikan demokrasi. Mereka umumnya terdiri atas para aktivis LSM dari berbagai sektor baik di tingkat lokal maupun nasional. Meskipun mereka merupakan tokoh-tokoh kunci dalam memperomosikan isu-isu publik utama, termasuk isu-isu kesejahteraan, para aktivis LSM ini memiliki kapasitas yang terbatas, yang membuat mereka tidak bisa menjadi aktor penting dalam percepatan proses demokratisasi.

Para aktivis ini masih belum bisa mengandalkan pemberdayaan warga negara dan organisasi rakyat untuk mengatasi problem-problem eksklusi dan mobilisasi sumber daya

dan dukungan. Alih-alih membangun tekanan dari bawah melalui sebuah jaringan asosiasi demokratis, para aktivis LSM sangat puas menggunakan media massa dalam menyuarakan isu-isu publik. Selain itu, kontak dan komunikasi dengan para tokoh dan organisasi di luar sektor mereka sendiri masih cukup terbatas. Para aktivis cenderung berbicara pada mereka sendiri berkaitan dengan isu-isu yang justru sangat penting bagi masyarakat umum. Mereka tidak memiliki strategi dan ideologi yang memadai untuk mengusulkan kebijakan-kebijakan alternatif.

Selanjutnya, perbaikan representasi rakyat di negeri ini, sebagaimana sudah dibahas, masih menghadapi tantangan praktik-paktik klientelisme. Akan tetapi, klientalisme sudah tidak lagi menjadi menjadi satu-satunya aturan main yang utama karena para aktor dominan khususnya juga harus menggunakan pelbagai bentuk populisme dalam memobilisasi dan mengorganisir dukungan. Oleh karena itu, diterapkannya lembaga-lembaga liberal di Indonesia belum diikuti oleh demokrasi yang stabil dan substantif yang ditandai oleh kuatnya representasi rakyat. Politik di negeri ini tampaknya sudah memasuki sebuah fase baru yang ditandai oleh fenomena pasca-klientelisme. Ω

BAB 6

MEM-*BYPASS* PROBLEM-PROBLEM DEMOKRATISASI

Willy Purna Samadhi dan Olle Törnquist

Pengantar

Bab ini akan memeriksa dinamika demokratisasi di Indonesia. Sebagian besar pemeriksaan demokrasi menampilkan gambaran yang statis tentang negara dalam periode sejarah tertentu. Dalam bab-bab sebelumnya, sudah dibahas beberapa perbandingan penting dari waktu ke waktu berdasarkan hasil-hasil survei yang kami lakukan sebelumnya. Bab ini masih akan membahas *proses* demokratisasi. Kami akan memeriksa potensi-potensi untuk kemajuan proses demokratisasi dan apa kepentingan, isu dan aktor yang mempengaruhi berlangsungnya proses ini. Dalam pandangan kami, indikator terbaik untuk memeriksa isu ini adalah dengan mengamati karakter strategi yang ditempuh para aktor dan bagaimana mereka

mempengaruhi persolan-persoalan kunci demokratisasi. Sebelum membahas strategi-strategi mereka dan pengaruhnya, kita akan menyampaikan kembali problem-problem demokratisasi yang sudah diidentifikasi dalam survei ini.

Secara singkat, bab-bab sebelumnya telah menunjukkan bahwa problem utama demokratisasi di Indonesia, ironisnya, terletak justru pada karakteristik yang menjadikan Indonesia sebagai contoh negara demokrasi baru di dunia. Karakteristik-karakteristik ini dapat diringkas sebagai berhasilnya membangun pakta kekuasaan antara kelompok konservatif moderat dan reformis untuk melakukan perubahan struktural dan kelembagaan menuju kekebasan politik dan ekonomi, dan membangun lembaga-lembaga demokrasi yang memungkinkan untuk dijalankan aktor-aktor moderat.

Demokrasi seperti di atas memerlukan, *pertama-tama*, pengenalan kebebasan sipil yang radikal dan desentralisasi untuk memotong monopoli ekonomi dan politik selama rezim Orde Baru. Ini memerlukan dikenalkannya kebebasan media dan masyarakat sipil, serta memprioritaskan pemenuhan hak sipil dan politik dan menyelenggarakan pemilu yang relatif adil dan bebas. *Kedua*, kemajuan-kemajuan ini juga ternyata disertai dengan beberapa efek yang problematis. Salah satu yang paling utama adalah depolitisasi beberapa isu, yang pada masa Orde Baru dikontrol oleh presiden dan para politisi dan asisten yang ditunjukkan. Alih-alih pembuatan keputusan terkait isu krusial ini dibuat dengan cara-cara demokratis, isu-isu ini telah diprivatisasi dan dideregulasi. Sementara lembaga-lembaga yudisial dan otoritas teknokratis semakin meningkat.

Konsekuensi lainnya adalah adanya kemunduran dalam reformasi yudisial dan upaya-upaya lain untuk percepatan

penegakkan hukum dan pemberantasan korupsi. Situasi ini membuat para aktor moderat memanipulasi standar-standar demokrasi. Selain itu, perkembangan representasi politik yang substantif telah terganggu oleh bagaimana peraturan pemilu dan dan partai politik yang menguntungkan para elit moderat dan lebih memprioritaskan jaringan dan koneksi-koneksi individual. Akibatnya, upaya-upaya untuk menerapkan tautan demokratis (*democratic linkage*) antara negara dan isu atau organisasi-organisasi kepentingan juga mengalami kemunduran.

Situasi ini tidak hanya mengurangi reprentasi para penguasa otoritarian lama seperti militer, tetapi juga membatasi pengutamaan kepentingan rakyat dan kepedulian yang pernah diekspresikan oleh para aktivis radikal dan pemimpin organisasi buruh di pelbagai gerakan sosial, seperti perjuangan hak tanah, kaum miskin kota, dan hak-hak untuk produksi and hidup layak. Oleh karenanya saat ini menjadi cukup sulit dan bahkan tidak rasional bagi para aktivis dan gerakan untuk fokus kecuali pada aksi kolektif dan pengorganisasian yang luas. Belakangan, berlangsung keterlibatan yang luar biasa antara para aktivis dan masyarakat biasa dalam mengkritisi kinerja pemerintah lokal dan negara. Selain itu, kapasitas ekonomi dan administratif pemerintah lokal yang seharusnya dapat mengimplementasikan reformasi-reformasi tersebut dengan adil juga masih terbatas.

Dengan kata lain, benar bahwa sudah ada sejumlah kemajuan dalam hal kebebasan dan pemilu. Lebih penting lagi kebebasan-kebebasan ini relatif tidak mengganggu stabilitas atau menghambat pertumbuhan ekonomi. Indonesia menjadi eksemplar negara demokrasi liberal. Akan tetapi, selain bahwa warga negara memiliki hak berorganisasi dan bebas menjalankan kegiatannya, perbaikan-perbaikan lebih jauh dalam hal kebebasan

dan HAM mengalami kemandekan. Lebih parah lagi, beberapa kemajuan justru malah mengganggu tata kelola pemerintahan dan dan pengorganisasian kepentingan dan representasi rakyat selain melalui jalur-jalur elit moderat. Usaha-usaha perbaikan memerlukan sebuah fase demokratisasi kedua yang lebih menguntungkan rakyat daripada elit dominan. Usaha ini membutuhkan pelibatan dan representasi kepetingan publik dan perbaikan kapasitas demokrasi negara untuk menjalankan reformasi-reformasi kesejahteraan dan tata kelola pemerintahan.

Bagaimana strategi para aktor menghadapi tantangan-tantangan tersebut? Apa, jika ada, peluang-peluang untuk memajukan demokratisasi? Indikator-indikator utama menunjukkan ramalan yang kurang menjanjikan meskipun ada beberapa tanda menuju kebaikan. Dengan kata lain, persoalan-persoalan utama demokratisasi sebagaimana disampaikan di atas masih belum diatasi. Saat ini, ketimbang mengatasi tantangan demokratisasi, para aktor dominan dan alternatif kerap mengkapitalisasi kebebasan mereka demi menemukan cara-cara untuk mempengaruhi pemerintahan yang tidak selamanya demokratis. Mereka melakukan apa yang mungkin dapat dilabeli sebagai 'politik penetrasi' untuk mendapatkan akses koneksi-koneksi dan sumber daya publik daripada bekerja untuk memperbaiki representasi demokrasi dan tata kelola pemerintahan serta mengembangkan strategi-strategi yang bertujuan untuk reformasi kelembagaan yang menggabungkan antara orientasi kesejahteraan dan pertumbuhan ekonomi.

Studi Kasus dan Hasil Survei

Dasar pikiran yang memandu analisis Bab ini, sebagaimana disebutkan sebelumnya, adalah untuk memahami tujuan dan

strategi para aktor dan memeriksa bagaimana strategi mereka telah menjawab tantangan-tantangan demokrasi. *Pertama*, sejumlah pertanyaan dalam survei menghasilkan pengetahuan tentang strategi-strategi aktor dominan dan bagaimana mereka mempengaruhi proses demokratisasi. *Kedua*, kajian-kajian studi kasus berdasarkan tema juga menjadi sangat diperlukan. Hal ini karena pentingnya prioritas kajian mengenai potensi-potensi perubahan yang berfokus pada aktor-aktor alternatif. Beberapa studi kasus ini telah dilakukan (Budiman dan Törnquist 2001, Prasetyo, Priyono, Törnquist 2003). Kajian-kajian lain dilakukan untuk melengkapi survei-survei demokratisasi yang kami selenggarakan (Priyono dan Nur 2009, Törnquist 2009 dan 2013-2014, Samadhi 2015). Kajian-kajian ini tidak saja memberikan pemahaman tentang percobaan-percoban aktor-aktor alternatif yang cukup mengesankan, tetapi juga menunjukkan tantangan-tantangan yang mereka hadapi. Dengan kajian-kajian ini, ditambah beberapa pengetahuan tambahan yang diperoleh melalui survei 2012, kami sampai pada sejumlah kesimpulan yang akan dibahas dalam Bab ini.

Strategi Aktor Dominan

Data-data yang diperoleh dalam tiga rangkaian survei menunjukkan dengan jelas bahwa aktor-aktor dominan menggunakan strategi-strategi yang lebih komprehensif dan memiliki sumber daya lebih besar daripada aktor-aktor alternatif. Sebagaimana ditunjukkan dalam Bab 5, aktor-aktor dominan jauh lebih mampu melakukan akumulasi sumberdaya kekuasaan ekonomi, sosial dan budaya—termasuk juga melalui koersi—dalam mentransformasikan sumberdaya-sumberdaya ini menjadi otoritas dan legitimasi agar mereka bisa mendominasi arena

politik dan pemerintahan. Aktor-aktor dominan juga memiliki kontak-kontak individu yang berguna dan sangat penting pengaruhnya dalam masyarakat sipil— khususnya yang berkaitan dengan kegiatan-kegiatan masyarakat. Selain itu, mereka juga kerap merekrut aktor-aktor alternatif yang populer ke dalam partai-partai politik dan menggunakan metode-metode kreatif untuk membangun isu dan agenda publik. Mereka juga jauh lebih berhasil daripada aktor alternatif dalam memobilisasi dan mengorganisasi dukungan publik.

Sebagaimana ditunjukan juga dalam Bab 5, strategi-strategi tersebut jarang sekali menghasilkan kebijakan, tujuan dan ideologi yang spesifik yang berkontribusi pada pembangunan ekonomi, sosial dan '*good governance*'. Strategi-strategi aktor dominan juga gagal dalam mempercepat aksi kolektif melalui organisasi-organisasi berbasis isu dan kepentingan. Aktor-aktor ini malah mengutamakan cara mendapatkan akses kepada jabatan-jabatan publik dan sumberdaya melalui program-program sosialisasi melalui media agar dikenal masyarakat, membangun

Tabel 6.1. Strategi aktor dominan untuk mencapai tujuannya

NO	JENIS STRATEGI AKTOR DOMINAN	PERSENTASE
1.	Melakukan program sosialisasi dan terlibat dalam aksi media	16%
2.	Membangun aksi-aksi karismatik dan populis	16%
3.	Membangun jaringan antar-elit dan aliansi	12%
4.	Mendapatkan dukungan dari partai dan parlemen	12%
5.	Menggunakan kekuatan untuk mendapatkan dukungan birokrasi	11%
6.	Lain-lain	33%
	JUMLAH	**100%**

politik populisme, dan membangun jaringan dengan aktor-aktor lain di dalam lingkaran elit untuk mendapatkan posisi-posisi dalam publik.

Strategi-strategi yang ditempuh aktor-aktor dominan tersebut tidak terhalangi oleh proses demokrasi yang berjalan di Indonesia. Selain problem-problem kompetisi elit dan keterbatasan dukungan publik, mereka cukup mampu mengendalikan politik dan pemerintahan tanpa terganggu oleh proses-proses demokratisasi. Tabel 6.2 menunjukan tantangan-tantangan utama mereka menjalankan strategi-strategi.

Efek-efek yang ditimbulkan dari strategi-strategi yang digunakan para aktor dominan ini sebenarnya cukup ambigu. Meskipun mereka menghadapi beberapa tantangan dalam menyesuaikan aturan main dalam sistem demokrasi yang ada mereka melanjutkan fokus mereka pada strategi-strategi untuk melakukan penetrasi ke dalam administrasi pemerintahan dan memperoleh akses terhadap sumberdaya-sumberdaya publik dan kekuasaan. Hal ini berkebalikan dengan kebijakan-kebijakan dan program-program yang berkembang yang mendapatkan dukungan publik dan mempercepat aksi kolektif melalui organisasi-organisasi berbasis isu dan kepentingan.

Strategi-strategi para aktor dominan jarang sekali yang ditujukan untuk mengatasi tantangan-tantangan utama demokrasi yang diidentifikasi dalam survei ini. Lebih dari separuh informan dalam survei ini menyatakan bahwa strategi yang diambil para aktor dominan berdampak negatif bagi demokrasi. Kurang dari sepertiga jawaban yang menyatakan bahwa strategi-strategi tersebut memiliki dampak positif. Begitu juga, sedikit informan yang menyatakan adanya hubungan positif antara strategi aktor dominan dan perbaikan kebijakan untuk melindungi hak-hak

Tabel 6.2. Tantangan demokratisasi yang dihadapi oleh aktor-aktor dominan untuk implementasi strategi

NO	JENIS TANTANGAN UTAMA	PERSENTASE
1.	Oposisi dari parlemen, legislasi yang membebani	3%
2.	Dukungan publik yang tidak memadai	15%
3.	Tekanan dan pengaruh dari sektor bisnis	4%
4.	Kompetisi dan konflik antar-elit	15%
5.	Dukungan birokrasi yang tidak memadai	5%
6.	Oposisi dari LSM dan masyarakat sipil	2%
7.	Kurangnya dukungan ekonomi	3%
8.	Penegakkan hukum yang lemah	2%
9.	Kebencian media, sinisisme, ketidakmampuan mengontrol media	2%
10.	Tantangan geografis	1%
11.	Kapasitas pemimpin yang tidak memadai untuk memonopoli politik	11%
12.	Politik uang dan korupsi	2%
13.	Feodalisme dan patronase, termasuk kesultanan, patriarki, dan politik etnik	5%
14.	Kebijakan yang tidak jelas, tidak stabil dan tidak konsisten	3%
15.	Regenerasi dan perekrutan kader, kesulitan mengidentifikasi orang-orang yang berkomitmen	2%
16.	Tantangan untuk memformulasi porgram dan strategi yang layak	7%
17.	Kurangnya keterlibatan warga negara terdidik dan kelas menengah	7%
18.	Tidak ada tantangan serius	4%
19.	Tidak ketahui	7%
	JUMLAH	**100,0%**

warga negara dan untuk menyediakan layanan publik; dan tidak ada satupun informan yang menyatakan bahwa strategi tersebut memiliki kaitan dengan tujuan pembangunan inklusif.

Strategi Aktor Alternatif

Sebagian besar kelompok oposisi demokratis terhadap rezim Soeharto berasal dari kelompok-kelompok masyarakat mandiri, (terkadang mereke memiliki agenda untuk mempercepat pembangunan alternatif), yang memiliki beragam isu, dan juga yang berasal dari kelompok-kelompok aksi di kalangan mahasiswa dan intelektual. Mereka mendapat dukungan dari kelas-kelas atas yang tidak diuntungkan oleh rezim. Sebagaimana digambarkan oleh Törnquist dan Budiman (2001), aktor-aktor prodemokrasi yang lebih terorganisir juga memainkan peranan penting: mereka tidak hanya mempromosikan kepentingan tertentu tetapi juga menuntut perubahan politik. Beberapa contoh pengorganisasian tersebut meliputi gerakan buruh di Medan, protes melawan rencana pembangunan bendungan Kedung Ombo di Jawa Tengah, gerakan petani di Nipah, Jawa Timur, protes wartawan melawan dibredelnya sejumlah majalah, dan perlawanan terhadap upaya pendudukan kantor PDI.

Para aktivis yang terlibat dalam gerakan ini kehilangan momentum karena mereka dimarjinalisasi dalam proses transisi dari rezim Soeharto menuju era post Soeharto. Dalam proses ini, dibangunlah pakta kekuasaan antara elit moderat yang berujung pada pembentukan lembaga-lembaga dan sistem pemilu yang menguntungkan mereka sendiri. Banyak aktor pro-demokrasi pasca-Soeharto kehilangan kepentingan dalam mencoba untuk membuat sebuah perbedaan dalam 'politik kotor'; dan kekuatan masyarakat sipil justru mengalami kemunduran,

tidak jelas tujuan dan strateginya, dengan basis sosial yang terbatas. Perkembangan ini didokumentasikan dan dianalisis dalam survei awal dan beberapa studi kasus tentang gerakan pro-demokrasi pasca-Soeharto (Prasetyo, Priyono, Törnquist 2003). Salah satu kesimpulan utamanya adalah bahwa para aktor tersebut digambarkan sebagai para 'demokrat yang mengambang' (*floating democracts*).

Hasil-hasil ini dikonfirmasi melalui kajian lanjutan dalam sebuah laporan pada survei demokrasi pertama, yang dilakukan pada 2003-2004 (Priyono, Samadhi, dan Törnquist 2007). Laporan ini menghasilkan rekomendasi para pakar bagi kelompok-kelompok pro-demokrasi untuk '*go politics*'. Publikasi Priyono dan Nur (2009) mendokumentasikan upaya-upaya para kelompok masyarakat sipil dan gerakan terkait yang melakukan kegiatan politik ini. Dengan mendiskusikan isu-isu, kepentingan dan lokasi, para penulis dapat mengidentifikasi dua cara utama bagaimana kelompok-kelompok ini dalam upaya memperluas wilayah pengaruhnya. *Pertama*, mereka menggunakan isu dan kepentingan yang lebih luas daripada sebelumnya dengan membangun koalisi dan aliansi di tingkat lokal. *Kedua*, mereka menyambungkan kelompok-kelompok dari daerah yang berbeda-beda yang memiliki agenda sama dan basis dukungan. Strategi-strategi khas ini meliputi: (i) melanjutkan kerja sebagai sebuah kelompok penekan (*pressure group*), (ii) mendukung para kandidat untuk duduk di kursi parlemen, (iii) bekerja dalam sebuah partai yang mapan, (iv) mencoba membangun sebuah partai alternatif, dan (v) mempengaruhi proses-proses tata pemerintahan (ibid, 83-95).

Berdasarkan wawancara yang cukup mendalam dan mencakup banyak aktivis sepanjang 2006-2007, dan

membandingkan dengan pengalaman-pengalaman internasional, Törnquist (2009) sampai pada kesimpulan sembilan strategi di antara aktor-aktor pro-demokrasi: (1) menggalang kepentingan di kalangan orang-orang yang tertindas dan tereksploitasi; (ii) mengembangkan politik oposisi berdasarkan solidaritas komunitas dan kepedulian antar warga yang termarjinalisasi, (iii) mengupayakan partisipasi politik langsung di kalangan warga negara sebagai sebuah strategi alternatif atas 'politik usang' (*rotten politics*), (iv) mempengaruhi wacana publik termasuk media dengan mengekspos sejumlah protes dan tuntutan (namun tidak terlalu banyak terlibat dalam usulan-usulan alternatif kebijakan), (v) menegosiasikan kontrak-kontrak berbasis isu antara politisi dan aktivis yang menguntungkan tujuan gerakan (vi) mengupayakan pembangunan front politik radikal dalam partai politik arus-utama (*mainstream*), (vii) mencoba membangun partai politik baru berdasarkan kelompok-kelompok multi sektor atau buruh dan komponen gerakan sosial, (viii) berupaya terlibat dalam partai-partai politik di daerah, dan (ix) berjuang untuk membangun partai baru yang lebih ideologis.

Secara umum hasil-hasil dari seluruh strategi di atas masih sangat terbatas. Pada satu sisi, aktivis masyarakat sipil semakin terlibat dalam politik, tetapi mereka umumnya melakukannya dengan basis kerjasama dengan gerakan yang spesifik dan keterlibatan mereka dalam isu yang juga spesifik. Pada sisi yang lain, sejumlah aktivis yang mempertimbangkan untuk membangun partai politik juga gagal karena buruknya pengorganisasian dan keterbatasan sumberdaya. Akibatnya mereka kerap membangun aliansi dengan partai arus-utama atau hanya berada di belakang para politisi alternatif potensial dalam pilkada (dalam pemilihan bupati/walikota atau gubernur).

Hampir dalam semua kasus mereka tidak menjalankan dengan kekuatan basis organisasi mereka sendiri.

Hasil dari survei 2007 (Samadhi dan Warouw 2009) mengkonfirmasi hasil studi kasus di atas dan menekankan perlunya menyelesaikan fragmentasi dan strategi-strategi jangka pendek dengan cara membangun blok politik berdasarkan tujuan bersama dan mengorganisasi tuntutan kelompok masyarakat sipil, gerakan sosial, dan para politisi yang memiliki komitmen kuat. Hal ini harus dikerjakan dengan membangun sebuah arena aksi baru yang menggabungkan masyarakat sipil dan aktivisme partai politik namun dengan dibangunnya sebuah area yang independen di antara kelompok-kelompok masyarakat berbasis isu yang terfragmentasi pada satu sisi dan dengan partai arus-utama yang didominasi para boss dan politisi alternatif yang mengandalkan populisme dan kharisma pada sisi yang lain. Melalui blok politik semacam ini, diharapkan aktor-aktor alternatif akan memperoleh posisi tawar yang memadai untuk melakukan negosiasi dengan partai-partai politik dan para pemimpin polulis, dan pada akhirnya untuk membangun partai mandiri yang benar-benar memiliki akar di masyarakat bawah.

Namun demikian, rekomendasi ini jarang sekali direalisasikan. Para aktivis malah merasionalisasi fokus mereka pada isu-isu dan kepentingan yang spesifik lalu memilih metode yang mereka percaya memiliki kesempatan terbaik untuk membuahkan hasil-hasik positif, seperti lobi, jaringan, dan mempengaruhi opini publik. Oleh karenanya mereka hanya terlibat dalam koalisi sementara dan mereka kerap khawatir dimanfaatkan oleh para koordinator dan operator politik. Implikasinya, aktivis-aktivis ini juga menghadapi masalah dalam memobilisasi sumberdaya yang memadai, yang justru malah

menjadi sebab bagi lahirnya konflik di antara mereka sendiri (seperti dalam kasus Nusa Tenggara Timur; Samadhi 2015). Bagi mereka yang menginginkan untuk fokus pada politik, mereka mengalami kesulitan mengorganisasi blok politik daripada ikut mendukung di belakang dan membangun kesepakatan politik dengan para pemimpin populis di daerah (seperti dalam kasus Jokowi di Solo; Pratikno dan Lay 2013), atau (sebagaimana banyak aktivis masyarakat sipil dan para pemimpin buruh) yang menjadi calon legislatif atau kepala daerah sebagai 'kandidat diaspora' untuk partai politik yang sedikit lebih baik.

Pola ini dibahas dalam kajian lapangan Törnquist (2013-2014), juga dalam kajian Samadhi yang didasarkan pada survei 2013 (Samadhi 2015). Samadhi mengidentifikasi tiga kelompok aktor yang memiliki kapasitas politik dan strategi yang sama. *Pertama,* kelompok yang terdiri dari individu-individu yang bekerja dengan partai politik atau bersama para politisi populis. Pada saat ini, kelompok ini cukup dominan dalam gerakan demokrasi. Para aktivis cenderung menjadi inklusif dan terbuka atas keterlibatan pelbagai partai politik dan tokoh politik. Melalui strategi ini, para aktivis mampu mempengaruhi para aktor penting, mempengaruhi wacana publik, dan meluaskan basis sosial mereka. Namun hubungan-hubungan mereka dengan basis ini kerap tidak terorganisir dan masih mengandalkan pada koneksi-koneksi personal. Selain itu mereka juga menghadapi problem keterbatasan sumber keuangan.

Kelompok aktivis yang *kedua* terdiri atas mereka yang juga dipengaruhi oleh populisme namun mereka cenderung mengasosiasikan diri secara langsung dengan kelompok-kelompok terorganisir seperti organisasi buruh atau asosiasi petani. Mereka mampu memperbaiki representasi berbasis kepentingan yang

cukup terorganisisr dan melakukan aksi-aksi namun mereka kurang bisa bertindak secara independen dalam politik. Mereka hanya melakukannya bersama partai politik lain ataupun para peminpin politik yang simpatik. Kelompok aktivis ketiga—yang terkecil dan paling tidak populis—meliputi kelompok-kelompok aksi atas pelbagai isu seperti HAM, korupsi, lingkungan atau subordinasi perempuan. Mereka berfokus pada membangun jejaring dengan aktor-aktor yang berpandangan sama dan gerakan-gerakan dan dengan mempengaruhi lembaga-lembaga pemerintahan dan birokrasi.

Berkebalikan dengan pengalaman-pengalaman ini, kajian lapangan Törnquist (2013-2014) mengidentifikasi tiga proses struktural baru yang memuluskan jalan bagi terbangunnya aliansi yang luas di belakang tuntutan bersama yang minim gaungnya di dalam arena politik dan kebijakan yang krusial. *Pertama*, proses ini berakar dalam pembangunan neoliberal yang tidak merata dan kenyataan bahwa seiring dengan jumlah pekerja kontrak dan buruh informal yang meningkat, para aktivis buruh harus membangun aliansi dengan aktor-aktor di luar organisasi mereka sendiri. Hal ini karena mereka perlu membela kepentingan buruh, menuntut pekerjaan dan upah yang layak dari pemerintah, dan mendorong pemerintah membangun ekonomi inklusif dengan menciptakan lebih banyak lapangan kerja. *Kedua*, proses ini berlangsung berdasarkan pada kepentingan bersama di kalangan masyarakat kota yang luas (dari masyarakat miskin sampai kaya) untuk mengatasi problem tata kota dengan terlibat dalam proses-proses pembuatan kebijakan untuk penggusuran yang adil, perbaikan layanan publik, dan perjuangan melawan semua jenis korupsi yang berdampak ke semua warga negara—bukan hanya kelas menengah. Di Solo dan Jakarta, misalnya,

proses ini menjadi fondasi bagi kebangkitan Jokowi untuk membangun kebijakan-kebijakan populis dengan membangun kerjasama dengan jaringan-jaringan aktor pendukungnya. *Ketiga*, proses ini berakar dalam semakin meluasnya tuntutan untuk kesejahteraan publik. Sejauh ini tuntutan ini berkaitan dengan isu-isu kesehatan dan pendidikan, namun harapannya di masa mendatang isunya akan lebih komprehensif seperti keamanan sosial, pendidikan anak yang gratis atau bersubsidi, perumahan rakyat, pengangguran, serta mampu mengkombinasikan antara model negara kesejahteraan dan pertumbuhan ekonomi inklusif yang menciptakan lebih banyak lapangan kerja dan, pada akhirnya, pendapatan berbasis pajak.

Ketiga proses tersebut telah menciptakan hasil yang beragam. Proses pertama menjadi yang paling dinamis di wilayah-wilayah industri sekitar Jakarta. Namun demikian, manfaat yang diperoleh buruh yang terorganisir dari aliansi yang luas ini sangat terbatas. Mereka menerima tawaran-tawaran yang sifatnya jangka pendek dari politisi otoriter seperti mantan calon presiden Prabowo Subianto dan para kelompok oligarki di belakangnya. Hal ini menunjukkan pentingnya koordinasi kepentingan buruh yang spesifik dengan menuntut untuk (i) mendorong kebijakan jangka panjang untuk perbaikan kesejahteraan yang mempercepat proses pembangunan ekonomi inklusif dan (ii) mendorong demokrasi berdasarkan representasi, selain melalui mekanisme yang ada seperti pemilu.

Proses kedua tentang menegosiasikan pakta sosial untuk mentransformasikan risiko-risiko kota besar dengan memprioritaskan kepentingan-kepentingan kelas menengah dan bisnis serta cara mereka melibatkan kelas-kelas bawah, buruh, dan kaum miskin kota. Oleh karena itu, jalur-jalur untuk representasi

demokrasi yang terlembaga bagi seluruh warga negara untuk membangun program-program publik yang efisien dan adil juga harus ditambahkan.

Proses yang terakhir tentang membangun sebuah model negara kesejahteraan masih menghadapi problem kurangnya usulan kebiajakan transformatif dan perspektif yang strategis. Sebagaimana disampaikan di atas, ini semua hanya proses yang menunjukkan potensi untuk menggabungkan kepedulian bersama dalam membangun peraturan buruh, pertumbuhan inklusif dengan lapangan kerja yang luas dan pendapatan pajak yang tinggi, perbaikan layanan publik, dan *good governance.* Semua ini sangat diperlukan sebagai prakondisi untuk membangun sebuah model negara kesejahteraan.

Strategi Aktor Alternatif dan Efeknya pada Demokratisasi: Hasil Survei 2013

Survei 2013 menyatakan bahwa aktor-aktor alternatif kehilangan tujuan dan kebijakan yang jelas, khususnya terkait dengan reformasi kesejahteraan, pertumbuhan inklusif, dan pelembagaan representasi demokratis berbasis kepentingan. Tujuan mereka cenderung kurang berorientasi pada reformasi untuk memperbaiki demokrasi dan sistem kesejahteraan universal, namun lebih pada upaya mendapatkan posisi-posisi berpengaruh, sumber daya dan koneksi. Indikator-indikator informan melihat keberhasilan strategi aktor meliputi penguatan posisi dan basis sosial, perbaikan tata kelola pemerintahan, dan peningkatan kesadaran publik. Capaian-capaian ini tentu saja penting, namun strategi mereka masih terbatas pada perbaikan kapasitas gerakan sendiri dan politik penetrasi ke lingkaran pemerintahan daripada membangun politik sosial demokrasi. Strategi-strategi

yang mereka tempuh juga sama dengan para aktor dominan yang tujuan utamanya adalah mendapatkan kekuasaan dan akses pada sumber daya publik. Namun, tentu saja, aktor-aktor dominan jauh lebih berhasil dan kerap menggunakan jalur-jalur korupsi.

Pertanyaan penting dalam hal ini adalah di mana perhatian para aktor alternatif. Ketika para aktivis dan masyarakat biasa jelas mengharapkan kesejahteraan publik (lihat Bab 2), kepercayaan mereka pada kapasitas lembaga-lembaga publik masih rendah. Ironisnya, fokus utama para aktor alternatif hanyalah pada diri mereka sendiri sehingga mereka tidak mencoba menyelesaikan isu-isu melalui perbaikan lembaga-lembaga dan layanan publik tetapi—setidaknya dalam jangka pendek—pada organisasi masyarakat atau bahkan lembaga-lembaga privat (lihat Tabel 6.3). Mereka juga cenderung pragmatis dalam keterlibatan mereka dengan lembaga-lembaga pemerintahan; mereka kempali pada individu atau lembaga yang memiliki kekuasaan dan pengaruh terbesar daripada menuntut perbaikan untuk standar-standar demokrasi demi mencapai hasil yang diharapkan.

Tabel 6.3. Lembaga-lembaga yang ditargetkan oleh aktor alternatif untuk mengatasi problem demokrasi dan mempromosikan kepentingan dan cita-cita

NO	JENIS SALURAN	PERSENTASE
1	Institusi tata kelola swasta	12%
2	Institusi tata kelola sipil	39%
3	Agensi bersama antar-pemangku kepentingan	24%
4	Administrasi sipil dan militer	5%
5	Otoritas pengadilan dan polisi	10%
6	Ekskutif	10%
	JUMLAH	**100%**

Pola yang sama juga terjadi dalam isu mediasi dan representasi. Di kalangan masyarakat biasa dan aktivis, kepercayaan kepada para politisi, partai politik, dan bahwan organisasi kepentingan masih rendah. Akibatnya, aktor-aktor ini kerap mem-*bypass* lembaga-lembaga tersebut untuk mencari representasi langsung dan mediasi alternatif melalui beberapa instrumen, seperti media, LSM, dan pemimpin infirmal. Mereka juga semakin tertarik pada ajakan para politisi untuk ikut serta dalam komisi-komisi pemerintah atau tim ahli, dengan mana mereka dapat memperluas jaringan profesionalnya, membangun koneksi dan akses pada sumber daya (Lihat Tabel 6.4).

Tabel 6.4. Mediator yang didekati oleh aktor-aktor alternatif untuk mengatasi persoalan demokrasi dan mempromosikan kepentingan dan cita-cita

NO	MEDIATOR	PERSENTASE
1	Organisasi masyarakat sipil	23%
2	Media	26%
3	Organisasi berbasis kepentingan dan isu	13%
4	Partisipasi individu/langsung	10%
5	Masyarakat politik	12%
6	Pemimpin infrmal	13%
7	*By pass* representasi demokrasi oleh individu atau kolektif	4%
	Jumlah	**100,0%**

Memang benar bahwa ada kecenderungan di kalangan aktor alternatif untuk masuk kembali ke dalam arena politik formal. Beberapa upaya untuk meluaskan basis sosial dan membangun organisasi berbasis keanggotaan juga sudah diusahakan. Akan tetapi, metode-metode utamanya masih menggunakan jalur advokasi, kampanye, lobi dan menghadiri seminar-seminar. Metode-metode ini masih jauh dari eksodus ke dalam partai

politik. Untungnya, identitas politik tidak menjadi jalan pintas utama untuk mendapatkan kekuasaan dan pengaruh—tuntutan untuk pekerjaan dan kesejahteraan publik masih menjadi agenda utamanya.

Tabel 6.5. Strategi aktor alternatif untuk mencapai tujuan

NO.	JENIS STRATEGI	PERSENTASE
1.	Memperluas basis sosial dan memperbaiki organisasi dan jaringan	24%
2.	Mengakumulasi dan mengaktivasi sumberdaya ekonomi	3%
3.	Mengadvokasi kepentingan rakyat	13%
4.	Kampanye dan aktivitas media	20%
5.	Membangun kapasitas intelektual, penelitian dan pengumpulan data	4%
6.	Mendapatkan dukungan dari partai dan parlemen	6%
7.	Menghadiri seminar dan diskusi publik	3%
8.	Lobi dan komunikasi dengan ekskutif dan tokoh-tokoh berpengaruh	11%
9.	Memasuki partai politik, pemilu	1%
10.	Mobilisasi warga negara	4%
11.	Mendapatkan dukungan melalui kelompok kulturalv, agama dan komunitas	6%
12.	Tidak menjawab/tidak relevan	6%
	JUMLAH	**100%**

Akhirnya, jawaban para informan mengenai apa hambatan kelembagaan dan problem yang dihadapi aktor alternatif ketika mereka mencoba menjalankan strateginya (lihat Tabel 6.6) juga mendukung kesimpulan-kesimpulan sebelumnya. Yakni bahwa para aktor ini kurang mempedulikan tujuan mereka (misalnya dalam hal kebijakan kesejahteraan, tata kelola pemerintahan dan

Tabel 6.6. Tantangan demokratisasi yang dihadapi oleh aktor-aktor alternatif untuk implementasi strategi

NO	JENIS TANTANGAN UTAMA	%
1.	Oposisi dari parlemen dan legislasi yang membebani	2%
2.	Kurangnya dukungan publik	14%
3.	Tekanan dan pengaruh dari sektor bisnis	2%
4.	Kompetisi dan konflik antar elit	4%
5.	Kurangnya dukungan birokrasi dan buruknya administrasi publik	6%
6.	Kurangnya sumberdaya ekonomi	6%
7.	Penegakan hukum yang lemah/buruk	1%
8.	Serangan media, sinisisme, dan ketidakmampuan mengontrol media	2%
9.	Tantangan geografis	1%
10.	Politk monopoli oleh elit dan para pemimpin teralienasi	4%
11.	Politik uang, korupsi	4%
12.	Feodalisme, patronase, termasuk kesultanan, patriarki, dan politik etnik	2%
13.	Kebijakan yang tidak jelas, tidak stabil, dan tidak konsisten	1%
14.	Regenerasi dan rekrutmen kader, kesulitan mengidentifikasi orang-orang yang berkomitmen	4%
15.	Strategi program yang tidak berhasil dan tidak efisien	13%
16.	Keterputusan antara aktor kritis, kelas menengah, warga negara terdidik dalam pembuatan kebijakan politik	3%
17.	Dukungan pemerintahan yang tidak memadai	4%
18.	Kurangnya kepedulian publik tentang pentingnya demokrasi	3%
19.	Diskriminasi	1%
20.	Aksi kriminal, aksi koersif, dan tekanan massa yang anti-demokrasi	3%
21.	Gerakan yang terfragmentasi	6%
22.	Tekanan dari pemerintah	3%
23.	Dukungan politik dan partai yang tidak memadai	1%
24.	Tidak ada tantangan serius	3%
25.	Tidak diketahui	10%
	TOTAL	**100,0%**

representasi rakyat) karena mereka lebih mengutamakan penetrasi ke dalam arena negara untuk mendapatkan akses sumber daya dan akses. Problem-problem yang dihadapi tidak terlalu terkait dengan tantangan utama demokratisasi seperti sistem representasi yang masih buruk atau kapasitas politik yang lemah. Para informan justru menyebutkan miskinnya dukungan rakyat (14%) atau problem dengan program atau strateginya (13%).

Di samping kekurangan-kekurangan ini, para informan juga memberi penilaian positif terhadap aktor-aktor alternatif dan bagaimana strategi mereka memberikan kontribusi pada demokratisasi dibandingkan dengan apa yang dilakukan oleh para aktor dominan. Hanya seperempat informan yang menyatakan bahwa strategi para aktor alternatif memiliki dampak negatif pada demokratisasi. Namun, dampak positif mereka juga tidak cukup besar karena upaya-upaya mereka untuk mengatasi problem utama demokratisasi masih cukup lemah dibandingkan dengan kapasitas mereka untuk mengatasi problem-problem kebebasan publik, HAM, dan partisipasi langsung.

Kesimpulan: Miskinnya Dinamika Demokratisasi

Faktor-faktor dan para aktor yang telah membuat demokratisasi di Indonesia cukup berhasil pada periode awal kini sedang mengalami kemunduran terus menerus. Indonesia memerlukan demokratisasi fase kedua, yang lebih mengutamakan perbaikan tata kelola pemerintahan, perbaikan representasi, dan kapasitas para aktor utama untuk melakukan perubahan. Pertanyaan utama yang masih harus dijawab adalah apakah hal itu mungkin diwujudkan atau tidak. Aktor-aktor dominan kerap mengikuti tata aturan permainan demokrasi namun hanya untuk kepentingan mereka, dan bukan dalam rangka

membangun kebijakan yang ditujukan untuk menyelesaikan problem-problem demokratisasi.

Sementara itu, para aktor alternatif cenderung untuk memajukan demokrasi namun dengan lebih mengutamakan kebebasan seperti hak-hak sipil dan politik. Mereka masih gagal mengatasi tantangan utama demokratisasi. Bahkan dalam beberapa kasus ketika para aktor alternatif mendukung kapasitas politik warga negara biasa, mereka masih belum bisa memberikan prioritas pengorganisasian untuk jangka panjang dan membangun kebijakan-kebijakan transformatif. Tantangan-tantangan dmeokratisasi kerap di-*bypass* dan kecenderungan utamanya kelihatannya hanya menjadi 'politik penetrasi' ke dalam lingkaran pemerintahan untuk mendapatkan akses sumber daya dan koneksi.

Akan tetapi, ada tiga peluang positif. *Pertama*, kepentingan di kalangan buruh yang terorganisir mulai membangun aliansi tambahan. *Kedua*, koalisi yang luas untuk mengatasi krisis tata kelola kota (seperti buruknya layanan publik, monopoli sumber daya dan korupsi). *Ketiga*, kepentingan yang luas dalam kebijakan terkait kesejahteraan yang akan memajukan pembangunan ekonomi inklusif. Tiga kecenderungan ini tentu saja tidak memadai, namun memberikan sebuah basis untuk membangun aliansi yang lebih luas dalam platform gerakan yang dibangun secara bersama dalam sejumlah area kebijakan. Problem terakhir kemudian adalah bahwa metode yang mereka pilih lebih cenderung dengan membangun aliansi dengan para pemimpin populis daripada merebut kesempatan untuk membangun agenda-agenda kebijakan transformatif dan melembagakan saluran-saluran untuk representasi politik yang akan menguatkan pengorganisasian gerakan dan aksi kolektif di kalangan organisasi-organisasi masyarakat sipil. Ω

BAB 7

REKOMENDASI

Amalinda Savirani, Eric Hiariej, Hasrul Hanif, Olle Törnquist, Willy Purna Samadhi

Survei 2013 ini dengan jelas menunjukkan bahwa demokratisasi di Indonesia, yang dianggap sebagai sebuah cerita sukses, mengalami kemandekan. Memang benar bahwa negeri ini telah berhasil mengadopsi sejumlah institusi demokrasi (tata aturan dan regulasi); aktor-aktor pro-demokrasi telah terpolitisasi beberapa tahun belakangan; dan klientelisme tidak lagi menjadi satu-satunya aturan main dalam politik. Selain itu ada juga sejumlah kemajuan terkait kebebasan dan pemilu yang tidak menghambat stabilitas dan pertumbuhan ekonomi. Akhirnya, keberhasilan membangun pakta kekuasaan antara kelompok moderat konservatif dan reformis telah memungkinkan dilakukannya perubahan kelembagaan dan struktural yang mendukung kebebasan politik dan ekonomi.

Namun demikian, kemajuan-kemajuan ini juga disertai dengan sejumlah persoalan yang menghambat perbaikan demokrasi di negeri ini. Lembaga-lembaga demokrasi masih sangat lemah. Selain kemajuan dalam kebebasan dan masyarakat sipil yang aktif, ada sedikit sekali kemajuan dalam institusi demokrasi terkait persamaan politik, tata kelola pemerintahan, dan representasi. Aktor-aktor dominan dan alternatif mendukung lembaga-lembaga demokrasi, namun sepanjang tata aturan dan regulasinya relevan dengan posisi dan kepentingan mereka. Era "pasca-klientelisme" terus menerus ditandai oleh sebuah kombinasi antara patronase, populisme dan perhatian pada karir politik individu, ketimbang perhatian pada kesejahteraan rakyat. Sementara kesejahteraan telah menjadi isu publik utama untuk beberapa lamanya, layanan publik yang semestinya diberikan pemerintah masih tidak efisien atau malah tidak ada. Mereka yang memiliki sumber daya keuangan yang besar malah mengandalkan solusi-solusi berbasis pasar, sedangkan mayoritas rakyat cenderung menggunakan cara-cara masyarakat untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan kesejahteraan mereka. Sementara itu, aktor-aktor alternatif yang semestinya menjadi penyokong utama demokrasi masih cukup lemah. Mereka terfragmentasi, miskin strategi jangka panjang, dan cenderung mengandalkan pada politik penetrasi ke negara daripada politik akar rumput yang terorganisir. Hal ini menandakan kecenderungan baik aktor-aktor dominan maupun alternatif untuk mem-*bypass* demokrasi. Keduanya menggunakan keterbukaan politik yang ada untuk mempengaruhi tata kelola pemerintah melalui 'politik penetrasi' daripada menyelesaikan persoalan-persoalan utama terkait demokratisasi, misalnya penguatan kapasitas organisasi rakyat, tentu saja dengan beberapa pengecualian. Untuk hal ini,

menurut pandangan mereka sendiri, para aktor dominanlah yang lebih berhasil memanfaatkan era demokrasi pasca-Soeharto.

Politisasi masyarakat sipil, yang berlangsung sejak pemilu 2004, yang ditandai dengan para aktivis menjadi calon legislatif, banyak aktor-aktor alternatif yang masuk ke dalam aren negara dan politik arus-utama. Karena terbatasnya organisasi-organisasi independen, keterlibatan mereka dalam pemerintahan dan politik diwujudkan melalui koneksi dengan para aktor politik yang berpikiran terbuka. Dalam prosesnya, aktor-aktor alternatif cenderung dikooptasi oleh kaum oligarki. Dengan kata lain, problem utamanya adalah lemahnya representasi politik dan aksi kolektif.

Survei 2003/2004 menunjukkan beberapa kecenderungan berikut ini:

1. Ada peningkatan signifikan dalam kebebasan politik, namun perbaikan demokrasi masih minim. Dua pertiga lembaga-lembaga demokrasi tidak berjalan dengan baik.
2. Proses demokratisasi menghasilkan bangkitnya representasi semu. Meskipun ada proses pemilu yang bebeas dan adil, pemilu masih memproduksi kandidat-kandidat yang tidak representatif dan responsif dari partai-partai politik dan kadernya.
3. Kelompok oligarki masih memiliki kekuasaan besar dalam politik. Tidak mengherankan meskipun lembaga-lembaga yang awalnya dianggap akan memperbaiki demokrasi liberal dan menjadi aturan main poilitik yang dominan, lembaga-lembaga tersebut umumnya dimanipulasi oleh para elit.
4. Kemunculan para demokrat yang mengambang dan termarjinalisasi. Mereka adalah para aktivis pro-demokrasi yang tidak memiliki basis sosial yang kuat atau organisasi

rakyat yang independen, dan oleh karena itu mereka (a) termarjinalisasi dari negara, bisnis dan tempat kerja, (b) bergantung pada metode-metode populis dan klientalistik dalam memobilisasi dukungan, dan (c) menggunakan wacana publik sebagai strategi utama untuk mendapatkan legitimasi dan otoritas.

5. Organisasi-organisasi masyarakat sipil yang mengalami fragmentasi dan tidak memiliki koalisi kepentingan yang strategis dan substantif.

Beberapa perubahan signifikan ditemukan dalam survei 2006, di antaranya sebagai berikut:

1. Lembaga-lembaga demokrasi telah mengalami kemunduran dalam beberapa hal; namun, telah ada upaya-upaya untuk memperbaiki tata kelola pemerintahan, setidaknya dalam bentuk upaya-upaya pemberantasan korupsi;
2. Demokrasi telah menjadi relatif stabil dengan konsolidasi para elit.
3. Tidak ada perbaikan signifikan dalam hal representasi politik. Pemilu hanya menghasilkan monopoli elit atas politik. Meskipun hal ini membuat stabilitas terjaga, namun tidak memperbaiki tata kelola pemerintahan. Di samping itu, ada juga peningkatan tuntutan untuk kembali ke model pemerintahan otoriter dan teknokratis, yakni kebali pada model 'politik ketertiban'.
4. Lahirnya kemunculan komunitas politik nasional yang memfasilitasi kesepakatan-kesepakatan demokratis untuk perdamaian dan rekonstruksi (khususnya di Aceh) namun masih terbatas dalam pengembangan model politik demokratis dari arus bawah.

5. Inisiasi pembentukkan blok poliitk demokratis di arena antara organisasi masyarakat sipil yang terfragmentasi dan partai-partai politik yang didominasi elit dalam rangka memperbaiki arena sosial politik dengan mana organisasi rakyat dan aktivis politik progresif dapat terlibat dan menggunakan lembaga-lembaga demokrasi agar menjadi lebih bermakna. Hal ini digambarkan sebagai aliansi luas non-partai dan sebagai sebuah saluran alternatif yang lebih bersifat permanen yang memiliki akar dari desa hingga tingkat nasional dan bertujuan untuk menguatkan kapasitas representatif rakyat.

Berdasarkan survei 2013 ini, dapat dikatakan bahwa lembaga-lembaga demokrasi di Indonesia telah relatif berhasil dalam hal stabilitas dan pembangunan ekonomi. Tata aturan dan regulasi utama demi memajukan demokrasi telah dibangun dan diperbaiki, dan dukungan untuk lembaga-lembaga ini telah dengan sangat jelas ditunjukkan oleh para aktor dominan dan alternatif. Akan tetapi, dalam kaitannya dengan lembaga-lembaga yang ditujukan untuk memperbaiki representasi demokrasi dan tata kelola pemerintahan, upaya-upaya perbaikan yang dilakukan masih cukup minim. Dukungan untuk lembaga-lembaga ini terutama datang dalam bentuk sosialisasi (yang bersifat *top-down*), tanpa tindakan yang konkret untuk menjamin implementasinya dalam rangka memenuhi kepentingan publik. Sementara itu, para aktor utama, hanya mendukung tata aturan dan regulasi yang menguntungkan posisi mereka sendiri.

Pada saat yang sama, di antara warga negara Indonesia sendiri sudah ada kesadaran yang cukup kuat tentang pentingnya kesejahteraan yang harus mereka peroleh—sesuatu yang harus

disediakan oleh negara. Keinginan akan terwujudnya negara kesejahteraan sangat terkait dengan perubahan kelembagaan politik elektoral, dan dalam kerangka kebijakan tentang kesejahteraan. Sejak diterapkannya pemilu langsung baik untuk tingkat nasional maupun daerah, para pemimpin politik gemar menjanjikan program-program seperti pendidikan dan kesehatan yang sudah menjadi strategi umum di kalangan calon anggota parlemen atau kepala daerah untuk mendapatkan dukungan rakyat. Namun demikian, meskipun tuntutan masyarakat cukup tinggi, kapasitas negara untuk menyediakan layanan terkait isu-isu kesejahteraan masih lemah. Penyediaan layanan kesejahteraan seperti pendidikan, kesehatan dan perumahan masih mengandalkan pada mekanisme pasar atau organisasi-organisasi kemasyarakatan.

Alih-alih memperbaiki representasi rakyat, praktik-praktik klientelisme terus berlangsung di negeri ini. Akan tetapi, ikatan-ikatan personal antara patron dan klien yang sulit dijaga dalam konteks pembangunan ekonomi dan urbanisasi tidak lagi menjadi satu-satunya aturan main dominan yang berlaku. Aktor-aktor dominan khususnya, namun juga para aktor alternatif, relatif kurang mengandalkan pada patronase personal dan pelbagai bentuk populisme (yakni karisma dan hubungan langsung antara pendukung dan pimpunan yang mengklaim bertindak untuk kepentingan rakyat) dalam memobilisasi dan mengorganisasi dukungan. Oleh karena itu, pengenalan lembaga-lembaga demokrasi di Indonesia masih belum disertai dengan politisasi demokrasi dan representasi rakyat yang kuat. Negeri ini tampaknya telah memasuki sebuah fase politik baru dengan bernama "pasca-klientelisme", sebuah model relasi klientelisme yang tidak lagi mengandalkan distribusi

kesejahteraan melalui jaringan klien yang terbatas, melainkan melalui kebijakan-kebijakan populis dengan skala lebih luas. Targetnya sama dengan klientelisme yakni menjadikan pemimpin terpilih kembali dalam pemilu, tapi cara yang digunakan berbeda. Dalam praktek pasca-klientelisme ini, pemimpin tergambar sebagai sosok popular (dekat dengan rakyat dan bekerja demi rakyat). Yang perlu dipahami, praktek pasca-klientelisme tidak menggeser, atau mengganti klientelisme. Seringkali keduanya berlangsung bersamaan.

Praktek politik dengan corak pasca-klientelisme tampaknya beriringan dengan politik oligarki di Indonesia. Kecenderungan biaya politik yang mahal untuk demokrasi elektoral telah mengkonsolidasikan kekuasaan para oligarki, karena merekalah yang memiliki modal ekonomi memadai untuk berkompetisi dalam memperebutkan jabatan-jabatan publik dan membuat pilihan-pilihan kebijakan. Akan tetapi, sebagian besar dari mereka bukan bagian dari Orde Baru, melainkan para pendatang baru. Mereka memiliki sedikit perbedaan dalam penggunaan metode dan taktik politik. Mereka tidak membangun kerangka yang substantif dan jangka panjang pada gerakan dan organisasi berbasis rakyat, tapi berorientasi pada karir politik dan keuntungan mereka sendiri. Metode utama mereka adalah dengan membangun dan mengkonsolidasikan mereka sendiri sebagai tokoh publik di media, kerap menjanjikan program-program populis terkait isu kesejahteraan dan mempraktekkan gaya-gaya politik populis. Meskipun politik berbasis tokoh tersebut kurang berpengaruh pada problem elitisme dalam demokrasi Indonesia, pentingnya program-program populis dan gaya politik populis sekarang menekan para elit politik baru agar lebih terbuka dan memihak kepentingan masyarakat umum.

Aktor-aktor alternatif yang seharusnya menjadi kekuatan utama untuk demokratisasi, telah menjadi lebih mapan dan terpolitisasi. Akan tetapi, mereka masih terfragmentasi dan tidak memiliki strategi jangka panjang dan ideologi yang kuat. Mereka cenderung elitis dan dikooptasi dalam sistem yang ada. Aktivis-aktivis lainnya masih berada di luar sistem, dan cenderung menghindari partai-partai politik dan parlemen ketika menghadapi persoalan-persoalan publik. Mereka kerap mengandalkan masyarakat—atau mekanisme tata kelola model masyarakat sipil—atau pada kolega-kolega mereka yang berada di dalam lembaga-lembaga komisi negara. Singkatnya, para aktivis mungkin sudah mulai mapan dan terpolitisasi, namun hal itu belum memadai untuk memperbaiki representasi. Isolasi dari rakyat dan aktivis, disertai dengan terbatasnya kontak dengan masyarakat politik (*political society*) dalam mengahadapi isu-isu publik, dapat menyeret mereka ke dalam pusaran oligarki.

Organisasi sipil mungkin menjadi elemen paling penting bagi aktor-aktor alternatif. Mereka merupakan tokoh-tokoh utama dalam memunculkan dan mendiskusikan isu-isu publik, mempromosikan kewarganegaraan aktif untuk meningkatkan tekanan terhadap pemerintah untuk memberi perhatian yang lebih dalam isu-isu publik. Namun demikian, tampaknya mobilisasi isu di media masih menjadi kekuatan paling penting yang tersedia di kalangan aktor-aktor masyarakat sipil. Meskipun organisasi-organsiasi masyarakat sipil telah meluaskan jangkauannya ke negara dan arena politik selama lebih dari satu dekade terakhir—seperti menjadi anggota lembaga komisi negara dan tim konsultan, staf khusus di kementrian, komisaris di BUMN, atau anggota parlemen (yang kemudian menjadi mediator alternatif untuk advokasi kebijakan)—kekuatan-kekuatan ini

masih belum memadai bagi mereka untuk melakukan perubahan yang berarti. Begitu pula sebagian besar organisasi dan gerakan buruh juga telah terlibat dalam politik, mengusulkan calon pemimpin politiknya dari kalangan mereka sendiri melalui partai dan membentuk aliansi dengan kelompok-kelompok lain untuk mempromosikan upah minimum yang lebih baik dan keamanan sosial. Namun, sejauh ini aliansi mereka masih bersifat sementara dan subordinatif, dan dalam banyak hal kurang memberi keuntungan bagi mereka sendiri.

Alih-alih mengatasi permasalahan demokratisasi, para aktor utama telah menggunakan kebebasan yang ada sekarang untuk menemukan cara alternatif—namun tidak selalu demokratis—untuk mempengaruhi tata kelola pemerintahan. Mereka lebih memilih untuk menggunakan cara politik penetrasi dalam rangka mendapatkan akses pada koneksi-koneksi dalam lingkaran pemerintahan dan untuk mengakses sumberdaya publik daripada berjuang untuk memperbaiki sistem representasi demokrasi dan tata kelola pemerintahan. Dampak strategi aktor-aktor dominan pada demokrasi memang meragukan. Mereka fokus untuk mengembangkan strategi untuk melakukan penetrasi administrasi dan mendapatkan akses pada sumberdaya publik dan kekuasaan daripada mengembangkan kebijakan dan program untuk memperoleh dukungan publik dan mempercepat aksi kolektif dari kawan atau jaringannya melalui organisasi isu dan dan kepentingan. Sementara itu, strategi-strategi yang ditempuh oleh aktor-aktor alternatif juga sama-sama bermasalahnya. Tujuan mereka tampaknya bukan untuk melakukan reformasi atau perbaikan demokrasi dan sistem kesejahteraan unviersal, melainkan mendapatkan akses pada koneksi, posisi berpengaruh, dan sumberdaya.

Bagaimana temuan-temuan survei di atas dapat menjawab problem kemandekan demokrasi di Indonesia? Bagaimana survei 2013 dapat memberikan jawaban atas problem tersebut? Bagaimana temuan yang ada sekarang berkaitan dengan rekomendasi-rekomendasi sebelumnya? Haruskah rekomendasi itu berorientasi pada perbaikan dan pengayaan strategi aktivis pro-demokrasi untuk masuk dalam politik dan meluaskan blok politik demokrasi?

Apa yang Harus Dilakukan?

Untuk memulai, sangatlah penting untuk dicatat bahwa problem representasi dan aksi kolektif yang lemah di Indonesia bukanlah fenomena baru. Sebagaimana diindikasikan dalam survei-survei sebelumya, kebebasan politik dan kemerdekaan sipil yang semakin luas di negeri ini disertai oleh kurang representatifnya demokrasi. Para aktivis pro-demoksrasi, yang berasosiasi dengan pelbagai organisasi masyarakat sipil, juga mengalami fragmentasi dan memiliki keterbatasan basis sosial. Namun demikian, ada sebuah nuansa berbeda dalam problem representasi dan aksi kolektif yang ditemukan dalam survei ini karena demokrasi di negeri ini sedang memasuki sebuah era pasca-klientelisme.

Mengikuti temuan-temuan survei 2003/2004, para peneliti merekomendasikan agar para aktor pro-demokrasi, yang kerap ditunjuk oleh masyarakat sipil dalam proses demokratisasi yang elitis, harus terlibat langsung ke dunia politik—'*go politics!*'. Asumsinya saat itu adalah bahwa berfokus pada '*go politics*' akan menghasilkan beberapa keuntungan politik melalui: (a) memungkinkan para aktivis untuk membangun keahlian kepemimpinan di luar kekuatan para oligarki; (b)

meratakan jalan bagi para 'demokrat yang mengambang' untuk membangun basis rakyat dan memiliki akar sosial yang kuat; dan (c) mengajak organisasi-organisasi masyarakat sipil untuk beroperasi pada platform yang beragam, jangan hanya terfokus pada platform tunggal saja, karena dukungan yang luas harus dimobilisasi selama pemilu.

Survei 2006 menghasilkan rekomendasi untuk membangun 'blok politik demokratis' dalam pelbagai wilayah publik antara organisasi-organisasi masyarakat sipil dan partai politik elitis. Blok politik ini dipandang penting dalam membangun aliansi yang dibentuk oleh aktor-aktor masyarakat sipil dan para aktivis yang berpandangan sama yang akan bersama-sama terlibat untuk menggunakan keterbukaan demokrasi demi menyelesaikan persoalan-persoalan representasi. Sebagai aliansi luas yang non-partai, blok politik demokratis tersebut ditujukan sebagai wilayah publik (*public sphere*) semi-institutional dalam mana kelompok-kelompok progresif dapat terlibat dan masuk dalam arena politik. Aliansi ini akan terbangun dengan akar yang kuat, dari tingkat desa ke nasional, dalam rangka menguatkan kapasitas rakyat untuk memperbaiki representasi kepentingan dan cita-citanya. Rekomendasi ini dimaksudkan untuk mengatasi problem representasi yang lemah dengan cara mengkonsolidasikan aktivis pro-demokrasi ke dalam kegitan bersama untuk menentukan arah proses demokratisasi.

Jelas sekali bahwa kedua strategi itu masih belum mampu menyelesaikan problem lemahnya representasi dan aksi kolektif. Meskipun rekomendasi untuk '*go politics*' dan 'blok politik demokratis' masih relevan dan, sebenarnya masih membutuhkan pengayaan, dan diskusi tentang strategi tambahan. Diskusi ini sebaiknya dilakukan dalam konteks

temuan-temuan survei ini dan sebagai kelanjutan logis dari rekomendasi-rekomendasi sebelumnya.

Pertama-tama, survei 2013 ini menunjukkan dengan sangat kuat bahwa kekuatan hegemoni pakta elit dan pembentukan lembaga-lembaga dengan para aktor telah berhasil mencegah individu ataupun kelompok yang memiliki keterbatasan sumberdaya, khususnya modal ekonomi, untuk membentuk partai alternatif/atau bahkan maju seabagai calon independen. Oleh karena itu, ada kebutuhan yang sangat besar untuk membangun saluran-saluran representasi alternatif demi kepentingan-kepentingan yang selama ini termajinalisasi. Saluran-saluran tambahan untuk representasi tersebut diperlukan untuk mengatasi persoalan tata kelola pemerintahan dan representasi yang terabaikan. Terakhir, saluran-saluran pengaruh untuk kepentingan dan isu-isu yang termarjinalisasi mungkin juga dapat membantu menciptakan aksi kolektif yang lebih luas yang akan akan membuka jalan bagi pembentukan partai-partai alternatif—yang tentu saja masih sangat penting.

Kebutuhan melembagakan saluran-saluran tambahan untuk representasi didukung oleh temuan-temuan kajian lainnya. Survei ini secara spesifik menunjukkan digunakannya jaringan, lobi, dan media oleh para aktor utama untuk memobilisasi dukungan. Strategi-strategi umum ini hanya menguntungkan individu dan kelompok dari kalangan aktor dominan dan alternatif yang memiliki akses kepada uang dan koneksi. Karena strategi ini memperkaya 'politik penentrasi', saluran-saluran tambahan yang terlembaga untuk representasi demokrasi sangat diperlukan untuk memungkinkan para aktor yang beragam serta organisasi-organisasi rakyat untuk bisa mempengaruhi jalannya tata pemerintahan.

Bangkitnya fenomena populisme mendukung argumen-argumen dalam temuan ini. Sebagaimana ditunjukkan dalam kasus Solo dan Jakarta, para pemimpin populis seperti Joko Widodo mungkin telah memfasilitasi partisipasi rakyat, namun hal ini masih belum terlembagakan secara demokratis dan masih tergantung pada diskresi para pemimpin populis dan para pengikutnya yang setia. Populisme hanya digunakan oleh para pemimpin populis untuk kepentingan politik mereka, demi mendapatkan popularitas dan mendulang dukungan tanpa menyiapkan alternatif kebijakan substantif atau strategi untuk mereformasi tata kelola pemerintahan yang ada.

Pertanyaannya sekarang adalah atas dasar apa saluran-saluran representasi alternatif tersebut dapat dibangun. Dua rekomendasi sebelumnya berfokus pada politisasi aktivis-aktivis pro-demokrasi. Dalam praktiknya, politisasi ini telah berlangsung, namun tampaknya hanya terbatas pada beberapa organisasi masyarakat sipil dan serikat buruh, serta beberapa demonstrasi di belakang sejumlah tokoh populer daripada menjadi aliansi luas yang memiliki agenda kebijakan yang sama. Politisasi ini telah telah memungkinkan sejumlah besar aktivis untuk melakukan penetrasi politik ke arena negara dan politik arus-utama. Para mantan aktivis telah banyak yang menjadi pejabat pemerintah, anggota parlemen, dan bahkan bupati/walikota. Kecenderungan ini memerlukan sebuah pendekatan yang berbeda, yakni sebuah pendektan yang tidak lagi menekankan masyarakat sipil, buruh atau tokoh terkenal saja.

Penetrasi para aktivis ke dalam arena negara memungkinkan para aktor baik yang ada di dalam negara atau politik arus-utama serta masyarakat sipil, serikat buruh dan organisasi berbasis kepentingan, untuk membangun dialog konstruktif dan

menghindari pertentangan. Memang ada resiko kooptasi dan favoritisme, namun beberapa bentuk kerjasama antara negara dan masyarakat sipil akan tetap mungkin berjalan tanpa menghilangkan perbedaan pandangan dan tetap menjaga posisi politik yang relatif independen. Di samping itu, penetrasi aktivis ke arena negara dan politik arus-utama memungkinkan negara menjadi lebih terbuka pada masyarakat. Kecenderungan menuju populisme memperkaya keterbukaan ini. Bentuk-bentuk kerjasama tersebut bertentangan dengan gagasan liberal tentang konflik yang tak terelakan antara negara dan masyarakat sipil dan bahwa kerjasama di antara mereka akan mengakibatkan kooptasi. Pengalaman-pengalaman dari Eropa Barat Laut, Amerika Latin dan beberapa negara bagian di India menunjukkan lahirnya bentuk-bentuk partisipasi dan kerjasama yang demokratis.

Singkatnya, kami berpendapat bahwa demokratisasi di Indonesia harus masuk fase kedua. Fase pertama ditandai oleh keterlibatan aktor-aktor kuat dalam memoderasi agenda-agenda reformasi dan membentuk lembaga-lembaga demokrasi liberal yang dapat mereka terima. Fase kedua, yang sedang kami advokasi, harus melibatkan kepentingan dan isu yang luas yang selama ini termarjinalisasi namun diperlukan dalam rangka mengatasi problem-problem kemandekan kebebassan, reformasi pemerintahan yang terbatas, dan buruknya representasi.

Berkebalikan dengan rekomendasi-rekomendasi kami sebelumnya, fokus kami sekarang berada dalam arena negara. Sangatlah penting untuk tidak hanya fokus pada aktivis pro-demokrasi dan kelompok masyarakat sipil atau organisasi kepentingan secara umum. Saat ini negara mesti menjadi prioritas utama dalam usaha-usaha untuk mengatasi problem demokratiasi di negeri ini. Isu utamanya adalah bagaimana membangun

mekanisme khusus untuk mengelola publik dan kepentingan yang kerap bertentangan dan untuk membangun saluran yang lebih representatif dan demokratis bagi organisasi dan gerakan berbasis rakyat. Usaha ini sangat tidak mungkin bisa dicapai melalui proses-proses elektoral, lobi atau kelompok-kelompok pengawas (*watchdog groups*) semata. Para pemimpin yang terpilih harus terlibat dalam mengusulkan dan memutuskan prioritas-prioritas utama untuk mengelola negeri ini. Kebijakan-kebijakan berbasis pengetahuan yang spesifik ini dan pelaksanaannya harus didiskusikan, dikembangkan dan dibuat transparan melalui kerjasama antara ekskutif, administrasi dan pihak-pihak yang terdampak dalam kehidupan ekonomi, tempat kerja, komunitas tempat tinggal, dan warga negara secara umum. Hal ini seharusnya menjadi perhatian utama ketika hendak mengusulkan kerjasama negara-masyarakat sipil.

Untuk tujuan ini, tim survei, ***pertama****,* ***mengusulkan dibentuknya "saluran representasi demokratis tambahan"*** *bagi organisasi-organisasi berbasis kepentingan. Saluran-saluran ini akan berbentuk kerjasama negara-masyarakat dan melibatkan pejabat pemerintah, intelektual, organisasi masyarakat sipil, aktivis, perwakilan organisasi-organisasi kepentingan. Sesuai dengan tata aturan dan regulasi demokrasi liberal yang sebelumnya disampaikan, para politisi yang terpilih harus memiliki hak untuk memutuskan area kebijakan dan isu yang akan menjadi fokus kerjasama melalui representasi demokrasi tambahan, seperti membangun komite bersama.* Oleh karena itu mereka juga akan memutuskan (dan secara publik akan terbuka) isu apa dan kelompok kepentingan mana yang harus diajak—yakni organisasi-organisasi penting yang diperlukan untuk pengembangan dan implementasi kebijakan dalam masing-masing area kebijakan.

***Kedua, proses dalam komite saluran representasi demokratis tambahan" bersifat inklusif dan demokratis**. Keputusan-keputusan ini (tentang area kebijakan dan jenis isu dan organisasi kepentingan yang penting dalam area-area tersebut) harus melaui diskusi politik yang terbuka dan intensif dalam mana rakyat biasa, media dan pelbagai organisasi rakyat, memiliki kesempatan untuk menyampaikan padangannya. Kemudian, politisi yang terpilih dan aknutabel secara publik harus membuat keputusan akhir—namun, kemudian, politisi-politisi tersebut tidak boleh sendirian dalam memutuskan organisasi mana yang diundang dan perwakilan yang ditunjuk. Jika keputusan-keputusan itu dilakukan, akan ada resiko kembalinya korporatisme statis atau pelbagai bentuk favoritisme. Perwakilan-perwakikan komite bersama harus dipilih oleh kelompok-kelompok kepentingan sendiri.* Bagaimana ini dapat dijamin?

Komite bersama harus terbuka bagi siapa saja yang berminat, namun tidak setiap orang bisa berpartisipasi. Harus ada sebuah sistem untuk representasi. Organisasi-organisasi berbasis isu dan kepentingan yang sudah diidentifikasi dalam pelbagai arena kebijakan masih perlu waktu untuk bersama-sama dan memilih perwakilan dalam komite bersama. Hasil akhir proses ini harus diterima semua dan tak bisa ditawar-tawar lagi. Dalam hal banyaknya kepentingan yang beragam, saat ini hampir tidak ada atau sangat sedikit organisasi-organisasi demokratis independen. Oleh karena itu akan ada beberapa kursi kosong untuk perwakilan bersama. Juga harus ada dana publik dan upaya-upaya lain untuk memfasilitasi pembentukan organisasi demokratis dengan bantuan para aktivis terpercaya dari kelompok-kelompok kepentingan dan masyaraka sipil yang ada.

Satu dari dua prioritas awal komite bersama ini akan mengkaji dan mengusulkan metode-metode yang paling mungkin diambil untuk memperbaiki proses demokratisasi. Isu-isu yang diinvestigasi oleh komite ini semestinya, *pertama*, ditujukan untuk memperbaiki representasi dalam sistem demokrasi liberal, misalnya eksperimen-eksperimen untuk membolehkan keterlibatan partai-partai politik yang tidak kurang memiliki basis bisnis dan dinasti dalam pemilu; dana publik untuk pembiayaan kampanye dan pemilu; dan hak-hak pegawai negeri sipil untuk berpartisipasi sebagai calon dalam politik untuk menandingi dominasi calon-calon dari sektor bisnis. *Kedua*, komite ini perlu melakukan kajian dan mengusulkan metode-metode yang paling mungkin untuk mendemokratisasikan representasi kelompok-kelompok kepentingan dan isu dalam pemerintahan. Hal ini dimaksudkan untuk menandingi (a) ketidakseimbangan dan kecenderungan untuk mem-*bypass* prinsip-prinsip demokrasi dengan mengutamakan akses, pengaruh dan jaringan, (b) penunjukkan politisi atas aliansi mereka dalam kantor-kantor sosial yang mengakibatkan fragmentasi dan lemahnya aksi kolektif di antara gerakan dan kelompok-kelompok berbasis kepentingan dan isu. Area kebijakan harus melibatkan tuntutan publik untuk upaya-upaya mewujudkan negara kesejahteraan dan ketidakmampuan kapasitas negara untuk melakukannya, penyediaan lapangan kerja, upaya aturan pengupahan sebagai bagian dari mendorong pembangunan ekonomi inklusif.

Ide tentang komite bersama ini tidak sepenuhnya baru di Indonesia. Survei ini dan kajian-kajian yang berhubungan sudah menunjukkan peningkatan partisipasi bersama dalam pelbagai kelompok masyarakat sipil, para ahli terkenal dalam pebagai

isu, organ-organ partisipatoris, kelompok investigasi, konsultasi, dan lainnya. Jenis-jenis inisiatif ini dapat ditemukan dalam forum-forum dan kelompok-kelompok pemangku kepentingan, seperti Dewan Kehutanan Nasional (DKN), Forum CSR, Forum untuk Pengurangan Resiko Bencana (PRB), Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah (TKPD).

Namun demikian, pola-pola yang ada terkait pemilihan orang dan/atau komite ahli tampaknya masih memiliki keterbatasan. Para politisi dan anggota parlemen melakukan pemilihan dengan diskresi mereka sendiri, dan akibatnya cenderung untuk memberikan posisi-posisi tersebut pada kelompok LSM, aktivis gerakan, dan peneliti yang menjadi pendukungnya. Selain itu, mereka yang menempati posisi-posisi dalam komite bersama sebagian besar merupakan para elit baru dan/atau para 'demokrat mengambang' tanpa basis sosial yang kuat. Jelas, problem-probem ini harus diatasi dengan cara mendemokratisasikan proses penunjukkan orang-orang dalam komite yang diusulkan di atas.

***Ketiga, "saluran representasi tambahan" memperkuat gagasan blok politik**. Gagasan bahwa representasi demokrasi tambahan melalui pembentukan komite-komite sebagaimana dibahas di atas merupakan sebuah pendekatan bersama negara-masyarakat untuk melengkapi rekomendasi-rekomendasi sebelumnya tentang membangun blok politik demokratis. Blok-blok ini sangat diperlukan untuk menopang komite-komite dan perwakilan-perwakilan bersama yang ditunjuk. Sebaliknya, komite-komite akan menstimulasi inisasi dan bekerjanya blok politik tersebut. Pada akhirnya, kesempatan untuk membangun komite akan memperkuat kapasitas blok organisasi-organisasi berbasis kepentingan dan isu agar bisa memiliki efek nyata pada perbaikan tata kelola pemerintahan dan memberi tekanan pada para politisi dan*

partai politik, dan mungkin juga, untuk membangun partai politik baru yang benar-benar memiliki basis rakyat.

Selain itu, pembangunan blok politik dan komite publik tidak seharusnya hanya difokuskan pada format bentuk-bentuk politik. Bagian lain yang juga penting adalah untuk menyuntikkan materi yang substantif dalam aksi-aksi kolektif ini.

Keempat, target akhir komite "saluran politik tambahan" adalah perbaikan kualitas demokrasi. *Perbaikan demokrasi jelas harus melibatkan pembangunan kebijakan dan usulan-usulan reformasi dengan orientasi ideologis dan strategi jangka panjang untuk mengimplementasikannya di dalam area-area ketimpangan dan problem-problem sosial-ekonomi yang diidentifikasi, baik melalui survei ini ataupun kajian lainnya*. Kemajuan-kemajuan penting sudah dicapai melalui pemilihan beberapa politisi progresif. Akan tetapi, sejauh ini masih sangat sedikit gagasan dan kebijakan khusus yang mesti menjadi prioritas. Ω

LAMPIRAN

Survei Perkembangan Demokrasi

KUESIONER

Survei putaran ketiga mengenai masalah dan peluang demokratisasi di Indonesia - 2013

versi:
[√] KONTEKS LOKAL
[ ] KONTEKS NASIONAL-SEKTORAL

UNIVERSITAS GAJAH MADA

UiO : University of Oslo

A	B	C

NO KUESIONER

A. KODE DAERAH / NASIONAL

KOTA		KABUPATEN	
01	Banda Aceh	18	Aceh Selatan
02	Medan	19	Kerinci
03	Batam	20	Bengkulu
04	Bekasi	21	Lampung Selatan
05	Bandung	22	Tangerang
06	Pekalongan	23	Batang
07	Surakarta	24	Sidoarjo
08	Surabaya	25	Kutai Kartanegara
09	Pontianak	26	Poso
10	Banjarmasin	27	Belu
11	Balikpapan	28	Jayapura
12	Makassar	29	Manokwari
13	Manado		
14	Ternate		
15	Denpasar	WILAYAH RAYA	
16	Kupang	30	DI Yogyakarta
17	Ambon	31	DKI Jakarta

B. KODE SEKTOR/GERAKAN DEMOKRASI YANG DIJALANKAN INFORMAN

01	Sektor Pendidikan, baik menyangkut pelayanan maupun substansi (kurikulum)	08	Sektor Hubungan Antar-klan, -etnis, dan –agama
02	Sektor Kesehatan	09	Sektor Media dan Media Sosial
03	Sektor Ekologi, Lingkungan dan Sumber Daya Alam (termasuk, misalnya, pertambangan, kehutanan, perikanan, dll.)	10	Reformasi Sektor Keamanan
04	Sektor Perburuhan	11	Gerakan Antikorupsi dan Penerapan Prinsip-prinsip Transparansi dan Akuntabilitas
05	Sektor Informal (termasuk kelompok miskin perkotaan)	12	Gerakan di sektor Hak Asasi Manusia dan Penegakan Hukum (termasuk hak-hak minoritas)
06	Sektor Agraria dan *Land reform* (termasuk isu kepemilikan tanah)	13	Gerakan Reformasi Kepartaian dan Sistem Pemilu
07	Gerakan Perempuan dan Anak	14	Sektor Bisnis

C. NOMOR URUT INFORMAN (01-35)

PROSES WAWANCARA

NO	TANGGAL	BAGIAN (NOMOR)	WAKTU	
			MULAI	AKHIR
1				
2				
3				
4				
5				

VALIDASI

NAMA	POSISI	TANDA TANGAN
	Pewawancara	
	Informan-kunci	

PERNYATAAN TENTANG TUJUAN, PRINSIP DAN KOMITMEN

Survei ini terselenggara atas kerja sama para akademisi, mahasiswa dan aktivis yang peduli terhadap perkembangan demokrasi. Meskipun begitu, survei ini tidak akan terlaksana tanpa kesediaan dan komitmen para informan. Kami menyadari bahwa waktu Anda yang sangat berharga akan banyak tersita untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan yang kami ajukan, namun kami berharap Anda bersedia memberikan kontribusi pengetahuan yang penting bagi kelanjutan dan kemajuan demokratisasi di Indonesia. Untuk itu kami menyampaikan terima kasih dan penghargaan atas komitmen dan kesabaran Anda. Kami akan mengabarkan kepada Anda hasil-hasil survei ini dan berharap dapat meneruskan kerja sama dalam kegiatan-kegiatan berikutnya.

Perlu kami nyatakan bahwa tim riset UGM, di bawah supervisi Prof. Dr. Purwo Santoso (UGM) dan Prof. Dr. Olle Törnquist (UiO), berkomitmen untuk menjaga kerahasiaan seluruh data mengenai informan dan hanya menggunakannya untuk validitas dan reliabilitas survei, serta untuk menjaga kerahasiaan segala informasi yang tidak terkait dengan jawaban-jawaban atas pertanyaan yang kami ajukan dan hanya akan menggunakannya secara anonim untuk keperluan non-komersial dan riset akademis yang independen di atas prinsip-prinsip akademis. Seluruh anggota tim, termasuk informan-kunci dan asisten peneliti di tingkat lokal, telah menandatangani pakta komitmen yang berkaitan dengan hal ini.

Survei yang diprakrasai oleh Universitas Gadjah Mada dan Universitas Oslo ini didukung secara finansial oleh Kedutaan Besar Norwegia di Indonesia. Dukungan finansial itu diberikan kepada kedua universitas tanpa ikatan secara formal maupun informal kecuali untuk melakukan kajian akademik yang independen dan sebaik mungkin demi kemajuan demokrasi, kesejahteraan dan pembangunan, serta, tentu saja, disertai kewajiban untuk mempertanggungjawabkan seluruh penggunaan dana dan melaporkan hasilnya kepada publik.

Survei ini merupakan kelanjutan dan perluasan dari dua survei sebelumnya yang dilakukan atas kerja sama antara Demos dan Universitas Oslo pada kurun waktu 2003-2008, yang didukung juga oleh para aktivis gerakan demokrasi di seluruh provinsi, mengenai masalah dan peluang demokratisasi di Indonesia. Hasil lengkap survei sebelumya telah dilaporkan dalam Priyono et al. (2007) dan Samadhi et al. (2009)[1]. Pengalihan kerja sama

1 Priyono, A.E, Willy PurnaSamadhidanOlleTörnquist(2007). *Menjadikan Demokrasi Bermakna. Masalah dan Peluang di Indonesia.* Jakarta: Demos; Samadhi, W. P. dan Nicolaas Warouw (Eds.) (2009). *Demokrasi di Atas Pasir. Kemajuan dan Kemunduruan di Indonesia*. Jakarta dan Yogyakarta: Demos dan PCD Press. (Edisi1: Desember 2008; Edisi2: 2009).

ke UGM dimaksudkan untuk (a) memperkuat basis dan kualitas akademik survei ini tanpa menghentikan kerja sama dengan para aktivis gerakan demokrasi, dan (b) untuk mendorong pemanfaatan hasil-hasil survei di dalam dunia akademik dan pendidikan yang lebih luas, serta untuk mendorong kajian-kajian akademik lebih lanjut. Sekelompok aktivis demokrasi dan intelektual terkemuka telah memberikan dukungan bagi kerja sama ini dan bersedia untuk berkontribusi dalam pewacanaan di tengah publik. Mereka adalah Danang Widoyoko, Daniel Dhakidae, Eva Kusuma Sundari, Ikrar Nusa Bakti, Handoko Wibowo, Luky Djani, Mian Manurung, Mohtar Mas'oed, Tamrin Amal Tomagola, Wardah Hafidz, dan Wiladi Budiharga. Maksud paling utama dari survei ini adalah untuk menghasilkan pengetahuan yang terbaik yang dapat dijadikan basis bagi transformasi politik demokratis dan reformasi untuk mewujudkan pembangunan sosial dan ekonomi yang berkelanjutan dan berdasarkan kesejahteraan.

Kesimpulan survei ini tidak didasarkan atas perhitungan dan analisis statistik, melainkan dengan mencermati penilaian kualititatif para informan mengenai masalah dan peluang demokratisasi yang kemudian diinterpretasikan dengan sejumlah teori yang relevan. Untuk mengetahui lebih dalam mengenai dasar pemikiran dan basis akademis survei ini, lihat Törnquist (2013)[2].

Survei ini dilakukan baik di dalam konteks lokal (kota/kabupaten) maupun konteks nasional. Fokusnya diarahkan pada enam pilar demokrasi: (1) basis pembentukan *demos* (rakyat) dan urusan publik; (2) institusi (aturan dan regulasi) demokrasi; (3) para aktor utama; (4) bagaimana para aktor utama membangun hubungan dengan institusi-institusi demokrasi; (5) kapasitas politik para aktor utama, dan (6) bagaimana pengaruh strategi aktor utama terhadap proses demokratisasi.

Sekali lagi, atas nama seluruh anggota tim, kami sangat berterima kasih atas kesediaan Anda terlibat di dalam upaya ini.

Yogyakarta dan Oslo, Maret 2013

Purwo Santoso dan Olle Törnquist

2 Törnquist, O. (2013). *Assessing the Dynamics of Democratisation: Transformative Politics. New Institutions and the Case of Indonesia*. New York: Palgrave.

UNIVERSITAS GAJAH MADA

UiO : University of Oslo

Survei
PERKEMBANGAN DEMOKRASI DI INDONESIA

PWD Project
UGM-UiO
research cooperation 2013

Purwo Santoso, Olle Törnquist	:	Direktur Proyek
Eric Hiariej	:	Deputi
Amalinda Savirani	:	Koordinator survei
Hasrul Hanif, Willy Purna Samadhi, and local teams in the survey areas	:	Peneliti
Debbie Prabawati, Wening Hapsari	:	Jejaring dan Administrasi

Kontak:
Jurusan Politik dan Pemerintahan
Facultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas Gadjah Mada
Gedung PAU UGM, Lantai 3
Jl. Teknika Utara, Pogung, Sleman 55281, DI YOGYAKARTA
Phone: +62-274-552212, +62-811-2515863
Email: polgov.ugm@gmail.com
Website: http://jpp.fisipol.ugm.ac.id

TENTANG INFORMAN

NAMA

JENIS KELAMIN

[ ] PEREMPUAN [ ] LAKI-LAKI

USIA

ALAMAT

KOTA/ KABUPATEN/ WILAYAH

PROVINSI

PROFESI

ORGANISASI

LOKASI AKTIVITAS

KONTAK

TELEPON/HP

EMAIL

Pada bagian ini kita membicarakan tentang 'demos' (warga) dan urusan 'publik'. Kedua topik ini terkait dengan definisi Beetham (1999) tentang demokrasi yakni "*popular control over public affairs based on political equality*". Secara khusus yang ingin digali adalah apa saja isu/problem 'publik', siapa yang mengurusi, dan bagaimana isu/problem tersebut diurusi.

BAGIAN 1

TENTANG 'DEMOS' DAN URUSAN 'PUBLIK' DI TINGKAT LOKAL

Q1.1. **Menurut orang kebanyakan di kota/kabupaten Anda**, isu/problem apa saja di antara yang tertera di Tabel A yang dianggap sebagai isu/problem publik?

Q1.2. **Menurut orang kebanyakan di kota/kabupaten Anda**, isu/problem publik apa yang dianggap paling penting? *(Pilih salah satu dari daftar)*

TABEL A

NO	ISU / PROBLEM	Q1.1. DIANGGAP SEBAGAI ISU/ PROBLEM PUBLIK		Q1.2. ISU/PROBLEM PUBLIK TERPENTING (PILIH SALAH SATU)
		YA	TIDAK	
A	Pendidikan	[ ]	[ ]	[ ]
B	Pelayanan kesehatan	[ ]	[ ]	[ ]
C	Jaminan keamanan fisik	[ ]	[ ]	[ ]
D	Perikanan	[ ]	[ ]	[ ]
E	Pertanian	[ ]	[ ]	[ ]
F	Sektor informal, misalnya pedagang K5	[ ]	[ ]	[ ]
G	Industri	[ ]	[ ]	[ ]
H	Upah dan aturan perburuhan	[ ]	[ ]	[ ]
I	Kesejahteraan dan jaminan sosial	[ ]	[ ]	[ ]
J	Transportasi publik	[ ]	[ ]	[ ]
K	Lalu lintas	[ ]	[ ]	[ ]
L	Perumahan publik	[ ]	[ ]	[ ]
M	Diskriminasi terhadap kelompok minoritas (gender, etnis, agama)	[ ]	[ ]	[ ]
N	Pengaturan tentang hak-hak anak	[ ]	[ ]	[ ]
O	Pengaturan berbasis agama	[ ]	[ ]	[ ]
P	Lain-lain	[ ]	[ ]	[ ]

Q1.3. **Menurut orang kebanyakan di kota/kabupaten Anda**, isu/problem apa saja di antara daftar yang tertera di Tabel B yang diurusi oleh mekanisme pasar (swasta), oleh komunitas, atau oleh keluarga/ individual?

Q1.4. **Menurut orang kebanyakan di kota/kabupaten Anda**, isu/ problem apa saja di antara daftar yang tertera di Tabel B yang tidak diurusi pemerintah namun menurut mereka *seharusnya* merupakan tugas pemerintah?

TABEL B

NO	ISU / PROBLEM	Q1.3.			Q1.4.
		PASAR (SWASTA)	KOMUNITAS	KELUARGA, INDIVIDU	SEHARUSNYA MERUPAKAN TUGAS PEMERINTAH
A	Pendidikan	[ ]	[ ]	[ ]	[ ]
B	Pelayanan kesehatan	[ ]	[ ]	[ ]	[ ]
C	Jaminan keamanan fisik	[ ]	[ ]	[ ]	[ ]
D	Perikanan	[ ]	[ ]	[ ]	[ ]
E	Pertanian	[ ]	[ ]	[ ]	[ ]
F	Sektor informal, misalnya pedagang K5	[ ]	[ ]	[ ]	[ ]
G	Industri	[ ]	[ ]	[ ]	[ ]
H	Upah dan aturan perburuhan	[ ]	[ ]	[ ]	[ ]
I	Kesejahteraan dan jaminan sosial	[ ]	[ ]	[ ]	[ ]
J	Transportasi publik	[ ]	[ ]	[ ]	[ ]
K	Lalu lintas	[ ]	[ ]	[ ]	[ ]
L	Perumahan publik	[ ]	[ ]	[ ]	[ ]
M	Diskriminasi terhadap kelompok minoritas (gender, etnis, agama)	[ ]	[ ]	[ ]	[ ]
N	Pengaturan tentang hak-hak anak	[ ]	[ ]	[ ]	[ ]
O	Pengaturan berbasis agama	[ ]	[ ]	[ ]	[ ]
P	Lain-lain	[ ]	[ ]	[ ]	[ ]

Q1.5. Merujuk pada jawaban Anda tentang isu/problem publik yang dianggap paling penting (Q 1.2), apakah **orang kebanyakan di kota/kabupaten Anda** mengetahui siapa dan lembaga apa yang seharusnya mengurusi isu/problem yang dianggap paling penting itu?
a. [ ] Ya, mereka mengetahui dengan baik
b. [ ] Ya, namun tidak terlalu mengetahui
c. [ ] Tidak, mereka sama sekali tidak mengetahui (*Langsung ke Q1.8*)

Q1.6. **Menurut orang kebanyakan di kota/kabupaten Anda**, siapa dan institusi apa (yang tertera pada daftar di Tabel C) yang seharusnya mengurusi isu/problem publik yang mereka anggap paling penting itu (Q1.2)?

Q1.7. **Menurut orang kebanyakan di kota/kabupaten Anda**, cara-cara apa (yang tertera di Tabel C) yang seharusnya digunakan untuk menyelesaikan isu/problem publik itu?

TABEL C

Q1.6.	Q1.7.
SIAPA YANG MENGURUSI	**BAGAIMANA CARANYA**
a. [ ] Individu	a. [ ] Tidak relevan, lanjut ke Q1.8
b. [ ] Keluarga, kerabat	a. [ ] Tidak relevan, lanjut ke Q1.8
c. [ ] Pasar	a. [ ] Membeli/Membayar jasa b. [ ] Menggunakan sara-cara lain namun yang terkait dengan pasar (jelaskan): .....
d. [ ] Organisasi-organisasi masyarakat	a. [ ] Menyelesaikannya melalui organisasi-organisasi komunitas (misalnya: kelompok swadaya dan koperasi, juga kelompok adat dan agama) b. [ ] Menyelesaikannya melalui organisasi-organisasi kepentingan/ sektoral c. [ ] Menggunakan sara-cara lain namun yang terkait dengan kelompok masyarakat sipil (jelaskan): .....
e. [ ] Negara/ Pemerintah dan/atau pemerintah lokal	a. [ ] Menyelesaikannya melalui pemeriintah kota/kabupaten (termasuk politisi lokal) b. [ ] Menyelesaikannya melalui pemeriintah provinsi/pusat (termasuk politisi) c. [ ] Menggunakan sara-cara lain namun yang terkait dengan pemerintah pusat/lokal (jelaskan): .....
f. [ ] Negara dan lembaga-lembaga publik (seperti Komnas HAM, KPK, Ombudsman, dll)	a. [ ] Melalui pemerintah kota/kabupaten dan lembaga-lembaga publik di tingkat lokal yang ditunjuk berdasarkan diskresi politisi dan birokrat. b. [ ] Melalui pemerintah provinsi/pusat dengan cara yang sama seperti (a). c. [ ] Melalui pemerintah kota/kabupaten dan lembaga-lembaga publik di tingkat lokal dengan menuruti aturan dan regulasi politik yang netral, dengan hak untuk menunjuk perwakilan. d. [ ] Melalui pemerintah provinsi/pusat dengan cara yang sama seperti (c). e. [ ] Menggunakan sara-cara lain namun yang terkait dengan lembaga publik (jelaskan): .....

Q1.8. **Menurut Anda**, siapa saja orang atau kelompok orang yang terlibat (misalnya: mendiskusikan, mendebat dan/atau membela) dalam isu/problem publik yang dianggap paling penting itu (Q1.2)?
.....

Q1.9. **Menurut Anda**, adakah isu lokal lain yang penting bagi warga di kota/kabupaten ini agar mereka dapat ikut terlibat mengontrol masalah-masalah 'lokal'?
.....

Q1.10. **Menurut Anda**, persoalan apa saja yang dihadapi oleh orang-orang yang menganggap isu/problem tertentu sebagai isu/problem publik (Q1.2) dan oleh mereka yang terlibat dalam diskusi/debat mengenai isu/problem publik, dalam kaitannya dengan pembentukan dan pendefinisian "warga" (yakni kelompok orang yang memiliki hak untuk memutuskan dan mengontrol urusan publik)?
.....

Pada bagian ini kita membicarakan keberadaan institusi formal demokrasi, yang merupakan salah satu aspek penting dalam memajukan demokrasi. Institusi dimaknai sebagai aturan main (rules and regulations), atau pranata sosial, dan bukan sekedar lembaga atau organisasi. Institusi formal demokrasi akan memperkuat upaya kontrol popular terhadap urusan publik (Beetham 1999). Secara khusus bagian ini akan melihat apa saja aturan dan regulasi, bagaimana kualitas bekerjanya aturan dan regulasi formal tersebut, dan bagaimana wujud interaksi (saling pengaruh) antara aturan dan regulasi yang formal dengan yang informal.

BAGIAN 2

KUALITAS ATURAN DAN REGULASI DEMOKRASI

Q2.1. **Menurut Anda**, bagaimana secara umum kualitas aturan dan regulasi yang berlaku di kota/kabupaten ini yang terkait dengan institusi demokrasi sebagaimana tertera pada daftar di Tabel D? Apakah baik, sedang atau buruk? (Silakan menjawab mengenai prinsip-prinsip demokrasi yang Anda ketahui terlebih dahulu, kemudian lanjutkan dengan yang lainnya. Jika Anda benar-benar tidak memiliki informasi, tentu saja Anda boleh untuk tidak menjawab)

Q2.2. **Menurut Anda**, apakah kualitas aturan dan regulasi yang berlaku di kota/kabupaten ini yang terkait dengan institusi demokrasi sebagaimana tertera pada daftar di Tabel D telah mengalami peningkatan, penurunan atau tidak berubah, selama 5 tahun terakhir?

Dalam menjawab pertanyaan Q2.1 dan Q2.2, Anda diminta untuk mempertimbangkan dan mengombinasikan ketiga aspek berikut ini:

1. Apakah aturan dan regulasi di kota/kabupaten ini efektif dalam mendorong ke-13 institusi demokrasi yang disebutkan di Tabel D?
2. Apakah aturan dan regulasi di kota/kabupaten ini mencakup keseluruhan atau hanya sedikit aspek dari institusi demokrasi, misalnya apakah hanya sebagian aspek hak asasi manusia?
3. Apakah aturan dan regulasi itu berlaku secara menyeluruh di kota/kabupaten ini?

TABEL D

NO	ATURAN DAN REGULASI DEMOKRASI	Q2.1	Q2.2
		PENILAIAN UMUM	PERUBAHAN 5 TAHUN TERAKHIR
1	**KEWARGANEGARAAN YANG SETARA DAN INKLUSIF** Terkait dengan konsensus umum atas kesetaraan tanpa diskriminasi Contohnya: tidak ada diskriminasi terhadap masyarakat adat, orang Tionghoa, eks-tapol serta para pengungsi/imigran/minoritas, melalui (1) hukum dan regulasi pelaksana, (2) badan2 pelaksana, (3) praktik lainnya.	a. [ ] Baik b. [ ] Sedang c. [ ] Buruk	a. [ ] Membaik b. [ ] Memburuk c. [ ] Tidak berubah
2	**ATURAN HUKUM (TERMASUK HUKUM INTERNASIONAL DAN KONVENSI-KONVENSI PBB)** Terkait dengan kepatuhan pemerintah dan badan-badan publik lainnya terhadap hukum, implementasi Kovenan atas Hak-hak Sipol dan Hak-hak Ekosob melalui (1) hukum dan regulasi pelaksana, UUD, UU No. 7/1984, UU No. 39/1999, UU No. 11/2005, UU No. 12/2005 dan aturan hukum terkait lainnya, Rencana Aksi Daerah (RAD) Hak Asasi Manusia, Kabupaten Ramah Anak, Kota Ramah Difabel, Pengarusutamaan Gender, (2) badan-badan pelaksana, semisal ORI atau Ombudsman Daerah, Komnas HAM, Komnas Perempuan, KPAI; (3) praktik lainnya.	a. [ ] Baik b. [ ] Sedang c. [ ] Buruk	a. [ ] Membaik b. [ ] Memburuk c. [ ] Tidak berubah
3	**KESETARAAN DI DEPAN HUKUM** Terkait dengan jaminan atas akses setara bagi semua orang terhadap keadilan, khususnya terhadap orang miskin, melalui (1) hukum dan regulasi pelaksana, (2) badan-badan pelaksana, seperti pengadilan, LBH, dan (3) praktik-praktik lainnya.	a. [ ] Baik b. [ ] Sedang c. [ ] Buruk	a. [ ] Membaik b. [ ] Memburuk c. [ ] Tidak berubah
4	HAK ASASI MANUSIA YANG UNIVERSAL Terkait dengan penghormatan, pemenuhan dan pemajuan hak-hak Sipol dan hak Ekosob.	a. [ ] Baik b. [ ] Sedang c. [ ] Buruk	a. [ ] Membaik b. [ ] Memburuk c. [ ] Tidak berubah

NO	ATURAN DAN REGULASI DEMOKRASI	Q2.1 PENILAIAN UMUM	Q2.2 PERUBAHAN 5 TAHUN TERAKHIR
5	**PERWAKILAN POLITIK YANG DEMOKRATIS MELALUI PARTAI POLITIK DAN PEMILU** Terkait dengan seberapa jauh pemilu dan partai politik bisa memfasilitasi masyarakat untuk memilih orang atau partai politik yang mereka inginkan untuk mewakili mereka, mengartikulasikan kepentingan mereka, serta sebagai sarana untuk mengontrol pemerintah dan kebijakan. Juga terkait dengan kesempatan untuk membentuk partai dan berpartisipasi dalam pemilu, kesempatan bagi kandidat independen untuk berpartisipasi, serta mengenai kualitas pengambilan keputusan secara demokratis di dalam partai.	a. [ ] Baik b. [ ] Sedang c. [ ] Buruk	a. [ ] Membaik b. [ ] Memburuk c. [ ] Tidak berubah
6	**PARTISIPASI BERBASIS HAK-HAK WARGANEGARA DALAM TATA KELOLA PUBLIK** Terkait dengan partisipasi publik dalam proses pembuatan kebijakan. Seberapa jauh, baik secara prinsip (merujuk pada aturan) maupun dalam praktik, warga negara bisa mengambil bagian dan diajak konsultasi dalam proses pengambilan kebijakan publik? Misalnya tataruang wilayah industri dan pemukiman, pengambilan keputusan prioritas anggaran, pengelolaan kebijakan pendidikan dan kesehatan, aturan tentang pasar dan transportasi publik, regulasi tentang aktivitas ekonomi.	a. [ ] Baik b. [ ] Sedang c. [ ] Buruk	a. [ ] Membaik b. [ ] Memburuk c. [ ] Tidak berubah
7	**SALURAN KEPENTINGAN YANG TERLEMBAGA DAN SALURAN REPRESENTASI BERBASIS ISU DALAM TATA KELOLA PUBLIK** Terkait dengan saluran partisipasi yang terlembaga. Seberapa jauh tersedia saluran-saluran yang terlembaga bagi organisasi dan pemangku kepentingan yang terkait dengan beragam masalah publik. Misalnya asosiasi pedagang dapat menyalurkan aspirasinya tentang pengelolaan pasar lokal, serikat buruh menyuarakan aspirasi tentang aturan perburuhan, pemilik modal untuk bisa menyampaikan dukungan terhadap produksi, dan bagi orang tua untuk mempengaruhi hal yang terkait dengan peraturan sekolah.	a. [ ] Baik b. [ ] Sedang c. [ ] Buruk	a. [ ] Membaik b. [ ] Memburuk c. [ ] Tidak berubah

NO	ATURAN DAN REGULASI DEMOKRASI	Q2.1 PENILAIAN UMUM	Q2.2 PERUBAHAN 5 TAHUN TERAKHIR
8	**DEMOKRASI LOKAL DALAM KERANGKA POLITIK NASIONAL** Terkait dengan seberapa jauh demokrasi lokal dan otonomi daerah berjalan. Apakah keduanya membuka peluang bagi warga untuk mengontrol dan mempengaruhi politik lokal, atau apakah keduanya dikontrol oleh aktor yang memiliki kekuasaan atau kepentingan, termasuk mereka yang berasal dari luar kota/kabupaten? Apakah desentralisasi menciptakan perbedaan?	a. [ ] Baik b. [ ] Sedang c. [ ] Buruk	a. [ ] Membaik b. [ ] Memburuk c. [ ] Tidak berubah
9	**KONTROL DEMOKRATIS TERHADAP PENGGUNAAN INSTRUMEN KEKERASAN** Terkait dengan kapasitas untuk mengontrol penggunaan instrumen kekerasan. Seberapa jauh polisi dan militer, juga organisasi keamanan swasta dan beragam kelompok, termasuk satgas partai politik dan pamswakarsa, tunduk pada regulasi dan kontrol demokratis._	a. [ ] Baik b. [ ] Sedang c. [ ] Buruk	a. [ ] Membaik b. [ ] Memburuk c. [ ] Tidak berubah
10	**TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG TRANSPARAN, TIDAK BERPIHAK DAN AKUNTABEL** Terkait dengan pelembagaan dan pelaksanaan pemerintahan yang transparan, tidak memihak, dan akuntabel. Misalnya UU No 11/2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, transparansi proses penyaluran bantuan sosial, hibah sosial, dll.	a. [ ] Baik b. [ ] Sedang c. [ ] Buruk	a. [ ] Membaik b. [ ] Memburuk c. [ ] Tidak berubah
11	**INDEPENDENSI PEMERINTAH DALAM MEMBUAT KEPUTUSAN SERTA KAPASITAS UNTUK MENGIMPLEMENTASIKANNYA** Terkait dengan kemampuan pemerintah untuk terbebas dari pengaruh dan kepentingan aktor-aktor tertentu. Tak kalah penting, seberapa jauh pemerintah dan birokrasi mampu melaksanakan aturan serta keputusannya sendiri.	a. [ ] Baik b. [ ] Sedang c. [ ] Buruk	a. [ ] Membaik b. [ ] Memburuk c. [ ] Tidak berubah
12	**KEBEBASAN DAN KESEMPATAN YANG SETARA UNTUK MENGAKSES WACANA PUBLIK, BUDAYA DAN AKADEMIK** Terkait dengan misalnya substansi dan pelaksanaan UU Pers, UU Sisdiknas, dsb., termasuk mengenai kebebasan untuk menyelenggarakan seminar, pertunjukan musik dan kesenian, jajak pendapat publik, dan menulis opini di media massa..	a. [ ] Baik b. [ ] Sedang c. [ ] Buruk	a. [ ] Membaik b. [ ] Memburuk c. [ ] Tidak berubah

NO	ATURAN DAN REGULASI DEMOKRASI	Q2.1 PENILAIAN UMUM	Q2.2 PERUBAHAN 5 TAHUN TERAKHIR
13	**KEMAMPUAN MASYARAKAT SIPIL BERORGANISASI SECARA INDEPENDEN DAN DEMOKRATIS** Terkait misalnya dengan hukum dan implementasi kebijakan yang mengatur tentang hak berserikat dan berorganisasi, serta praktik demokrasi dan penerapan prinsip akuntabilitas di dalam organisasi masyarakat sipil. Misalnya substansi dan pelaksanaan aturan dan regulasi tentang ormas, yayasan; juga mengenai aturan internal organisasi dalam melakukan pemilihan ketua dan pelaksanaan rapat-rapatnya.	a. [ ] Baik b. [ ] Sedang c. [ ] Buruk	a. [ ] Membaik b. [ ] Memburuk c. [ ] Tidak berubah

Q2.3. **Menurut Anda**, praktik informal (adat, kebiasaan, tradisi, budaya dsb.) seperti apa yang *mendukung* aturan dan regulasi demokrasi sebagaimana tertera pada Tabel E?

Q2.4. **Menurut Anda**, praktik informal (adat, kebiasaan, tradisi, budaya dsb.) seperti apa yang *membatasi atau bertentangan* dengan aturan dan regulasi demokrasi sebagaimana tertera pada Tabel E?

TABEL E

NO	ATURAN DAN REGULASI DEMOKRASI	Q2.3 PRAKTIK INFORMAL YANG MENDUKUNG INSTITUSI FORMAL DEMOKRASI	Q2.4 PRAKTIK INFORMAL YANG MEMBATASI ATAU BERLAWANAN DENGAN INSTITUSI FORMAL DEMOKRASI
1	Kewarganegaraan yang setara dan inklusif	....	....
2	Aturan Hukum (termasuk hukum internasional dan konvensi-konvensi PBB)	....	....
3	Kesetaraan di depan hukum	....	....
4	Hak Asasi Manusia yang universal	....	....
5	Perwakilan politik yang demokratis melalui partai politik dan pemilu	....	....
6	Partisipasi berbasis hak-hak warga negara dalam tatakelola publik	....	....

NO	ATURAN DAN REGULASI DEMOKRASI	Q2.3	Q2.4
		PRAKTIK INFORMAL YANG MENDUKUNG INSTITUSI FORMAL DEMOKRASI	PRAKTIK INFORMAL YANG MEMBATASI ATAU BERLAWANAN DENGAN INSTITUSI FORMAL DEMOKRASI
7	Saluran kepentingan yang terlembaga dan saluran representasi berbasis isu dalam tatakelola publik	....	....
8	Demokrasi lokal dalam kerangka politik nasional	....	....
9	Kontrol demokratis terhadap penggunaan instrumen kekerasan	....	....
10	Tatakelola pemerintahan yang transparan, tidak berpihak dan akuntabel	....	....
11	Indepedensi pemerintah dalam membuat keputusan serta kapasitas untuk mengimplementasikannya	....	....
12	Kebebasan dan kesempatan yang setara untuk mengakses wacana publik, budaya dan akademik	....	....
13	Kemampuan masyarakat sipil berorganisasi secara independen dan demokratis	....	....

Pada bagian ini kita menggali peran aktor dalam pengelolaan urusan publik. Posisi aktor dalam demokrasi sangat esensial karena kinerja institusi demokrasi tergantung pada orang-orang yang menggunakannya. Secara lebih khusus, bagian ini akan mengidentifikasi aktor-aktor utama (aktor berpengaruh) dan asal-usul mereka secara sosial, politik dan ekonomi.

BAGIAN 3

AKTOR UTAMA DALAM URUSAN PUBLIK

Q3.1. Menurut Anda, siapakah aktor-aktor utama, baik individu maupun kelompok, yang berpengaruh (misalnya: mendiskusikan, mendebat dan/atau membela) terhadap urusan publik di kota/kabupaten ini? (*Sebutkan 2-4 aktor di setiap arena sebagaimana tertera pada Tabel F*)

TABEL F

Q3.1. AKTOR UTAMA YANG BERPENGARUH TERHADAP URUSAN PUBLIK	
AKTOR UTAMA (NAMA DAN PROFESI)	**MENGAPA DAN BAGAIMANA PARA AKTOR ITU MENCOBA MEMPENGARUHI URUSAN PUBLIK?**
A. NEGARA DAN PEMERINTAHAN	
(1)	....
(2)	....
(3)	....
(4)	....
B. MASYARAKAT POLITIK (termasuk partai dan kelompok penekan dan kelompok kepentingan)	
(1)	....
(2)	....
(3)	....
(4)	....

Q3.1. AKTOR UTAMA YANG BERPENGARUH TERHADAP URUSAN PUBLIK	
AKTOR UTAMA (NAMA DAN PROFESI)	**MENGAPA DAN BAGAIMANA PARA AKTOR ITU MENCOBA MEMPENGARUHI URUSAN PUBLIK?**
C. DUNIA USAHA	
(1)	....
(2)	....
(3)	....
(4)	....
D. MASYARAKAT SIPIL (misalnya LSM, serikat buruh, organisasi petani, komunitas warga)	
(1)	....
(2)	....
(3)	....
(4)	....

Q3.2. Dari aktor-aktor berpengaruh yang telah Anda sebutkan (Q3.1), siapakah aktor yang paling dominan (entah demokratis atau pun tidak) dalam pengelolaan urusan publik di kota/kabupaten ini? (*Sebutkan dua aktor*)

Q3.2. AKTOR DOMINAN	
AKTOR DOMINAN 1 (DOM-1)	....
AKTOR DOMINAN 2 (DOM-2)	....

Q3.3. Dari aktor-aktor berpengaruh yang telah Anda sebutkan (Q3.1), siapakah aktor yang bersikap paling kritis terhadap dua aktor dominan yang baru saja Anda sebutkan sekaligus melontarkan gagasan-gagasan alternatif untuk perubahan? (*Sebutkan dua aktor*)

Q3.3. AKTOR ALTERNATIF	
AKTOR ALTERNATIF 1 (ALT-1)	....
AKTOR ALTERNATIF 2 (ALT-2)	....

Pada bagian ini kita mengeksplorasi lebih mendalam relasi antara institusi demokrasi/aturan dan regulasi (Bagian 2), dan para Aktor Utama (Bagian 3). Kepatuhan para Aktor Utama untuk mengikuti aturan dan regulasi demokrasi merupakan hal yang sangat penting.
Secara khusus kita ingin memahami bagaimana para Aktor Utama mempromosikan atau menyalahgunakan/ mengabaikan aturan dan regulasi demokrasi yang ada.

BAGIAN 4

RELASI AKTOR TERHADAP ATURAN DAN REGULASI DEMOKRASI

Q4.1. **Dalam penilaian Anda**, bagaimana para Aktor Dominan (Q3.2) *mempromosikan* aturan dan regulasi demokrasi dalam rangka memperjuangkan kepentingan mereka?

TABEL G

NO	ATURAN DAN REGULASI DEMOKRASI	Q4.1. CARA AKTOR DOMINAN MEMPROMOSIKAN ATURAN DAN REGULASI DEMOKRASI	
		DOM-1	DOM-2
1	Kewarganegaraan yang setara dan inklusif	a. [ ] Jelaskan..... b. [ ] Jarang/Tidak pernah mempromosikan aturan dan regulasi ini	a. [ ] Jelaskan..... b. [ ] Jarang/Tidak pernah mempromosikan aturan dan regulasi ini
2	Aturan Hukum (termasuk hukum internasional dan konvensi-konvensi PBB)	a. [ ] Jelaskan..... b. [ ] Jarang/Tidak pernah mempromosikan aturan dan regulasi ini	a. [ ] Jelaskan..... b. [ ] Jarang/Tidak pernah mempromosikan aturan dan regulasi ini
3	Kesetaraan di depan hukum	a. [ ] Jelaskan..... b. [ ] Jarang/Tidak pernah mempromosikan aturan dan regulasi ini	a. [ ] Jelaskan..... b. [ ] Jarang/Tidak pernah mempromosikan aturan dan regulasi ini
4	Hak Asasi Manusia yang universal	a. [ ] Jelaskan..... b. [ ] Jarang/Tidak pernah mempromosikan aturan dan regulasi ini	a. [ ] Jelaskan..... b. [ ] Jarang/Tidak pernah mempromosikan aturan dan regulasi ini

NO	ATURAN DAN REGULASI DEMOKRASI	Q4.1. CARA AKTOR DOMINAN MEMPROMOSIKAN ATURAN DAN REGULASI DEMOKRASI	
		DOM-1	DOM-2
5	Perwakilan politik yang demokratis melalui partai politik dan pemilu	a. [ ] Jelaskan..... b. [ ] Jarang/Tidak pernah mempromosikan aturan dan regulasi ini	a. [ ] Jelaskan..... b. [ ] Jarang/Tidak pernah mempromosikan aturan dan regulasi ini
6	Partisipasi berbasis hak-hak warga negara dalam tatakelola publik	a. [ ] Jelaskan..... b. [ ] Jarang/Tidak pernah mempromosikan aturan dan regulasi ini	a. [ ] Jelaskan..... b. [ ] Jarang/Tidak pernah mempromosikan aturan dan regulasi ini
7	Saluran kepentingan yang terlembaga dan saluran representasi berbasis isu dalam tatakelola publik	a. [ ] Jelaskan..... b. [ ] Jarang/Tidak pernah mempromosikan aturan dan regulasi ini	a. [ ] Jelaskan..... b. [ ] Jarang/Tidak pernah mempromosikan aturan dan regulasi ini
8	Demokrasi lokal dalam kerangka politik nasional	a. [ ] Jelaskan..... b. [ ] Jarang/Tidak pernah mempromosikan aturan dan regulasi ini	a. [ ] Jelaskan..... b. [ ] Jarang/Tidak pernah mempromosikan aturan dan regulasi ini
9	Kontrol demokratis terhadap penggunaan instrumen kekerasan	a. [ ] Jelaskan..... b. [ ] Jarang/Tidak pernah mempromosikan aturan dan regulasi ini	a. [ ] Jelaskan..... b. [ ] Jarang/Tidak pernah mempromosikan aturan dan regulasi ini
10	Tatakelola pemerintahan yang transparan, tidak berpihak dan akuntabel	a. [ ] Jelaskan..... b. [ ] Jarang/Tidak pernah mempromosikan aturan dan regulasi ini	a. [ ] Jelaskan..... b. [ ] Jarang/Tidak pernah mempromosikan aturan dan regulasi ini
11	Indepedensi pemerintah dalam membuat keputusan serta kapasitas untuk mengimplementasikannya	a. [ ] Jelaskan..... b. [ ] Jarang/Tidak pernah mempromosikan aturan dan regulasi ini	a. [ ] Jelaskan..... b. [ ] Jarang/Tidak pernah mempromosikan aturan dan regulasi ini
12	Kebebasan dan kesempatan yang setara untuk mengakses wacana publik, budaya dan akademik	a. [ ] Jelaskan..... b. [ ] Jarang/Tidak pernah mempromosikan aturan dan regulasi ini	a. [ ] Jelaskan..... b. [ ] Jarang/Tidak pernah mempromosikan aturan dan regulasi ini
13	Kemampuan masyarakat sipil berorganisasi secara independen dan demokratis	a. [ ] Jelaskan..... b. [ ] Jarang/Tidak pernah mempromosikan aturan dan regulasi ini	a. [ ] Jelaskan..... b. [ ] Jarang/Tidak pernah mempromosikan aturan dan regulasi ini

Q4.2. **Dalam penilaian Anda**, bagaimana para Aktor Alternatif (Q3.3) *mempromosikan* aturan dan regulasi demokrasi dalam rangka memperjuangkan kepentingan mereka?

TABEL H

NO	ATURAN DAN REGULASI DEMOKRASI	Q4.2. CARA AKTOR DOMINAN MEMPROMOSIKAN ATURAN DAN REGULASI DEMOKRASI	
		DOM-1	DOM-2
1	Kewarganegaraan yang setara dan inklusif	a. [ ] Jelaskan..... b. [ ] Jarang/Tidak pernah mempromosikan aturan dan regulasi ini	a. [ ] Jelaskan..... b. [ ] Jarang/Tidak pernah mempromosikan aturan dan regulasi ini
2	Aturan Hukum (termasuk hukum internasional dan konvensi-konvensi PBB)	a. [ ] Jelaskan..... b. [ ] Jarang/Tidak pernah mempromosikan aturan dan regulasi ini	a. [ ] Jelaskan..... b. [ ] Jarang/Tidak pernah mempromosikan aturan dan regulasi ini
3	Kesetaraan di depan hukum	a. [ ] Jelaskan..... b. [ ] Jarang/Tidak pernah mempromosikan aturan dan regulasi ini	a. [ ] Jelaskan..... b. [ ] Jarang/Tidak pernah mempromosikan aturan dan regulasi ini
4	Hak Asasi Manusia yang universal	a. [ ] Jelaskan..... b. [ ] Jarang/Tidak pernah mempromosikan aturan dan regulasi ini	a. [ ] Jelaskan..... b. [ ] Jarang/Tidak pernah mempromosikan aturan dan regulasi ini
5	Perwakilan politik yang demokratis melalui partai politik dan pemilu	a. [ ] Jelaskan..... b. [ ] Jarang/Tidak pernah mempromosikan aturan dan regulasi ini	a. [ ] Jelaskan..... b. [ ] Jarang/Tidak pernah mempromosikan aturan dan regulasi ini
6	Partisipasi berbasis hak-hak warga negara dalam tatakelola publik	a. [ ] Jelaskan..... b. [ ] Jarang/Tidak pernah mempromosikan aturan dan regulasi ini	a. [ ] Jelaskan..... b. [ ] Jarang/Tidak pernah mempromosikan aturan dan regulasi ini
7	Saluran kepentingan yang terlembaga dan saluran representasi berbasis isu dalam tatakelola publik	a. [ ] Jelaskan..... b. [ ] Jarang/Tidak pernah mempromosikan aturan dan regulasi ini	a. [ ] Jelaskan..... b. [ ] Jarang/Tidak pernah mempromosikan aturan dan regulasi ini
8	Demokrasi lokal dalam kerangka politik nasional	a. [ ] Jelaskan..... b. [ ] Jarang/Tidak pernah mempromosikan aturan dan regulasi ini	a. [ ] Jelaskan..... b. [ ] Jarang/Tidak pernah mempromosikan aturan dan regulasi ini
9	Kontrol demokratis terhadap penggunaan instrumen kekerasan	a. [ ] Jelaskan..... b. [ ] Jarang/Tidak pernah mempromosikan aturan dan regulasi ini	a. [ ] Jelaskan..... b. [ ] Jarang/Tidak pernah mempromosikan aturan dan regulasi ini

NO	ATURAN DAN REGULASI DEMOKRASI	Q4.2. CARA AKTOR DOMINAN MEMPROMOSIKAN ATURAN DAN REGULASI DEMOKRASI	
		DOM-1	DOM-2
10	Tatakelola pemerintahan yang transparan, tidak berpihak dan akuntabel	a. [ ] Jelaskan..... b. [ ] Jarang/Tidak pernah mempromosikan aturan dan regulasi ini	a. [ ] Jelaskan..... b. [ ] Jarang/Tidak pernah mempromosikan aturan dan regulasi ini
11	Indepedensi pemerintah dalam membuat keputusan serta kapasitas untuk mengimplementasikannya	a. [ ] Jelaskan..... b. [ ] Jarang/Tidak pernah mempromosikan aturan dan regulasi ini	a. [ ] Jelaskan..... b. [ ] Jarang/Tidak pernah mempromosikan aturan dan regulasi ini
12	Kebebasan dan kesempatan yang setara untuk mengakses wacana publik, budaya dan akademik	a. [ ] Jelaskan..... b. [ ] Jarang/Tidak pernah mempromosikan aturan dan regulasi ini	a. [ ] Jelaskan..... b. [ ] Jarang/Tidak pernah mempromosikan aturan dan regulasi ini
13	Kemampuan masyarakat sipil berorganisasi secara independen dan demokratis	a. [ ] Jelaskan..... b. [ ] Jarang/Tidak pernah mempromosikan aturan dan regulasi ini	a. [ ] Jelaskan..... b. [ ] Jarang/Tidak pernah mempromosikan aturan dan regulasi ini

Q4.3. **Dalam penilaian Anda**, bagaimana para Aktor Dominan (Q3.2) *menyalahgunakan atau mengabaikan* aturan dan regulasi demokrasi dalam rangka memperjuangkan kepentingan mereka?

TABEL I

NO	ATURAN DAN REGULASI DEMOKRASI	Q4.3. CARA AKTOR DOMINAN MEMPROMOSIKAN ATURAN DAN REGULASI DEMOKRASI	
		DOM-1	DOM-2
1	Kewarganegaraan yang setara dan inklusif	a. [ ] Jelaskan..... b. [ ] Jarang/Tidak pernah mempromosikan aturan dan regulasi ini	a. [ ] Jelaskan..... b. [ ] Jarang/Tidak pernah mempromosikan aturan dan regulasi ini
2	Aturan Hukum (termasuk hukum internasional dan konvensi-konvensi PBB)	a. [ ] Jelaskan..... b. [ ] Jarang/Tidak pernah mempromosikan aturan dan regulasi ini	a. [ ] Jelaskan..... b. [ ] Jarang/Tidak pernah mempromosikan aturan dan regulasi ini
3	Kesetaraan di depan hukum	a. [ ] Jelaskan..... b. [ ] Jarang/Tidak pernah mempromosikan aturan dan regulasi ini	a. [ ] Jelaskan..... b. [ ] Jarang/Tidak pernah mempromosikan aturan dan regulasi ini

NO	ATURAN DAN REGULASI DEMOKRASI	Q4.3. CARA AKTOR DOMINAN MEMPROMOSIKAN ATURAN DAN REGULASI DEMOKRASI	
		DOM-1	DOM-2
4	Hak Asasi Manusia yang universal	a. [ ] Jelaskan..... b. [ ] Jarang/Tidak pernah mempromosikan aturan dan regulasi ini	a. [ ] Jelaskan..... b. [ ] Jarang/Tidak pernah mempromosikan aturan dan regulasi ini
5	Perwakilan politik yang demokratis melalui partai politik dan pemilu	a. [ ] Jelaskan..... b. [ ] Jarang/Tidak pernah mempromosikan aturan dan regulasi ini	a. [ ] Jelaskan..... b. [ ] Jarang/Tidak pernah mempromosikan aturan dan regulasi ini
6	Partisipasi berbasis hak-hak warga negara dalam tatakelola publik	a. [ ] Jelaskan..... b. [ ] Jarang/Tidak pernah mempromosikan aturan dan regulasi ini	a. [ ] Jelaskan..... b. [ ] Jarang/Tidak pernah mempromosikan aturan dan regulasi ini
7	Saluran kepentingan yang terlembaga dan saluran representasi berbasis isu dalam tatakelola publik	a. [ ] Jelaskan..... b. [ ] Jarang/Tidak pernah mempromosikan aturan dan regulasi ini	a. [ ] Jelaskan..... b. [ ] Jarang/Tidak pernah mempromosikan aturan dan regulasi ini
8	Demokrasi lokal dalam kerangka politik nasional	a. [ ] Jelaskan..... b. [ ] Jarang/Tidak pernah mempromosikan aturan dan regulasi ini	a. [ ] Jelaskan..... b. [ ] Jarang/Tidak pernah mempromosikan aturan dan regulasi ini
9	Kontrol demokratis terhadap penggunaan instrumen kekerasan	a. [ ] Jelaskan..... b. [ ] Jarang/Tidak pernah mempromosikan aturan dan regulasi ini	a. [ ] Jelaskan..... b. [ ] Jarang/Tidak pernah mempromosikan aturan dan regulasi ini
10	Tatakelola pemerintahan yang transparan, tidak berpihak dan akuntabel	a. [ ] Jelaskan..... b. [ ] Jarang/Tidak pernah mempromosikan aturan dan regulasi ini	a. [ ] Jelaskan..... b. [ ] Jarang/Tidak pernah mempromosikan aturan dan regulasi ini
11	Indepedensi pemerintah dalam membuat keputusan serta kapasitas untuk mengimplementasikannya	a. [ ] Jelaskan..... b. [ ] Jarang/Tidak pernah mempromosikan aturan dan regulasi ini	a. [ ] Jelaskan..... b. [ ] Jarang/Tidak pernah mempromosikan aturan dan regulasi ini
12	Kebebasan dan kesempatan yang setara untuk mengakses wacana publik, budaya dan akademik	a. [ ] Jelaskan..... b. [ ] Jarang/Tidak pernah mempromosikan aturan dan regulasi ini	a. [ ] Jelaskan..... b. [ ] Jarang/Tidak pernah mempromosikan aturan dan regulasi ini
13	Kemampuan masyarakat sipil berorganisasi secara independen dan demokratis	a. [ ] Jelaskan..... b. [ ] Jarang/Tidak pernah mempromosikan aturan dan regulasi ini	a. [ ] Jelaskan..... b. [ ] Jarang/Tidak pernah mempromosikan aturan dan regulasi ini

Q4.4. **Dalam penilaian Anda**, bagaimana para Aktor Alternatif (Q3.3) *menyalahgunakan atau mengabaikan* aturan dan regulasi demokrasi dalam rangka memperjuangkan kepentingan mereka?

NO	ATURAN DAN REGULASI DEMOKRASI	Q4.4. CARA AKTOR DOMINAN MEMPROMOSIKAN ATURAN DAN REGULASI DEMOKRASI	
		DOM-1	DOM-2
1	Kewarganegaraan yang setara dan inklusif	a. [ ] Jelaskan..... b. [ ] Jarang/Tidak pernah mempromosikan aturan dan regulasi ini	a. [ ] Jelaskan..... b. [ ] Jarang/Tidak pernah mempromosikan aturan dan regulasi ini
2	Aturan Hukum (termasuk hukum internasional dan konvensi-konvensi PBB)	a. [ ] Jelaskan..... b. [ ] Jarang/Tidak pernah mempromosikan aturan dan regulasi ini	a. [ ] Jelaskan..... b. [ ] Jarang/Tidak pernah mempromosikan aturan dan regulasi ini
3	Kesetaraan di depan hukum	a. [ ] Jelaskan..... b. [ ] Jarang/Tidak pernah mempromosikan aturan dan regulasi ini	a. [ ] Jelaskan..... b. [ ] Jarang/Tidak pernah mempromosikan aturan dan regulasi ini
4	Hak Asasi Manusia yang universal	a. [ ] Jelaskan..... b. [ ] Jarang/Tidak pernah mempromosikan aturan dan regulasi ini	a. [ ] Jelaskan..... b. [ ] Jarang/Tidak pernah mempromosikan aturan dan regulasi ini
5	Perwakilan politik yang demokratis melalui partai politik dan pemilu	a. [ ] Jelaskan..... b. [ ] Jarang/Tidak pernah mempromosikan aturan dan regulasi ini	a. [ ] Jelaskan..... b. [ ] Jarang/Tidak pernah mempromosikan aturan dan regulasi ini
6	Partisipasi berbasis hak-hak warga negara dalam tatakelola publik	a. [ ] Jelaskan..... b. [ ] Jarang/Tidak pernah mempromosikan aturan dan regulasi ini	a. [ ] Jelaskan..... b. [ ] Jarang/Tidak pernah mempromosikan aturan dan regulasi ini
7	Saluran kepentingan yang terlembaga dan saluran representasi berbasis isu dalam tatakelola publik	a. [ ] Jelaskan..... b. [ ] Jarang/Tidak pernah mempromosikan aturan dan regulasi ini	a. [ ] Jelaskan..... b. [ ] Jarang/Tidak pernah mempromosikan aturan dan regulasi ini
8	Demokrasi lokal dalam kerangka politik nasional	a. [ ] Jelaskan..... b. [ ] Jarang/Tidak pernah mempromosikan aturan dan regulasi ini	a. [ ] Jelaskan..... b. [ ] Jarang/Tidak pernah mempromosikan aturan dan regulasi ini

NO	ATURAN DAN REGULASI DEMOKRASI	Q4.4. CARA AKTOR DOMINAN MEMPROMOSIKAN ATURAN DAN REGULASI DEMOKRASI	
		DOM-1	DOM-2
9	Kontrol demokratis terhadap penggunaan instrumen kekerasan	a. [ ] Jelaskan..... b. [ ] Jarang/Tidak pernah mempromosikan aturan dan regulasi ini	a. [ ] Jelaskan..... b. [ ] Jarang/Tidak pernah mempromosikan aturan dan regulasi ini
10	Tatakelola pemerintahan yang transparan, tidak berpihak dan akuntabel	a. [ ] Jelaskan..... b. [ ] Jarang/Tidak pernah mempromosikan aturan dan regulasi ini	a. [ ] Jelaskan..... b. [ ] Jarang/Tidak pernah mempromosikan aturan dan regulasi ini
11	Indepedensi pemerintah dalam membuat keputusan serta kapasitas untuk mengimplementasikannya	a. [ ] Jelaskan..... b. [ ] Jarang/Tidak pernah mempromosikan aturan dan regulasi ini	a. [ ] Jelaskan..... b. [ ] Jarang/Tidak pernah mempromosikan aturan dan regulasi ini
12	Kebebasan dan kesempatan yang setara untuk mengakses wacana publik, budaya dan akademik	a. [ ] Jelaskan..... b. [ ] Jarang/Tidak pernah mempromosikan aturan dan regulasi ini	a. [ ] Jelaskan..... b. [ ] Jarang/Tidak pernah mempromosikan aturan dan regulasi ini

Fokus pada bagian ini adalah kapasitas politik aktor. Ada lima aspek kapasitas yang akan kita eksplorasi, yakni: a) kapasitas melakukan inklusi politik (versus eksklusi) di sektor-sektor penting kehidupan publik, b) kapasitas memperoleh legitimasi, c) kapasitas melakukan politisasi dan menciptakan agenda, d) kapasitas melakukan mobilisasi dan organisasi, dan e) kapasitas meningkatkan partisipasi dan representasi.

Secara khusus kita akan mendalami bagaimana kapasitas politik setiap Aktor Utama yang telah diidentifikasi pada Bagian 3 (Q3.2 dan Q3.3).

BAGIAN 5

KAPASITAS AKTOR

A. KAPASITAS MELAKUKAN INKLUSI – *Demokratisasi menghendaki agar semua kelompok sosial tidak tereksklusi dari keterlibatan untuk melakukan kontrol terhadap urusan publik. Aktor harus mampu mendorong inklusi politik dan menciptakan popular control.*

Apa kapasitas aktor utama untuk melawan proses marginalisasi (politik, ekonomi, sosial) sehingga tercapai politik yang inklusif?

Q5.1. Dalam penilaian Anda, cara-cara apa saja yang biasa digunakan untuk membuat orang kebanyakan (orang awam) terlibat di dalam proses politik di kota/kabupaten ini? (*Anda boleh memilih lebih dari satu jawaban dari tiga alternatif berikut ini, atau tambahkan kategori baru jika perlu*)

a. [ ] Politik (contoh: didaftar sebagai pemilih dalam pemilu, boleh menduduki jabatan formal maupun informal)
b. [ ] Ekonomi (contoh: mendapatkan ijin usaha, bebas berjualan di sebuah wilayah tertentu)
c. [ ] Sosial dan budaya (contoh: diundang dalam kegiatan kampung, bebas memiliki tanah/rumah di wilayah tertentu)
d. [ ] Lain-lain (sebutkan) .....
.....

Q5.2. **Menurut penilaian Anda**, apakah para Aktor Dominan (Q3.2) dan Aktor Alternatif (Q3.3) melakukan inklusi dalam proses politik terhadap Aktor Utama lainnya atau orang-orang lain?

Q5.2. APAKAH AKTOR DOMINAN DAN ALTERNATIF MELAKUKAN INKLUSI TERHADAP AKTOR UTAMA ATAU ORANG LAIN?			
AKTOR DOMINAN		AKTOR ALTERNATIF	
DOM-1	a. [ ] Ya b. [ ] Tidak (langsung ke Q5.5)	ALT-1	a. [ ] Ya b. [ ] Tidak (langsung ke Q5.5)
DOM-2	a. [ ] Ya b. [ ] Tidak (langsung ke Q5.5)	ALT-2	a. [ ] Ya b. [ ] Tidak (langsung ke Q5.5)

Q5.3. **Menurut penilaian Anda,** terhadap siapa sajakah masing-masing Aktor Dominan dan Aktor Alternatif melakukan inklusi dalam proses politik? (*Anda boleh memilih lebih dari satu jawaban*)

Q5.4. **Menurut penilaian Anda,** pada sektor-sektor apa sajakah proses inklusi yang dilakukan oleh para Aktor Dominan dan Aktor Alternatif itu berlangsung? (*Mohon jelaskan dan berikan contohnya*)

AKTOR UTAMA	Q5.3. SIAPA YANG DIINKLUSI	Q5.4 SEKTOR INKLUSI	Q5.4 CONTOH
DOM-1	a. [ ] Aktor Dominan 2 b. [ ] Aktor Alternatif 1 c. [ ] Aktor Alternatif 2 d. [ ] Pihak lain (jelaskan) ..... e. [ ] Tidak relevan (karena tidak melakukan inklusi sesuai jawaban Q5.2)	....	....
DOM-2	a. [ ] Aktor Dominan 1 b. [ ] Aktor Alternatif 1 c. [ ] Aktor Alternatif 2 d. [ ] Pihak lain (jelaskan) ..... e. [ ] Tidak relevan (karena tidak melakukan inklusi sesuai jawaban Q5.2)	....	....
ALT-1	a. [ ] Aktor Dominan 1 b. [ ] Aktor Dominan 2 c. [ ] Aktor Alternatif 2 d. [ ] Pihak lain (jelaskan) ..... e. [ ] Tidak relevan (karena tidak melakukan inklusi sesuai jawaban Q5.2)	....	....
ALT-2	a. [ ] Aktor Dominan 1 b. [ ] Aktor Dominan 2 c. [ ] Aktor Alternatif 1 d. [ ] Pihak lain (jelaskan) ..... e. [ ] Tidak relevan (karena tidak melakukan inklusi sesuai jawaban Q5.2)	....	....

Q5.5. **Menurut penilaian Anda**, apakah para Aktor Dominan dan Aktor Alternatif yang telah disebutkan pada Bagian 3 melakukan eksklusi dalam proses politik terhadap para Aktor Utama lainnya atau orang-orang lain?

Q5.5. APAKAH AKTOR DOMINAN DAN ALTERNATIF MELAKUKAN EKSKLUSI TERHADAP AKTOR UTAMA ATAU ORANG LAIN?			
AKTOR DOMINAN		AKTOR ALTERNATIF	
DOM-1	a. [ ] Ya b. [ ] Tidak (langsung ke Q5.8)	ALT-1	a. [ ] Ya b. [ ] Tidak (langsung ke Q5.8)
DOM-2	a. [ ] Ya b. [ ] Tidak (langsung ke Q5.8)	ALT-2	a. [ ] Ya b. [ ] Tidak (langsung ke Q5.8)

Q5.6. **Menurut penilaian Anda**, terhadap siapakah masing-masing Aktor Dominan dan Aktor Alternatif melakukan eksklusi dalam proses politik? (*Anda boleh memilih lebih dari satu jawaban*)

Q5.7. **Menurut penilaian Anda**, pada sektor-sektor apa sajakah proses eksklusi yang dilakukan oleh para Aktor Dominan dan Aktor Alternatif itu berlangsung? (*Mohon jelaskan dan berikan contohnya*)

AKTOR UTAMA	Q5.6	Q5.7	
	SIAPA YANG DIINKLUSI	SEKTOR INKLUSI	CONTOH
DOM-1	a. [ ] Aktor Dominan 2 b. [ ] Aktor Alternatif 1 c. [ ] Aktor Alternatif 2 d. [ ] Pihak lain (jelaskan) ..... e. [ ] Tidak relevan (karena tidak melakukan inklusi sesuai jawaban Q5.5)	....	....
DOM-2	a. [ ] Aktor Dominan 1 b. [ ] Aktor Alternatif 1 c. [ ] Aktor Alternatif 2 d. [ ] Pihak lain (jelaskan) ..... e. [ ] Tidak relevan (karena tidak melakukan inklusi sesuai jawaban Q5.5)	....	....
ALT-1	a. [ ] Aktor Dominan 1 b. [ ] Aktor Dominan 2 c. [ ] Aktor Alternatif 2 d. [ ] Pihak lain (jelaskan) ..... e. [ ] Tidak relevan (karena tidak melakukan inklusi sesuai jawaban Q5.5)	....	....
ALT-2	a. [ ] Aktor Dominan 1 b. [ ] Aktor Dominan 2 c. [ ] Aktor Alternatif 1 d. [ ] Pihak lain (jelaskan) ..... e. [ ] Tidak relevan (karena tidak melakukan inklusi sesuai jawaban Q5.5)	....	....

Q5.8. **Menurut penilaian Anda,** apa saja cara-cara yang biasa dilakukan oleh masing-masing Aktor Dominan dan Aktor Alternatif untuk mengatasi eksklusi dalam proses politik?

Q5.8. CARA AKTOR DOMINAN DAN ALTERNATIF MENGATASI EKSKLUSI			
AKTOR DOMINAN		AKTOR ALTERNATIF	
DOM-1	....	ALT-1	....
DOM-2	....	ALT-2	....

Q5.9. **Menurut penilaian Anda**, adakah aktor lain (di luar Aktor Dominan dan Aktor Alternatif) yang melakukan eksklusi/marginalisasi terhadap orang-orang di kota/kabupaten ini? (*Anda boleh memilih lebih dari satu jawaban*)

Q5.10. **Menurut penilaian Anda**, pada sektor-sektor apa sajakah proses eksklusi yang dilakukan oleh orang-orang selain Aktor Dominan dan Aktor Alternatif itu berlangsung? (*Mohon jelaskan dan berikan contohnya*)

Q5.9.		Q5.10.
AKTOR LAIN YANG MELAKUKAN EKSKLUSI/ MARGINALISASI		SEKTOR EKSKLUSI DAN CONTOHNYA
a. [ ] AKTOR POLITK	....	....
b. [ ] AKTOR BISNIS	....	....
c. [ ] AKTOR SOSIAL-BUDAYA	....	....

Q5.11. **Menurut Anda**, kebijakan seperti apa yang diperlukan agar semua orang terinklusi dalam kehidupan politik di kota/kabupaten ini? (*Pilih salah satu dan jelaskan berikut contohnya*)

a. [ ] Kebijakan afirmatif, Jelaskan: ....

b. [ ] Persamaan hak, Jelaskan: ....

***B. KAPASITAS MEMPEROLEH LEGITIMASI** – Pengetahuan mengenai bagaimana berbagai basis kekuatan (modal) para Aktor Utama ditransformasikan menjadi kekuasaan otoritatif/ menentukan adalah hal yang krusial ketika kita ingin menjelaskan masalah dan peluang demokrasi.*

Apa kapasitas para aktor dalam melakukan transformasi basis–basis kekuatan ekonomi, sosial, budaya dan koersif yang mereka miliki menjadi kekuasaan otoritatif/menentukan?

Q5.12. **Menurut Anda**, apa saja basis kekuatan yang dimiliki oleh masing-masing Aktor Dominan (Q3.2) dan Aktor Alternatif (Q3.3)? (*Pilih dua basis kekuatan untuk setiap aktor, lalu beri peringkat*)

AKTOR UTAMA	Q5.12. BASIS KEKUATAN AKTOR UTAMA			
	SUBER DAYA EKONOMI (BASIS EKONOMI)	HUBUNGAN SOSIAL (BASIS SOSIAL)	PENGETA-HUAN/ INFORMASI (BASIS BUDAYA)	TEKANAN, PAKSAAN (BASIS KOERSIF)
DOM-1	[ ]	[ ]	[ ]	[ ]
DOM-2	[ ]	[ ]	[ ]	[ ]
ALT-1	[ ]	[ ]	[ ]	[ ]
ALT-2	[ ]	[ ]	[ ]	[ ]

Q5.13. **Menurut penilaian Anda**, apakah masing-masing Aktor Dominan dan Aktor Alternatif mudah atau sulit menjadi pemimpin politik yang absah dan otoritatif? (*Jelaskan alasan jawaban Anda*)

AKTOR UTAMA	Q5.13.	
	TINGKAT KESULITAN MENJADI PEMIMPIN POLITIK YANG ABSAH DAN OTORITATIF	MENGAPA?
DOM-1	a. [ ] Mudah b. [ ] Sulit	....
DOM-2	a. [ ] Mudah b. [ ] Sulit	....
ALT-1	a. [ ] Mudah b. [ ] Sulit	....
ALT-2	a. [ ] Mudah b. [ ] Sulit	....

Q5.14. **Menurut penilaian Anda,** apa indikator keberhasilan masing-masing Aktor Dominan (Q3.2) dan Aktor Alternatif (Q3.3) dalam memanfaatkan basis ekonomi, sosial, budaya dan koersif yang mereka miliki (Q5.12) untuk memperoleh kekuasaan politik?

Q5.14. INDIKATOR KEBERHASILAN MEMANFAATKAN BASIS KEKUATAN			
AKTOR DOMINAN		AKTOR ALTERNATIF	
DOM-1	....	ALT-1	....
DOM-2	....	ALT-2	....

Q5.15. **Menurut penilaian Anda,** apa hambatan dan tantangan yang dihadapi oleh masing-masing Aktor Dominan (Q3.2) dan Aktor Alternatif (Q3.3) dalam memanfaatkan basis ekonomi, sosial, budaya dan koersif yang mereka miliki (Q5.12) untuk memperoleh kekuasaan politik?

Q5.15. HAMBATAN DAN TANTANGAN DALAM MEMANFAATKAN BASIS KEKUATAN			
AKTOR DOMINAN		AKTOR ALTERNATIF	
DOM-1	....	ALT-1	....
DOM-2	....	ALT-2	....

C. KAPASITAS MELAKUKAN POLITISASI DAN MENCIPTAKAN AGENDA

– Agenda-setting merupakan salah satu proses yang krusial dalam setiap proses politik. Oleh karena itu, menjadi penting untuk mengelaborasi bagaimana aktor berusaha mengidentifikasi dan menentukan isu-isu prioritas mereka. Selanjutnya, penting juga memahami bagaimana para aktor berusaha mentransformasikan isu-isu prioritas mereka menjadi agenda politik.

Apa kapasitas para aktor utama untuk mengubah persoalan-persoalan yang ada menjadi masalah publik dan agenda politik?

Q5.16. **Menurut Anda,** isu-isu apa saja yang diprioritaskan oleh masing-masing Aktor Dominan (Q3.2) dan Aktor Alternatif (Q3.3)?

Q5.16. ISU PRIORITAS AKTOR DOMINAN DAN AKTOR ALTERNATIF			
AKTOR DOMINAN		AKTOR ALTERNATIF	
DOM-1	....	ALT-1	....
DOM-2	....	ALT-2	....

Q5.17. Apa metode yang digunakan oleh masing-masing Aktor Dominan (Q3.2) dan Aktor Alternatif (Q3.3) dalam mengubah isu-isu prioritas mereka (Q5.16) menjadi agenda politik? (*Pilih tiga metode yang paling penting untuk setiap aktor, dan urutkan berdasarkan peringkat*)

Q5.17. METODE MENGUBAH ISU PRIORITAS BERSAMA MENJADI AGENDA POLITIK			
a. Terlibat aktif dalam partai politik dan menggunakan partai b. Terlibat aktif dalam organisasi-organisasi sosial c. Mendirikan stasiun radio atau televisi d. Menulis artikel untuk dipublikasikan di media		e. Memberi/menyediakan/memobilisasi dukungan politik f. Membuat petisi g. Demonstrasi, unjuk rasa h. Lain-lain	
DOM-1	DOM-2	ALT-1	ALT-2
1. [ ] 2. [ ] 3. [ ] Jelaskan jika pilihan [h]	1. [ ] 2. [ ] 3. [ ] Jelaskan jika pilihan [h]	1. [ ] 2. [ ] 3. [ ] Jelaskan jika pilihan [h]	1. [ ] 2. [ ] 3. [ ] Jelaskan jika pilihan [h] .....

Q5.18. **Menurut penilaian Anda**, apakah masing-masing Aktor Dominan (Q3.2) dan Aktor Alternatif (Q3.3) cenderung membingkai isu-isu prioritas mereka (Q5.16) sebagai isu yang bersifat tunggal atau sebagai isu yang bersifat strategis ketika memperjuangkan agenda politik mereka masing-masing? (*Pilih satu jawaban untuk setiap aktor*)

Q5.18. STRATEGI MEMBINGKAI ISU PRIORITAS			
AKTOR DOMINAN		AKTOR ALTERNATIF	
DOM-1	a. [ ] Bersifat tunggal b. [ ] Bersifat strategis	ALT-1	a. [ ] Bersifat tunggal b. [ ] Bersifat strategis
DOM-2	a. [ ] Bersifat tunggal b. [ ] Bersifat strategis	ALT-2	a. [ ] Bersifat tunggal b. [ ] Bersifat strategis

Q5.19. **Menurut penilaian Anda,** apa indikator keberhasilan masing-masing Aktor Dominan (Q3.2) dan Aktor Alternatif (Q3.3) dalam mengubah isu-isu prioritas mereka (Q5.16) menjadi isu publik dan agenda politik?

Q5.19. INDIKATOR KEBERHASILAN MENCIPTAKAN ISU PUBLIK DAN AGENDA POLITIK			
AKTOR DOMINAN		AKTOR ALTERNATIF	
DOM-1	....	ALT-1	....
DOM-2	....	ALT-2	....

Q5.20. **Menurut penilaian Anda,** apa hambatan dan tantangan yang dihadapi oleh masing-masing Aktor Dominan (Q3.2) dan Aktor Alternatif (Q3.3) dalam mengubah isu-isu prioritas mereka (Q5.16) menjadi isu publik dan agenda politik?

Q5.20. HAMBATAN DAN TANTANGAN DALAM MENCIPTAKAN ISU PUBLIK DAN AGENDA POLITIK			
AKTOR DOMINAN		AKTOR ALTERNATIF	
DOM-1	....	ALT-1	....
DOM-2	....	ALT-2	....

***D. KAPASITAS UNTUK MELAKUKAN MOBILISASI DAN MEMBANGUN ORGANISASI** – Para aktor harus mampu melakukan politisasi 'demos' (warga), yakni kemampuan mobilisasi dan mengorganisasikan dukungan bagi kepentingan-kepentingannya. Pada gilirannya hal ini menuntut adanya kapasitas untuk menghimpun orang-orang ke dalam politik, khususnya melalui mobilisasi dan organisasi.*

Apa kapasitas para aktor utama untuk memobilisasi dan mengorganisasi dukungan untuk memperjuangkan kepentingan mereka?

Q5.21. **Menurut penilaian Anda**, apa metode yang digunakan oleh masing-masing Aktor Dominan (Q3.2) dan Aktor Alternatif (Q3.3) dalam memobilisasi dan mengorganisasi dukungan untuk memperjuangkan kepentingan-kepentingan mereka? (*Pilih tiga metode yang paling sering digunakan oleh setiap aktor, lalu beri peringkat*)

TABEL L

Q5.21. METODE UNTUK MEMOBILISASI DAN MENGORGANISASI DUKUNGAN	
a. Menggunakan populisme (menyuarakan isu-isu yang populer dan membangun hubungan langsung antara elit dan massa). Contoh: Sukarno, Jokowi. b. Menggunakan kepemimpinan kharismatik. Contoh: Megawati, Abubakar Ba'asyir. c. Membangun patronase. Contoh: Suharto. d. Memberikan perlindungan dan dukungan. Contoh: Kegiatan advokasi yang dilakukan Kontras. e. Menyediakan kontak dengan tokoh-tokoh berpengaruh. Contoh: Denny Indrayana, Andi Arif, Dita Indah Sari, Eggy Sudjana.	f. Memanfaatkan koneksi keluarga dan klan. Contoh: Gubernur Ratu Atut di Banten. g. Membangun jaringan antara aktor-aktor yang memiliki kepentingan yang sama. Contoh: Mega-Amin-Gus Dur-Sultan membentuk 'Pakta Ciganjur' menjelang reformasi. h. Melakukan koordinasi/mengorganisasi kelompok-kelompok dan gerakan-gerakan yang terkait. Contoh: Gerakan antipolitisi busuk. i. Menyatukan berbagai jaringan individu dan kolektif, baik antar-sesama organisasi akar rumput maupun antara organisasi akar rumput dan jaringan aktivis nasional, dalam rangka memperkuat gerakan politik.

DOM-1	DOM-2	ALT-1	ALT-2
1. [ ] 2. [ ] 3. [ ]	1. [ ] 2. [ ] 3. [ ]	1. [ ] 2. [ ] 3. [ ]	1. [ ] 2. [ ] 3. [ ]

Q5.22. **Menurut penilaian Anda,** bagaimana cara masing-masing Aktor Dominan (Q3.2) dan Aktor Alternatif (Q3.3) menggunakan metode-metode untuk memobilisasi dan mengorganisasikan dukungan sebagaimana telah Anda sebutkan di atas (Q5.21)?

Q5.22. CARA AKTOR MENGGUNAKAN METODE MOBILISASI DAN MENGORGANISASIKAN DUKUNGAN			
AKTOR DOMINAN		AKTOR ALTERNATIF	
DOM-1	....	ALT-1	....
DOM-2	....	ALT-2	....

Q5.23. **Menurut penilaian Anda,** apa indikator keberhasilan masing-masing Aktor Dominan (Q3.2) dan Aktor Alternatif (Q3.3) dalam melakukan mobilisasi dan mengorganisasikan dukungan untuk memperjuangkan kepentingan mereka?

Q5.23. INDIKATOR KEBERHASILAN MEMOBILISASI DAN MENGORGANISASIKAN DUKUNGAN			
AKTOR DOMINAN		AKTOR ALTERNATIF	
DOM-1	....	ALT-1	....
DOM-2	....	ALT-2	....

Q5.24. **Menurut penilaian Anda,** apa hambatan dan tantangan yang dihadapi oleh masing-masing Aktor Dominan (Q3.2) dan Aktor Alternatif (Q3.3) dalam melakukan mobilisasi dan mengorganisasikan dukungan untuk memperjuangkan kepentingan mereka?

Q5.24. HAMBATAN DAN TANTANGAN DALAM MEMOBILISASI DAN MENGORGANISASIKAN DUKUNGAN			
AKTOR DOMINAN		AKTOR ALTERNATIF	
DOM-1	....	ALT-1	....
DOM-2	....	ALT-2	....

E. KAPASITAS UNTUK MENINGKATKAN PARTISIPASI DAN REPRESENTASI – *Pada dasarnya dalam rangka menciptakan kontrol popular terhadap urusan publik, orang kebanyakan (orang awam) harus mampu menggunakan berbagai saluran representasi dan partisipasi yang ada, melakukan reformasi terhadapnya, atau mengembangkan saluran-saluran baru agar dapat mempengaruhi lembaga-lembaga pengelola urusan publik. Yang paling perlu diperhatikan adalah keragaman saluran representasi dan bagaimana saluran-saluran itu terlegitimasi dan dimediasi oleh tokoh-tokoh tradisional, partai politik, organisasi kepentingan, mekanisme korporatis dan/atau partisipasi langsung.*

Apa saja pola dan kapasitas para aktor untuk menggunakan dan mengembangkan saluran-saluran representasi dan partisipasi yang telah ada?

Q5.25. **Menurut penilaian Anda**, kepada lembaga urusan publik apakah masing-masing Aktor Dominan (Q3.2) menyelesaikan persoalan-persoalan yang mereka hadapi dalam memperjuangkan kepentingan mereka?

Q5.26. **Menurut penilaian Anda**, melalui agen perantara apakah masing-masing Aktor Dominan (Q3.2) membawa persoalan-persoalan yang mereka hadapi untuk disalurkan ke dalam lembaga-lembaga urusan publik?

Untuk setiap Aktor Dominan, pilihlah dua lembaga urusan publik dan tiga agen perantara yang paling sering dimanfaatkan, sebagaimana tertera pada tabel berikut ini.

AKTOR DOMI-NAN	Q5.25. LEMBAGA URUSAN PUBLIK	Q5.26. AGEN-AGEN PERANTARA
DOM-1	a. [ ] Tatakelola privat b. [ ] Tatakelola berbasis komunitas dan masyarakat sipil yang independen c. [ ] Tata kelola hasil kerja sama pemerintah dan pemangku kepentingan d. [ ] Birokrasi sipil dan militer e. [ ] Peradilan dan kepolisian f. [ ] Eksekutif pemerintah	a. [ ] Organisasi masyarakat sipil b. [ ] Media c. [ ] Kelompok kepentingan d. [ ] Partisipasi langsung individual sebagai bagian pemangku kepentingan. e. [ ] Masyarakat politik (parpol, parlemen, tokoh partai, anggota parlemen dan kandidat-kandidat pejabat publik di berbagai level administrasi pemerintahan) f. [ ] Pemimpin dan tokoh informal g. [ ] Tidak menggunakan agen perantara (*By pass*)
DOM-2	a. [ ] Tatakelola privat b. [ ] Tatakelola berbasis komunitas dan masyarakat sipil yang independen c. [ ] Tata kelola hasil kerja sama pemerintah dan pemangku kepentingan d. [ ] Birokrasi sipil dan militer e. [ ] Peradilan dan kepolisian f. [ ] Eksekutif pemerintah	a. [ ] Organisasi masyarakat sipil b. [ ] Media c. [ ] Kelompok kepentingan d. [ ] Partisipasi langsung individual sebagai bagian pemangku kepentingan. e. [ ] Masyarakat politik (parpol, parlemen, tokoh partai, anggota parlemen dan kandidat-kandidat pejabat publik di berbagai level administrasi pemerintahan) f. [ ] Pemimpin dan tokoh informal g. [ ] Tidak menggunakan agen perantara (*By pass*)

Q5.27. **Menurut penilaian Anda**, kepada lembaga urusan publik apakah masing-masing Aktor Alternatif (Q3.3) menyelesaikan persoalan-persoalan yang mereka hadapi dalam memperjuangkan kepentingan mereka?

Q5.28. **Menurut penilaian Anda**, melalui agen perantara apakah masing-masing Aktor Alternatif (Q3.3) membawa persoalan-persoalan yang mereka hadapi untuk disalurkan ke dalam lembaga-lembaga urusan publik?

Untuk setiap Aktor Alternatif, pilihlah dua lembaga urusan publik dan tiga agen perantara yang paling sering dimanfaatkan, sebagaimana tertera pada tabel berikut ini.

AKTOR ALTER-NATIF	Q5.27.	Q5.28.
	LEMBAGA URUSAN PUBLIK	AGEN-AGEN PERANTARA
DOM-1	a. [ ] Tatakelola privat b. [ ] Tatakelola berbasis komunitas dan masyarakat sipil yang independen c. [ ] Tata kelola hasil kerja sama pemerintah dan pemangku kepentingan d. [ ] Birokrasi sipil dan militer e. [ ] Peradilan dan kepolisian f. [ ] Eksekutif pemerintah	a. [ ] Organisasi masyarakat sipil b. [ ] Media c. [ ] Kelompok kepentingan d. [ ] Partisipasi langsung individual sebagai bagian pemangku kepentingan. e. [ ] Masyarakat politik (parpol, parlemen, tokoh partai, anggota parlemen dan kandidat-kandidat pejabat publik di berbagai level administrasi pemerintahan) f. [ ] Pemimpin dan tokoh informal g. [ ] Tidak menggunakan agen perantara (*By pass*)
DOM-2	a. [ ] Tatakelola privat b. [ ] Tatakelola berbasis komunitas dan masyarakat sipil yang independen c. [ ] Tata kelola hasil kerja sama pemerintah dan pemangku kepentingan d. [ ] Birokrasi sipil dan militer e. [ ] Peradilan dan kepolisian f. [ ] Eksekutif pemerintah	a. [ ] Organisasi masyarakat sipil b. [ ] Media c. [ ] Kelompok kepentingan d. [ ] Partisipasi langsung individual sebagai bagian pemangku kepentingan. e. [ ] Masyarakat politik (parpol, parlemen, tokoh partai, anggota parlemen dan kandidat-kandidat pejabat publik di berbagai level administrasi pemerintahan) f. [ ] Pemimpin dan tokoh informal g. [ ] Tidak menggunakan agen perantara (*By pass*)

Q5.29. **Menurut Anda**, mengapa masing-masing Aktor Dominan (Q3.2) dan Aktor Alternatif (Q3.3) cenderung menggunakan lembaga urusan publik dan agen perantara tertentu sebagaimana Anda telah jelaskan (Q.28)?

Q5.29. ALASAN AKTOR MENGGUNAKAN LEMBAGA URUSAN PUBLIK DAN AGEN PERANTARA TERTENTU			
AKTOR DOMINAN		AKTOR ALTERNATIF	
DOM-1	....	ALT-1	....
DOM-2	....	ALT-2	....

Q5.30. **Menurut penilaian Anda**, apakah upaya masing-masing Aktor Dominan (Q3.2) dan Aktor Alternatif (Q3.3) dalam menggunakan lembaga urusan publik dan agen perantara itu telah berhasil meningkatkan partisipasi dan representasi? (*Jelaskan jawaban Anda*)

Q5.30. KEBERHASILAN MENINGKATKAN PARTISIPASI DAN REPRESENTASI			
AKTOR DOMINAN		AKTOR ALTERNATIF	
DOM-1	....	ALT-1	....
DOM-2	....	ALT-2	....

Q5.31. **Menurut Anda,** apa hambatan dan tantangan yang dihadapi oleh masing-masing Aktor Dominan (Q3.2) dan Aktor Alternatif (Q3.3) saat menggunakan lembaga urusan publik dan agen perantara tertentu dalam dalam memperjuangkan kepentingan mereka?

Q5.31. HAMBATAN DAN TANTANGAN DALAM MEMOBILISASI DAN MENGORGANISASIKAN DUKUNGAN			
AKTOR DOMINAN		AKTOR ALTERNATIF	
DOM-1	....	ALT-1	....
DOM-2	....	ALT-2	....

Q5.32. Sekarang kita beralih melihat bagaimana orang kebanyakan (orang awam) memanfaatkan saluran representasi. **Menurut penilaian Anda**, kepada lembaga urusan publik apakah orang kebanyakan (orang awam) menyelesaikan persoalan-persoalan yang mereka hadapi dalam memperjuangkan kepentingan mereka?

Q5.33. Masih menyangkut tentang orang kebanyakan (orang awam), **menurut Anda**, melalui agen perantara apakah orang kebanyakan (orang awam) membawa persoalan-persoalan yang mereka hadapi untuk disalurkan ke dalam lembaga-lembaga urusan publik?

Pilihlah dua lembaga urusan publik dan tiga agen perantara yang paling sering dimanfaatkan orang kebanyakan, sebagaimana tertera pada tabel berikut ini.

Q5.32.	Q5.33.
KELEMBAGA URUSAN PUBLIK	**AGEN-AGEN PERANTARA**
a. [ ] Tatakelola privat b. [ ] Tatakelola berbasis komunitas dan masyarakat sipil yang independen c. [ ] Tata kelola hasil kerja sama pemerintah dan pemangku kepentingan d. [ ] Birokrasi sipil dan militer e. [ ] Peradilan dan kepolisian f. [ ] Eksekutif pemerintah	a. [ ] Organisasi masyarakat sipil b. [ ] Media c. [ ] Kelompok kepentingan d. [ ] Partisipasi langsung individual sebagai bagian pemangku kepentingan. Contoh: sopir angkot demo tanpa menggunakan asosiasi resmi seperti Organda. e. [ ] Masyarakat politik (parpol, parlemen, tokoh partai, anggota parlemen dan kandidat-kandidat pejabat publik di berbagai level administrasi pemerintahan) f. [ ] Pemimpin dan tokoh informal g. [ ] Tidak menggunakan agen perantara (*By pass*)

Q5.34. Menurut Anda, mengapa orang kebanyakan (orang awam) menggunakan lembaga urusan publik dan agen perantara sebagaimana Anda jelaskan dalam menjawab pertanyaan di atas?..
.....
.....

Demokrasi adalah proses yang dinamis. Oleh karena itu, sangat penting untuk memahami dimensi dinamis dari demokratisasi dengan mengidentifikasi strategi para aktor untuk mencapai tujuan-tujuan mereka dan mempelajari bagaimana pilihan strategi itu berpengaruh pada tantangan-tantangan demokratisasi.

BAGIAN 6

STRATEGI (DINAMIKA) DEMOKRATISASI

Q6.1. **Menurut Anda,** apa strategi masing-masing Aktor Dominan (Q3.2) dan Aktor Alternatif (Q3.3) dalam memperjuangkan kepentingan dan mencapai tujuan mereka masing-masing?

Q6.1. STRATEGI AKTOR UNTUK MENCAPAI TUJUAN			
AKTOR DOMINAN		AKTOR ALTERNATIF	
DOM-1	....	ALT-1	....
DOM-2	....	ALT-2	....

Q6.2. **Menurut Anda,** apa tantangan-tantangan demokratisasi yang dihadapi oleh masing-masing Aktor Dominan (Q3.2) dan Aktor Alternatif (Q3.3) ketika mereka menerapkan strategi pilihan mereka masing-masing?

Q6.3. **Menurut Anda,** apa pengaruh yang ditimbulkan dari penerapan strategi-strategi para aktor (Q6.1) terhadap tantangan dan peluang demokratisasi yang Anda jelaskan (Q6.2)?

	Q6.2.	Q6.3.
AKTOR UTAMA	TANTANGAN UTAMA DEMOKRATISASI	PENGARUH STRATEGI AKTOR TERHADAP DEMOKRATISASI
DOM-1	....	....
DOM-2	....	....
ALT-1	....	....
ALT-2	....	....

TERIMA KASIH ATAS KERJA SAMA ANDA

Survei Perkembangan Demokrasi

KUESIONER

Survei putaran ketiga mengenai masalah dan peluang demokratisasi di Indonesia - 2013

versi:
[ ] KONTEKS LOKAL
[√] KONTEKS NASIONAL-SEKTORAL

UiO : University of Oslo

		A		B		NO KUESIONER
9	9					

A. KODE SEKTOR/GERAKAN DEMOKRASI YANG DIJALANKAN INFORMAN

01	Sektor Pendidikan, baik menyangkut pelayanan maupun substansi (kurikulum)	08	Sektor Hubungan Antar-klan, -etnis, dan –agama
02	SektorKesehatan	09	Sektor Media dan Media Sosial
03	Sektor Ekologi, Lingkungan dan Sumber Daya Alam (termasuk, misalnya, pertambangan, kehutanan, perikanan, dll.)	10	ReformasiSektorKeamanan
04	SektorPerburuhan	11	Gerakan Antikorupsi dan Penerapan Prinsip-prinsip Transparansi dan Akuntabilitas
05	Sektor Informal (termasuk kelompok miskin perkotaan)	12	Gerakan di sektor Hak Asasi Manusia dan Penegakan Hukum (termasuk hak-hak minoritas)
06	Sektor Agraria dan *Land reform*(termasuk isu kepemilikan tanah)	13	Gerakan Reformasi Kepartaian dan Sistem Pemilu
07	GerakanPerempuandanAnak	14	SektorBisnis

B. NOMOR URUT INFORMAN(01-50)

PROSES WAWANCARA

NO	TANGGAL	BAGIAN (NOMOR)	WAKTU	
			MULAI	AKHIR
1				
2				
3				
4				
5				

VALIDASI

NAMA	POSISI	TANDA TANGAN
	Pewawancara	
	Informan-kunci	

PERNYATAAN TENTANG TUJUAN, PRINSIP DAN KOMITMEN

Survei ini terselenggara atas kerja sama para akademisi, mahasiswa dan aktivis yang peduli terhadap perkembangan demokrasi. Meskipun begitu, survei ini tidak akan terlaksana tanpa kesediaan dan komitmen para informan. Kami menyadari bahwa waktu Anda yang sangat berharga akan banyak tersita untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan yang kami ajukan, namun kami berharap Anda bersedia memberikan kontribusi pengetahuan yang penting bagi kelanjutan dan kemajuan demokratisasi di Indonesia. Untuk itu kami menyampaikan terima kasih dan penghargaan atas komitmen dan kesabaran Anda. Kami akan mengabarkan kepada Anda hasil-hasil survei ini dan berharap dapat meneruskan kerja sama dalam kegiatan-kegiatan berikutnya.

Perlu kami nyatakan bahwa tim riset UGM, di bawah supervisi Prof. Dr. Purwo Santoso (UGM) dan Prof. Dr. Olle Törnquist (UiO), berkomitmen untuk menjaga kerahasiaan seluruh data mengenai informan dan hanya menggunakannya untuk validitas dan reliabilitas survei, serta untuk menjaga kerahasiaan segala informasi yang tidak terkait dengan jawaban-jawaban atas pertanyaan yang kami ajukan dan hanya akan menggunakannya secara anonim untuk keperluan non-komersial dan riset akademis yang independen di atas prinsip-prinsip akademis. Seluruh anggota tim, termasuk informan-kunci dan asisten peneliti di tingkat lokal, telah menandatangani pakta komitmen yang berkaitan dengan hal ini.

Survei yang diprakrasai oleh Universitas Gadjah Mada dan Universitas Oslo ini didukung secara finansial oleh Kedutaan Besar Norwegia di Indonesia. Dukungan finansial itu diberikan kepada kedua universitas tanpa ikatan secara formal maupun informal kecuali untuk melakukan kajian akademik yang independen dan sebaik mungkin demi kemajuan demokrasi, kesejahteraan dan pembangunan, serta, tentu saja, disertai kewajiban untuk mempertanggungjawabkan seluruh penggunaan dana dan melaporkan hasilnya kepada publik.

Survei ini merupakan kelanjutan dan perluasan dari dua survei sebelumnya yang dilakukan atas kerja sama antara Demos dan Universitas Oslo pada kurun waktu 2003-2008, yang didukung juga oleh para aktivis gerakan demokrasi di seluruh provinsi, mengenai masalah dan peluang demokratisasi di Indonesia. Hasil lengkap survei sebelumya telah dilaporkan dalam Priyono et al. (2007) dan Samadhi et al. (2009)[1]. Pengalihan kerja sama

1 Priyono, A.E, Willy PurnaSamadhidanOlleTörnquist(2007). *Menjadikan Demokrasi Bermakna. Masalah dan Peluang di Indonesia.* Jakarta: Demos; Samadhi, W. P. dan Nicolaas Warouw (Eds.) (2009). *Demokrasi di Atas Pasir. Kemajuan dan Kemunduruan di Indonesia*. Jakarta dan Yogyakarta: Demos dan PCD Press. (Edisi1: Desember 2008; Edisi2: 2009).

ke UGM dimaksudkan untuk (a) memperkuat basis dan kualitas akademik survei ini tanpa menghentikan kerja sama dengan para aktivis gerakan demokrasi, dan (b) untuk mendorong pemanfaatan hasil-hasil survei di dalam dunia akademik dan pendidikan yang lebih luas, serta untuk mendorong kajian-kajian akademik lebih lanjut. Sekelompok aktivis demokrasi dan intelektual terkemuka telah memberikan dukungan bagi kerja sama ini dan bersedia untuk berkontribusi dalam pewacanaan di tengah publik. Mereka adalah Danang Widoyoko, Daniel Dhakidae, Eva Kusuma Sundari, Ikrar Nusa Bakti, Handoko Wibowo, Luky Djani, Mian Manurung, Mohtar Mas'oed, Tamrin Amal Tomagola, Wardah Hafidz, dan Wiladi Budiharga. Maksud paling utama dari survei ini adalah untuk menghasilkan pengetahuan yang terbaik yang dapat dijadikan basis bagi transformasi politik demokratis dan reformasi untuk mewujudkan pembangunan sosial dan ekonomi yang berkelanjutan dan berdasarkan kesejahteraan.

Kesimpulan survei ini tidak didasarkan atas perhitungan dan analisis statistik, melainkan dengan mencermati penilaian kualititatif para informan mengenai masalah dan peluang demokratisasi yang kemudian diinterpretasikan dengan sejumlah teori yang relevan. Untuk mengetahui lebih dalam mengenai dasar pemikiran dan basis akademis survei ini, lihat Törnquist (2013)[2].

Survei ini dilakukan baik di dalam konteks lokal (kota/kabupaten) maupun konteks nasional. Fokusnya diarahkan pada enam pilar demokrasi: (1) basis pembentukan *demos* (rakyat) dan urusan publik; (2) institusi (aturan dan regulasi) demokrasi; (3) para aktor utama; (4) bagaimana para aktor utama membangun hubungan dengan institusi-institusi demokrasi; (5) kapasitas politik para aktor utama, dan (6) bagaimana pengaruh strategi aktor utama terhadap proses demokratisasi.

Sekali lagi, atas nama seluruh anggota tim, kami sangat berterima kasih atas kesediaan Anda terlibat di dalam upaya ini.

Yogyakarta dan Oslo, Maret 2013

PurwoSantoso and OlleTörnquist

2 Törnquist, O. (2013). *Assessing the Dynamics of Democratisation: Transformative Politics. New Institutions and the Case of Indonesia.* New York: Palgrave.

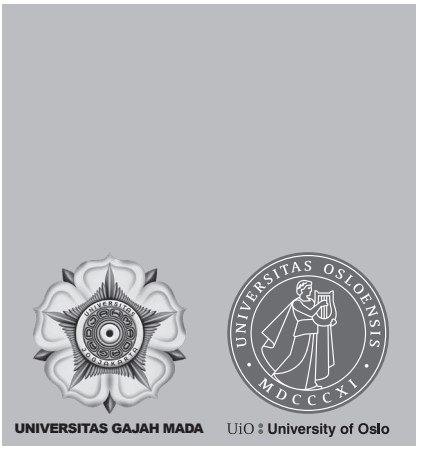

Survei
PERKEMBANGAN DEMOKRASI DI INDONESIA

PWD Project
Kerja sama riset
UGM – UiO
2013

Purwo Santoso, Olle Törnquist : Direktur Proyek
Eric Hiariej : Deputi
Amalinda Savirani : Koordinator survei
Hasrul Hanif, Willy Purna Samadhi, and local teams in the survey areas : Peneliti
Debbie Prabawati, Wening Hapsari : Jejaring dan Administrasi

Kontak:
Jurusan Politik dan Pemerintahan
Facultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas Gadjah Mada
Gedung PAU UGM, Lantai 3
Jl. Teknika Utara, Pogung, Sleman 55281, DI YOGYAKARTA
Phone: +62-274-552212, +62-811-2515863
Email: polgov.ugm@gmail.com
Website: http://jpp.fisipol.ugm.ac.id

TENTANG INFORMAN

NAMA

JENIS KELAMIN

[ ] PEREMPUAN [ ] LAKI-LAKI

USIA

ALAMAT

KOTA/ KABUPATEN/ WILAYAH

PROVINSI

PROFESI

ORGANISASI

LOKASI AKTIVITAS

KONTAK

TELEPON/HP

EMAIL

Pada bagian ini kita membicarakan tentang 'demos' (warga) dan urusan 'publik'. Kedua topik ini terkait dengan definisi Beetham (1999) tentang demokrasi yakni "*popular control over public affairs based on political equality*". Secara khusus yang ingin digali adalah apa saja isu/problem 'publik', siapa yang mengurusi, dan bagaimana isu/problem tersebut diurusi.

BAGIAN 1

TENTANG 'DEMOS' DAN URUSAN 'PUBLIK'

A. Assessment Informan tentang Isu-isu Publik

Q1.1. Menurut *assessment* Anda sendiri, apa isu/problem publik yang paling utama dalam sektor yang Anda geluti?*(Sebutkan 4-6 isu/ problem publik)*

Q1.2. Berikanlah ilustrasi atau contoh-contoh dari setiap isu/problem publik yang Anda sebutkan.

Q1.1. ISU PUBLIK UTAMA	Q1.2. ILUSTRASI/CONTOH
1.	1. .....
2.	2. .....
3.	3. .....
4.	4. .....
5.	5. .....
6.	6. .....

B. Assessment Publik tentang Isu Publik

Q1.3. Menurut Anda, isu/problem publik apa yang dianggap oleh orang kebanyakan (awam) sebagai isu-isu utama dalam sektor yang Anda geluti? (*Sebutkan 4-6 isu*)

Q1.4. Berikan contohnya.

Q1.3. ISU/PROBLEM PUBLIK MENURUT ORANG KEBANYAKAN	Q1.4. ILUSTRASI/CONTOH
1.	1. .....
2.	2. .....
3.	3. .....
4.	4. .....
5.	5. .....
6.	6. .....

Q1.5. Menurut orang kebanyakan (awam), isu/problem publik apa yang paling penting dalam sektor kegiatan yang Anda geluti?
.....

Q1.6. Merujuk pada jawaban Anda tentang isu/problem publik yang dianggap paling penting (Q1.5), apakah **orang kebanyakan** mengetahui siapa dan lembaga apa yang seharusnya mengurusi isu/problem yang dianggap paling penting itu?
a. [ ] Ya, mereka mengetahui dengan baik
b. [ ] Ya, namun tidak terlalu mengetahui
c. [ ] Tidak, mereka sama sekali tidak mengetahui (*Langsung ke Q1.9*)

Q1.7. **Menurut orang kebanyakan**, siapa dan institusi apa (yang tertera di Tabel A) yang seharusnya mengurusi isu/problem publik yang mereka anggap paling penting itu (Q1.5)?

Q1.8. **Menurut orang kebanyakan**, cara-cara apa (yang tertera di Tabel A) yang seharusnya digunakan untuk menyelesaikan isu/problem publik itu?

TABEL A

Q1.7. SIAPA YANG MENGURUSI	Q1.8. BAGAIMANA CARANYA
A. [ ] Pasar	a. [ ] Membeli/Membayar jasa b. [ ] Menggunakan sara-cara lain namun yang terkait dengan pasar (jelaskan): .....
B. [ ] Organisasi-organisasi masyarakat	a. [ ] Menyelesaikannya melalui organisasi-organisasi komunitas (misalnya: kelompok swadaya dan koperasi, juga kelompok adat dan agama) b. [ ] Menyelesaikannya melalui organisasi-organisasi kepentingan/sektoral c. [ ] Menggunakan sara-cara lain namun yang terkait dengan kelompok masyarakat sipil (jelaskan): .....
C. [ ] Negara/ Pemerintah dan/ atau pemerintah lokal	a. [ ] Menyelesaikannya melalui pemeriintah (termasuk politisi) b. [ ] Menyelesaikannya melalui pemeriintah provinsi/ nasional(termasuk politisi) c. [ ] Menggunakan sara-cara lain namun yang terkait dengan pemerintah(jelaskan): .....
D. [ ] Negara dan lembaga-lembaga publik (seperti Komnas HAM, KPK, Ombudsman, dll)	a. [ ] Melalui pemerintah dan lembaga-lembaga publik yang ditunjuk berdasarkan diskresi politisi dan birokrat. b. [ ] Melalui pemerintah provinsi/lokaldengan cara yang sama seperti (a). c. [ ] Melalui pemerintah dan lembaga-lembaga publik dengan menuruti aturan dan regulasi politik yang netral, dengan hak untuk menunjuk perwakilan. d. [ ] Melalui pemerintah provinsi/lokal dengan cara yang sama seperti (c). e. [ ] Menggunakan sara-cara lain namun yang terkait dengan lembaga publik (jelaskan): .....

C. Tentang Demos

Q1.9. **Menurut Anda**, siapa saja orang atau kelompok orang yang terlibat (misalnya: mendiskusikan, mendebat dan/atau membela) dalam isu/problem publik yang dianggap paling penting itu (Q1.5)? .....
.....

Q1.10. **Menurut Anda**, adakah isu lain yang penting di sektor kegiatan Anda agar orang-orang kebanyakan dapat ikut terlibat mengontrol masalah-masalah yang mereka hadapi? .....
.....

Q1.11. **Menurut Anda**, persoalan apa saja yang ada di dalam sektor kegiatan Anda yang berkaitan dengan pembentukan dan pendefinisian "warga" (yakni kelompok orang yang memiliki hak untuk memutuskan dan mengontrol urusan publik)? .....
.....

Pada bagian ini kita membicarakan keberadaan institusi formal demokrasi, yang merupakan salah satu aspek penting dalam memajukan demokrasi. Institusi dimaknai sebagai aturan main (*rules and regulations*), atau pranata sosial, dan bukan sekedar lembaga atau organisasi. Institusi formal demokrasi akan memperkuat upaya kontrol popular terhadap urusan publik (Beetham 1999). Secara khusus bagian ini akan melihat apa saja aturan dan regulasi, bagaimana kualitas bekerjanya aturan dan regulasi formal tersebut, dan bagaimana wujud interaksi (saling pengaruh) antara aturan dan regulasi yang formal dengan yang informal.

BAGIAN 2

KUALITAS ATURAN DAN REGULASI DEMOKRASI

Q2.1. Aturan dan regulasi demokrasi apa saja yang berlaku di sektor ini, dari daftar 13 aturan dan regulasi demokrasi yang tertera di Tabel B?

Q2.2. Menurut Anda, bagaimana secara umum kualitas aturan dan regulasi yang berlaku di sektor ini yang terkait dengan institusi demokrasi sebagaimana tertera pada daftar di Tabel B? Apakah baik, sedang atau buruk?

Q2.3. Menurut Anda, apakah kualitas aturan dan regulasi yang berlaku sektor ini terkait dengan institusi demokrasi sebagaimana tertera pada daftar Tabel B telah mengalami peningkatan, penurunan atau tidak berubah sejak tahun 2007?

Dalam menjawab pertanyaan Q2.1, Q2.2 dan Q2.3, informan diminta untuk mempertimbangkan dan mengombinasikan ketiga aspek berikut ini:

1. Apakah aturan dan regulasi ini efektif dalam mendorong ke-13 institusi demokrasi yang disebutkan di Tabel B?
2. Apakah aturan dan regulasi ini mencakup keseluruhan atau hanya sedikit aspek dari institusi demokrasi, misalnya apakah hanya sebagian aspek hak asasi manusia?
3. Apakah aturan dan regulasi itu berlaku secara menyeluruh?

TABEL B

NO	ATURAN DAN REGULASI DEMOKRASI	Q2.1 ATURAN DAN REGULASI YANG BERLAKU	Q2.2 PENILAIAN UMUM	Q2.3 PERUBAHAN SEJAK TAHUN 2007
1	KEWARGANEGARAAN YANG SETARA DAN INKLUSIF Terkait dengan konsensus umum atas kesetaraan tanpa diskriminasi Contohnya: tidak ada diskriminasi terhadap masyarakat adat, orang Tionghoa, eks-tapol serta para pengungsi/imigran/minoritas, melalui (1) hukum dan regulasi pelaksana, (2) badan2 pelaksana, (3) praktik lainnya.	a. [ ] Berlaku b. [ ] Tidak Berlaku	a. [ ] Baik b. [ ] Sedang c. [ ] Buruk	a. [ ] Membaik b. [ ] Memburuk c. [ ] Tidak Berubah
2	ATURAN HUKUM (TERMASUK HUKUM INTERNASIONAL DAN KONVENSI-KONVENSI PBB) Terkait dengan kepatuhan pemerintah dan badan-badan publik lainnya terhadap hukum, implementasi Kovenan atas Hak-hak Sipol dan Hak-hak Ekosob melalui (1) hukum dan regulasi pelaksana, UUD, UU No. 7/1984, UU No. 39/1999, UU No. 11/2005, UU No. 12/2005 dan aturan hukum terkait lainnya, Rencana Aksi Daerah (RAD) Hak Asasi Manusia, Kabupaten Ramah Anak, Kota Ramah Difabel, Pengarusutamaan Gender, (2) badan-badan pelaksana, semisal ORI atau Ombudsman Daerah, Komnas HAM, Komnas Perempuan, KPAI; (3) praktik lainnya.	a. [ ] Berlaku b. [ ] Tidak Berlaku	a. [ ] Baik b. [ ] Sedang c. [ ] Buruk	a. [ ] Membaik b. [ ] Memburuk c. [ ] Tidak Berubah
3	KESETARAAN DI DEPAN HUKUM Terkait dengan jaminan atas akses setara bagi semua orang terhadap keadilan, khususnya terhadap orang miskin, melalui (1) hukum dan regulasi pelaksana, (2) badan-badan pelaksana, seperti pengadilan, LBH, dan (3) praktik-praktik lainnya.	a. [ ] Berlaku b. [ ] Tidak Berlaku	a. [ ] Baik b. [ ] Sedang c. [ ] Buruk	a. [ ] Membaik b. [ ] Memburuk c. [ ] Tidak Berubah
4	HAK ASASI MANUSIA YANG UNIVERSAL Terkait dengan penghormatan, pemenuhan dan pemajuan hak-hak Sipol dan hak Ekosob.	a. [ ] Berlaku b. [ ] Tidak Berlaku	a. [ ] Baik b. [ ] Sedang c. [ ] Buruk	a. [ ] Membaik b. [ ] Memburuk c. [ ] Tidak Berubah

NO	ATURAN DAN REGULASI DEMOKRASI	Q2.1 ATURAN DAN REGULASI YANG BERLAKU	Q2.2 PENILAIAN UMUM	Q2.3 PERUBAHAN SEJAK TAHUN 2007
5	PERWAKILAN POLITIK YANG DEMOKRATIS MELALUI PARTAI POLITIK DAN PEMILU Terkait dengan seberapa jauh pemilu dan partai politik bisa memfasilitasi masyarakat untuk memilih orang atau partai politik yang mereka inginkan untuk mewakili mereka, mengartikulasikan kepentingan mereka, serta sebagai sarana untuk mengontrol pemerintah dan kebijakan. Juga terkait dengan kesempatan untuk membentuk partai dan berpartisipasi dalam pemilu, kesempatan bagi kandidat independen untuk berpartisipasi, serta mengenai kualitas pengambilan keputusan secara demokratis di dalam partai.	a. [ ] Berlaku b. [ ] Tidak Berlaku	a. [ ] Baik b. [ ] Sedang c. [ ] Buruk	a. [ ] Membaik b. [ ] Memburuk c. [ ] Tidak Berubah
6	PARTISIPASI BERBASIS HAK-HAK WARGANEGARA DALAM TATA KELOLA PUBLIK Terkait dengan partisipasi publik dalam proses pembuatan kebijakan. Seberapa jauh, baik secara prinsip (merujuk pada aturan) maupun dalam praktik, warga negara bisa mengambil bagian dan diajak konsultasi dalam proses pengambilan kebijakan publik? Misalnya tataruang wilayah industri dan pemukiman, pengambilan keputusan prioritas anggaran, pengelolaan kebijakan pendidikan dan kesehatan, aturan tentang pasar dan transportasi publik, regulasi tentang aktivitas ekonomi.	a. [ ] Berlaku b. [ ] Tidak Berlaku	a. [ ] Baik b. [ ] Sedang c. [ ] Buruk	a. [ ] Membaik b. [ ] Memburuk c. [ ] Tidak Berubah

NO	ATURAN DAN REGULASI DEMOKRASI	Q2.1 ATURAN DAN REGULASI YANG BERLAKU	Q2.2 PENILAIAN UMUM	Q2.3 PERUBAHAN SEJAK TAHUN 2007
7	SALURAN KEPENTINGAN YANG TERLEMBAGA DAN SALURAN REPRESENTASI BERBASIS ISU DALAM TATA KELOLA PUBLIK Terkait dengan saluran partisipasi yang terlembaga. Seberapa jauh tersedia saluran-saluran yang terlembaga bagi organisasi dan pemangku kepentingan yang terkait dengan beragam masalah publik. Misalnya asosiasi pedagang dapat menyalurkan aspirasinya tentang pengelolaan pasar lokal, serikat buruh menyuarakan aspirasi tentang aturan perburuhan, pemilik modal untuk bisa menyampaikan dukungan terhadap produksi, dan bagi orang tua untuk mempengaruhi hal yang terkait dengan peraturan sekolah.	a. [ ] Berlaku b. [ ] Tidak Berlaku	a. [ ] Baik b. [ ] Sedang c. [ ] Buruk	a. [ ] Membaik b. [ ] Memburuk c. [ ] Tidak Berubah
8	DEMOKRASI LOKAL DALAM KERANGKA POLITIK NASIONAL Terkait dengan seberapa jauh demokrasi lokal dan otonomi daerah berjalan. Apakah keduanya membuka peluang bagi warga untuk mengontrol dan mempengaruhi politik lokal, atau apakah keduanya dikontrol oleh aktor yang memiliki kekuasaan atau kepentingan, termasuk mereka yang berasal dari luar kota/kabupaten? Apakah desentralisasi menciptakan perbedaan?	a. [ ] Berlaku b. [ ] Tidak Berlaku	a. [ ] Baik b. [ ] Sedang c. [ ] Buruk	a. [ ] Membaik b. [ ] Memburuk c. [ ] Tidak Berubah
9	KONTROL DEMOKRATIS TERHADAP PENGGUNAAN INSTRUMEN KEKERASAN Terkait dengan kapasitas untuk mengontrol penggunaan instrumen kekerasan. Seberapa jauh polisi dan militer, juga organisasi keamanan swasta dan beragam kelompok, termasuk satgas partai politik dan pamswakarsa, tunduk pada regulasi dan kontrol demokratis.	a. [ ] Berlaku b. [ ] Tidak Berlaku	a. [ ] Baik b. [ ] Sedang c. [ ] Buruk	a. [ ] Membaik b. [ ] Memburuk c. [ ] Tidak Berubah

NO	ATURAN DAN REGULASI DEMOKRASI	Q2.1 ATURAN DAN REGULASI YANG BERLAKU	Q2.2 PENILAIAN UMUM	Q2.3 PERUBAHAN SEJAK TAHUN 2007
10	TATAKELOLA PEMERINTAHAN YANG TRANSPARAN, TIDAK BERPIHAK DAN AKUNTABEL Terkait dengan pelembagaan dan pelaksanaan pemerintahan yang transparan, tidak memihak, dan akuntabel. Misalnya UU No 11/2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, transparansi proses penyaluran bantuan sosial, hibah sosial, dll.	a. [ ] Berlaku b. [ ] Tidak Berlaku	a. [ ] Baik b. [ ] Sedang c. [ ] Buruk	a. [ ] Improved b. [ ] Worsened c. [ ] Not change
11	INDEPENDENSI PEMERINTAH DALAM MEMBUAT KEPUTUSAN SERTA KAPASITAS UNTUK MENGIMPLEMENTASIKANNYA Terkait dengan kemampuan pemerintah untuk terbebas dari pengaruh dan kepentingan aktor-aktor tertentu. Tak kalah penting, seberapa jauh pemerintah dan birokrasi mampu melaksanakan aturan serta keputusannya sendiri.	a. [ ] Berlaku b. [ ] Tidak Berlaku	a. [ ] Baik b. [ ] Sedang c. [ ] Buruk	a. [ ] Membaik b. [ ] Memburuk c. [ ] Tidak Berubah
12	KEBEBASAN DAN KESEMPATAN YANG SETARA UNTUK MENGAKSESWACANA PUBLIK, BUDAYA DAN AKADEMIK Terkait dengan misalnya substansi dan pelaksanaan UU Pers, UU Sisdiknas, dsb., termasuk mengenai kebebasan untuk menyelenggarakan seminar, pertunjukan musik dan kesenian, jajak pendapat publik, dan menulis opini di media massa..	a. [ ] Berlaku b. [ ] Tidak Berlaku	a. [ ] Baik b. [ ] Sedang c. [ ] Buruk	a. [ ] Membaik b. [ ] Memburuk c. [ ] Tidak Berubah
13	KEMAMPUAN MASYARAKAT SIPIL BERORGANISASI SECARA INDEPENDEN DAN DEMOKRATIS Terkait misalnya dengan hukum dan implementasi kebijakan yang mengatur tentang hak berserikat dan berorganisasi, serta praktik demokrasi dan penerapan prinsip akuntabilitas di dalam organisasi masyarakat sipil. Misalnya substansi dan pelaksanaan aturan dan regulasi tentang ormas, yayasan; juga mengenai aturan internal organisasi dalam melakukan pemilihan ketua dan pelaksanaan rapat-rapatnya.	a. [ ] Berlaku b. [ ] Tidak Berlaku	a. [ ] Baik b. [ ] Sedang c. [ ] Buruk	a. [ ] Membaik b. [ ] Memburuk c. [ ] Tidak Berubah

Q2.4. **Menurut Anda**, praktik informal (adat, kebiasaan, tradisi, budaya dsb.) seperti apa yang *mendukung* aturan dan regulasi demokrasi sebagaimana tertera pada Tabel C?

TABEL C

NO	ATURAN DAN REGULASI DEMOKRASI	BERLAKU DI SEKTOR (Q2.1) [√]	Q2.4. PRAKTIK INFORMAL YANG MENDUKUNG INSTITUSI FORMAL DEMOKRASI
1	Kewarganegaraan yang setara dan inklusif	[ ]	....
2	Aturan Hukum (termasuk hukum internasional dan konvensi-konvensi PBB)	[ ]	....
3	Kesetaraan di depan hukum	[ ]	....
4	Hak Asasi Manusia yang universal	[ ]	....
5	Perwakilan politik yang demokratis melalui partai politik dan pemilu	[ ]	....
6	Partisipasi berbasis hak-hak warganegara dalam tatakelolapublik	[ ]	....
7	Saluran kepentingan yang terlembaga dan saluran representasi berbasis isu dalam tatakelola publik	[ ]	....
8	Demokrasi lokal dalam kerangka politik nasional	[ ]	....
9	Kontrol demokratis terhadap penggunaan instrumenkekerasan	[ ]	....
10	Tatakelola pemerintahan yang transparan, tidak berpihak dan akuntabel	[ ]	....
11	Indepedensi pemerintah dalam membuat keputusan serta kapasitas untuk mengimplementasikannya	[ ]	....
12	Kebebasan dan kesempatan yang setara untuk mengakseswacana publik, budaya dan akademik	[ ]	....
13	Kemampuan masyarakat sipil berorganisasi secara independen dan demokratis	[ ]	....

Q2.5. **Menurut Anda**, praktik informal (adat, kebiasaan, tradisi, budaya dsb.) seperti apa yang *membatasi atau bertentangan* dengan aturan dan regulasi demokrasi sebagaimana tertera pada Tabel D?

TABEL D

NO	ATURAN DAN REGULASI DEMOKRASI	BERLAKU DI SEKTOR (Q2.1) [√]	Q2.5. PRAKTIK INFORMAL YANG MENDUKUNG INSTITUSI FORMAL DEMOKRASI
1	Kewarganegaraan yang setara dan inklusif	[ ]	....
2	Aturan Hukum (termasuk hukum internasional dan konvensi-konvensi PBB)	[ ]	....
3	Kesetaraan di depan hukum	[ ]	....
4	Hak Asasi Manusia yang universal	[ ]	....
5	Perwakilan politik yang demokratis melalui partai politik dan pemilu	[ ]	....
6	Partisipasi berbasis hak-hak warganegara dalam tatakelolapublik	[ ]	....
7	Saluran kepentingan yang terlembaga dan saluran representasi berbasis isu dalam tatakelola publik	[ ]	....
8	Demokrasi lokal dalam kerangka politik nasional	[ ]	....
9	Kontrol demokratis terhadap penggunaan instrumenkekerasan	[ ]	....
10	Tatakelola pemerintahan yang transparan, tidak berpihak dan akuntabel	[ ]	....
11	Indepedensi pemerintah dalam membuat keputusan serta kapasitas untuk mengimplementasikannya	[ ]	....
12	Kebebasan dan kesempatan yang setara untuk mengakseswacana publik, budaya dan akademik	[ ]	....
13	Kemampuan masyarakat sipil berorganisasi secara independen dan demokratis	[ ]	....

Pada bagian ini kita menggali peran aktor dalam pengelolaan urusan publik. Posisi aktor dalam demokrasi sangat esensial karena kinerja institusi demokrasi tergantung pada orang-orang yang menggunakannya.

Secara lebih khusus, bagian ini akan mengidentifikasi aktor-aktor utama (aktor berpengaruh) dan asal-usul mereka secara sosial, politik dan ekonomi.

BAGIAN 3

AKTOR UTAMA DALAM URUSAN PUBLIK

Q3.1. **Menurut Anda**, siapakah aktor-aktor utama, baik individu maupun kelompok, di dalam sektor kegiatan yang Anda geluti, yang berpengaruh (misalnya: mendiskusikan, mendebat dan/atau membela) terhadap urusan publik? (*Sebutkan 2-4 aktor di setiap arena sebagaimana tertera pada Tabel E*)

TABEL E

Q3.1. AKTOR UTAMA YANG BERPENGARUH TERHADAP URUSAN PUBLIK	
AKTOR UTAMA (NAMA DAN PROFESI)	**MENGAPA DAN BAGAIMANA PARA AKTOR TERSEBUT MENCOBA MEMPENGARUHI URUSAN PUBLIK**
A. NEGARA DAN PEMERINTAHANv	
(1)	....
(2)	....
(3)	....
(4)	....
B. POLITICAL SOCIETY (including parties and political movements, pressure groups and interest groups)	
(1)	....
(2)	....
(3)	....
(4)	....

Q3.1. AKTOR UTAMA YANG BERPENGARUH TERHADAP URUSAN PUBLIK	
AKTOR UTAMA (NAMA DAN PROFESI)	**MENGAPA DAN BAGAIMANA PARA AKTOR TERSEBUT MENCOBA MEMPENGARUHI URUSAN PUBLIK**
C. DUNIA USAHA	
(1)	....
(2)	....
(3)	....
(4)	....
D. MASYARAKAT SIPIL (misalnya LSM, serikat buruh, organisasi petani, komunitas warga)	
(1)	....
(2)	....
(3)	....
(4)	....

Q3.2. Dari aktor-aktor berpengaruh yang telah Anda sebutkan (Q3.1), siapakah aktor yang paling dominan (entah demokratis atau pun tidak) di dalam sektor yang Anda geluti dalam pengelolaan urusan publik? (*Sebutkan dua aktor*)

Q3.2. AKTOR DOMINAN	
AKTOR DOMINAN 1 (DOM-1)	....
AKTOR DOMINAN 2 (DOM-2)	....

Q3.3. Dari aktor-aktor berpengaruh yang telah Anda sebutkan (Q3.1), siapakah aktor yang bersikap paling kritis terhadap dua aktor dominan yang baru saja Anda sebutkan sekaligus melontarkan gagasan-gagasan alternatif untuk perubahan? (*Sebutkan dua aktor*)

Q3.3. AKTOR ALTERNATIF	
AKTOR ALTERNATIF 1 (ALT-1)	....
AKTOR ALTERNATIF 2 (ALT-2)	....

Pada bagian ini kita mengeksplorasi lebih mendalam relasi antara institusi demokrasi/aturan dan regulasi (Bagian 2), dan para Aktor Utama (Bagian 3). Kepatuhan para Aktor Utama untuk mengikuti aturan dan regulasi demokrasi merupakan hal yang sangat penting.

Secara khusus kita ingin memahami bagaimana para Aktor Utama mempromosikan atau menyalahgunakan/ mengabaikan aturan dan regulasi demokrasi yang ada.

BAGIAN 4

RELASI AKTOR TERHADAP ATURAN MAIN DAN REGULASI DEMOKRASI

Q4.1. **Dalam penilaian Anda**, bagaimana para Aktor Dominan (Q3.2) *mempromosikan* aturan dan regulasi demokrasi seperti pada daftar di tabel E dalam rangka memperjuangkan kepentingan mereka?

TABEL E

NO	ATURAN DAN REGULASI DEMOKRASI	Q4.1. CARA AKTOR DOMINAN MEMPROMOSIKAN ATURAN DAN REGULASI DEMOKRASI	
		DOM-1	DOM-2
1	Kewarganegaraan yang setara dan inklusif	a. [ ] Jelaskan..... b. [ ] Jarang/Tidak pernah mempromosikan aturan dan regulasi ini	a. [ ] Jelaskan..... b. [ ] Jarang/Tidak pernah mempromosikan aturan dan regulasi ini
2	Aturan Hukum (termasuk hukum internasional dan konvensi-konvensi PBB)	a. [ ] Jelaskan..... b. [ ] Jarang/Tidak pernah mempromosikan aturan dan regulasi ini	a. [ ] Jelaskan..... b. [ ] Jarang/Tidak pernah mempromosikan aturan dan regulasi ini
3	Kesetaraan di depan hukum	a. [ ] Jelaskan..... b. [ ] Jarang/Tidak pernah mempromosikan aturan dan regulasi ini	a. [ ] Jelaskan..... b. [ ] Jarang/Tidak pernah mempromosikan aturan dan regulasi ini
4	Hak Asasi Manusia yang universal	a. [ ] Jelaskan..... b. [ ] Jarang/Tidak pernah mempromosikan aturan dan regulasi ini	a. [ ] Jelaskan..... b. [ ] Jarang/Tidak pernah mempromosikan aturan dan regulasi ini
5	Perwakilan politik yang demokratis melalui partai politik dan pemilu	a. [ ] Jelaskan..... b. [ ] Jarang/Tidak pernah mempromosikan aturan dan regulasi ini	a. [ ] Jelaskan..... b. [ ] Jarang/Tidak pernah mempromosikan aturan dan regulasi ini

NO	ATURAN DAN REGULASI DEMOKRASI	Q4.1. CARA AKTOR DOMINAN MEMPROMOSIKAN ATURAN DAN REGULASI DEMOKRASI	
		DOM-1	DOM-2
6	Partisipasi berbasis hak-hak warga negara dalam tatakelola publik	a. [ ] Jelaskan..... b. [ ] Jarang/Tidak pernah mempromosikan aturan dan regulasi ini	a. [ ] Jelaskan..... b. [ ] Jarang/Tidak pernah mempromosikan aturan dan regulasi ini
7	Saluran kepentingan yang terlembaga dan saluran representasi berbasis isu dalam tatakelola publik	a. [ ] Jelaskan..... b. [ ] Jarang/Tidak pernah mempromosikan aturan dan regulasi ini	a. [ ] Jelaskan..... b. [ ] Jarang/Tidak pernah mempromosikan aturan dan regulasi ini
8	Demokrasi lokal dalam kerangka politik nasional	a. [ ] Jelaskan..... b. [ ] Jarang/Tidak pernah mempromosikan aturan dan regulasi ini	a. [ ] Jelaskan..... b. [ ] Jarang/Tidak pernah mempromosikan aturan dan regulasi ini
9	Kontrol demokratis terhadap penggunaan instrumen kekerasan	a. [ ] Jelaskan..... b. [ ] Jarang/Tidak pernah mempromosikan aturan dan regulasi ini	a. [ ] Jelaskan..... b. [ ] Jarang/Tidak pernah mempromosikan aturan dan regulasi ini
10	Tatakelola pemerintahan yang transparan, tidak berpihak dan akuntabel	a. [ ] Jelaskan..... b. [ ] Jarang/Tidak pernah mempromosikan aturan dan regulasi ini	a. [ ] Jelaskan..... b. [ ] Jarang/Tidak pernah mempromosikan aturan dan regulasi ini
11	Indepedensi pemerintah dalam membuat keputusan serta kapasitas untuk mengimplementasikannya	a. [ ] Jelaskan..... b. [ ] Jarang/Tidak pernah mempromosikan aturan dan regulasi ini	a. [ ] Jelaskan..... b. [ ] Jarang/Tidak pernah mempromosikan aturan dan regulasi ini
12	Kebebasan dan kesempatan yang setara untuk mengakses wacana publik, budaya dan akademik	a. [ ] Jelaskan..... b. [ ] Jarang/Tidak pernah mempromosikan aturan dan regulasi ini	a. [ ] Jelaskan..... b. [ ] Jarang/Tidak pernah mempromosikan aturan dan regulasi ini
13	Kemampuan masyarakat sipil berorganisasi secara independen dan demokratis	a. [ ] Jelaskan..... b. [ ] Jarang/Tidak pernah mempromosikan aturan dan regulasi ini	a. [ ] Jelaskan..... b. [ ] Jarang/Tidak pernah mempromosikan aturan dan regulasi ini

Q4.2. **Dalam penilaian Anda**, bagaimana para Aktor Alternatif (Q3.3) *mempromosikan* aturan dan regulasi demokrasi seperti pada daftar di Tabel F dalam rangka memperjuangkan kepentingan mereka?

TABEL F

NO	ATURAN DAN REGULASI DEMOKRASI	Q4.1. CARA AKTOR DOMINAN MEMPROMOSIKAN ATURAN DAN REGULASI DEMOKRASI	
		DOM-1	DOM-2
1	Kewarganegaraan yang setara dan inklusif	a. [ ] Jelaskan..... b. [ ] Jarang/Tidak pernah mempromosikan aturan dan regulasi ini	a. [ ] Jelaskan..... b. [ ] Jarang/Tidak pernah mempromosikan aturan dan regulasi ini
2	Aturan Hukum (termasuk hukum internasional dan konvensi-konvensi PBB)	a. [ ] Jelaskan..... b. [ ] Jarang/Tidak pernah mempromosikan aturan dan regulasi ini	a. [ ] Jelaskan..... b. [ ] Jarang/Tidak pernah mempromosikan aturan dan regulasi ini
3	Kesetaraan di depan hukum	a. [ ] Jelaskan..... b. [ ] Jarang/Tidak pernah mempromosikan aturan dan regulasi ini	a. [ ] Jelaskan..... b. [ ] Jarang/Tidak pernah mempromosikan aturan dan regulasi ini
4	Hak Asasi Manusia yang universal	a. [ ] Jelaskan..... b. [ ] Jarang/Tidak pernah mempromosikan aturan dan regulasi ini	a. [ ] Jelaskan..... b. [ ] Jarang/Tidak pernah mempromosikan aturan dan regulasi ini
5	Perwakilan politik yang demokratis melalui partai politik dan pemilu	a. [ ] Jelaskan..... b. [ ] Jarang/Tidak pernah mempromosikan aturan dan regulasi ini	a. [ ] Jelaskan..... b. [ ] Jarang/Tidak pernah mempromosikan aturan dan regulasi ini
6	Partisipasi berbasis hak-hak warga negara dalam tatakelola publik	a. [ ] Jelaskan..... b. [ ] Jarang/Tidak pernah mempromosikan aturan dan regulasi ini	a. [ ] Jelaskan..... b. [ ] Jarang/Tidak pernah mempromosikan aturan dan regulasi ini
7	Saluran kepentingan yang terlembaga dan saluran representasi berbasis isu dalam tatakelola publik	a. [ ] Jelaskan..... b. [ ] Jarang/Tidak pernah mempromosikan aturan dan regulasi ini	a. [ ] Jelaskan..... b. [ ] Jarang/Tidak pernah mempromosikan aturan dan regulasi ini
8	Demokrasi lokal dalam kerangka politik nasional	a. [ ] Jelaskan..... b. [ ] Jarang/Tidak pernah mempromosikan aturan dan regulasi ini	a. [ ] Jelaskan..... b. [ ] Jarang/Tidak pernah mempromosikan aturan dan regulasi ini
9	Kontrol demokratis terhadap penggunaan instrumen kekerasan	a. [ ] Jelaskan..... b. [ ] Jarang/Tidak pernah mempromosikan aturan dan regulasi ini	a. [ ] Jelaskan..... b. [ ] Jarang/Tidak pernah mempromosikan aturan dan regulasi ini
10	Tatakelola pemerintahan yang transparan, tidak berpihak dan akuntabel	a. [ ] Jelaskan..... b. [ ] Jarang/Tidak pernah mempromosikan aturan dan regulasi ini	a. [ ] Jelaskan..... b. [ ] Jarang/Tidak pernah mempromosikan aturan dan regulasi ini

NO	ATURAN DAN REGULASI DEMOKRASI	Q4.1. CARA AKTOR DOMINAN MEMPROMOSIKAN ATURAN DAN REGULASI DEMOKRASI	
		DOM-1	DOM-2
11	Indepedensi pemerintah dalam membuat keputusan serta kapasitas untuk mengimplementasikannya	a. [ ] Jelaskan..... b. [ ] Jarang/Tidak pernah mempromosikan aturan dan regulasi ini	a. [ ] Jelaskan..... b. [ ] Jarang/Tidak pernah mempromosikan aturan dan regulasi ini
12	Kebebasan dan kesempatan yang setara untuk mengakses wacana publik, budaya dan akademik	a. [ ] Jelaskan..... b. [ ] Jarang/Tidak pernah mempromosikan aturan dan regulasi ini	a. [ ] Jelaskan..... b. [ ] Jarang/Tidak pernah mempromosikan aturan dan regulasi ini
13	Kemampuan masyarakat sipil berorganisasi secara independen dan demokratis	a. [ ] Jelaskan..... b. [ ] Jarang/Tidak pernah mempromosikan aturan dan regulasi ini	a. [ ] Jelaskan..... b. [ ] Jarang/Tidak pernah mempromosikan aturan dan regulasi ini

Q4.3. **Dalam penilaian Anda**, bagaimana para Aktor Dominan (Q3.2) *menyalahgunakan atau mengabaikan* aturan dan regulasi demokrasi seperti pada daftar di Tabel G dalam rangka memperjuangkan kepentingan mereka?

TABEL G

NO	ATURAN DAN REGULASI DEMOKRASI	Q4.1. CARA AKTOR DOMINAN MEMPROMOSIKAN ATURAN DAN REGULASI DEMOKRASI	
		DOM-1	DOM-2
1	Kewarganegaraan yang setara dan inklusif	a. [ ] Jelaskan..... b. [ ] Jarang/Tidak pernah mempromosikan aturan dan regulasi ini	a. [ ] Jelaskan..... b. [ ] Jarang/Tidak pernah mempromosikan aturan dan regulasi ini
2	Aturan Hukum (termasuk hukum internasional dan konvensi-konvensi PBB)	a. [ ] Jelaskan..... b. [ ] Jarang/Tidak pernah mempromosikan aturan dan regulasi ini	a. [ ] Jelaskan..... b. [ ] Jarang/Tidak pernah mempromosikan aturan dan regulasi ini
3	Kesetaraan di depan hukum	a. [ ] Jelaskan..... b. [ ] Jarang/Tidak pernah mempromosikan aturan dan regulasi ini	a. [ ] Jelaskan..... b. [ ] Jarang/Tidak pernah mempromosikan aturan dan regulasi ini
4	Hak Asasi Manusia yang universal	a. [ ] Jelaskan..... b. [ ] Jarang/Tidak pernah mempromosikan aturan dan regulasi ini	a. [ ] Jelaskan..... b. [ ] Jarang/Tidak pernah mempromosikan aturan dan regulasi ini

NO	ATURAN DAN REGULASI DEMOKRASI	Q4.1. CARA AKTOR DOMINAN MEMPROMOSIKAN ATURAN DAN REGULASI DEMOKRASI	
		DOM-1	DOM-2
5	Perwakilan politik yang demokratis melalui partai politik dan pemilu	a. [ ] Jelaskan..... b. [ ] Jarang/Tidak pernah mempromosikan aturan dan regulasi ini	a. [ ] Jelaskan..... b. [ ] Jarang/Tidak pernah mempromosikan aturan dan regulasi ini
6	Partisipasi berbasis hak-hak warga negara dalam tatakelola publik	a. [ ] Jelaskan..... b. [ ] Jarang/Tidak pernah mempromosikan aturan dan regulasi ini	a. [ ] Jelaskan..... b. [ ] Jarang/Tidak pernah mempromosikan aturan dan regulasi ini
7	Saluran kepentingan yang terlembaga dan saluran representasi berbasis isu dalam tatakelola publik	a. [ ] Jelaskan..... b. [ ] Jarang/Tidak pernah mempromosikan aturan dan regulasi ini	a. [ ] Jelaskan..... b. [ ] Jarang/Tidak pernah mempromosikan aturan dan regulasi ini
8	Demokrasi lokal dalam kerangka politik nasional	a. [ ] Jelaskan..... b. [ ] Jarang/Tidak pernah mempromosikan aturan dan regulasi ini	a. [ ] Jelaskan..... b. [ ] Jarang/Tidak pernah mempromosikan aturan dan regulasi ini
9	Kontrol demokratis terhadap penggunaan instrumen kekerasan	a. [ ] Jelaskan..... b. [ ] Jarang/Tidak pernah mempromosikan aturan dan regulasi ini	a. [ ] Jelaskan..... b. [ ] Jarang/Tidak pernah mempromosikan aturan dan regulasi ini
10	Tatakelola pemerintahan yang transparan, tidak berpihak dan akuntabel	a. [ ] Jelaskan..... b. [ ] Jarang/Tidak pernah mempromosikan aturan dan regulasi ini	a. [ ] Jelaskan..... b. [ ] Jarang/Tidak pernah mempromosikan aturan dan regulasi ini
11	Indepedensi pemerintah dalam membuat keputusan serta kapasitas untuk mengimplementasikannya	a. [ ] Jelaskan..... b. [ ] Jarang/Tidak pernah mempromosikan aturan dan regulasi ini	a. [ ] Jelaskan..... b. [ ] Jarang/Tidak pernah mempromosikan aturan dan regulasi ini
12	Kebebasan dan kesempatan yang setara untuk mengakses wacana publik, budaya dan akademik	a. [ ] Jelaskan..... b. [ ] Jarang/Tidak pernah mempromosikan aturan dan regulasi ini	a. [ ] Jelaskan..... b. [ ] Jarang/Tidak pernah mempromosikan aturan dan regulasi ini
13	Kemampuan masyarakat sipil berorganisasi secara independen dan demokratis	a. [ ] Jelaskan..... b. [ ] Jarang/Tidak pernah mempromosikan aturan dan regulasi ini	a. [ ] Jelaskan..... b. [ ] Jarang/Tidak pernah mempromosikan aturan dan regulasi ini

Q4.4. **Dalam penilaian Anda**, bagaimana para Aktor Alternatif (Q3.3) *menyalahgunakan atau mengabaikan* aturan dan regulasi demokrasi seperti pada daftar di Tabel H dalam rangka memperjuangkan kepentingan mereka?

TABEL H

NO	ATURAN DAN REGULASI DEMOKRASI	Q4.1. CARA AKTOR DOMINAN MEMPROMOSIKAN ATURAN DAN REGULASI DEMOKRASI	
		DOM-1	DOM-2
1	Kewarganegaraan yang setara dan inklusif	a. [ ] Jelaskan..... b. [ ] Jarang/Tidak pernah mempromosikan aturan dan regulasi ini	a. [ ] Jelaskan..... b. [ ] Jarang/Tidak pernah mempromosikan aturan dan regulasi ini
2	Aturan Hukum (termasuk hukum internasional dan konvensi-konvensi PBB)	a. [ ] Jelaskan..... b. [ ] Jarang/Tidak pernah mempromosikan aturan dan regulasi ini	a. [ ] Jelaskan..... b. [ ] Jarang/Tidak pernah mempromosikan aturan dan regulasi ini
3	Kesetaraan di depan hukum	a. [ ] Jelaskan..... b. [ ] Jarang/Tidak pernah mempromosikan aturan dan regulasi ini	a. [ ] Jelaskan..... b. [ ] Jarang/Tidak pernah mempromosikan aturan dan regulasi ini
4	Hak Asasi Manusia yang universal	a. [ ] Jelaskan..... b. [ ] Jarang/Tidak pernah mempromosikan aturan dan regulasi ini	a. [ ] Jelaskan..... b. [ ] Jarang/Tidak pernah mempromosikan aturan dan regulasi ini
5	Perwakilan politik yang demokratis melalui partai politik dan pemilu	a. [ ] Jelaskan..... b. [ ] Jarang/Tidak pernah mempromosikan aturan dan regulasi ini	a. [ ] Jelaskan..... b. [ ] Jarang/Tidak pernah mempromosikan aturan dan regulasi ini
6	Partisipasi berbasis hak-hak warga negara dalam tatakelola publik	a. [ ] Jelaskan..... b. [ ] Jarang/Tidak pernah mempromosikan aturan dan regulasi ini	a. [ ] Jelaskan..... b. [ ] Jarang/Tidak pernah mempromosikan aturan dan regulasi ini
7	Saluran kepentingan yang terlembaga dan saluran representasi berbasis isu dalam tatakelola publik	a. [ ] Jelaskan..... b. [ ] Jarang/Tidak pernah mempromosikan aturan dan regulasi ini	a. [ ] Jelaskan..... b. [ ] Jarang/Tidak pernah mempromosikan aturan dan regulasi ini
8	Demokrasi lokal dalam kerangka politik nasional	a. [ ] Jelaskan..... b. [ ] Jarang/Tidak pernah mempromosikan aturan dan regulasi ini	a. [ ] Jelaskan..... b. [ ] Jarang/Tidak pernah mempromosikan aturan dan regulasi ini
9	Kontrol demokratis terhadap penggunaan instrumen kekerasan	a. [ ] Jelaskan..... b. [ ] Jarang/Tidak pernah mempromosikan aturan dan regulasi ini	a. [ ] Jelaskan..... b. [ ] Jarang/Tidak pernah mempromosikan aturan dan regulasi ini

NO	ATURAN DAN REGULASI DEMOKRASI	Q4.1. CARA AKTOR DOMINAN MEMPROMOSIKAN ATURAN DAN REGULASI DEMOKRASI	
		DOM-1	DOM-2
10	Tatakelola pemerintahan yang transparan, tidak berpihak dan akuntabel	a. [ ] Jelaskan..... b. [ ] Jarang/Tidak pernah mempromosikan aturan dan regulasi ini	a. [ ] Jelaskan..... b. [ ] Jarang/Tidak pernah mempromosikan aturan dan regulasi ini
11	Indepedensi pemerintah dalam membuat keputusan serta kapasitas untuk mengimplementasikannya	a. [ ] Jelaskan..... b. [ ] Jarang/Tidak pernah mempromosikan aturan dan regulasi ini	a. [ ] Jelaskan..... b. [ ] Jarang/Tidak pernah mempromosikan aturan dan regulasi ini
12	Kebebasan dan kesempatan yang setara untuk mengakses wacana publik, budaya dan akademik	a. [ ] Jelaskan..... b. [ ] Jarang/Tidak pernah mempromosikan aturan dan regulasi ini	a. [ ] Jelaskan..... b. [ ] Jarang/Tidak pernah mempromosikan aturan dan regulasi ini
13	Kemampuan masyarakat sipil berorganisasi secara independen dan demokratis	a. [ ] Jelaskan..... b. [ ] Jarang/Tidak pernah mempromosikan aturan dan regulasi ini	a. [ ] Jelaskan..... b. [ ] Jarang/Tidak pernah mempromosikan aturan dan regulasi ini

Fokus pada bagian ini adalah kapasitas politik aktor. Ada lima aspek kapasitas yang akan kita eksplorasi, yakni: a) kapasitas melakukan inklusi politik (versus eksklusi) di sektor-sektor penting kehidupan publik, b) kapasitas memperoleh legitimasi, c) kapasitas melakukan politisasi dan menciptakan agenda, d) kapasitas melakukan mobilisasi dan organisasi, dan e) kapasitas meningkatkan partisipasi dan representasi.

Secara khusus kita akan mendalami bagaimana kapasitas politik setiap Aktor Utama yang telah diidentifikasi pada Bagian 3 (Q3.2 dan Q3.3).

BAGIAN 5

KAPASITAS AKTOR

A. KAPASITAS MELAKUKAN INKLUSI *– Demokratisasi menghendaki agar semua kelompok sosial tidak tereksklusi dari keterlibatan untuk melakukan kontrol terhadap urusan publik. Aktor harus mampu mendorong inklusi politik dan menciptakan popular control.*

Apa kapasitas aktor utama untuk melawan proses marginalisasi (politik, ekonomi, sosial) sehingga tercapai politik yang inklusif?v

Q5.1. **Dalam penilaian Anda**, cara-cara apa saja yang biasa digunakan di dalam sektor kegiatan yang Anda geluti untuk membuat orang kebanyakan (orang awam) terlibat di dalam proses politik? (*Anda boleh memilih lebih dari satu jawaban dari tiga alternatif berikut ini, atau tambahkan kategori baru jika perlu*)

a. [ ] Politik (contoh: didaftar sebagai pemilih dalam pemilu, boleh menduduki jabatan formal maupun informal)
b. [ ] Ekonomi (contoh: mendapatkan ijin usaha, bebas berjualan di sebuah wilayah tertentu)
c. [ ] Sosial dan budaya (contoh: diundang dalam kegiatan kampung, bebas memiliki tanah/rumah di wilayah tertentu)
d. [ ] Lain-lain (sebutkan).....

Q5.2. **Menurut penilaian Anda**, apakah para Aktor Dominan (Q3.2) dan Aktor Alternatif (Q3.3) di dalam sektor kegiatan yang Anda geluti melakukan inklusi dalam proses politik terhadap Aktor Utama lainnya atau orang-orang lain?

Q5.2. APAKAH AKTOR DOMINAN DAN ALTERNATIF MELAKUKAN INKLUSI TERHADAP AKTOR UTAMA ATAU ORANG LAIN?			
AKTOR DOMINAN		AKTOR ALTERNATIF	
DOM-1	a. [ ] Ya b. [ ] Tidak (langsung ke Q5.7)	ALT-1	a. [ ] Ya b. [ ] Tidak (langsung ke Q5.7)
DOM-2	a. [ ] Ya b. [ ] Tidak (langsung ke Q5.7)	ALT-2	a. [ ] Ya b. [ ] Tidak (langsung ke Q5.7)

Q5.3. **Menurut penilaian Anda**, terhadap siapa sajakah masing-masing Aktor Dominan dan Aktor Alternatif melakukan inklusi dalam proses politik? (*Anda boleh memilih lebih dari satu jawaban*)

Q5.4. **Menurut penilaian Anda**, pada sektor-sektor apa sajakah proses inklusi yang dilakukan oleh para Aktor Dominan dan Aktor Alternatif itu berlangsung? (*Mohon jelaskan dan berikan contohnya*)

AKTOR UTAMA	Q5.3.	Q5.4	
	SIAPA YANG DIINKLUSI	SEKTOR INKLUSI	CONTOH
DOM-1	a. [ ] Aktor Dominan 2 b. [ ] Aktor Alternatif 1 c. [ ] Aktor Alternatif 2 d. [ ] Pihak lain (jelaskan):	....	....
DOM-2	a. [ ] Aktor Dominan 1 b. [ ] Aktor Alternatif 1 c. [ ] Aktor Alternatif 2 d. [ ] Pihak lain (jelaskan):	....	....
ALT-1	a. [ ] Aktor Dominan 1 b. [ ] Aktor Dominan 2 c. [ ] Aktor Alternatif 2 d. [ ] Pihak lain (jelaskan):	....	....
ALT-2	a. [ ] Aktor Dominan 1 b. [ ] Aktor Dominan 2 c. [ ] Aktor Alternatif 1 d. [ ] Pihak lain (jelaskan):	....	....

Q5.5. **Menurut penilaian Anda**, apakah para Aktor Dominan dan Aktor Alternatif yang telah disebutkan pada Bagian 3 melakukan eksklusi dalam proses politik terhadap para Aktor Utama lainnya atau orang-orang lain?

Q5.5. APAKAH AKTOR DOMINAN DAN ALTERNATIF MELAKUKAN EKSKLUSI TERHADAP AKTOR UTAMA ATAU ORANG LAIN?			
AKTOR DOMINAN		AKTOR ALTERNATIF	
DOM-1	a. [ ] Ya b. [ ] Tidak (langsung ke Q5.7)	ALT-1	a. [ ] Ya b. [ ] Tidak (langsung ke Q5.7)
DOM-2	a. [ ] Ya b. [ ] Tidak (langsung ke Q5.7)	ALT-2	a. [ ] Ya b. [ ] Tidak (langsung ke Q5.7)

Q5.6. **Menurut penilaian Anda**, terhadap siapakah masing-masing Aktor Dominan dan Aktor Alternatif melakukan eksklusi dalam proses politik? (*Anda boleh memilih lebih dari satu jawaban*)

Q5.7. **Menurut penilaian Anda**, pada sektor-sektor apa sajakah proses eksklusi yang dilakukan oleh para Aktor Dominan dan Aktor Alternatif itu berlangsung? (*Mohon jelaskan dan berikan contohnya*)

AKTOR UTAMA	Q5.6. SIAPA YANG DIINKLUSI	Q5.7. SEKTOR INKLUSI	Q5.7. CONTOH
DOM-1	a. [ ] Aktor Dominan 2 b. [ ] Aktor Alternatif 1 c. [ ] Aktor Alternatif 2 d. [ ] Pihak lain (jelaskan)	....	....
DOM-2	a. [ ] Aktor Dominan 1 b. [ ] Aktor Alternatif 1 c. [ ] Aktor Alternatif 2 d. [ ] Pihak lain (jelaskan)	....	....
ALT-1	a. [ ] Aktor Dominan 1 b. [ ] Aktor Dominan 2 c. [ ] Aktor Alternatif 2 d. [ ] Pihak lain (jelaskan)	....	....
ALT-2	a. [ ] Aktor Dominan 1 b. [ ] Aktor Dominan 2 c. [ ] Aktor Alternatif 1 d. [ ] Pihak lain (jelaskan)	....	....

Q5.8. **Menurut penilaian Anda,** apa saja cara-cara yang biasa dilakukan oleh masing-masing Aktor Dominan dan Aktor Alternatif untuk mengatasi eksklusi dalam proses politik?

Q5.8. CARA AKTOR DOMINAN DAN ALTERNATIF MENGATASI EKSKLUSI			
AKTOR DOMINAN		AKTOR ALTERNATIF	
DOM-1	....	ALT-1	....
DOM-2	....	ALT-2	....

Q5.9. **Menurut penilaian Anda**, adakah aktor lain (di luar Aktor Dominan dan Aktor Alternatif) di dalam sektor kegiatan yang Anda geluti yang melakukan eksklusi/marginalisasi terhadap orang-orang? (*Anda boleh memilih lebih dari satu jawaban*)

Q5.10. **Menurut penilaian Anda**, pada sektor-sektor apa sajakah proses eksklusi yang dilakukan oleh orang-orang selain Aktor Dominan dan Aktor Alternatif itu berlangsung? (*Mohon jelaskan dan berikan contohnya*)

Q5.9.		Q5.10.
AKTOR LAIN YANG MELAKUKAN EKSKLUSI/ MARGINALISASI		SEKTOR EKSKLUSI DAN CONTOHNYA
a. [ ] AKTOR POLITK	....	....
b. [ ] AKTOR BISNIS	....	....
c. [ ] AKTOR SOSIAL-BUDAYA	....	....

Q5.11. **Menurut Anda**, kebijakan seperti apa yang diperlukan agar semua orang terinklusi dalam kehidupan politik di kota/kabupaten ini? (*Pilih salah satu dan jelaskan berikut contohnya*)

a. [ ] Kebijakan afirmatif, Jelaskan: ....

b. [ ] Persamaan hak, Jelaskan: ....

B. KAPASITAS MEMPEROLEH LEGITIMASI – Pengetahuan mengenai bagaimana berbagai basis kekuatan (modal) para Aktor Utama ditransformasikan menjadi kekuasaan otoritatif/ menentukan adalah hal yang krusial ketika kita ingin menjelaskan masalah dan peluang demokrasi.

Apa kapasitas para aktor dalam melakukan transformasi basis–basis kekuatan ekonomi, sosial, budaya dan koersif yang mereka miliki menjadi kekuasaan otoritatif/menentukan?

Q5.12. **Menurut Anda**, apa saja basis kekuatan yang dimiliki oleh masing-masing Aktor Dominan (Q3.2) dan Aktor Alternatif (Q3.3)? (*Pilih dua basis kekuatan untuk setiap aktor, lalu beri peringkat*)

	Q5.12. ACTOR'S PRIME BASES			
MAIN ACTOR	ECONOMIC RESOURCES (ECONOMIC CAPITAL)	GOOD CONTACTS (SOCIAL CAPITAL)	KNOWLEDGE/ INFORMATION (CULTURAL CAPITAL)	MEANS OF COMPULISON (COERCIVE CAPITAL)
DOM-1	[ ]	[ ]	[ ]	[ ]
DOM-2	[ ]	[ ]	[ ]	[ ]
ALT-1	[ ]	[ ]	[ ]	[ ]
ALT-2	[ ]	[ ]	[ ]	[ ]

Q5.13. **Menurut penilaian Anda**, apakah masing-masing Aktor Dominan dan Aktor Alternatif mudah atau sulit menjadi pemimpin politik yang absah dan otoritatif? (*Jelaskan alasan jawaban Anda*)

AKTOR UTAMA	Q5.13.	
	TINGKAT KESULITAN MENJADI PEMIMPIN POLITIK YANGv ABSAH DAN OTORITATIF	MENGAPA?
DOM-1	a. [ ] Mudah b. [ ] Sulit	....
DOM-2	a. [ ] Mudah b. [ ] Sulit	....
ALT-1	a. [ ] Mudah b. [ ] Sulit	....
ALT-2	a. [ ] Mudah b. [ ] Sulit	....

Q5.14. **Menurut penilaian Anda,** apa indikator keberhasilan masing-masing Aktor Dominan (Q3.2) dan Aktor Alternatif (Q3.3) dalam memanfaatkan basis ekonomi, sosial, budaya dan koersif yang mereka miliki (Q5.12) untuk memperoleh kekuasaan politik?

Q5.14. INDIKATOR KEBERHASILAN MEMANFAATKAN BASIS KEKUATAN			
AKTOR DOMINAN		AKTOR ALTERNATIF	
DOM-1	....	ALT-1	....
DOM-2	....	ALT-2	....

Q5.15. **Menurut penilaian Anda,** apa hambatan dan tantangan yang dihadapi oleh masing-masing Aktor Dominan (Q3.2) dan Aktor Alternatif (Q3.3) dalam memanfaatkan basis ekonomi, sosial, budaya dan koersif yang mereka miliki (Q5.12) untuk memperoleh kekuasaan politik?

Q5.15. HAMBATAN DAN TANTANGAN DALAM MEMANFAATKAN BASIS KEKUATAN			
AKTOR DOMINAN		AKTOR ALTERNATIF	
DOM-1	....	ALT-1	....
DOM-2	....	ALT-2	....

C. KAPASITAS MELAKUKAN POLITISASI DAN MENCIPTAKAN AGENDA – *Agenda-setting merupakan salah satu proses yang krusial dalam setiap proses politik. Oleh karena itu, menjadi penting untuk mengelaborasi bagaimana aktor berusaha mengidentifikasi dan menentukan isu-isu prioritas mereka. Selanjutnya, penting juga memahami bagaimana para aktor berusaha mentransformasikan isu-isu prioritas mereka menjadi agenda politik.*

Apa kapasitas para aktor utama untuk mengubah persoalan-persoalan yang ada menjadi masalah publik dan agenda politik?

Q5.16. **Menurut Anda**, isu-isu apa saja yang diprioritaskan oleh masing-masing Aktor Dominan (Q3.2) dan Aktor Alternatif (Q3.3)?

Q5.16. ISU PRIORITAS AKTOR DOMINAN DAN AKTOR ALTERNATIF			
AKTOR DOMINAN		AKTOR ALTERNATIF	
DOM-1	....	ALT-1	....
DOM-2	....	ALT-2	....

Q5.17. Apa metode yang digunakan oleh masing-masing Aktor Dominan (Q3.2) dan Aktor Alternatif (Q3.3) dalam mengubah isu-isu prioritas mereka (Q5.16) menjadi agenda politik? (*Pilih tiga metode yang paling penting untuk setiap aktor, dan urutkan berdasarkan peringkat*)

Q5.17. METODE MENGUBAH ISU PRIORITAS BERSAMA MENJADI AGENDA POLITIK			
a. Terlibat aktif dalam partai politik dan menggunakan partai b. Terlibat aktif dalam organisasi-organisasi sosial c. Mendirikan stasiun radio atau televisi d. Menulis artikel untuk dipublikasikan di media		e. Memberi/menyediakan/memobilisasi dukungan politik f. Membuat petisi g. Demonstrasi, unjuk rasa h. Lain-lain	
DOM-1	DOM-2	ALT-1	ALT-2
1. [ ] 2. [ ] 3. [ ] Jelaskan jika pilihan [h]	1. [ ] 2. [ ] 3. [ ] Jelaskan jika pilihan [h]	1. [ ] 2. [ ] 3. [ ] Jelaskan jika pilihan [h]	1. [ ] 2. [ ] 3. [ ] Jelaskan jika pilihan [h] ....

Q5.18. **Menurut penilaian Anda**, apakah masing-masing Aktor Dominan (Q3.2) dan Aktor Alternatif (Q3.3) cenderung membingkai isu-isu prioritas mereka (Q5.16) sebagai isu yang bersifat tunggal atau sebagai isu yang bersifat strategis ketika memperjuangkan agenda politik mereka masing-masing? (*Pilih satu jawaban untuk setiap aktor*)

Q5.18. STRATEGI MEMBINGKAI ISU PRIORITAS			
AKTOR DOMINAN		AKTOR ALTERNATIF	
DOM-1	a. [ ] Bersifat tunggal b. [ ] Bersifat strategis	ALT-1	a. [ ] Bersifat tunggal b. [ ] Bersifat strategis
DOM-2	a. [ ] Bersifat tunggal b. [ ] Bersifat strategis	ALT-2	a. [ ] Bersifat tunggal b. [ ] Bersifat strategis

Q5.19. **Menurut penilaian Anda,** apa indikator keberhasilan masing-masing Aktor Dominan (Q3.2) dan Aktor Alternatif (Q3.3) dalam mengubah isu-isu prioritas mereka (Q5.16) menjadi isu publik dan agenda politik?

Q5.19. INDIKATOR KEBERHASILAN MENCIPTAKAN ISU PUBLIK DAN AGENDA POLITIK			
AKTOR DOMINAN		AKTOR ALTERNATIF	
DOM-1	....	ALT-1	....
DOM-2	....	ALT-2	....

Q5.20. **Menurut penilaian Anda,** apa hambatan dan tantangan yang dihadapi oleh masing-masing Aktor Dominan (Q3.2) dan Aktor Alternatif (Q3.3) dalam mengubah isu-isu prioritas mereka (Q5.16) menjadi isu publik dan agenda politik?

Q5.20. HAMBATAN DAN TANTANGAN DALAM MENCIPTAKAN ISU PUBLIK DAN AGENDA POLITIK			
AKTOR DOMINAN		AKTOR ALTERNATIF	
DOM-1	....	ALT-1	....
DOM-2	....	ALT-2	....

D. KAPASITAS UNTUK MELAKUKAN MOBILISASI DAN MEMBANGUN ORGANISASI – *Para aktor harus mampu melakukan politisasi 'demos' (warga), yakni kemampuan mobilisasi dan mengorganisasikan dukungan bagi kepentingan-kepentingannya. Pada gilirannya hal ini menuntut adanya kapasitas untuk menghimpun orang-orang ke dalam politik, khususnya melalui mobilisasi dan organisasi.*

Apa kapasitas para aktor utama untuk memobilisasi dan mengorganisasi dukungan untuk memperjuangkan kepentingan mereka?

Q5.21. **Menurut penilaian Anda**, apa metode yang digunakan oleh masing-masing Aktor Dominan (Q3.2) dan Aktor Alternatif (Q3.3) dalam memobilisasi dan mengorganisasi dukungan untuk memperjuangkan kepentingan-kepentingan mereka? (*Pilih tiga metode yang paling sering digunakan oleh setiap aktor, lalu beri peringkat*)

TABEL I

Q5.21. METODE UNTUK MEMOBILISASI DAN MENGORGANISASI DUKUNGAN	
a. Menggunakan populisme (menyuarakan isu-isu yang populer dan membangun hubungan langsung antara elit dan massa). Contoh: Sukarno, Jokowi. b. Menggunakan kepemimpinan kharismatik. Contoh: Megawati, Abubakar Ba'asyir. c. Membangun patronase. Contoh: Suharto. d. Memberikan perlindungan dan dukungan. Contoh: Kegiatan advokasi yang dilakukan Kontras. e. Menyediakan kontak dengan tokoh-tokoh berpengaruh. Contoh: Denny Indrayana, Andi Arif, Dita Indah Sari, Eggy Sudjana.	f. Memanfaatkan koneksi keluarga dan klan. Contoh: Gubernur Ratu Atut di Banten. g. Membangun jaringan antara aktor-aktor yang memiliki kepentingan yang sama. Contoh: Mega-Amin-Gus Dur-Sultan membentuk 'Pakta Ciganjur' menjelang reformasi. h. Melakukan koordinasi/mengorganisasi kelompok-kelompok dan gerakan-gerakan yang terkait. Contoh: Gerakan antipolitisi busuk. i. Menyatukan berbagai jaringan individu dan kolektif, baik antar-sesama organisasi akar rumput maupun antara organisasi akar rumput dan jaringan aktivis nasional, dalam rangka memperkuat gerakan politik.

DOM-1	DOM-2	ALT-1	ALT-2
1. [ ] 2. [ ] 3. [ ]	1. [ ] 2. [ ] 3. [ ]	1. [ ] 2. [ ] 3. [ ]	1. [ ] 2. [ ] 3. [ ]

Q5.22. **Menurut penilaian Anda,** bagaimana cara masing-masing Aktor Dominan (Q3.2) dan Aktor Alternatif (Q3.3) menggunakan metode-metode untuk memobilisasi dan mengorganisasikan dukungan sebagaimana telah Anda sebutkan di atas (Q5.21)?

Q5.22. CARA AKTOR MENGGUNAKAN METODE MOBILISASI DAN MENGORGANISASIKAN DUKUNGAN			
AKTOR DOMINAN		AKTOR ALTERNATIF	
DOM-1	....	ALT-1	....
DOM-2	....	ALT-2	....

Q5.23. **Menurut penilaian Anda,** apa indikator keberhasilan masing-masing Aktor Dominan (Q3.2) dan Aktor Alternatif (Q3.3) dalam melakukan mobilisasi dan mengorganisasikan dukungan untuk memperjuangkan kepentingan mereka?

Q5.23. INDIKATOR KEBERHASILAN MEMOBILISASI DAN MENGORGANISASIKAN DUKUNGAN			
AKTOR DOMINAN		AKTOR ALTERNATIF	
DOM-1	....	ALT-1	....
DOM-2	....	ALT-2	....

Q5.24. **Menurut penilaian Anda,** apa hambatan dan tantangan yang dihadapi oleh masing-masing Aktor Dominan (Q3.2) dan Aktor Alternatif (Q3.3) dalam melakukan mobilisasi dan mengorganisasikan dukungan untuk memperjuangkan kepentingan mereka?

Q5.24. HAMBATAN DAN TANTANGAN DALAM MEMOBILISASI DAN MENGORGANISASIKAN DUKUNGAN			
AKTOR DOMINAN		AKTOR ALTERNATIF	
DOM-1	....	ALT-1	....
DOM-2	....	ALT-2	....

E. KAPASITAS UNTUK MENINGKATKAN PARTISIPASI DAN REPRESENTASI –

Pada dasarnya dalam rangka menciptakan kontrol popular terhadap urusan publik, orang kebanyakan (orang awam) harus mampu menggunakan berbagai saluran representasi dan partisipasi yang ada, melakukan reformasi terhadapnya, atau mengembangkan saluran-saluran baru agar dapat mempengaruhi lembaga-lembaga pengelola urusan publik. Yang paling perlu diperhatikan adalah keragaman saluran representasi dan bagaimana saluran-saluran itu terlegitimasi dan dimediasi oleh tokoh-tokoh tradisional, partai politik, organisasi kepentingan, mekanisme korporatis dan/atau partisipasi langsung.

Apa saja pola dan kapasitas para aktor untuk menggunakan dan mengembangkan saluran-saluran representasi dan partisipasi yang telah ada?

Q5.25. **Menurut penilaian Anda**, kepada lembaga urusan publik apakah masing-masing Aktor Dominan (Q3.2) menyelesaikan persoalan-persoalan yang mereka hadapi dalam memperjuangkan kepentingan mereka?

Q5.26. **Menurut penilaian Anda**, melalui agen perantara apakah masing-masing Aktor Dominan (Q3.2) membawa persoalan-persoalan yang mereka hadapi untuk disalurkan ke dalam lembaga-lembaga urusan publik?

Untuk setiap Aktor Dominan, pilihlah dua lembaga urusan publik dan tiga agen perantara yang paling sering dimanfaatkan, sebagaimana tertera pada tabel berikut ini.

AKTOR DOMI-NAN	Q5.25.	Q5.26.
	LEMBAGA URUSAN PUBLIK	AGEN-AGEN PERANTARA
DOM-1	a. [ ] Tatakelola privat b. [ ] Tatakelola berbasis komunitas dan masyarakat sipil yang independen c. [ ] Tata kelola hasil kerja sama pemerintah dan pemangku kepentingan d. [ ] Birokrasi sipil dan militer e. [ ] Peradilan dan kepolisian f. [ ] Eksekutif pemerintah	a. [ ] Organisasi masyarakat sipil b. [ ] Media c. [ ] Kelompok kepentingan d. [ ] Partisipasi langsung individual sebagai bagian pemangku kepentingan. e. [ ] Masyarakat politik (parpol, parlemen, tokoh partai, anggota parlemen dan kandidat-kandidat pejabat publik di berbagai level administrasi pemerintahan) f. [ ] Pemimpin dan tokoh informal g. [ ] Tidak menggunakan agen perantara (*By pass*)
DOM-2	a. [ ] Tatakelola privat b. [ ] Tatakelola berbasis komunitas dan masyarakat sipil yang independen c. [ ] Tata kelola hasil kerja sama pemerintah dan pemangku kepentingan d. [ ] Birokrasi sipil dan militer e. [ ] Peradilan dan kepolisian f. [ ] Eksekutif pemerintah	a. [ ] Organisasi masyarakat sipil b. [ ] Media c. [ ] Kelompok kepentingan d. [ ] Partisipasi langsung individual sebagai bagian pemangku kepentingan. e. [ ] Masyarakat politik (parpol, parlemen, tokoh partai, anggota parlemen dan kandidat-kandidat pejabat publik di berbagai level administrasi pemerintahan) f. [ ] Pemimpin dan tokoh informal g. [ ] Tidak menggunakan agen perantara (*By pass*)

Q5.27. **Menurut penilaian Anda**, kepada lembaga urusan publik apakah masing-masing Aktor Alternatif (Q3.3) menyelesaikan persoalan-persoalan yang mereka hadapi dalam memperjuangkan kepentingan mereka?

Q5.28. **Menurut penilaian Anda**, melalui agen perantara apakah masing-masing Aktor Alternatif (Q3.3) membawa persoalan-persoalan yang mereka hadapi untuk disalurkan ke dalam lembaga-lembaga urusan publik?

Untuk setiap Aktor Alternatif, pilihlah dua lembaga urusan publik dan tiga agen perantara yang paling sering dimanfaatkan, sebagaimana tertera pada tabel berikut ini.

AKTOR ALTER-NATIF	Q5.27.	Q5.28.
	LEMBAGA URUSAN PUBLIK	AGEN-AGEN PERANTARA
ALT-1	a. [ ] Tatakelola privat b. [ ] Tatakelola berbasis komunitas dan masyarakat sipil yang independen c. [ ] Tata kelola hasil kerja sama pemerintah dan pemangku kepentingan d. [ ] Birokrasi sipil dan militer e. [ ] Peradilan dan kepolisian f. [ ] Eksekutif pemerintah	a. [ ] Organisasi masyarakat sipil b. [ ] Media c. [ ] Kelompok kepentingan d. [ ] Partisipasi langsung individual sebagai bagian pemangku kepentingan. e. [ ] Masyarakat politik (parpol, parlemen, tokoh partai, anggota parlemen dan kandidat-kandidat pejabat publik di berbagai level administrasi pemerintahan) f. [ ] Pemimpin dan tokoh informal g. [ ] Tidak menggunakan agen perantara (*By pass*)
ALT-2	a. [ ] Tatakelola privat b. [ ] Tatakelola berbasis komunitas dan masyarakat sipil yang independen c. [ ] Tata kelola hasil kerja sama pemerintah dan pemangku kepentingan d. [ ] Birokrasi sipil dan militer e. [ ] Peradilan dan kepolisian f. [ ] Eksekutif pemerintah	a. [ ] Organisasi masyarakat sipil b. [ ] Media c. [ ] Kelompok kepentingan d. [ ] Partisipasi langsung individual sebagai bagian pemangku kepentingan. e. [ ] Masyarakat politik (parpol, parlemen, tokoh partai, anggota parlemen dan kandidat-kandidat pejabat publik di berbagai level administrasi pemerintahan) f. [ ] Pemimpin dan tokoh informal g. [ ] Tidak menggunakan agen perantara (*By pass*)

Q5.29. **Menurut Anda**, mengapa masing-masing Aktor Dominan (Q3.2) dan Aktor Alternatif (Q3.3) cenderung menggunakan lembaga urusan publik dan agen perantara tertentu sebagaimana Anda telah jelaskan (Q.28)?

Q5.29. ALASAN AKTOR MENGGUNAKAN LEMBAGA URUSAN PUBLIK DAN AGEN PERANTARA TERTENTU			
AKTOR DOMINAN		AKTOR ALTERNATIF	
DOM-1	....	ALT-1	....
DOM-2	....	ALT-2	....

Q5.30. **Menurut penilaian Anda**, apakah upaya masing-masing Aktor Dominan (Q3.2) dan Aktor Alternatif (Q3.3) dalam menggunakan lembaga urusan publik dan agen perantara itu telah berhasil meningkatkan partisipasi dan representasi? (*Jelaskan jawaban Anda*)

Q5.30. KEBERHASILAN MENINGKATKAN PARTISIPASI DAN REPRESENTASI			
AKTOR DOMINAN		AKTOR ALTERNATIF	
DOM-1	....	ALT-1	....
DOM-2	....	ALT-2	....

Q5.31. **Menurut Anda,** apa hambatan dan tantangan yang dihadapi oleh masing-masing Aktor Dominan (Q3.2) dan Aktor Alternatif (Q3.3) saat menggunakan lembaga urusan publik dan agen perantara tertentu dalam dalam memperjuangkan kepentingan mereka?

Q5.31. HAMBATAN DAN TANTANGAN DALAM MEMOBILISASI DAN MENGORGANISASIKAN DUKUNGAN			
AKTOR DOMINAN		AKTOR ALTERNATIF	
DOM-1	....	ALT-1	....
DOM-2	....	ALT-2	....

Q5.32. Sekarang kita beralih melihat bagaimana orang kebanyakan (orang awam) memanfaatkan saluran representasi. **Menurut penilaian Anda**, kepada lembaga urusan publik apakah orang kebanyakan (orang awam) menyelesaikan persoalan-persoalan yang mereka hadapi dalam memperjuangkan kepentingan mereka?

Q5.33. Masih menyangkut tentang orang kebanyakan (orang awam), **menurut Anda**, melalui agen perantara apakah orang kebanyakan (orang awam) membawa persoalan-persoalan yang mereka hadapi untuk disalurkan ke dalam lembaga-lembaga urusan publik?

Pilihlah dua lembaga urusan publik dan tiga agen perantara yang paling sering dimanfaatkan orang kebanyakan, sebagaimana tertera pada tabel berikut ini.

Q5.32.	Q5.33.
KELEMBAGA URUSAN PUBLIK	**AGEN-AGEN PERANTARA**
a. [ ] Tatakelola privat b. [ ] Tatakelola berbasis komunitas dan masyarakat sipil yang independen c. [ ] Tata kelola hasil kerja sama pemerintah dan pemangku kepentingan d. [ ] Birokrasi sipil dan militer e. [ ] Peradilan dan kepolisian f. [ ] Eksekutif pemerintah	a. [ ] Organisasi masyarakat sipil b. [ ] Media c. [ ] Kelompok kepentingan d. [ ] Partisipasi langsung individual sebagai bagian pemangku kepentingan. Contoh: sopir angkot demo tanpa menggunakan asosiasi resmi seperti Organda. e. [ ] Masyarakat politik (parpol, parlemen, tokoh partai, anggota parlemen dan kandidat-kandidat pejabat publik di berbagai level administrasi pemerintahan) f. [ ] Pemimpin dan tokoh informal g. [ ] Tidak menggunakan agen perantara (*By pass*)

Q5.34. **Menurut Anda**, mengapa orang kebanyakan (orang awam) menggunakan lembaga urusan publik dan agen perantara sebagaimana Anda jelaskan dalam menjawab pertanyaan di atas?..
.....
.....

Demokrasi adalah proses yang dinamis. Oleh karena itu, sangat penting untuk memahami dimensi dinamis dari demokratisasi dengan mengidentifikasi strategi para aktor untuk mencapai tujuan-tujuan mereka dan mempelajari bagaimana pilihan strategi itu berpengaruh pada tantangan-tantangan demokratisasi.

BAGIAN 6

STRATEGI (DINAMIKA) DEMOKRATISASI

Q6.1. **Menurut Anda,** apa strategi masing-masing Aktor Dominan (Q3.2) dan Aktor Alternatif (Q3.3) dalam memperjuangkan kepentingan dan mencapai tujuan mereka masing-masing?

Q6.1. STRATEGI AKTOR UNTUK MENCAPAI TUJUAN			
AKTOR DOMINAN		AKTOR ALTERNATIF	
DOM-1	....	ALT-1	....
DOM-2	....	ALT-2	....

Q6.2. **Menurut Anda,** apa tantangan-tantangan demokratisasi yang dihadapi oleh masing-masing Aktor Dominan (Q3.2) dan Aktor Alternatif (Q3.3) ketika mereka menerapkan strategi pilihan mereka masing-masing?

Q6.3. **Menurut Anda,** apa pengaruh yang ditimbulkan dari penerapan strategi-strategi para aktor (Q6.1) terhadap tantangan dan peluang demokratisasi yang Anda jelaskan (Q6.2)?

	Q6.2.	Q6.3.
AKTOR UTAMA	TANTANGAN UTAMA DEMOKRATISASI	PENGARUH STRATEGI AKTOR TERHADAP DEMOKRATISASI
DOM-1	....	....
DOM-2	....	....
ALT-1	....	....
ALT-2	....	....

Terakhir, kami meminta informan melakukan refleksi atas upaya-upaya yang telah dilakukan oleh para pegiat demokrasi untuk terlibat di dalam kegiatan-kegiatan politik.

BAGIAN 7

REFLEKSI

Q7.1. Berdasarkan pengalaman Anda, masalah dan peluang apa saja yang muncul sejak 2007 di dalam lingkup sektor kegiatan Anda terkait dengan upaya-upaya yang dilakukan oleh banyak organisasi masyarakat sipil dan gerakan sosial untuk terlibat di dalam kegiatan-kegiatan politik? .....
.....
.....
.....
.....
.....

TERIMA KASIH ATAS KERJA SAMA ANDA

DAFTAR PUSTAKA

(n.d.). Diunduh dari ht t p s: /w w w.mpr.go.id /f i le s / pdf/2013/11/06/no-09th-viiseptember-2013.pdf

Ambardi, K. (2009). *Mengungkap Politik Kartel: Studi Tentang Sistem Kepartaian di Indonesia Era Reformasi*. Jakarta: Gramedia & LSI.

Aspinall, E. (2014). "Health Care and Democratization in Indonesia". *Democratization,* Vol. 21, No. 5, 803-823.

Aspinall, E., & (eds.), M. S. (2015). *Politik Uang di Indonesia: Patronase dan Klientelisme pada Pemilu Legislatif 2014*. Yogyakarta: Penerbit PolGov.

Aspinall, E., & Van Klinken, G. (2011). 'The State and Illegality in Indonesia." In E. Aspinall, & Van Klinken G.. (eds.), *The State and Illegality in Indonesia*. Leiden: KITLV Press.

Aswidah, R., & Jafar, W. (2013). *Ragam, Corak, dan Masalah Kebebasan Berekspresi di Lima Propinsi Periode 2011-2012*. Jakarta: ELSAM & TIFA.

Beetham, D. (1999). *Democracy and Human Rights*. Oxford: Polity Press.

Beetham, D., Carvalho, E., Landman, T., & Weir, S. (2008). *Assessing The Quality of Democracy: A Practical Guide*. IDEA International.

Budiman, A., & Törnquist, O. (2001). *Aktor Demokrasi: Catatan tentang Gerakan Perlawanan di Indonesia*. Jakarta: Institut Studi Arus Informasi (ISAI).

Buehler, M. (2014). "Elite Competition and Changing State-Society Relations: Sharia Policymaking in Indonesia." In M. Ford, & T. Pepinsky, *Beyond Oligarchy: Wealth, Power, and Contemporary Indonesian Politics* (pp. 157-175). New York: Cornell South East Asia Program (SEAP).

Caraway, T., & Ford, M. (2014). "Labor and Politics under Oligarchy." In M. Ford, & T. Pepinsky, *Beyond Oligarchy: Wealth, Power, and Contemporary Indonesian Politics* (pp. 139-155). New York: South East Asia Program (SEAP).

Carothers, T. (2007). "How Democracies Emerge: The Sequencing Fallacy". *Journal of Democracy,* Vol. 18, No. 1.

Cornwall, A., & Coelho, V. S. (2006). "Space for Change? The Politics of Participation in New Democratic Arenas." In A. Cornwall, & V. S. Coelho, *Spaces for Change? The Politics of Citizen Participation in New Democratic Arenas.* Zed Books.

Crouch, H. (1978). *The Army and Politics in Indonesia*. Ithaca, New York: Cornell University Press.

Daftar Kelembagaan. (n.d.). Diunduh dari Kementerian PAN dan Reformasi Birokrasi: http://www.menpan.go.id/daftar-kelembagaan-2

Diamond, L. (2009). *Developing Democracy: Toward Consolidation. Baltimore:* JHU Press.

Esping-Andersen, G. (1990). *The Three Worlds of Welfare Capitalism*. New Jersey: Princeton University Press.

Evans, P. B. (1989). "Predatory, Developmental, and Other Apparatuses: A Comparative Political Economy Perspective on The Third World State." *Sociological Forum*, Vol. 4, No. 4, 561-587.

Ford, M., & Pepinsky, T. (2014). *Beyond Oligarchy: Wealth, Power, and Contemporary Indonesian Politics.* Ithaca New York: Cornell Southeast Asia Program (SEAP).

Gatra, S. (2014, September 12). RUU Rahasia Negara Dinilai Tidak Perlu Dilanjutkan. Diunduh dari Kompas.com: http://nasional.kompas.com/read /2014/09/12/13483441/RUU.Rahasia.Negara.Dinilai.Tidak.Perlu.Dilanjutkan

Hadiz, V. R., & Robison, R. (2013). *The Political Economy of Oligarchy and the Reorganization of Power in Indonesia. Indonesia*, No 96, 35-57.

Hadiz, V., & Robison, R. (2014). "The Political Economy of Oligarchy and The Reorganization of Power in Indonesia." In M. Ford, & T. Pepinsky. (eds.), *Beyond Oligarchy: Wealth, Power, and Contemporary Indonesian Politics*. New York: South East Asia Program.

Hanif, H. (2013). "Networking Based Policy: CSO Networking for Advocating Public Budget Reform." In P. Laksono, Sukamdi, R. Habraken, & L. S. (eds.), *Local Civil Society Dinamics in Indonesia.* CAPS UGM-CIDIN Nijmegen University.

Harris, J., Stokke, K., & Törnquist, O. (2004). *Politicising Democracy: The New Local Politics of Democratisation*. New York: Palgrave.

Helmke, G., & Levitsky, S. (2006). "Introduction." In G. Helmke, & S. L. (eds.), *Informal Institution and Democracy: Lessons from Latin America*. The Johns Hopkins University.

Houtzager, P., & Lavalle, A. (2009). 'The Paradox of Civil Society Representation: Constructing New Forms of Democratic Legitimacy in Brazil." In O. Törnquist, N. Webster, & K. S. (eds.), *Rethinking Popular Representation*. New York: Palgrave Macmillan.

Huntington, S. P. (1965). "Political Development and Political Decay". *World Politics*, Vol. 17, No. 3, 386-430.

Jackson, K. D. (2014). "Bureaucratic Polity: A Theoretical Framework for Analysis of Power and Communications in Indonesia." In K. D. Jackson, & L. W. (eds.), *Political Power and Communication in Indonesia*. California: University of California Press. Diunduh dari Transparency International: http://www.transparency.org/cpi2014

Jayasuria, K. (2001). "Globalization, Sovereignty, and The Rule of Law: From Political to Economic Constitutionalism?" *Constellations*, Vol. 8, No. 4, 442-440.

Jayasuria, K., & Hewison, K. (2006). "The Anti-Politics of Good Governance: From Global Social Policy to a Global Populism." In G. Rodan, & K. H. (eds.), *Neoliberalism and Conflict in Asia After 9/11.* London: Routledge.

Kartodirdjo, S. (1984). *Pemberontakan Petani Banten 1888*. Jakarta: Pustaka Jaya.

King, D. (1982). "Indonesia's New Order Regime as a Bureaucratic Polity, a Neopatrimonial Regime or Bureaucratic Authoritarian Regime: What Difference Does It Make?" In B. Anderson, & A. Kahin, *Interpreting Indonesian Politics: Thirteen Contributions to The Debate.* Ithaca: Cornell Modern Indonesia Project.

Lauth, H.-J. (2000). '"Informal Institutions and Democracy." *Democratization*, Vol. 7, No. 4, 21-50.

Lee, R. B. (2009). *(Un) Civil Society and Political Change in Indonesia: A Contested Arena.* London: Routledge.

Lele, G., Ambardi, K., Sujito, A., & Hanif, H. (2013). *Kajian Implementasi UU No. 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik dalam Tata Kelola Pemerintahan Daerah: Studi di 4 Propinsi dan 3 Kabupaten/Kota*. Yogyakarta: FISIPOL UGM-Yayasan TIFA.

Lipset, S. M. (1959). "Some Social Requisites of Democracy: Economic Development and Political Legitimacy." *The American Political Science Review*, Vol. 53, No. 1, 69-105.

Manor, J. (2013), "Post-clientelist Initiatives." In *Democratisation in Global South: The Importance of Transformative Politics,* edited by Kristian Stokke and Olle Törnquist. Basingstoke: Palgrave.

Mietzner, M. (2012). "Indonesia's Democratic Stagnation: Anti-Reformist Elites and Resilient Society." *Democratization*, Vol. 19, No. 2, 209-229.

Mietzner, M. (2014). "Oligarchs, Politicians and Activists: Contesting Party Politics in Post-Soeharto Indonesia." In Ford, & T. P. (eds.), *Beyond Oligarchy: Wealth, Power, and Contemporary Indonesian Politics* (pp. 99-116). New York: Cornell South East Asia Program (SEAP).

Moore, B. (1966). *Social Origin of Dictatorship and Democracy: Lord and Peasant in the Making of the Modern World*. Boston: Beacon Press.

Mortimer, R. A. (1986). *Stubborn Survivors: Dissenting Essays on Peasants and Third World Development*. Monash: Center for South East Asia Studies.

Mouzelis, N. (1998). "Modernity, Late Development and Civil Society." In L. Rudebeck, O. Törnquist, & V. Rojas, *Democratization in the Third World: Concrete Cases in Comparative and Theoretical Perspective*. New York: MacMillan.

Nur, A. (2009). "Merancang Representasi." In W. P. Samadhi, & Warouw, *Demokrasi di Atas Pasir*. Yogyakarta: PCD Press.

Nyman, M. (2006). *Democratising Indonesia: The Challenges of Civil Society in The Era of Reformasi*. NIAS.

O'Donnell, G. (2004). "Human Development, Human Rights and Democracy." In G. O'Donnell, J. V. Cullel, & O. I. (eds.), *The Quality of Democracy: Theory and Applications*. University of Notre Dame Press.

Olsen, J., & March, J. (1989). *Rediscovering Institutions: The Organizational Basis of Politics*. Free Press.

Open Government Partnership Indonesia. (n.d.). Diunduh dari Open Government Partnership: http:/www.opengovpartnership.org/country/Indonesia diunduh pada 1 August 2014

Peters, G. B. (1999). *Institutional Theory in Political Science: The New Institutionalism*. New York: Continuum.

Prabowo, D. (2013, Juni 30). *Pengamat: RUU Ormas Disahkan Masyarakat Dianggap Sumber Masalah*. Diunduh dari Kompas.com: http://nasional.kompas.com/read/2013/06/30/1620056/Pengamat.RUU.Ormas.Disahkan.Masyarakat.Dianggap.Sumber.Masalah

Prasetyo, A. S., A. E. Priyono, dan O. Törnquist, (dengan T. Birks), eds. *Indonesia's Post Soeharto Democracy Movement*. Jakarta: Demos, 2003.

Prasetyo, SA & T. Birks, *Aceh: The Role of Democracy for Peace and Reconstruction*. Yogyakarta: PCD Press.

Pratikno dan Lay, C. (2013). "From Populism to Democratic Polity. Problems and Challenges in Surakarta, Indonesia." In *Democratisation in the Global South: The Importance of Transformative Politics*, edited by Kristian Stokke and Olle Törnquist. Basingstoke: Palgrave.

Priyono, A., Prasetyo, S. A., & Törnquist, O. (2003). *Gerakan Demokrasi di Indonesia Pasca Soeharto*. Jakarta: Demos.

Priyono, A., Samadhi, W. P., & Törnquist, O. (2007). *Making Democracy Meaningful: Problems and Options in Indonesia*. Jakarta: Demos.

Priyono, AE and Nur, A., ed. *Untitled Collection of Manuscripts from the Link Project*. Jakarta: DEMOS, 2009.

Putnam, R. D. (1994). *Making Democracy Works: Civic Traditions in Modern Italy*. Princeton University Press.

Raadt, J., Holladers, D., & Krouwel, A. (2004). *Varieties of Populism: An Analysis of the Programatic Character of Six European Parties*. Amsterdam: Vrije Universiteit.

Robison, R. (1986). *Indonesia: The Rise of Capital.* Sidney: Allen & Unwin.

Robison, R., & Hadiz, V. (2004). *Reorganising Power in Indonesia: The Politics of Oligarchy in Age of Markets.* London: Routledge.

Rueschemeyer, D., E. H. Stephens, and J. D. Stephens. (1992) *Capitalist Development and Democracy.* Cambridge: Polity.

Samadhi, W. P., & Asgart, S. (2009). "Satu Dekade Reformasi: Rentannya Demokrasi." In W. P. Samadhi, & N. Warouw, *Demokrasi di Atas Pasir.* Yogyakarta: PCD Press.

Samadhi, W. P., & Warouw, N. (2009). *Building Democracy on The Sand: Advances and Setback in Indonesia.* Jakarta & Yogyakarta: Demos & PCD Press.

Samadhi, W.P. (2015). *Optimalizing Political Capacity of the Pro-Democracy Actors Through The Forming of Welfare Political Block9.* Unpublished MA Thesis, Universitas Gadjah Mada.

Savirani, A. (2015). "Bekasi, Jawa Barat: Buruh Go Politics dan Melemahnya Politik Patronase." In E. Aspinall, & A. Savirani (eds.), *Politik Uang di Indonesia: Patronase dan Klientelisme pada Pemilu Legislatif* 2014. Yogyakarta: Penerbit PolGov.

Scott, W. R. (2004). "Institutional Theory." In G. Ritzer (eds.), *Encyclopedia of Social Theory* (pp. 408-414). Thousand Oak, CA: Sage.

Slater, D. (2004). "Indonesian Accountability Traps: Party Cartels and Presidential Power After Democratic Transition." *Indonesia*, No. 78 (Oktober).

Stokke, K. (2013). "Conceptualizing The Politics of Citizenship." *PCD Journal*, Vol. 5, No. 1.

Stokke, K. (2014). "Substantiating Urban Democracy: The Importance of Popular Representation and Transformative Democratic Politics." In S. Parnell, & S. Oldfield, *The*

Routledge Handbook on Cities of The Global South. London: Routledge.

Stokke, K., & Törnquist, O. (2013). *Democratisation in Global South: The Importance of Transformative Politics*. New York: Palgrave.

Subono, N. I., & Samadhi, W. P. (2009). "Politik Dominasi Demokrasi dan Konsolidasi Elit-Dominan." In W. P. Samadhi, & N. W. (eds.), *Demokrasi di Atas Pasir*. Yogyakarta: PCD Press.

Subono, N. I., Priyono, A., & Samadhi, W. P. (2007). 'The Floating and Marginalized Democrats." In W. P. Samadhi, Törnquist, & T. Birks, *Making Democracy Meaningful: Problems and Options in Indonesia*. Jakarta: DEMOS.

TIFA-Foundation. (2005). *Semua Bisa Seperti Jembrana: Kisah Sukses Sebuah Kabupaten Meningkatkan Kesejahteraan Rakyatnya*. Jakarta: Yayasan TIFA.

Törnquist, O. (1984). *Dilemmas of Third World Communism: The Destruction of the PKI in Indonesia*. London: Zed Books. (Also in Indonesian published by Komunitas Bambu.)

Törnquist, O. (2007). "Pendahuluan: Menilai Demokrasi Indonesia dari Bawah." In A. Priyono, W. P. Samadhi, & O. Törnquist, *Menjadikan Demokrasi Bermakna: Masalah dan Pilihan di Indonesia*. Jakarta: Demos.

Törnquist, O. (2009). "Introduction and General Conclusion, Social Democratic Peace: To Be Continued." In O.

Törnquist, O. (2009). "Introduction: The Problem is Representation! Towards an Analytical Framework." In O. Törnquist, N. Webster, & K. S. (eds.), *Rethinking Popular Representation*. New York: Palgrave.

Törnquist, O. (2013). *Assessing Dynamic Democratisation. Transformative Politics, New Institutions, and the Case of Indonesia*. New York: Palgrave.

Törnquist, O. (2014). "Stagnation or Transformation in Indonesia?" *Economic and Political Weekly*, Vol. 49, No. 50, 23-27.

Törnquist, O. Unpublished draft manuscripts based on focus group discussions and 130 in depth interviews with pioneering democracy activists around Indonesia, 2013-2014. Oslo University.

Törnquist, O., & Warouw, N. (2009). "Approaching Democracy: Some Brief Introductory Notes on Concepts and Methods." In W. P. Samadhi, & N. Warouw, *Building Democracy on The Sand*. PCD Press & Demos.

Törnquist, O., P. K. M. Tharakan (with J. Chathukulam), and N. Quimpo. (2009). "Popular Politics of Representation: New Lessons from the Pioneering Projects in Indonesia, Kerala, and the Philippines." In *Rethinking Popular Representation,* edited by Olle Törnquist, Neil Webster, and Kristian Stokke. New York: Palgrave.

Van Klinken, G. (2009). 'Patronage Democracy in Provincial Indonesia.' In O. Törnquist, N. Webster, & K. S. (eds.), *Rethinking Popular Representation*. New York: Palgrave.

Winters, J. (1996). *Power in Motion: Capital Mobility and the Indonesian State*. Ithaca, New York: Cornell University Press. Winters, J. A. (2011). *Oligarchy*. New York: Cambridge University Press.

Winters, J. A. (2014). 'Oligarchy and Democracy in Indonesia'. In M. Ford, & T. Pepinsky, *Beyond Oligarchy: Wealth, Power, and Contemporary Indonesian Politics*. New York: Cornell University Press.

TENTANG PARA PENULIS

Amalinda Savirani, PhD adalah dosen pada Departemen Politik dan Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial dan Politik, Universitas Gadjah Mada (UGM), Indonesia. Ia menyelesaikan pendidikan sarjana di UGM pada 2000, pendidikan master dari *International School for Humanities and Social Sciences,* Universitas Amsterdam, Belanda, dan menyelesaikan PhDnya di Amsterdam Institute on Social Research (AiSSR), Universitas Amsterdam. Disertasinya mengkaji dimensi sosial politik para pengusaha kecil di kota perdagangan Pekalongan, Jawa Tengah. Minat risetnya meliputi kajian ekonomi politik dengan pendekatan etnografis, khususnya pada gerakan akar rumput dan gerakan buruh di Indonesia. Email: lindasavirani@yahoo.com savirani@ugm.ac.id

Dr. Eric Hiariej menyelesaikan pendidikan doktoralnya di Australian National University (ANU), Canberra, Australia. Ia merupakan Direktur Program Pasca-sarjana Magister Perdamaian dan Resolusi Konflik, dan peneliti senior pada Pusat Studi Keamanan dan Perdamaian (PSKP), Universitas Gadjah Mada. Penelitian terakhirnya meliputi: Kekuasaan, Kesejahteraan dan Demokrasi; Membangun Masyarakat Tangguh Bencana; Dari Klientalisme ke Kewarganegaraan. Publikasi terkininya termasuk Globalisasi, Kapitalisme dan Perlawanan (IIS, 2013); Pluralisme, Identitas Politik dan Krisis Identitas (kontribusi Bab dalam buku Identitas Politik dan Masa Depan Pluralisme Kita, Paramadina, 2010); Materialisme Sejarah Kejatuhan Soeharto: Pertumbuhan dan Kebangkrutan Kapitalisme Orde Baru (IRE, 2006); Politik Transisi Pasca-Soeharto (Fisipol, 2014). Email: ehiariej@yahoo.com, hiariej@ugm.ac.id

Hasrul Hanif, MA adalah dosen di Departemen Politik dan Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial dan Politik, Universitas Gadjah Mada (UGM), Indonesia. Ia banyak terlibat dalam pelbagai kegiatan akademik dan advokasi di bidang pembangunan, kesejahteraan dan kewarganegaraan. Ia merupakan koordinator kajian rezim kesejahteraan dalam Proyek Kekuasaan, Kesejahteraan dan Demokrasi (PWD) dan aktif dalam Resource Governance in Asia Pacific (RegINA), sebuah jaringan pengetahuan berbasis universitas untuk tata kelola industri ekstraktif. Kajian terkininya meliputi ekonomi politik industri ekstraktif dan publikasi terakhirnya termasuk *Mengembalikan Daulat Warga Pesisir: Demokrasi, Representasi dan Partisipasi di Ranah Lokal* (2008); Securing Pace and Direction of Indonesian Democratrisation (2010- co-author); Negara tanpa Warga: Kewarganegaraan Sosial, Hak ekonomi-Sosial Buruh dan Desentralisasi (2011, co-author); Network-based Policy: CSO Networking for Advocating Public Budget Reform (kontribusi Bab, 2013). Email: hhanif@ugm.ac.id, hasrulhanif@gmail.com.

Prof. Olle Törnquist adalah profesor Ilmu Politik dan Kajian Pembangunan, Universitas Oslo, Norwegia. Sebelumya ia mengajar di Uppsala, Swedia. Selain menjadi co-direktur dalam survei nasional demokratisasi di Indonesia, ia juga memimpin proyek penelitian tentang upaya India dan Skandinavia dalam membangun proyek sosial demokrasi, dan kajian tentang demokrasi dan Kiri di Indonesia, India dan Filipina dalam perspektif komparatif. Publikasi terkahirnya meliputi *Politics and Development: A Critical Introduction*; *Popular Development and Democracy: Case Studies in the Philippines, Indonesia and Kerala* (UNRISD); *Politicising Democracy: The New Local Politics of*

Democratisation (with Harriss and Stokke); *Making Democracy Work: Problems and Options in Indonesia* (with Piryono and Samadhi) (ISEAS); *Rethinking Popular Representation* (with Webster and Stokke) (Palgrave); *Aceh: The Role of Democratisation for Peace and Democracy* (with Prasetyo and Birks); *Democratization in the Global South* (with Stokke); dan *Assessing Dynamics of Democratisation*. Email: olle.tornquist@stv.uio.no

Willy Purna Samadhi, MA sekarang aktif sebagai peneliti dalam proyek Power, Welfare, and Democracy (PWD). Sebelumnya ia merupakan wakil ketua bidang penelitian pada LSM berbasis di Jakarta, *Demos* (2006-2008), dan staf editorial di bidang penelitian dan pengembangan di Koran Republika (1996-2004). Ini merupakan buka ketiga yang berkaitan dengan survei demokrasi di Indonesia. Buku yang diterbitkan sebelumnya meliputi *Democracy on the Sands* (2009, bersama Nicolaas Warouw) dan *Making Democracy Meaningful* (2007, bersama AE Priyono dan Olle TÖrnquist) Email: willy.purnasamadhi@gmail.com

POWER, WELFARE & DEMOCRACY atau **PWD** [pwd.polgov.id] merupakan program riset kolaborasi antara Universitas Gadjah Mada dengan University of Oslo yang bertujuan untuk mendorong pemajuan dan kemajuan demokrasi di Indonesia. PWD mengeksplorasi demokrasi sebagai instrumen dan cara untuk mengontrol kekuasaan dalam rangka menciptakan dan mendistribusikan kesejahteraan. Cara pandang ini didasarkan atas asumsi bahwa demokrasi secara dinamis berpengaruh terhadap relasi kekuasaan, dan pada gilirannya akan ikut mempengaruhi pola-pola penciptaan dan pendistribusian kesejahteraan.

Saat ini PWD dikelola oleh Departemen Politik dan Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Gadjah Mada [JPP UGM] dibawah koordinasi program Pacer [Popular Control and Effective Welfarism].

INDEKS

A

Abubakar Ba'asyir 186, 228
Aceh 6, 132
  Aceh Selatan xi, 65
  Banda Aceh xi, 65, 152
adat 167
AE. Priyono ix
Ahmadiyah 48
Aktor
  aktor alternatif 12, 15, 18, 19, 41, 55, 56, 57, 62, 63, 64, 70, 72, 73, 77, 78, 79, 81, 82, 84, 85, 86, 87, 89, 91, 92, 93, 94, 95, 98, 99, 104, 111, 112, 118, 123, 124, 125, 127, 128, 130, 131, 134, 136, 137
  Aktor Alternatif 83, 88, 115, 122
  aktor demokrasi 12, 15, 61, 73, 82, 88, 102
  aktor dominan 9, 12, 15, 18, 19, 41, 42, 52, 55, 56, 57, 58, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 70, 72, 73, 74, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 84, 85, 86, 89, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 99, 100, 102, 104, 105, 110, 111, 112, 113, 114, 123, 127, 130, 133, 134, 137, 140, 170, 213
  aktor moderat 108, 109
  aktor politik 6, 12, 15, 38, 61, 64, 75, 76, 79, 86, 88, 89, 131
Amalinda Savirani xiv, 1, 21, 59, 129, 157, 200, 245
AUSAID 86

B

Bank Indonesia 8
Basuki Tjahja Purnama 68, 69
blok politik 16, 83, 118, 119, 138, 139, 146, 147
blusukan 78
Bolsa Familia 27
BPJS 31
bureaucratic polity 91, 93
bureaucratic populist 91, 93

D

David Beetham 5, 11, 21, 41, 59
Demokrasi
  demokrasi elektoral 24, 135
  demokrasi liberal 1, 4, 5, 7, 19, 109, 131, 142, 143, 145
  demokrasi suplementer 4
demokrat mengambang 146
deregulasi 7
desentralisasi 7, 108, 166, 208
Dewan Kehutanan Nasional (DKN) 146
Dharma Wanita 67

E

elit baru 62, 67, 68, 69, 74, 82, 146
elit lama 68, 69, 74
Eric Hiariej xiv, 37, 75, 129, 157, 200, 245

F

Forum CSR 146
fraksi balkon 30
FSPMI 87
Fukuyama 7, 10

G

gerakan sosial 5, 8, 34, 60, 69, 84, 90, 98, 109, 117, 118, 235
Golkar 67
Go Politics 242

H

hak anak 25, 159, 160
hak kesejahteraan 23, 26, 28, 29, 30, 31, 34
hak minoritas 25, 48, 153, 196
hak sipil 25, 108, 128
HAM 7, 41, 44, 46, 47, 51, 53, 54, 84, 85, 90, 110, 120, 127, 161, 164, 203, 206
Hannah Arendt 22
Hasrul Hanif xii, xiv, 37, 129, 157, 200, 246

I

ICW 87

J

jaminan kesehatan 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 34, 61, 74, 87, 89, 90, 100
Jaminan Kesehatan Jembrana (JKJ) 26
jaminan sosial 24, 35, 159, 160
Jokowi 6, 72, 119, 121, 186, 228. *lihat* Joko Widodo
Joko Widodo 27, 78, 141

K

KAJS 35. *lihat* Komite Aksi Jaminan Sosial
Karang Taruna 67
kartel politik 8, 39
Kartu Indonesia Pintar (KIP) 27
Kartu Indonesia Sehat (KIS) 27
Kartu Keluarga Sejahtera 27
keamanan sosial 26, 27, 121, 137
kelas menengah 6, 8, 9, 10, 30, 114, 120, 121, 126
kelompok strukturalis 8
kewarganegaraan 3, 22, 25, 41, 48, 49, 56, 136, 246
klientelisme 17, 40, 79, 99, 100, 101, 105, 129, 134, 135
Koalisi Jaminan Sosial Nasional (KJSN) 73
Koin untuk Keadilan 88
Koin untuk Prita 88
Komite Aksi Jaminan Sosial 31, 89
Konflik 7, 119, 142
  konflik antar-elit 114
  konflik sektarian 17
Korpri 67
korupsi 6, 7, 8, 10, 29, 50, 87, 103, 109, 114, 120, 123, 126, 128, 132
KPK 85, 87, 161, 203
Kristian Stokke xiii, 239, 241, 244

L

Larry Diamond 42
lembaga demokrasi 4, 5, 7, 11, 12, 14, 15, 17, 18, 19, 31, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 45, 48, 50, 52, 55, 56, 57, 58, 70, 76, 79, 108, 130, 131, 132, 133, 134, 142
Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia 1
liberalisasi ekonomi 6
liberalisme ix
LSM 13, 33, 63, 64, 65, 66, 72, 83, 85, 86, 104, 105, 114, 124, 146, 170, 213, 247

M

Marxist 8
masyarakat sipil 2, 3, 7, 12, 15, 16, 17, 19, 24, 28, 30, 31, 32, 33, 39, 40, 42, 48, 49, 56, 58, 60, 62, 63, 64, 68, 76, 79, 81, 84, 86, 99, 108, 112, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 124, 128, 130, 131, 132, 133, 136, 138, 139, 141, 142, 143, 145, 161, 167, 168, 172, 174, 175, 189, 190, 192, 203, 209, 210, 211, 215, 217, 218, 220, 230, 231, 233, 235
Max Lane 8
Medan xi
Megawati 26, 186, 228

N

negara kesejahteraan 3, 34, 121, 122, 134, 145
Nicolaas Warouw x, 155, 198, 247
Nurdin Abdullah 69

O

oligarki 8, 16, 19, 60, 61, 69, 77, 83, 99, 121, 131, 135, 136, 138
Olle Törnquist ix, xi, xiv, 1, 38, 76, 107, 129, 155, 156, 157, 198, 200, 239, 241, 244, 246
Orde Baru 12, 60, 61, 62, 67, 68, 69, 70, 74, 83, 108, 135, 245
organisasi rakyat 9, 11, 17, 72, 104, 130, 131, 133, 140, 144
otoritarianisme ix

P

PAN 69, 237
partai politik 7, 15, 17, 30, 32, 63, 66, 67, 74, 79, 83, 92, 95, 97, 98, 99, 109, 112, 117, 118, 119, 120, 124, 125, 131, 133, 136, 139, 145, 147, 165, 166, 167, 172, 173, 175, 176, 184, 188, 207, 208, 210, 211, 214, 216, 218, 219, 226, 229
pasca-klientelisme 18, 78, 79, 100, 101, 105, 130, 134, 135, 138
patronase 18, 70, 71, 77, 79, 81, 94, 95, 96, 98, 101, 114, 126, 130, 134, 186, 228
PDB 29
PDI 115
pelayanan publik 18, 24, 34
pemilu 2, 3, 4, 6, 7, 15, 16, 18, 23, 24, 27, 33, 62, 63, 66, 67, 68, 72, 74, 78, 81, 83, 91, 93, 108, 109, 115, 121, 125, 129, 131, 134, 135, 139, 145, 165, 167, 172, 173, 175, 176, 178, 207, 210, 211, 214, 216, 218, 219, 221
pemimpin informal 29, 86
Pengurangan Resiko Bencana (PRB) 146
PGRI 67
pluralisme 14, 85, 90
Politik
  politik berbasis tokoh 104, 135
  politik branding 104
  politik ketertiban 7, 10, 132
  politik pencitraan 69, 104
  politik penetrasi 18, 19, 57, 58, 110, 122, 128, 130, 137

populisme 77, 78, 79, 83, 94, 96, 98, 100, 101, 102, 105, 113, 118, 119, 130, 134, 141, 142, 186, 228
Presiden Yudhoyono 6
Prita Mulyasari 88
privatisasi 7, 9, 16
pro-demokrasi viii, xi, 15, 17, 50, 56, 76, 78, 87, 99, 115, 116, 117, 129, 131, 138, 139, 141, 142
program jaminan kesehatan 26, 100
PWI 67

R

Regulasi ekonomi 25
Ridwan Kamil 68, 69

S

Samuel Huntington 7
sektor informal 25
Soeharto 1, 2, 7, 8, 9, 49, 60, 62, 67, 72, 91, 115, 116, 131, 240, 241, 245
sosial demokrasi transformatif 6, 9
Suyoto 69
Syiah 48

T

tata kelola ekonomi 25
Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah (TKPD) 146
Tri Risma Harini 68, 69

U

UGM ix, x, xi, xiv, 13, 155, 156, 157, 198, 199, 200, 238, 239, 245, 246, 248
Uni Eropa 86
Universitas Oslo xi, xiii, 2, 13, 155, 198, 246
USAID 86

W

warga negara 3, 11, 22, 23, 24, 27, 29, 30, 31, 34, 35, 41, 42, 44, 46, 47, 51, 53, 54, 62, 88, 101, 104, 109, 114, 115, 117, 120, 122, 125, 126, 128, 133, 143, 165, 167, 172, 173, 175, 176, 207, 215, 216, 218, 219
Willy Purna Samadhi ix, 107, 129, 157, 200, 247

PANCASILA

KETUHANAN YANG MAHA ESA

KEMANUSIAAN YANG ADIL DAN BERADAB

PERSATUAN INDONESIA

KERAKYATAN YANG DIPIMPIN OLEH HIKMAT KEBIJAK-SANAAN DALAM PERMUSYAWARATAN / PERWAKILAN

KEADILAN SOSIAL BAGI SELURUH RAKYAT INDONESIA

PolGov
RESEARCH CENTRE FOR POLITICS AND GOVERNMENT
Department of Politics & Government - FISIPOL UGM

Reclaiming The State: Mengatasi Problem Demokrasi Di Indonesia Pasca-Soeharto - Amalinda Savirani, Olle Tornquist, dkk

Photo: google

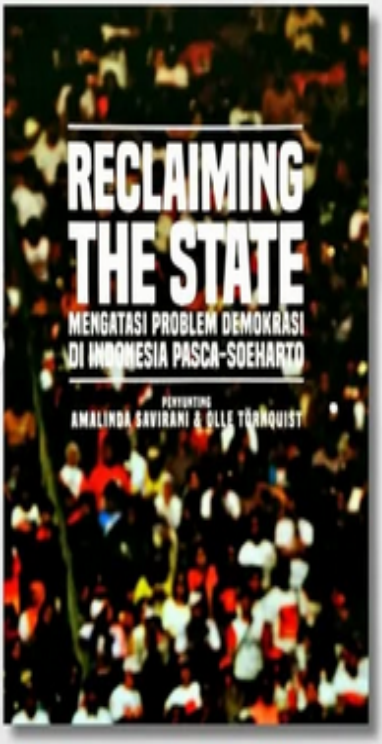

Buku ini secara luas dan mendalam mencoba untuk memahami keadaan demokrasi di Indonesia setelah Reformasi 1998. Buku ini juga menawarkan beberapa hal yang mungkin dilakukan untuk memperbaiki mutu demokrasi di Indonesia dengan berpijak pada penelitian lintas ilmu yang dilakukan secara berkala. Amalinda Savirani, Olle Tornquist, dkk sebagai bagian dari Para peneliti dan aktivis demokrasi dari Research Centre for Politics and Government, Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta; dan Universitas Oslo, Norwegia, bekerja sama untuk melakukan penelitian pustaka, lapangan (survei dan wawancara) sekaligus merumuskan beberapa rekomendasi untuk tindakan lebih lanjut.

Setelah 25 tahun era reformasi, buku ini menjadi titik pijak bagi kita semua di Indonesia untuk melakukan refleksi atas apa yang telah kita lakukan, sambil memperkuat niat dan strategi untuk berjuang lebih jauh pada masa kini dan masa depan.